KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Buku VIII
RPIW Provinsi Jambi



Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2025-2034

Jambi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.

KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. RPIW Provinsi Aceh;
2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. RPIW Provinsi Bengkulu;
6. RPIW Provinsi Riau;
7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. RPIW Provinsi Jambi;
9. RPIW Provinsi Lampung;
10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. RPIW Provinsi Banten;
17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. RPIW Provinsi Bali;
23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. RPIW Provinsi Gorontalo;
26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. RPIW Provinsi Maluku;
33. RPIW Provinsi Papua;
34. RPIW Provinsi Papua Barat;
35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,

disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.

KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.

KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN



M. BASUKI HADIMULJONO
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono

SAMBUTAN



YUDHA MEDIAWAN
Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Badan Pengembangan

Tim Pengarah
Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.
Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.
Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc.
Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc.
Benny Hermawan, S.T., M.Sc.
Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D.
Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM
Pranoto, S.T., M.Dev.Plg.
Dr. Ir. Hari Suko Setiono, M.Eng.Sc.
Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci.
Ir. Kuswardono, MCP.
Dr. Ir. Manggas Rudy Siahaan, M.Sc.

Tim Penyusun
Sosilawati, S.T., M.T.
Indra Maulana, S.T., M.T.
Silvita Jarsil Anwar, S.T., M.T., M.Sc.
Nur Haryati Salekha, S.Si
Wantarista Ade Wardhana, ST
Putri Widia Pratiwi, SE
Rachmi Layina Chimayati, S.T, M.T

Tim Peninjau
Sinta Nur Aini, ST, MT
Dedy Pratama, SE
Astri Isnaini Dewi, S.T., M.R.K.
Chintya Jasmine Gunarso, ST

BPIW

DAFTAR ISI

SAMBUTAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Kedudukan Dalam Kebijakan 4
1.3 Urgensi Penyusunan 6
1.4 Muatan RPIW 7
1.5 Manfaat RPIW 8
1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW 8
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN **13**
2.1 Kebijakan Penataan Ruang 14
2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ... 14
2.1.2 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera 16
2.1.3 RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 21
2.1.4 RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 24
2.2 Kebijakan Sektor 62
2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 63
2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 64
2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 66
2.2.4 Visi Indonesia 2045 67
2.2.5 Visium Kementerian Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 68

2.2.6 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 69
2.2.7 Rencana Induk Kepelabuhan Nasional 73
2.2.8 Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional 74
2.2.9 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 74
2.2.10 Rencana Aksi Nasional Taman Bumi (Geopark) 75
2.2.11 Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024 75
2.2.12 Kebijakan KSPN Muaro Jambi 76
2.2.13 Kebijakan Tentang Jalan 76
2.2.14 Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi. 77
2.2.15 Standar Pelayanan Minimal 77
2.3 Agenda Global 71
2.4 Sintesa Kebijakan Pengembangan Wilayah 11
2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 11
2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas 92

BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH 99

3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan 99
3.2 Profil Demografi 115
3.3 Profil Ekonomi 131
3.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas 152
3.3.2. Profil dan Potensi Fokus Perkotaan 155
3.3.3 Profil dan Potensi Fokus Pariwisata 157
3.4 Profil Sosial Budaya 162
3.5 Profil Interaksi Antarkawasan 164

BAB 4 PROFIL INFRASTRUKTUR 167

4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air 169

4.1.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Perkotaan – PKN Jambi 195
4.1.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Pariwisata – KSPN Muaro Jambi 196
4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan 197
4.2.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Perkotaan – PKN Jambi 214
4.2.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Pariwisata – KSPN Muaro Jambi . 216
4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman 217
4.3.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Perkotaan – PKN Jambi 231
4.3.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Pariwisata – KSPN Muaro Jambi 234
4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan 238
4.4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus Perkotaan – PKN Jambi 243
4.4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus Pariwisata – KSPN Muaro Jambi 243
4.5 Profil Infrastruktur Non PUPR 244
BAB 5 PEMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 247
5.1. Isu Strategis Provinsi 249
5.1 Isu Strategis Fokus Pariwisata 249
5.2 Isu Strategis Fokus Perkotaan 250
BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH 261
6.1 Proyeksi Pertumbuhan 263
6.1.1 Proyeksi Penduduk 263
6.1.2 Proyeksi Ekonomi 264
6.2 Visi dan Strategi 267

6.3 Skenario Pengembangan 267
6.3.1 Strategi Pengembangan Wilayah Fokus Perkotaan 269
6.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Fokus Pariwisata 276
BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR 283
7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Provinsi Jambi 285
7.1.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Perkotaan – PKN Jambi 303
7.1.2 Analisis Kesenjangan Infrastruktur KSPN Muaro Jambi 314
7.1.3 Analisis Kesenjangan Infrastruktur untuk Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 322
7.2 Analisis Keterpaduan Infrastruktur 334
BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR .. 341
8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pada Fokus Perencanaan 343
8.1.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pada Fokus Perkotaan (PUPR dan Non PUPR) 343
8.1.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pada Fokus Pariwisata (PUPR dan Non PUPR) 349
8.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR 354
8.2.1. Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air 354
8.2.2. Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sektor Jalan dan Jembatan 366
8.2.3. Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sektor Permukiman 377

8.2.4. Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sektor Perumahan 38

BAB 9 Pemantauan dan Evaluasi RPIW 401

9.1. Latar Belakang 488

9.2. Tujuan 483

9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi 483

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sistem Perkotaan Nasional RTRWN Provinsi Jambi 14
Tabel 2.2 Sistem Transportasi Provinsi Jambi Berdasarkan RTRWN 15
Tabel 2.3 Kawasan Lindung Nasional Provinsi Jambi - RTRWN ... 15
Tabel 2.4 Strategi Operasionalisasi Struktur Ruang Pulau Sumatera 16
Tabel 2.5 Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Jambi 22
Tabel 2.6 Rencana Jaringan Prasarana Utama Provinsi Jambi 22
Tabel 2.7 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Provinsi Jambi .. 23
Tabel 2.8 Rencana Struktur Ruang Kota Jambi 25
Tabel 2.9 Rencana Struktur Ruang Kota Sungai Penuh 27
Tabel 2.10 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Batang Hari 31
Tabel 2.11 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bungo 33
Tabel 2.12 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kerinci 38
Tabel 2.13 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Merangin..... 40
Tabel 2.14 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Muaro Jambi 45
Tabel 2.15 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sarolangun 47
Tabel 2.16 Struktur Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat..... 50
Tabel 2.17 Struktur Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... 56
Tabel 2.18 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tebo..... 60
Tabel 2.19 Kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait Provinsi Jambi 64
Tabel 2.20 Target Pembangunan Wilayah Provinsi Jambi 2020-2024..... 66
Tabel 2.21 Daftar Proyek Strategis Nasional Provinsi Jambi..... 66
Tabel 2.22 Target Visium Tahun 2020-2024 dan 2030..... 69
Tabel 2.23 Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 71
Tabel 2.24 Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut Provinsi Jambi..... 73
Tabel 2.25 Rencana Induk Nasional Bandar Udara 74
Tabel 2.26 Kebijakan Agenda Global 78
Tabel 2.27 Sintesa Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 84
Tabel 2.28 Infrastruktur PUPR Prioritas Provinsi Jambi 94
Tabel 3.1 Luas Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi..... 99
Tabel 3.2 Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi 101
Tabel 3.3 Wilayah Sungai (WS) Provinsi Jambi 103
Tabel 3.4 Tutupan Lahan Provinsi Jambi 107

Tabel 3.5 Perkembangan Luasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2020 110
Tabel 3.6 Rawan Bencana Banjir Provinsi Jambi 112
Tabel 3.7 Rawan Bencana Kebakaran Provinsi Jambi 113
Tabel 3.8 Rawan Bencana Gunung Api Provinsi Jambi 113
Tabel 3.9 Indeks Risiko Bencana Tiap Kabupaten/Kota 2021 117
Tabel 3.10 Bahaya Banjir di Provinsi Jambi 118
Tabel 3.11 Bahaya Karhutla di Provinsi Jambi 118
Tabel 3.12 Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Jambi 119
Tabel 3.13 Perkembangan Jumlah Penduduk Povinsi Jambi 2018 – 2022 125
Tabel 3.14 Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022 127
Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Usia Provinsi Jambi Tahun 2021 128
Tabel 3.16 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Provinsi Jambi 2021 129
Tabel 3.17 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi 2019 - 2022 130
Tabel 3.18 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2019-2022 130
Tabel 3.19 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 131
Tabel 3.20 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi 132
Tabel 3.21 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi 134
Tabel 3.22 Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 136
Tabel 3.23 Ekspor Komoditi di Provinsi Jambi 2020-2021 138
Tabel 3.24 Komoditas Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2022 140
Tabel 3.25 Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021 141
Tabel 3.26 Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021 141
Tabel 3.27 Luas Lahan Tidak diusahakan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021 142
Tabel 3.28 Luas Areal Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi 2021 143
Tabel 3.29 Produksi Perkebunan di Provinsi Jambi Tahun 2021 143

Tabel 3.30 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi Tahun 2021 144
Tabel 3.31 Persebaran Destinasi Wisata Provinsi Jambi.....145
Tabel 3.32 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2020 - 2022 145
Tabel 3.33 Jumlah Hotel Bintang Provinsi Jambi Tahun 2021 147
Tabel 3.34 Jumlah Hotel Non bintang Provinsi Jambi Tahun 2021.....147
Tabel 3.35 Luas Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi.....148
Tabel 3.36 Data Produksi Minyak dan Gas Bumi Provinsi jambi..149
Tabel 3.37 Akses Jalur Batubara Jalan Nasional Provinsi jambi ...149
Tabel 3.38 Justifikasi Kawasan Prioritas Industri 152
Tabel 3.39 Justifikasi Kawasan Prioritas Pertanian 153
Tabel 3.40 Justifikasi Kawasan Prioritas Perkotaan.....154
Tabel 3.41 Justifikasi Kawasan Prioritas Pariwisata.....154
Tabel 3.42 Persebaran Destinasi Wisata Provinsi Jambi.....157
Tabel 3.43 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2020 - 2022 158
Tabel 4.1 Wilayah Sungai Provinsi Jambi 169
Tabel 4.2 D.I. Permukaan WS Batanghari 170
Tabel 4.3 D.I. Rawa (D.I.R) WS Batanghari 171
Tabel 4.4 Nilai IKSI Daerah Irigasi Provinsi Jambi..... 172
Tabel 4.5 Debit Rata-rata WS Batanghari 172
Tabel 4.6 Embung (*Multipurpose*) WS Batanghari di Provinsi Jambi 173
Tabel 4.7 Prasarana Penyediaan Air Baku Eksisting WS Batanghari - Provinsi Jambi.....173
Tabel 4.8 Air Baku Intake Sungai 176
Tabel 4.9 Sumur Sebagai Sumber Air Baku di Provinsi Jambi....179
Tabel 4.10 Prasarana Penyediaan Air Baku Wilayah SPM di Provinsi Jambi.....182
Tabel 4.11 Sarana Prasarana Infrastruktur SDA Provinsi Jambi 187
Tabel 4.12 Potensi Banjir Di WS. Batanghari.....189
Tabel 4.13 Program Pengendalian Banjir di Provinsi Jambi.....190
Tabel 4.14 Abrasi Pantai di Ws. Batanghari..... 192
Tabel 4.15 Pembangunan Infrastruktur SDA Provinsi Jambi Tahun 2023 193
Tabel 4.16 Prasarana Penyediaan Air Baku di Perkotaan Jambi . 195

Tabel 4.17 Prasarana Penyediaan Air Baku di Kabupaten Muaro Jambi 196
Tabel 4.18 Ruas Jalan Nasional di Provinsi Jambi 198
Tabel 4.19 Data Kondisi dan Kemantapan Permukaan Jalan Nasional Provinsi Jambi Tahun 2022 203
Tabel 4.20 Daftar Ruas Tol di Wilayah Provinsi Jambi 209
Tabel 4.21 Data Jembatan Gantung Provinsi Jambi Tahun 2019 210
Tabel 4.22 Alternatif Terpilih Trase Pembangunan Jembatan Sei Rambut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 211
Tabel 4.23 Pembangunan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2023 di Provinsi Jambi 214
Tabel 4.24 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan PKN Jambi 215
Tabel 4.25 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan di Kawasan KSPN Muaro Jambi 216
Tabel 4.26 PDAM di Provinsi Jambi 217
Tabel 4.27 Sumber Air Minum Provinsi Jambi 219
Tabel 4.28 Penduduk Terlayani Air Minum Provinsi Jambi 2020 220
Tabel 4.29 Prasarana IPAL/IPLT di Provinsi Jambi 221
Tabel 4.30 Prasarana TPA di Provinsi Jambi 223
Tabel 4.31 Capaian Akses Persampahan di Provinsi Jambi 223
Tabel 4.32 Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Jambi 225
Tabel 4.33 Pembangunan Infrastruktur CK Tahun 2023 di Provinsi Jambi 230
Tabel 4.34 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Kota Jambi .232
Tabel 4.35 Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kota Jambi 233
Tabel 4.36 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Kabupaten Muaro Jambi 235
Tabel 4.37 SPALD-S di Kabupaten Muaro Jambi 237
Tabel 4.38 Kondisi Infrastruktur Perumahan Provinsi jambi 238
Tabel 4.39 Total Penanganan RTLH di Provinsi Jambi 2016 -2022 239
Tabel 4.40 Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Jambi 239
Tabel 4.41 Pembangunan Rumah Khusus di Provinsi Jambi 240
Tabel 4.42 Pembangunan Infrastruktur Perumahan Tahun 2023 di Provinsi Jambi 242
Tabel 4.43 Daftar Infrastruktur Perhubungan Provinsi Jambi 244
Tabel 4.44 Jumlah Pelanggan Listrik Provinsi Jambi Tahun 2021 245

Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Kawasan Pariwisata 252
Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan 257
Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Jambi 263
Tabel 6.2 Proyeksi PDRB Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 266
Tabel 6.3 PESTLE Fokus Kawasan Perkotaan 270
Tabel 6.4 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan 272
Tabel 6.5 Identifikasi SWOT Fokus Perkotaan 272
Tabel 6.6 Analisis Faktor Internal Fokus Perkotaan 273
Tabel 6.7 Analisis Faktor Eksternal Fokus Perkotaan 274
Tabel 6.8 PESTLE Fokus Pariwisata 276
Tabel 6.9 Analisis 5 Forces (meso) Fokus Pariwisata 278
Tabel 6.10 Identifikasi SWOT Fokus Pariwisata 279
Tabel 6.11 Analisis Faktor Internal Fokus Pariwisata 279
Tabel 6.12 Analisis Faktor Eksternal Fokus Pariwisata 280
Tabel 7.1 Kondisi Infrastruktur Air Baku Eksisting di Provinsi Jambi 285
Tabel 7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2034 287
Tabel 7.3 Proyeksi Banjir di WS Batanghari Tahun 2022 - 2029 289
Tabel 7.4 Proyeksi Lalu Lintas Ruas Jalan Nasional Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2034 291
Tabel 7.5 Proyeksi VCR dan Level Of Service (LOS) Ruas jalan Nasional Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2034 295
Tabel 7.6 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jambi 300
Tabel 7.7 Proyeksi Operasional TPA di Provinsi Jambi 301
Tabel 7.8 Kawasan Kumuh pada Kawasan Prioritas Provinsi Jambi 302
Tabel 7.9 Jumlah RTLH dan Penanganan di Provinsi Jambi 303
Tabel 7.10 Proyeksi Jumlah Penduduk PKN Jambi Tahun 2022-2034 304
Tabel 7.11 Proyeksi Kepadatan Penduduk PKN Jambi 2022-2034 304
Tabel 7.12 *Demand Assesment* PKN Kota Jambi Tahun 2023-2034 306
Tabel 7.13 Kebutuhan Air Baku untuk PKN Jambi Tahun 2022-2029 309

Tabel 7.14 Proyeksi Kebutuhan Air Minum PKN Jambi Tahun 2022-2029 309
Tabel 7.15 *Supply* Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kota Jambi 310
Tabel 7.16 *Gap Supply Demand* Air Minum PKN Jambi 2022-2029 311
Tabel 7.17 Proyeksi Jumlah Air Limbah PKN Jambi 2022-2034 311
Tabel 7.18 Gap Kebutuhan Air Limbah PKN Jambi 2022-2029 311
Tabel 7.19 *Demand* Pengelolaan Sampah PKN Jambi 2022-2029 312
Tabel 7.20 Pengelolaan Sampah PKN Jambi 313
Tabel 7.21 *Gap Supply Demand* Pengelolaan Sampah di PKN Jambi Tahun 2022-2034 313
Tabel 7.22 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kawasan KSPN Muaro Jambi 2022-2034 315
Tabel 7.23 Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kawasan KSPN Muaro Jambi 2022 - 2034 315
Tabel 7.24 *Demand Assesment* KSPN Muaro Jambi 2022-2034 315
Tabel 7.25 Kebutuhan Air Baku untuk KSPN Muaro Jambi Tahun 2022-2034 316
Tabel 7.26 *Demand* Air Minum KSPN Muaro Jambi Tahun 2023-2034 316
Tabel 7.27 *Supply Demand* Air Minum KSPN Muaro Jambi 318
Tabel 7.28 *Gap Supply Demand* Air Minum KSPN Muaro Jambi Tahun 2022-2034 318
Tabel 7.29 Proyeksi Jumlah Air Limbah KSPN Muaro Jambi Tahun 2022-2034 318
Tabel 7.30 Demand Pengelolaan Sampah KSPN Muaro Jambi Tahun 2022-2034 319
Tabel 7.31 Sistem Pengelolaan Sampah KSPN Muaro Jambi 320
Tabel 7.32 *GAP Supply Demand* Pengelolaan Sampah di KSPN Muaro Jambi Tahun 2023-2034 320
Tabel 7.33 Proyeksi Kebutuhan Air Baku di Kabupaten/Kota (SPM) di Provinsi Jambi 322
Tabel 7.34 Potensi Banjir di Kabupaten/Kota (SPM) Provinsi Jambi 323
Tabel 7.35 Proyeksi Jalan Nasional di Wilayah Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2023- 2034 324

Tabel 7.36 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034 328
Tabel 7.37 GAP Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034 328
Tabel 7.38 Proyeksi Demand Persampahan di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034 329
Tabel 7.39 GAP Demand Persampahan di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034 330
Tabel 7.40 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034 331
Tabel 7.41 GAP Pengelolaan Air Limbah di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034 331
Tabel 7.42 Kawasan Kumuh pada Kawasan Prioritas Provinsi Jambi 332
Tabel 7.43 GAP RTLH yang Ditangani di Wilayah Provinsi Jambi (SPM) 333
Tabel 7.44 Keterpaduan Infrastruktur Provinsi Jambi 335
Tabel 7.45 Keterpaduan Infrastruktur Provinsi Jambi 338
Tabel 8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Fokus Kawasan Perkotaan Jambi 345
Tabel 8.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Fokus Kawasan Pariwisata 350
Tabel 8.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR Sektor SDA Provinsi Jambi 356
Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur PUPR Sektor Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi 367
Tabel 8.5 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR Sektor Permukiman Provinsi Jambi 378
Tabel 8.6 Rencana Aksi Infrastruktur PUPR Sektor Perumahan Provinsi Jambi 390

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Kerangka Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perencanaan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR 5
Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya 6
Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW 11
Gambar 2.1 Kawasan Strategis Nasional 16
Gambar 2.2 Peta Sintesa Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jambi 91
Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Jambi 100
Gambar 3.2 Peta Hidrologi Provinsi Jambi 104
Gambar 3.3 Jumlah IUP Pada Tiap – tiap Kabupaten di Provinsi Jambi 105
Gambar 3.4 Peta Geologi Provinsi Jambi 106
Gambar 3.5 Peta Jasa Ekosistem Provinsi Jambi 107
Gambar 3.6 Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Jambi 2000 - 2015 109
Gambar 3.7 Visualisasi Spasial Permukiman Provinsi Jambi 2010 – 2020 110
Gambar 3.8 Peta Tutupan Lahan Provinsi Jambi 111
Gambar 3.9 Peta Bahaya Banjir Provinsi Jambi 114
Gambar 3.10 Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jambi 115
Gambar 3.11 Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jambi 116
Gambar 3.12 Peta Bahaya Banjir di Provinsi Jambi 121
Gambar 3.13 Peta Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Jambi 122
Gambar 3.14 Peta Bahaya Karhutla di Provinsi Jambi 123
Gambar 3.15 Peta Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Jambi 124
Gambar 3.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2020 - 2022 126
Gambar 3.17 Visualisasi Spasial Perkembangan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2020 126
Gambar 3.18 Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi 2018 - 2022 .. 127
Gambar 3.19 Grafik PDRB ADHK Provinsi Jambi 132

Gambar 3.20 Grafik PDRB ADHB Provinsi Jambi 133
Gambar 3.21 Grafik Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 136
Gambar 3.22 Nilai Ekspor Berdasarkan Pelabuhan Muat di Provinsi Jambi Tahun 2020-2021 137
Gambar 3.23 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 139
Gambar 3.24 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 139
Gambar 3.25 Penilaian Aspek Utama Indeks Daya Saing Wilayah Provinsi Jambi 151
Gambar 3.26 Penilaian 12 Pilar Indeks Daya Saing Wilayah Provinsi Jambi 152
Gambar 3.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2016-2022 157
Gambar 3.28 Jumlah Wisatawan di KSPN Muaro Jambi Tahun 2018 - 2022 159
Gambar 3.29 Delineasi KSPN Muaro Jambi 161
Gambar 3.30 Sebaran Cagar Budaya Muaro Jambi 162
Gambar 3.31 Peta Interaksi Antar Kawasan Provinsi Jambi 165
Gambar 4.1 Peta Infrastruktur SDA Provinsi Jambi 188
Gambar 4.2 Potensi Rawan Banjir 190
Gambar 4.3 Abrasi Pantai di WS Batanghari 192
Gambar 4.4 Total Kebutuhan RKI Provinsi jambi 193
Gambar 4.5 Kondisi Banjir di Komplek KSPN Muaro Jambi 196
Gambar 4.6 Alternatif Trase dari PKN Jambi ke Pelabuhan Ujung Jabung 212
Gambar 4.7 Diagram Jumlah Jembatan di Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 212
Gambar 4.8 Peta Infrastruktur Bina Marga Provinsi Jambi 213
Gambar 4.9 PDAM Tirta Mayang dan Area Pelayanannya 218
Gambar 4.10 PDAM Tirta Muaro 218
Gambar 4.11 Grafik Capaian Air Minum Layak di Provinsi Jambi Tahun 2022 218
Gambar 4.12 Diagram Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 221
Gambar 4.13 PDAM Tirta Mayang Kota Jambi 231

Gambar 4.14 TPA Talang Gulo Kota Jambi 233
Gambar 4.15 TPA Bukit Baling 236
Gambar 4.16 Sistem SPALD-S 236
Gambar 4.17 Rusun RSUD Abdul Manaf Kota Jambi 243
Gambar 6.1 Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi Jambi 264
Gambar 6.2 Proyeksi Ambang Batas Pengembangan Lahan di Provinsi Jambi 265
Gambar 6.3 Langkah Penyusunan *Grand Strategy* 268
Gambar 6.4 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Perkotaan 275
Gambar 6.5 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pariwisata 281
Gambar 7.1 Peta LOS Jalan Nasional PKN Jambi 305
Gambar 7.2 Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Jambi 308



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 53.435 km2. Secara geografis Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di bagian selatan, Provinsi Riau di bagian utara, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat di bagian barat, serta Laut Cina Selatan dan Selat Berhala di bagian timur. Provinsi Jambi meliputi dua kota yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, serta sembilan kabupaten yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Jambi mencapai 3,5 juta jiwa (sekitar 14% dari jumlah penduduk Pulau Sumatera) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,38% per tahun. Ibukota Provinsi Jambi terletak di Kota Jambi, yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi.

Berdasarkan aspek ekonomi, nilai PDRB berdasarkan harga berlaku Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah 233,72 triliun rupiah (sekitar 6% dari PDRB seluruh provinsi di Pulau Sumatera), dengan laju pertumbuhan sebesar 3,66% per tahun. Penggerak perekonomian utama di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang 31,66%, kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 13,73%. Sektor pertambangan dan penggalian selain sebagai penyumbang terbesar kedua PDRB, juga menjadi penyumbang tertinggi ekspor (dengan dominasi 75,36% dari nilai total ekspor), yaitu komoditas minyak dan gas dan batu bara.

Berdasarkan arahan kebijakan penataan ruang nasional, terdapat beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Jambi dengan berbagai tipologi. KSN perkotaan antara lain PKN Jambi, PKW Muara Sabak, PKW Kuala Tungkal, PKW Muara Bulian, PKW Sarolangun, dan PKW Bungo. KSN taman nasional antara lain Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dan Taman Nasional Berbak. KSN budaya yaitu Candi Muaro Jambi. Taman Nasional Kerinci Seblat dan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Beberapa kawasan prioritas nasional lainnya yaitu: Kawasan Industri Kemingking, Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional Muaro Jambi, Kawasan Transmigrasi Bhatin III Ulu dan Geopark Merangin. Kawasan

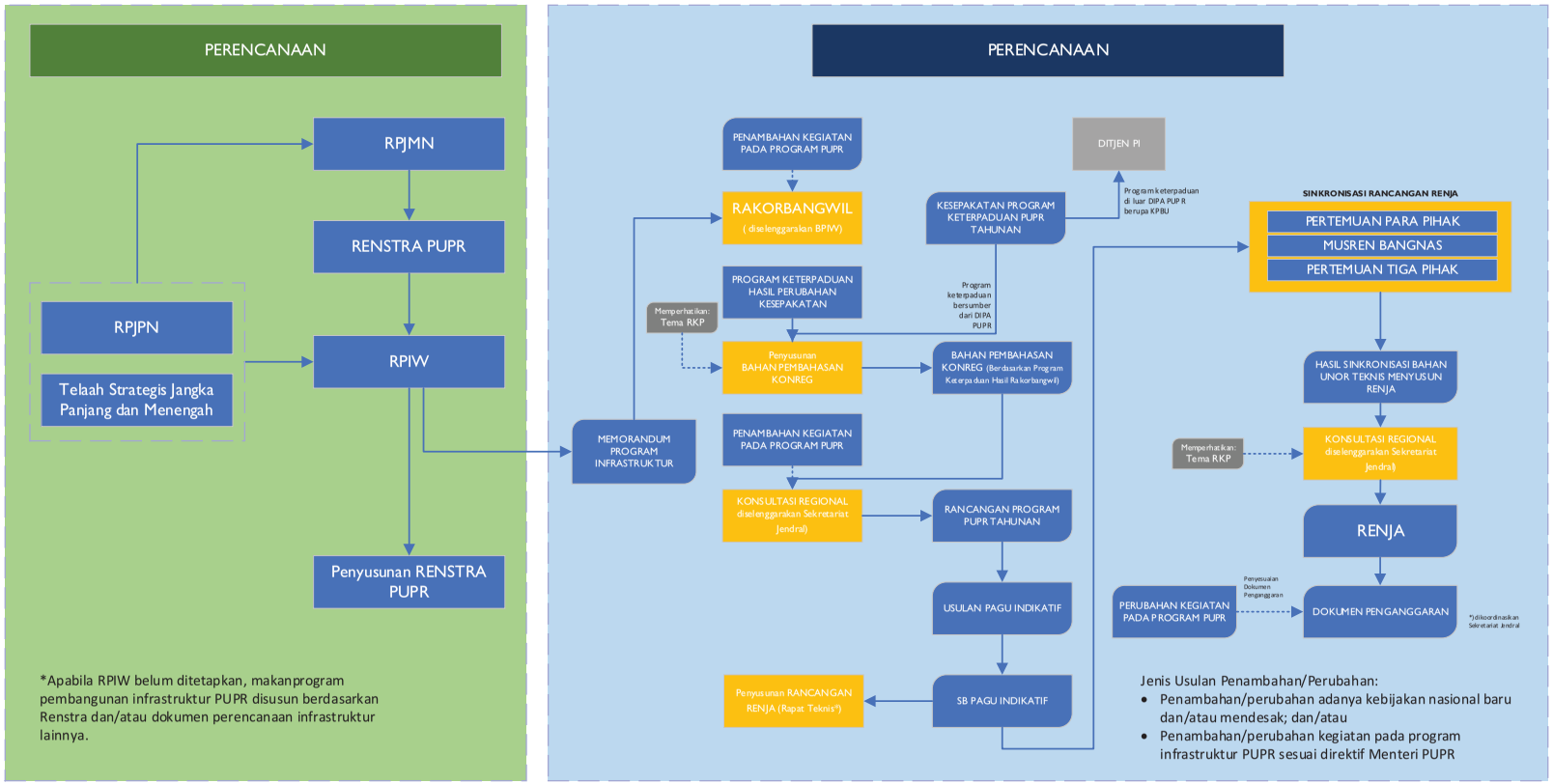
andalan di Provinsi Jambi sebagai penggerak perekonomian wilayah yaitu : Kawasan Muara Bulian Timur Jambi dan sekitarnya dan Kawasan Muara Bungo dan sekitarnya. Juga terdapat proyek strategis nasional berupa Jalan Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung konektivitas antar wilayah di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi dihadapkan dengan permasalahan kewilayahan berupa tingginya intensitas kebencanaan terutama banjir serta belum adanya industri pengolahan yang dapat memberi nilai tambah komoditas. Sedangkan permasalahan infrastruktur di Provinsi Jambi berhubungan dengan kebutuhan air baku, peningkatan konvektivitas antar kawasan, dan pemenuhan infrastruktur permukiman dan perumahan terutama di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur wilayah untuk Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan pariwisata, pemenuhan standar minimal perkotaan, dan pengurangan risiko bencana.

Dalam rangka mengatasi isu dan permasalahan terkait kewilayahan dan infrastruktur, diperlukan dokumen perencanaan terpadu yang dapat menjadi pedoman bersama sebagai arahan penyediaan infrastruktur di tingkat wilayah atau kawasan. Hal ini sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR untuk menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Jambi.

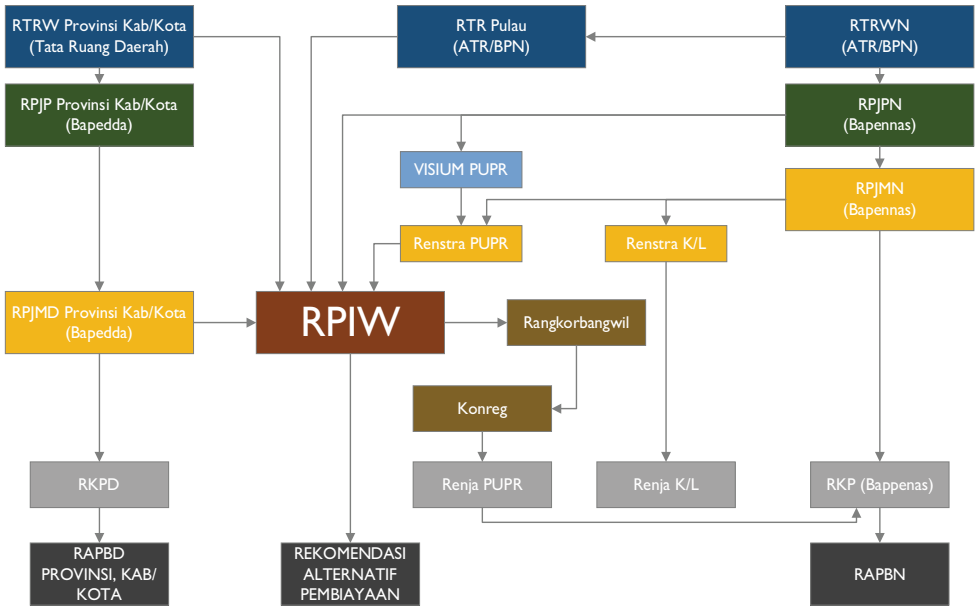
1.2 Kedudukan Dalam Kebijakan

Kedudukan dokumen RPIW dalam kerangka perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.1. RPIW adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari sasaran nasional terkait bidang PUPR yang dituangkan dalam RPJMN serta termuat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR. Selanjutnya RPIW akan digunakan sebagai acuan pemrograman infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis nasional.



Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Kerangka Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR

Sumber : Petunjuk Teknis Peyusunan RPIW, 2021



Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber : Petunjuk Teknis Peyusunan RPIW, 2021

1.3 Urgensi Penyusunan

RPIW Provinsi Jambi disusun sebagai upaya untuk menterpadukan pengembangan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah/kawasan sebagaimana diamanatkan terutama dalam RTR Wilayah Provinsi Jambi. Upaya ini sekaligus untuk menjabarkan Visium PUPR 2030 yang juga memperhatikan Visi Indonesia 2045. Infrastruktur PUPR yang diterpadukan pada skala wilayah pulau meliputi infrastruktur sektor jalan, sumber daya air, permukiman dan perumahan. Adapun kerangka waktu yang digunakan dalam RPIW adalah jangka menengah. Disamping itu, RPIW disusun untuk memenuhi kebutuhan mempercepat tercapainya tujuan pengembangan wilayah melalui perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Pengembangan infrastruktur wilayah, termasuk infrastruktur PUPR, merupakan upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang (sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja) yang menyatakan bahwa penataan ruang adalah sebuah sistem proses perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Pemanfaatan ruang merupakan langkah lanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang yang telah disusun. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program beserta pembiayaannya dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

1.4 Muatan RPIW

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Provinsi Jambi memuat:

1. Pendahuluan, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
2. Arah Kebijakan, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;
3. Profil Wilayah dan Potensi Daerah, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. Profil dan Kinerja Infrastruktur, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR;
5. Permasalahan dan Isu Strategis, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. Skenario Pengembangan Wilayah, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritisasi);
7. Analisis Kebutuhan Infrastruktur, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan

9. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5 Manfaat RPIW

Manfaat penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Provinsi Jambi antara lain:

1. Sebagai dasar memadukan kebijakan nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) ke dalam rencana pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
2. Sebagai acuan pemrograman dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR melalui mekanisme perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR; dan
3. Sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN, Rencana Strategis Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

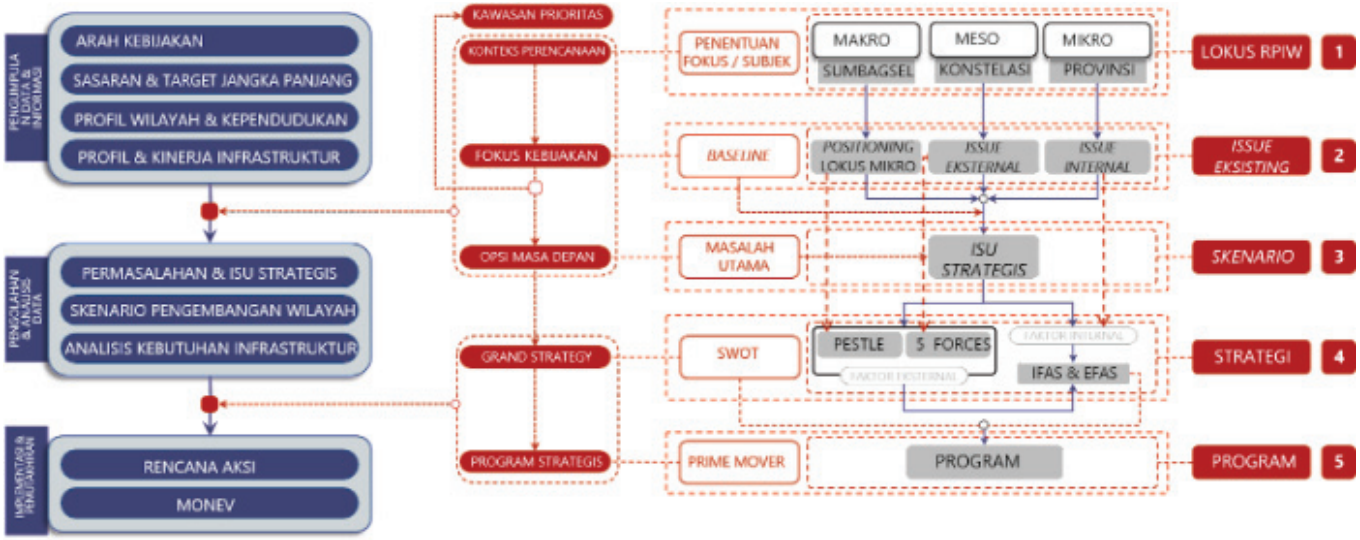
Proses penyusunan RPIW melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data dan Informasi
   - Arah kebijakan (penataan ruang, sektor, dan agenda global) akan menentukan fokus perencanaan dan kawasan prioritas.
   - Sasaran dan target jangka panjang memuat kondisi di masa depan sesuai fokus perencanaan dan strategi Unit Organisasi PUPR.
   - Profil wilayah dan kependudukan akan menggambarkan kondisi eksisting wilayah yang berkaitan fisik kebencanaan, kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya.
   - Profil dan kinerja infrastruktur yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi eksisting infrastruktur.

   Setelah pengumpulan data dan informasi, dilakukan proses perumusan isu strategis melalui tahapan,
   - penentuan konteks perencanaan meliputi fokus dan lokus makro, meso, dan mikro pada wilayah pengembangan.

- perumusan sintesa fokus kebijakan untuk mengelaborasikan kondisi eksisting wilayah yang meliputi isu lokus mikro di tingkat makro, isu eksternal di tingkat meso, dan isu internal di tingkat mikro.
- Identifikasi fokus kebijakan dan kondisi eksisting wilayah akan digunakan dalam menentukan kawasan prioritas pengembangan wilayah.
- Selanjutnya untuk menentukan isu strategis melalui keterpaduan isu wilayah, masalah utama dan opsi masa depan Kawasan prioritas sesuai fokus perencanaan.

b. Pengolahan dan Analisis Data:
   - Permasalahan dan isu strategis akan menggambarkan kondisi yang ingin diselesaikan di wilayah pengembangan
   - Skenario pengembangan wilayah akan menghasilkan *grand strategy* per fokus perencanaan pada wilayah pengembangan
   - Analisis kebutuhan infrastruktur akan menghitung gap kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan infrastruktur di masa depan.
   - Setelah pengolahan dan analisis data, dilakukan penyusunan *grand strategy* dirumuskan melalui analisis eksternal (PESTLE dan 5 FORCES) dan analisis internal SWOT. Selanjutnya, grand strategy akan digunakan untuk penyusunan program perencanaan.
c. Implementasi dan Pemutakhiran :
   - Rencana aksi akan mengasilkan daftar kegiatan dan rencana aksi pembangunan infrastruktur secara spesifik pada setiap unit organisasi atau instansi penanggungjawab lain.
   - Monitoring dan Evaluasi akan memantau keberlangsungan kegiatan pembangunan infrastruktur dan menilai kebermanfaatan dari pembangunan.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber : Pedoman Muatan RPIW (2021) dan Penajaman Dokumen Teknokratik RPIW, diolah



BAB 2

ARAH KEBIJAKAN

2.1 Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi. Berikut ringkasan arah kebijakan penataan ruang untuk wilayah Provinsi Jambi :

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Penataan ruang nasional termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan arahan rencana struktur ruang RTRWN, strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang meliputi pengembangan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, ditetapkan sistem perkotaan nasional di Provinsi Jambi sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sistem Perkotaan Nasional RTRWN Provinsi Jambi

Provinsi	PKN	PKW
Jambi	Jambi (II/C/1)	Kuala Tungkal (II/ B) Sarolangun (II/ B) Muaro Bungo (II/ C/ 1) Muara Bulian (II/ C/ 1) Muara Sabak (II/ C/ 1)

Sumber: PP Nomor 13 Tahun 2017

Terkait Jalan bebas hambatan dalam lingkup wilayah nasional. Jalan bebas hambatan dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang berkaitan dengan wilayah Provinsi Jambi diantaranya:

1. Jambi – Rengat
2. Betung (Simpang Sekayu) – Tempino – Jambi

Sistem transportasi nasional dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjelaskan terkait pelabuhan pengumpul, pelabuhan penyeberangan, dan bandar udara. Berikut sistem transportasi yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jambi, diantaranya:

Tabel 2.2 Sistem Transportasi Provinsi Jambi Berdasarkan RTRWN

Pelabuhan	Bandar Udara
PELABUHAN PENGUMPUL • Ujung Jabung • Kuala Tungkal • Talang Duku • Muara Sabak	**Pengumpul Tersier** • Sultan Thaha
PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN • Kuala Tungkal **(IIL/5)** • Tanah Tumbuh **(III/2)**	

Sumber: PP Nomor 13 Tahun 2017

Arahan rencana pola ruang RTRWN, Kawasan lindung nasional di Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam kebijakan RTRWN, antara lain:

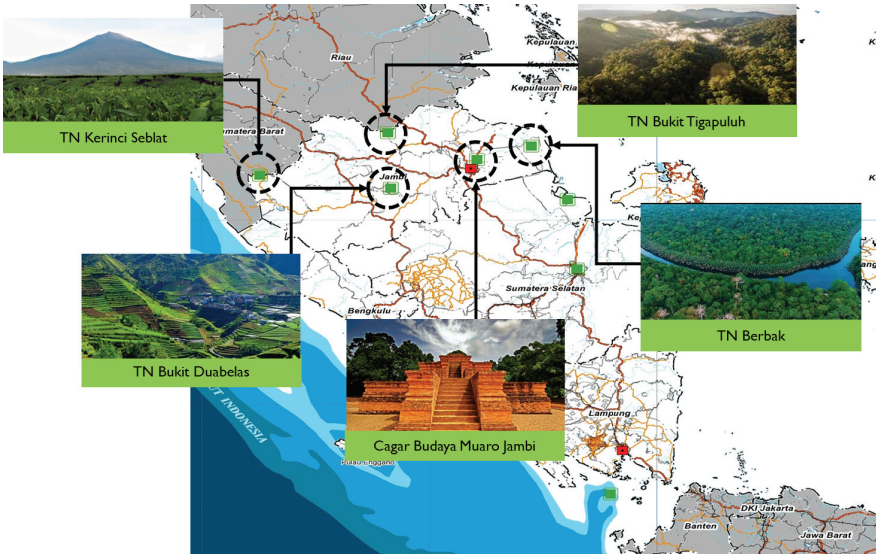
Tabel 2.3 Kawasan Lindung Nasional Provinsi Jambi - RTRWN

No	Kawasan Lindung Nasional	No	Kawasan Lindung Nasional
1	Cagar Alam Bakau Pantai Timur	8	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
2	Cagar Alam Cempaka/Tabir Kesajung	9	Taman Nasional Bukit Dua Belas
3	Cagar Alam Sunsai Batara	10	Taman Nasional Berbak
4	Cagar Alam Buluh Hitam/Pasir Mayang Danau Bangko	11	Taman Nasional Kerinci Seblat
5	Cagar Alam Gua Ulu Tiangko	12	Taman Hutan Raya Thaha Syaifuddin
6	Cagar Alam Durian Luncuk I	13	Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung/Orang Kayo Hitam
7	Cagar Alam Durian Luncuk II	14	Taman Wisata Alam Bukit Sari

Sumber: PP Nomor 13 Tahun 2017

Kawasan andalan di Provinsi Jambi berdasarkan RTRWN antara lain:

1. Kawasan Muara Bulian Timur Jambi dan sekitarnya dengan sektor unggulan Perkebunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perikanan, Pariwisat, serta Minyak dan Gas Bumi
2. Kawasan Muara Bungo dan sekitarnya dengan unggulan Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pariwisat, serta Minyak dan Gas Bumi.



Gambar 2.1 Kawasan Strategis Nasional
Sumber : BPIW Kementerian PUPR, 2022

2.1.2 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera

Strategi kebijakan penataan ruang Pulau Sumatera terdiri dari strategi operasionalisasi struktur ruang dan strategi operasionalisasi pola ruang. Berikut merupakan beberapa strategi yang berkaitan dengan ruang lingkup perencanaan wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 2.4 Strategi Operasionalisasi Struktur Ruang Pulau Sumatera

No.	Strategi Operasional Struktur Ruang	Lokasi
Sistem Perkotaan Nasional		
1.	Mengembangkan PKN dan PKW sebagai **pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan** kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan	PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Bulian
2.	Mengembangkan PKN dan PKW sebagai **pusat penelitian dan pengembangan perkebunan**	PKN Jambi
3.	Mengembangkan PKN dan PKW sebagai **pusat industri pengolahan dan industri jasa**	PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal

No.	Strategi Operasional Struktur Ruang	Lokasi
	hasil perikanan yang ramah lingkungan	
4.	Mengembangkan PKN dan PKW sebagai **pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi** yang didukung oleh pengelolaan limbah industri	PKN Jambi, PKW Muara Bulian
5.	Mengembangkan PKN dan PKW sebagai **pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan**	PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo
6.	Mengembangkan PKN dan PKW sebagai **pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan**	PKN Jambi
7.	Mengembangkan PKN dan PKW untuk kegiatan **industri kreatif**	PKN Jambi
8.	Mengembangkan PKN dan PKW sebagai **pusat pariwisata cagar budaya** dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran	Pusat Pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN Jambi, PKW Muara Bulian
9.	Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan	PKN Jambi, PKW Kuala Tangkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo
10.	Mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang menjalar *(urban spraiob)*	PKN Jambi
11.	Mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan	PKN Jambi, PKW Muara Bungo, dan PKW Muara Bulian
12.	Mengembangkan PKN dan PKW berbasis sumber daya	PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal

No.	Strategi Operasional Struktur Ruang	Lokasi
	alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	
13.	Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional	PKN Jambi
Sistem Jaringan Transportasi Jalan		
1.	Pengembangan atau pemantapan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sumatera	• Pemantapan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera yang menghubungkan **Merlung-Jambi-Tempino-Bayunglencir-Sungai Lilin-Betung-Palembang-Simpang Indralaya-Kayu Agung-Pematang Panggang-Mesuji- Simpang Unit VII-Simpang Bujung Tenuk** • Pengembangan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan lintas tengah pulau sumatera yang menghubungkan: **Muara Bungo-Bangko Sarolangun-Lubuk Linggau-Lahat-Muara Enim-Baturaja Martapura-Simpang IV-Bukit Kemuning-Kotabumi-Terbanggi Besar-Gunung Sugih-Simpang Tanjungkarang-Simpang Kalianda- Bakauheni** • Pemantapan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau

No.	Strategi Operasional Struktur Ruang	Lokasi
		Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan/atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera meliputi jaringan jalan arteri primer: 1. **Muara bungo** -Muara Tebo-**Muara Bulian**-darnbi; 2. **Jambi-**Tanjung Duku; • Pemantapan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera yang menghubungkan: 1. **Sarolangun** - Muaratembesi; 2. Simpang Tuan-**Kualatungkal**; • Pengembangan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera meliputi jaringan jalan nasional: Tanjung Duku-**Muara Sabak**
2.	Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan	• Jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Jambi dengan Bandar Udara Sultan Thaha • Jaringan jalan kolektor primer yang

No.	Strategi Operasional Struktur Ruang	Lokasi
	pelabuhan dan/atau bandar udara	menghubungkan PKN Jambi dengan Pelabuhan Kuala Tungkal.
3.	Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian meliputi jaringan jalan nasional di Pulau Sumatera yang terpadu	• Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan • Jaringan penyeberangan sabuk selatan, sabuk utara, sabuk tengah, dan jaringan penyeberangan penghubung sabuk; • Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Strategi Operasional Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan		
1.	Revitalisasi fungsi dan pengembangan pelabuhan sungai	Sungai Batanghari yang melayani PKN jambi
2.	Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	Pelabuhan pada lintas penyeberangan antarprovinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kepelabuhan		
1.	Pengembangan pelabuhan utama dan pengumpul dengan memanfaatkan alur laut Kepulauan Indonesia	Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Kuala Tanjung
Strategi Operasional Perwujudan Perwujudan Tatanan Kebandarudaraan		
1.	Pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara	Bandar Udara Sultan Thaha sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier
2.	Pemanfaatan bersama bandar udara	Bandar Udara Sultan Thaha
Strategi Operasional Perwujudan Jaringan Terestrial		
1.	Rehabilitasi dan peningkatan fungsi Jaringan Pelayanan Pusat-pusat Pertumbuhan di Pantai Timur Sumatera: 1. Menghubungkan PKW Kuala Tungkal-PKN Jambi dan melayani Kawasan Andalan Muara Bulian-Pantai Timur Jambi dan Sekitarnya	

No.	Strategi Operasional Struktur Ruang	Lokasi
	2. Menghubungkan kawasan perkotaan PKW Muara Bungo-PKW Muara Bulian-PKW Sarolangun dan melayani Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya	
Strategi Operasionalisasi Perwujudan sistem Jaringan Sumber Daya Air		
1.	Pendayagunaan sumber air dengan berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan	• Sumber air pada wilayah sungai strategis nasional yang terdiri atas: WS. Banyuasin yang melayani Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya • Sumber air pada WS lintas provinsi meliputi: WS Batanghari yang melayani PKN Jambi, PKW Muara Bulian, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya; • Rehabilitasi DAS kritis dilakukan pada: 1. DAS Batanghari dan DAS Tungkal pada WS Batanghari; 2. DAS Musi dan DAS Batanghari Leko pada WS Musi.
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air		
1.	Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI)	DI Sei Siulak Deras dan DI Sei Batang Sangkir melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kerinci

Sumber : RTR Pulau Sumatera

2.1.3 RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Provinsi Jambi ditetapkan beberapa kebijakan dan strategi, diantaranya:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk

mendukung pengembangan ekonomi daerah
4. Pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
5. Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Rencana Struktur Ruang Provinsi Jambi terdiri dari rencana sistem perkotaan, jaringan prasarana utama, dan jaringan prasarana lainnya. Sistem perkotaan terdiri dari PKN, PKW, dan PKL. Berikut merupakan rencana dari sistem perkotaan Provinsi Jambi.

Tabel 2.5 Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Jambi

PKN	PKW
Kota Jambi	• Perkotaan Muara Bungo • Perkotaan Sarolangon • Perkotaan Kuala Tungkai • Perkotaan Muara Bulian • Perkotaan Muara Sabak

Sumber : RTRW Provinsi Jambi 2013-2033

Tabel 2.6 Rencana Jaringan Prasarana Utama Provinsi Jambi

Aspek	Rencana
Jalan Tol	a. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi (bagian Trans Sumatera) b. Jalan Tol Jambi – Rengat (bagian dari Trans Sumatera)
Rencana Jaringan Transportasi Laut	a. Rencana pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Rencana pelabuhan pengumpul • Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur • Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi c. Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pelabuhan Nipah Panjang dan Pelabuhan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Rencana Jaringan Transportasi Udara	Rencana tatanan kebandarudaraan • Bandara Sultan Thaha Jambi di Kota Jambi sebagai pengumpul sekunder • Bandara Bungo di Kabupaten Bungo dan Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerici sebagai bandara pengumpan

Sumber : RTRW Provinsi Jambi 2013-2033

Tabel 2.7 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Provinsi Jambi

Aspek	Rencana
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	a. Jaringan irigasi kewenangan nasional: • Jaringan Irigasi Batanghari meliputi Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo; • Jaringan Irigasi Sungai Siulak Deras dan Sungai Batang Sangir di Kabupaten Kerinci; dan • Jaringan Irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun b. Jaringan air baku meliputi Sungai Batanghari, Sungai Pengabuan, Danau Kerinci, Danau Pauh, dan Mata air di seluruh wilayah Provinsi Jambi c. Pembangunan kolam retensi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi sebagai bagian penanggulangan banjir Perkotaan Jambi d. Pembangunan kolam retensi di Kota Sungai Penuh e. Pembangunan pintu air di sub das pada kawasan perkotaan f. Rencana bangunan sumberdaya air • Waduk Batang Merangin di Kabupaten Merangin. • Embung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun; • Embung Batang Merangin di Kabupaten Merangin; • Embung di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;dan • Embung di Kota Jambi.
Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	a. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional yang berada di Kabupaten Kerinci b. IPAL skala kota di Kota Jambi, Muara Bungo, Sarolangun, Kuala Tungkal, dan Kota Sungai Penuh c. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal skala permukiman pada kawasan kumuh perkotaan d. Jalur evakuasi bencana meliputi Lempur – Rantau Kermas - Simpang Danau Pauh, Rantau Kermas – Batas Provinsi Bengkulu, Sungai Penuh – Pungut Mudik – Pasir Jaya - Sungai Kuning – Limbur Lubuk Mengkuang, Plompek - Sungai Kuning, dan Sungai Tanduk – Pasir Jaya

Sumber : RTRW Provinsi Jambi 2013-2033

Kawasan strategis di Provinsi Jambi terdiri dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi Kawasan Tanaman Nasional Kerinci Seblat, Kawasan Tanaman Nasional Berbak, Kawasan Tanaman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Kawasan Tanaman Nasional Bukit Duabelas. Sementara kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Percandian Muaro Jambi. Kawasan strategis provinsi meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, serta

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Kawasan strategis provinsi diuraikan sebagai berikut.

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
   a. Perkotaan Jambi;
   b. Perkotaan Muara Bulian-Muara Tembesi;
   c. Perkotaan Muara Bungo;
   d. Perkotaan Muara Tebo;
   e. Perkotaan Bangko;
   f. Perkotaan Sarolangun;
   g. Kerinci-Sungai Penuh;
   h. Perkotaan Sengeti;
   i. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berada di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

2.1.4 RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terdiri dari 2 kota dan 9 Kabupaten, diantaranya yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Berikut adalah reviu dari masing-masing dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi :

2.1.4.1 RTRW Kota Jambi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2013-2033 tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dan rencana pengembangan sistem jaringan.

Tabel 2.8 Rencana Struktur Ruang Kota Jambi

Rencana Sistem Perkotaan	
PPK	**SPPK**
• Kelurahan Beringin • Kelurahan Pasar Jambi	• Kelurahan Olak Kemang • Kelurahan Talang Banjar • Kelurahan Kebun Handil • Kelurahan Paal V • Kelurahan Kenali Besar • Kelurahan Selamat
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Jalan arteri primer	Jalan Sultan Agung, Jalan Sultan Thaha Syaifuddin, Jalan Raden Pamuk, Jalan Yos Sudarso, Jalan Husni Thamrin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Sukarno Hatta, Jalan Pangeran Hidayat, Jalan R.M. Marzuki, Jalan M.Yamin, SH, Jalan Surya Dharma, Jalan Lingkar Barat V (Jambi), Jalan SP. Pal sepuluh – SP. Palmerah – Lingkar Timur I, Jalan Lingkar Timur I – Lingkar Timur II - Sijenjang
Rencana persimpangan tidak sebidang	Pengembangan simpang susun Jalan Pasar Angso Duobaru
Rencana pengembangan jalan baru	Pembangunan jalan lingkar luar II, pembangunan jalan lingkar utara, pembangunan jalan layang Sudirman, pembangunan jalan layang A. Bakaruddin, pembangunan jalan di Kelurahan Bagan Pete, pembangunan jalan Buluran-Danau Sipin ke Angso Duo, pembangunan jembatan penyeberangan gantung
Pembangunan rel kereta api	• Kelurahan Bagan Pete • Kelurahan Kenali Asam bawah • Kelurahan Sijenjang
Transportasi Udara	
Perluasan bandar udara	Bandara Sultan Thaha Syaifuddin
Jaringan Prasarana Lainnya	
Jaringan Prasarana Energi	
Gardu distribusi	Kelurahan Payo Selincah
Pembangunan PLTG	Selincah
Pengembangan jaringan distribusi	Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kotabaru
Jaringan Telekomunikasi	

Penyediaan jaringan telepon kabel	Kota Jambi
Pengembangan tower bersama	Kota Jambi
Pegembangan internet umum	Kota Jambi
Jaringan Prasarana SDA	
DAS lintas kabupaten/kota	DAS Batanghari
DAS dalam kota	DAS Kenali Kecil, DAS Kenali Besar, DAS Kambang, DAS Asam, DAS Tembuku, DAS Sijenjang, DAS Danau Teluk
Pengembangan kolam retensi	Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Telanaipura, dan Kecamatan Kota Baru
Penyediaan Air Minum	
Peningkatan kapasitas produksi IPA	Telanaipura
Pembangunan IPA	Telanaipura, Jambi Timur, dan Danau Teluk
Penyediaan Air Limbah	
Pembangunan IPAL	Kecamatan Jambi timur, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Kota Baru, Jelutung, dan Telanaipura
Sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual	Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan
Sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal	Jambi Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jelutung, dan Kecamatan Telanaipura
Sistem pembuangan air limbah sistem perkotaan	Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Jambi Timur
Sistem Persampahan	
Pengembangan dan peningkatan TPA	TPA Talang Gulo
Rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	Pengembangan dan penyediaan TPST di kawasan perumahan dan kawasan pusat pelayanan

Sumber: RTRW Kota Jambi, 2013-2033

Kawasan strategis di wilayah kota meliputi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis sosial dan budaya. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

1. Kelurahan Beringin, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Sungai Asam, dan Kecamatan Pasar Jambi
2. Kelurahan Legok, Kelurahan Solok Sipin, dan Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura

3. Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, dan Kelurahan Jelutung, dan Kecamatan Jelutung
4. Kelurahan Tambak Sari, Kelurahan Pakuan Baru, dan Kecamatan Jambi Selatan
5. Kelurahan Kasang, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kecamatan Jambi Timur

Sedangkan, kawasan strategis sosial budaya terdiri dari:
1. Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Ulu Gedong,Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden, dan Kecamatan Danau Teluk
2. Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Tahtul, dan Yaman Kecamatan Pelayangan.

2.1.4.2RTRW Kota Sungai Penuh

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh tahun 2011-2031 tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012. Rencana struktur ruang berdasarkan RTRW Kota Sungai Penuh terdiri atas hirarki pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kota Sungai penuh.

Tabel 2.9 Rencana Struktur Ruang Kota Sungai Penuh

Rencana Sistem Perkotaan	
PPK	**SPPK**
• Kecamatan Sungai Penuh	• Tanah Kampung • Pesisir Bukit • Hamparan Rawang • Kumun Debai
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Peningkatan jaringan jalan kolektor primer	• Jalan Pancasila (batas kota) – Jalan RE. Martadinata – Jalan Diponegoro – Jalan Muradi (batas kota) • Jalan Depati Parbo (batas kota) – Jalan Imam Bonjol – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Soekarno Hatta (batas kota)

Peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder	• Jalan Prof. M. Yamin, SH – Jalan Arif Rahman Hakim – Jalan Hamparan • Jalan Yos. Sudarso • Jalan Jend. Ahmad Yani • Jalan Mayjend. A Thalib – Jalan MH. Thamrin • Jalan H. Bakri
Pengembangan jalan layang	• Jalan Pancasila di Kecamatan Sungai Penuh – Jembatan II Tanah Kampung
Pengembangan jalan lingkar dalam	• Jalan Muradi di Desa Koto Lolo Kecamatan Pesisir Bukit – Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Penuh – Persimpangan Jembatan Sumur Anyir – Jalan Yos Sudarso - Jalan H. Hasimi – Jalan Pancasila - Jalan Depati Parbo
Peningkatan jalan lingkar luar	Pertigaan Jalan Depati Parbo – Jalan Puti Balo – Jalan Pelita III – Jalan Gajah Mada – Pertigaan Jalan Soekarno Hatta – Jalan H. Rusdi Sayuti – Jalan Jend. Basuki Rahmat – Jalan Sultan Thaha – Pertigaan Jalan Muradi
Pengembangan jalan lingkar luar	Batas Kota Kecamatan Kumun Debai – Jalan Lembang Jaya di Kecamatan Kumun Debai – Jalan Pancasila Kecamatan Tanah Kampung – Sungai Terung Kecamatan Hamparan Rawang – Batas Kota – Jalan Muradi Kecamatan Pesisir Bukit
Peningkatan jalan strategis nasional	• Jalan Pancasila – Jalan RE. Martadinata – Jalan Diponegoro – Jalan A. Yani - Jalan Soekarno Hatta - Sako (Batas Sumatera Barat) • Jalan Hos Cokroaminoto • Jalan M. Yamin • Jalan Sultan Thaha

Jaringan Transportasi Udara	
Pengaturan terhadap kawasan keselamatan operasional penerbangan	Bandara Depati Parbo Kabupaten Kerinci
Jaringan SDA	
Wilayah sungai	Pengelolaan wilayah Sungai Batanghari yang mencakup DAS Batanghari
Pengembangan sistem jaringan air baku	Sungai Batang Merao, Sungai Jernih, Sungai Ampuh, Sungai Batang Sangkir, Sungai Batang Buai, dan Sungai Sangkakala
Pengembangan waduk penampungan air	Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Sungai Penuh
Pengendalian kawasan terbangun, kawasan rawan banjir	Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamataan Kumun Debai dan sebagian Kecamatan Sungai Penuh
Rencana Infrastruktur Perkotaan	
Penyediaan Air Minum	
Pengembangan sistem jaringan perpipaan primer	• Jalan Lembang Jaya – Jalan Pandai Besi – Jalan Pancasila • Jalan Tanjung • Kota Sungai Penuh
Pengembangan sistem jaringan perpipaan sekunder	• Jalan Tanjung – Tanjung Bunga • Jalan Pancasila – Desa Koto Panap • Kota Sungai Penuh
Pengembangan IPAM	• Kumun Debai dengan kapasitas 30 ltr/dtk • Tanah Kampung dengan kapasitas 10 ltr/dtk • Simpang Tiga Rawang kapasitas 100 ltr/dtk
Jaringan Air Limbah	
Rencana sistem pembuangan air limbah bahan berbahaya dan beracun	Kawasan Rumah Sakit di Kecamatan Sungai Penuh
Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat	Kawasan pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sungai Penuh

Sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual	Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, dan Kecamatan Hamparan Rawang
Sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal	Kawasan perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Sungai Penuh
Sistem Persampahan	
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Setiap lingkungan perumahan dan pusat kegiatan
Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)	Kabupaten Kerinci
Sistem Drainase	
Pengembangan sistim kanal pengendali banjir	Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai
Perbaikan saluran drainase	Jalan Muradi, Jalan A. Yani, Jalan Depati Parbo dan Kawasan Pasar Tanjung Bajure
Jalur Evakuasi	
Jalur evakuasi gerakan tanah	Jalan Sungai Penuh - Sako dan Jalan Renah Kayu Embun Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai
Jalur evakuasi banjir	Jalan Tanjung di Kecamatan Hamparan Rawang, Jalan Pancasila di Kecamatan Sungai Penuh, Jalan Pinggir Air di Kecamatan Kumun Debai, dan Jalan Pancasila di Kecamatan Tanah Kampung

Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh, 2011-2031

Kawasan strategis Kota Sungai Penuh meliputi kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari perspektif ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan ekowisata di setiap kecamatan;
2. Kawasan industri kecil di setiap kecamatan;dan
3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional di Kecamatan Sungai Penuh.

Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya terdiri atas:

1. Kawasan kebudayaan Islam di Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh
2. Kawasan pengkajian Islam di Kecamatan Hamparan Rawang
3. Kawasan pendidikan dan pelatihan di Kecamatan Pesisir Bukit

Kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Sungai Penuh, Pesisir Bukit dan Kumun Debai;dan
2. Kawasan resapan air di Kecamatan Sungai Penuh, Pesisir Bukit dan Kumun Debai.

2.1.4.3 RTRW Kabupaten Batang Hari

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari tahun 2011-2031 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi rencana pusat kegiatan, rencana jaringan prasarana utama dan jaringan prasarana lainnya.

Tabel 2.10 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Batang Hari

Rencana Sistem Perkotaan	
PKW	
Perkotaan Muara Bulian	
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Jalan tol	Ruas Tol Jambi - Rengat (BTS Muara Jambi – BTS Batang Hari)
Jalan arteri primer	• Ruas BTS. Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tebo – Muara Tembesi, • Ruas Muara Tembesi – BTS. Kota Muara Bulian, Ruas Jln Muara Tembesi (Muara Bulian), • Ruas Bts Kota Ma. Bulian – BTS. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batang Hari, • Ruas Jln. Gajah Mada (Muara Bulian)
Jalan kolektor primer	Ruas Muara Tembesi – BTS. Kab. Batang Hari/Kab. Sarolangun

Jalan kolektor sekunder	• Ruas Simpang Sei Buluh – Sei Duren, • Ruas Muara Bulian – Panerokan – Tempino, Ruas Panerokan - Sungai Bahar, • Ruas Simpang Rantau Gedang – Tapah Sari – Bukit Harapan – Bulian Jaya – Merlung, Ruas Ring Road Sridadi – Simpang pete, • Ruas Muara Bulian – Muara Tembesi
Pengembangan pelabuhan	Pelabuhan Muara Bulian, pelabuhan Muara Tembesi, dermaga Desa Teluk, dermaga Sungai Rengas
Perkeretaapian	
Pembangunan jalur kereta api dan Jaringan jalur kereta api khusus	• Batas Sumatera Barat - Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Jambi – Muara Sabak • Batas Sumatera Barat - Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Jangga – Sarolangun
Stasiun kereta api umum	Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian
Stasiun kereta api khusus	Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Muara Tembesi
Sistem Prasarana Lainnya	
Jaringan SDA	
Wilayah sungai	WS Batanghari yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi
Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi
Daerah Irigasi (DI)	DI Karmeo dengan luas kurang lebih 480 ha
Sistem pengendalian daya rusak air	• Pembangunan turap, plengsengan dan embung di sepanjang DAS • Penghijaun di sepanjang DAS
Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	
Pengembangan TPA sampah dengan sistem *sanitary landfill*	TPA Muara Tembesi dan TPS Muara Bulian

Pembangunan sistem penyediaan air minum	Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Batin XXIV, dan Kecamatan Maro Sebo Ulu
Pembangunan distribusi air minum melalui jaringan pipa PDAM atau jaringan SPAM	Kecamatan Pemayung, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kecamatan Bajubang
Pengelolaan limbah domestik	Kecamatan Pemayung, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kecamatan Bajubang, Kecamatan Mersam
Pengelolaan limbah non-domestik	Perkotaan Muara Bulian
Pengelolaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya)	Kecamatan Pemayung

Sumber: RTRW Kabupaten Batang Hari, 2011-2031

Kawasan strategis di wilayah kabupaten meliputi perwujudan kawasan strategis nasional yaitu Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas dan perwujudan kawasan strategis provinsi yaitu Kawasan Muara Bulian – Jambi dan sekitarnya.

2.1.4.4 RTRW Kabupaten Bungo

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun 2013-2033 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang direncanakan struktur ruang yang terdiri atas sistem pusat kegiatan, sistem prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kabupaten Bungo

Tabel 2.11 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bungo

Rencana Sistem Perkotaan	
PKNp	
Perkotaan Muara Bungo	
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Jalan arteri primer	• Jalan lintas tengah sumatera: Batas Provinsi Sumatera Barat/Provinsi Jambi – Batas Kabupaten Bungo, Jalan Lintas Sumatera I, Jalan Lintas Sumatera II, Batas Kota

	Muara Bungo-Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin, Batas Kabupaten Bungo-Batas Kabupaten/Batas Kota Bangko • Jalan Penguhubung I Jambi – Bungo: Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura, Batas Kota Muara Bungo-Batas Kabupaten Tebo
Jalan kolektor primer 1	• Penghubung antar pusat kegiatan dengan ruas Jalan Lingkar Bungo
Jalan lokal primer	• Ruas Jalan Muara Bungo – Tanjung Agung – Rantau Pandan • Ruas Jalan Peninjau – Simpang Lubuk Mengkuang – Limbur Lubuk Mengkuang • Ruas Jalan Senamat – Kota Jayo – Dusun Danau – Muara Kuamang – Unit 1 Kuamang Kuning • Ruas Jalan Muara Bungo – Pasir Putih – Trans Sungai Suluh – Dusun Danau – Muara Kuamang – Unit I Kuamang Kuning • Ruas Jalan Desa Baru Pusat Jalo – Bedaro – Simpang Desa Baru Pusat Jalo – Bukit Kemang – Tanah Tumbuh • Ruas Jalan Rantau Ikil – Aur Gading – Pulau Batu • Ruas Jalan Talang Silungko – Simpang Jalan TKA – Batas Sumbar • Ruas Jalan Rantau Keloyang – Rantau Asam
Pembangunan jaringan angkutan kereta api umum	• Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo –

	Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Kota Jambi • Lubuk Linggau – Sarolangun – Bangko – Muara Bungo
Pembangunan jaringan jalur kereta api khusus	• Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Kota Jambi – Muara Sabak • Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Sarolangun
Pembangunan stasiun KA	• Perkotaan Muara Bungo
Jaringan Transportasi Udara	
Bandar udara pengumpan	Pembangunan Bandara Bungo
Jaringan Prasarana Lainnya	
Jaringan SDA	
Wilayah Sungai (WS)	WS Batanghari lintas Provinsi Jambi
CAT Kabupaten Bungo	• Kecamatan Pelepat, Kecamatan Pelepat Ilir, Kecamatan Bathin II Babeko, Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Bathin III, Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kecamatan Bathin III Ulu
Daerah Irigasi (DI)	• Kewenangan nasional DI Batanghari dengan luas

	untuk wilayah Kabupaten Bungo 737 ha • Kewenangan pemerintah provinsi di DI Sei Batang Uleh • DI Kabupaten: DI Sei Semangai, DI Sei Terantam Besar, DI Sei Talang Cabuk, DI Sei Jentayo, dll
Sumber sungai batang bungo	• IPA Sungai Pinang, IPA unit Tanjung Agung
Sumber sungai batang tebo	• IPA unit Lubuk Landai, IPA unit Tanah Tumbuh, IPA unit Embacang Gedang, IPA unit Candi, IPA SKB
Sistem pengendalian daya rusak air	• Embung di Kecamatan bathin IIII ulu, kecamatan pelepat, kecamatan rimbo tengah, dan kecematan pelepat ilir
Pengembangan pembangunan embung	• Kecamatan pelepat ilir, dan kecamatan liimbur lubuk mengkuang
Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	
TPA	Kecamtan Bathin II Babeko
TPA 3R	Kecamtan Pelepat
TPST	Seluruh kecamatan
Pemanfaatan SPAM muaro bungo	Melayani Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bungo Dani, dan Kecamatan Bathin III
Pemanfaatan SPAM Embacang Gedang	Melayani Kecamatan Tanah sepenggal lintas
Pemanfaatan SPAM Purwo Sari	Melayani Kecamatan Pelepat Ilir
IPAL domestik	Perkotaan Muara Bungo, Bungo Dani, Rimbo Tengah, Bathin III
Jaringan drainase primer	Sungai Batang Bungo dan Sungai Batang Tebo
Jalur evakuasi bencana	• **Bencana Letusan Gunung Api Kerinci**: Sungai Penuh-Pungut Mudik-Pasir Jaya-

	Sungai Kuning-Limbur Lubuk Mengkuang • **Bencana Longsor**: ruas jalan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, ruas jalan Kecamatan Pelepat ruas jalan Kecamatan Tanah Tumbuh dan ruas jalan Kecamatan Bathin III Ulu • **Bencana Banjir**: ruas jalan Kecamatan Pasar Muara Bungo, ruas jalan Kecamatan Bathin III, ruas jalan Kecamatan Bathin III ulu, ruas jalan Kecamatan Rantau Pandan, ruas jalan Kecamatan Pelepat Ilir
Ruang evakuasi bencana	• **Bencana Letusan Gunung Api Kerinci**: sarana dan prasarana kesehatan, kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang • **Bencana Longsor**: kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan Pelepat, dan Kecamatan Bathin III Ulu • **Bencana Banjir**: kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Bathin III, Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Rantau Pandan dan Kecamatan Pelepat Ilir

Sumber: RTRW Kabupaten Bungo, 2013-2033

Kawasan strategis Kabupaten Bungo meliputi kawasan strategis nasional berupa Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Tanah Tumbuh, dan Kecamatan Pelepat. Kawasan strategis provinsi

berupa kawasan Perkotaan Muara Bungo, dan kawasan strategis kabupaten dilihat dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kota Terpadu Mandiri Bathin III Ulu, Kecamatan Pandan, Kawasan Perkotaan Rantau Ikil, Tuo Limbur, Perkotaan Rantau Keloyang dan Perkotaan Embacang Gedang, sedangkan dilihat dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup berupa Hutan Lindung Bukit Panjang – Bukit Bayur.

2.1.4.5 RTRW Kabupaten Kerinci

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci tahun 2012-2032 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012. Struktur ruang yang terdiri atas sistem pusat kegiatan, sistem prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kabupaten Kerinci

Tabel 2.12 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kerinci

Rencana Sistem Perkotaan	
PKL	
• Perkotaan Siulak di Kecamatan Siulak • Perkotaan Batang Sangir di Kecamatan Kayu Aro • Perkotaan Sanggaran Agung di Kecamatan Danau Kerinci	
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Jalan kolektor primer	• Ruas Jalan Muara Imat – Simpang IV Tanjung Tanah – Simpang IV Sebukar – Batas Kota Sungai Penuh • Ruas Jalan Semumu, Batas Kota Sei Penuh –Siulak Deras - Kayu Aro - Batas Provinsi Sumatera Barat • Ruas Jalan Sanggaran Agung – Jujun - Batas Kota Sungai Penuh • Ruas Jalan Jujun – Lempur
Jalan Strategis Nasional	• Ruas jalan Km 337,1, Kabupaten Merangin – Sanggaran Agung • Ruas jalan Sanggaran Agung – Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh • Ruas jalan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh – Siulak Deras – Batas Sumatera Barat
Jaringan Transportasi Udara	
Pengembangan Bandar Udara	Bandar Udara Depati Parbo di Kecamatan Sitinjau Laut sebagai bandar udara pengumpan

Jaringan Prasarana Lainnya	
Pengelolaan SDA	
Wilayah Sungai (WS)	• WS Batanghari yang merupakan WS lintas Provinsi Jambi-Sumatera Barat • WS Teramang Moar yang merupakan WS lintas Provinsi Jambi-Provinsi Bengkulu
Cekungan air tanah (CAT)	• CAT Bangko-Sarolangun, CAT Kayu Aro-Padang Aro, CAT Painan-Lubuk Pinang, dan CAT Sungai Penuh.
Daerah Irigasi (DI)	• DI kewenangan nasioanl: DI Sei Siulak Deras, DI Sei Batang • DI kewenangan pemerintah provinsi: DI Sei Tanduk • DI kewenangan pemerintah kabupaten: DI semi teknis dan DI sederhana
Pengendalian daya rusak air	• Sungai Sangir, Sungai Batang Merao, Sungai Mukai, Sungai Lempur, Sungai Batang Sangkir, Sungai Buai, Sungai Jujun
Jaringan Prasarana Lainnya	
Pembangunan TPA	Kecamatan Gunung Kerinci
Pengembangan TPA	Kecamatan Danau Kerinci
IPAL komunal	Perkotaan Siulak, Perkotaan Batang Sangir, dan Perkotaan Sanggaran Agung
Pengelolaan limbah domestik berupa septic tank	Perkotaan Siulak Deras, Perkotaan Jujun, Perkotaan Semurup, dan Perkotaan Hiang
Pengelolaan limbah non domestik	PTP VI Kayu Aro Perkotaan Batang Sangir
Jaringan drainase primer	Sungai Batang Merao, Sungai Batang Merangin, Sungai Sangir, Sungai Buai, Sungai Lempur, Sungai Batang Sangkir, Sungai Mukai, Sungai Jujun

Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci, 2012-2032

Kawasan strategis Kabupaten Kerinci meliputi kawasan strategis nasional berupa TN Kerinci Seblat, kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan Strategis Kota Sungai

Penuh yaitu Kecamatan Siulak, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Barat, Kecamatan Depati VII, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Danau kerinci, dan Kecamatan Keliling Danau. sedangkan kawasan strategis provinsi berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tinggi berupa kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di wilayah Kabupaten Kerinci.

Kawasan strategis kabupaten terdiri dari sudut kepentingan ekonomi yang meliputi:

1. Kawasan agropolitan Kayu Aro dan sekitarnya
2. Kawasan agropolitan Gunung Raya dan sekitarnya
3. Kawasan minapolitan Danau Kerinci
4. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Siulak dan sekitarnya
5. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bukit Kerman
6. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Hangat Barat dan sekitarnya.

Sedangakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kerinci di Kecamatan Batang Merangin.

2.1.4.6 RTRW Kabupaten Merangin

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014. Direncanakan struktur ruang yang terdiri atas sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kabupaten Merangin.

Tabel 2.13 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Merangin

Rencana Sistem Perkotaan	
PKL	
• Perkotaan Rantau Panjang di Kecamatan Tabir • Perkotaan Pamenang di Kecamatan Pamenang • Perkotaan Sungai Manau di Kecamatan Sungai Manau • Perkotaan Pasar Masurai di Kecamatan Lembah Masurai	
Jaringan Prasarana Utama	
Sistem Jaringan Transportasi Darat	
Jalan Arteri	• Ruas jalan batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin-batas Kota Bangko

	• Ruas jalan batas Kota Bangko-batas Kabupaten Sarolangun/Kabupaten Merangin • Ruas jalan Lintas Sumatra I (Bangko) • Ruas jalan Lintas Sumatra II (Bangko)
Jalan kolektor (K1)	• Jalan Makalam Bangko • Jalan M. Yamin Bangko • Jalan Bangko-Sungai Manau
Jalan kolektor (K2)	• Ruas Jalan Simpang Jelatang – Batas kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun • Ruas jalan Simpang Kuamang – Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Bungo • Ruas jalan Jangkat – Batas Kabupaten Merangin/kabupaten Sarolangun • Ruas jalan Simpang Pulau Rengas – Jangkat • Ruas jalan Simpang margoyoso – Kabupaten Merangin/kabupaten Sarolangun • Ruas jalan Simpang Merkeh – Air Batu (Akses Geopark Merangin)
Jalan lokal	• Ruas jalan Tambang Mas-Tanjung Benuang–Selango - batas Kabupaten Sarolangun • Ruas jalan Simpang Lubuk Gaung - Simpang Tiga Desa Nalo • Ruas jalan Sungai Ulak - Aur Duri • Ruas jalan Aur Duri –Telun - Simpang Pulau Layang • Ruas jalan Simpang Limbur Merangin - Pinang Merah - Simpang Empat Rasau • Ruas jalan Rantau Panjang - Rantau Limau Manis • Ruas jalan Simpang Seling - Muara Jernih-Ngaol • Ruas jalan Kotojati • Ruas jalan Sungai Manau - Sungai Pinang – Sengayau - Ngaol • Ruas jalan Simpang Pasar Masurai - Tanjung Dalam – Koto Tapus • Ruas jalan Kebun Sayur - Simpang Talang Kawo

	• Ruas jalan Simpang Talang Kawo – Simpang Empat Rasau • Ruas jalan Ulak Makam – Kotaraja • Ruas jalan Simpang Air Batu – Kotaraja • Ruas jalan Simpang Mentawak - Sinar Gading - Muara Delang • Ruas jalan Simpang Sekancing - Baru Tiang Pumpung - Rantau Limau Kapas • Ruas jalan Muara Kibul - Batang Kibul • Ruas jalan Jembatan Rasau - Pasar Pamenang • Ruas jalan Rejosari – Simpang Rasau • Ruas jalan Sri Sembilan - Sungai Limau • Ruas jalan Simpang Kodim - Simpang Talang Kawo • Ruas jalan Muara Jernih - Danau • Ruas jalan BIRR SMA 6 Merangin – Pasar Baru Bangko • Ruas jalan BIRR Pasar Baru - Salam Buku • Ruas jalan BIRR Sungai Ulak – Kandis • Ruas jalan Simpang Merkeh – Air Batu
Pengembangan jaringan jalan baru	• Ruas jalan Simpang Dusun Mudo Langling-Simpang Talang Kawo • Ruas jalan Simpang Talang Kawo-Pulau Rengas • Ruas jalan Simpang Mentawak-Simpang Dusun Mudo Langling • Ruas jalan Pulau Rengas-Rantau Alai-Sungai Ulak- Simpang Mentawak
Jaringan Prasarana Lainnya	
Jaringan Sumber Daya Air	
Wilayah Sungai (WS)	• Wilayah sungai lintas provinsi Teramang Muar yang mencakup DAS Air Dikit • Wilayah sungai lintas provinsi Batanghari, yang mencakup Sub DAS Batang Tembesi, Sub DAS Batang Tabir, Sub DAS Batang Merangin dan Sub DAS Batang Masumai
Cekungan air tanah (CAT)	CAT Bangko-Sarolangun
Daerah Irigasi (DI)	• DI Betuk di Kecamatan Tabir • DI Sei Ulak di Kecamatan Tabir • DI Sei Sembilang di Kecamatan Tabir • DI Karang Birahi di Kecamatan Pamenang

	• DI Sungai Birun di Kecamatan Pangkalan Jambu • DI Sei Supermin di Kecamatan Pangkalan Jambu • DI Sei Tanjung Mudo di Kecamatan Pangkalan Jambu • DI Sei Pelipan di Kecamatan Sungai Manau • DI Sei Nagan di Kecamatan Sungai Manau • DI Sei Tiangko di Kecamatan Sungai Manau • DI Sei Nilau di Kecamatan Sungai Manau • DI Sei Lintang di Kecamatan Sungai Manau • DI Sei Semayo di Kecamatan Tabir • DI Sei Petepah di Kecamatan Tabir • DI Beringin di Kecamatan Pamenang Barat • DI Batang Nibung di Kecamatan Batang Masumai
Pengembangan air bersih dengan pipa *intake*	Batang Merangin, Batang Tabir, Batang Tembesi, dan Batang Masumai
Pengembangan sumber air baku	Sumber air baku Sigerincing di Kecamatan Lembah Masurai
Pembangunan turap/tanggul	Wilayah Sungai Teramang Muar, Sungai Batang Merangin, Sungai Batang Tembesi, Sungai Batang Tabir dan Sungai Batang Masumai
Pembangunan embung	Kecamatan Pamenang
Jaringan Prasarana Lainnya	
Pengembangan TPA	Kecamatan Bangko
Pembangunan TPS	Perkotaan Pamenang, Rantau Panjang, Sungai Manau, dan Pasar Masurai
Pembangunan dan pengembangan unit pengolahan akhir lumpur tinja	Kecamatan Bangko
Pengembangan jalur evakuasi	• Ruas Muara Madras – Pasar Masurai;

bencana tanah longsor	• Ruas Rantau Suli – Tanjung Dalam – Pasar Masurai; • Ruas Ngaol – Sengayau – Sungai Manau; • Ruas Ngaol – Muara Kibul; dan • Ruas Durian Rambun – Lubuk Birah – Lubuk Beringin – Pasar Muara Siau
Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	• Ruas Ngaol – Muara Kibul – Muara Jernih – Simpang Seling; • Ruas Rantau Limau Manis – Rantau Panjang; • Ruas Nalo – Simpang Lubuk Gaung; • Ruas Nalo – Sungai Ulak; dan • Ruas Empang Benao – Tanjung Gedang – Pasar Pemenang
Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi	Ruas jalan Simpang Danau Pauh - Rantau Kermas - Tanjung Kasri - Renah Kemumu - Batas Kabupaten Kerinci (Lempur), dan Rantau kermas-Batas Provinsi Bengkulu
Ruang evakuasi bencana	Kantor kecamatan, bangunan sekolah, dan bangunan pemerintah lainnya meliputi: • Kecamatan Jangkat • Kecamatan Sungai Tenang • Kecamatan Lembah Masurai • Kecamatan Muara Siau • Kecamatan Tabir Barat • Kecamatan Tabir Ulu • Kecamatan Sungai Manau • Kecamatan Renah Pembarap • Kecamatan Pangkalan Jambu • Kecamatan Tabir • Kecamatan Tabir Ilir • Kecamatan Nalo Tantan • Kecamatan Pamenang

Sumber: RTRW Kabupaten Merangin, 2014-2034

Kawasan strategis Kabupaten Merangin meliputi kawasan strategis nasional berupa Taman Nasional Kerinci Seblat, kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan Strategis Bangko-Sarolangun. sedangkan kawasan strategis kabupaten meliputi, Kawasan Strategis Perkotaan Bangko dan Kawasan Lembah Jang Tenang yang meliputi Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Jangkat, dan Kecamatan Sungai Tenang.

2.1.4.7 RTRW Kabupaten Muaro Jambi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2014. Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 2.14 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Muaro Jambi

Rencana Sistem Perkotaan	
PKWp	
Perkotaan Sengeti	
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Pengembangan jaringan halan bebas hambat	Batas Provinsi Jambi/Provinsi Sumatera Selatan – Kecamatan Mestong – Kecamatan Jambi Luar Kota – Kecamatan Sekernan – Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer	• Jalan Lintas Timur • Jalan Penghubung I Jambi – Bungo • Jalan Akses Pelabuhan Talang Duku • Jalan Akses Candi Muaro Jambi
Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer 1 melalui	• Simpang Tempino – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari – Simpang Penerokan • Talang Duku – manis Mato Desa Sogo/Suak Kandis
Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan lokal primer	• Kecamatan Sekernan • Kecamatan Maro Sebo • Kecamatan Taman Rajo • Kecamatan Jambi Luar Kota • Kecamatan Kumpeh Ulu • Kecamatan Kumpeh • Kecamatan Mestong • Kecamatan Sungai Gelam • Kecamtan Bahar Utara • Kecamatan Sungai Bahar • Kecamatan Bahar Selatan
Jaringan Transportasi Udara	
Pengembangan dan pembangunan tatanan kebandarudaraan	• Pengembangan bandar udara umum Sultan Thaha Jambi • Pembangunan baru bandar udara di Kecamatan Taman Rajo
Rencana Infrastruktur Perkotaan	

Penyediaan Air Minum	
Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	• Kecamatan Sekernan • Kecamatan Mendalo Darat • Kecamatan Muaro Jambi
Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM)	• Kecamatan Bahar • Kecamatan Mestong • Kecamatan Bahar Selatan • Kecamatan Sungai Gelam
Jaringan Air Limbah	
Pembangunan dan pengembangan IPAL	Perkotaan di seluruh kabupaten
Pembangunan dan pengembangan IPLT	• Kecamatan Jambi Luar Kota • Kecamatan Sekernan • Kecamatan Sungai Gelam • Kecamatan Sungai Bahar
Perbaikan system sanitasi masyarakat dengan *system on site*	Seluruh permukiman di kabupaten
Sistem Persampahan	
Pembangunan TPA Sanitary Landfill	• Kecamatan Sungai Gelam • Kecamatan Sekernan
Pengembanan TPA Sanitary Landfill	• Kecamatan Jambi Luar Kota • Kecamatan Sungai Bahar
Pembangunan TPST	• Kecamatan Mestong • Kecamatan Bahar Selatan • Kecamatan Jambi Luar Kota • Kecamaan Kumpeh • Keccamatan Kumpeh Ulu • Kecamatan Bahar Utara • Kecamatan Taman Rajo • Kecamatan Maro Sebo
Sistem Drainase	
Pengembangan sistem drainase terpadu	Kawasan perkotaan PKWp, PKL, PKL, PKLp, dan PPK
Pembangunan pengendali banjir	Sepanjang aliran Sungai Batang Hari
Jalur Evakuasi	
Pengembangan jalur evakuasi banjir	• Wilayah Sekernan dan Kecamatan Jambi Luar Kota melalui ruas jalan arteri primer Sp Tuan – Batasa Kota Jambi ke lapangan perkantoran bukit Cinto Kenang • Wilayah Sekernan dan Kecamatan Jambi Luar Kota melalui ruas jalan arteri primer batas Kabupaten Muaro Jambi –

	Sp. Mendalo Darat ke Universitas Jambi, jalan lokal primer Pematang Jering - Sungai Duren – Simpang Sungai Duren menuju Kampus IAIN • Wilayah Kecamatan taman rajo melalui ruas jalan kemingking dalam – Talang Duku – Batas Kota Jambi ke lapangan Batalyon Infantri Ksatria Jaya Kasang
Jalur evakuasi banjir	Wilayah Kumpeh Ulu dan Kumpeh melalui ruas jalan Suak Kandis – Talang Duku – Batas Kota Jambi ke Batalyon Infantri Ksatria Jaya Kasang

Sumber: RTRW Kabupaten Muaro Jambi, 2014-2034

Kawasan strategis Kabupaten Muaro Jambi meliputi kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari perspektif ekonomi terdiri atas kawasan strategis pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan di Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Taman Rajo, Kecamatan Kumpeh Ulum, dan Kecamatan Sungai Gelam. Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya terdiri atas Kawasan Candi Muaro Jambi di Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo. Kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Kumpeh.

2.1.4.8 RTRW Kabupaten Sarolangun

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kabupaten Sarolangun.

Tabel 2.15 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sarolangun

Rencana Sistem Perkotaan	
PKNp	
Perkotaan Sarolangun	
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer	• Ruas batas Kabupaten Merangin – Sarolangun • Ruas Sarolangun – Simpang Pelawan - batas Provinsi Sumatera Selatan.

Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K1	• Ruas Pauh – Batas Kabupaten Batang Hari • Ruas Pauh – Sarolangun.
Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K2	• Ruas Sei Salak - Simpang Pelawan • Ruas Pauh –Sepintun –Batas Sumatera Selatan • Ruas Jangkat – Batang Asai – Sei Salak – simpang Pelawan • Ruas Pauh – Air Hitam – Simpang Margoyoso • Ruas Air Hitam - Batas Kabupaten Merangin (Pemenang) • Ruas Koto Tapus - Sungai Keradak - Pekan Gedang.
Pengembangan jaringan jalan lokal primer	• Kecamatan Bathin VIII • Kecamatan Sarolangun • Kecamatan Pelawan • Kecamatan Singkut • Kecamatan Limun • Kecamatan Pauh • Kecamatan Air Hitam • Kecamatan Batang Asai • Kecamatan Mandiangin • Kecamatan Cermin Nan Gedang
Pembangunan jembatan	Kecamatan Pelawan
Pembangunan jalur kereta api	• Muaro Bungo – Bangko – Sarolangun – Lubuk Linggau • Muara Tembesi – Sarolangun • Batas Kabupaten Batang Hari – Mandiangin - Pauh – Sarolangun.
Rencana Infrastruktur Perkotaan	
Penyediaan Air Minum	
Penyediaan air minum melalui PDAM	Kecamatan Sarolangun
Penyediaan distribusi air minum/air bersih	• Kecamatan Sarolanngun • Kecamatan Pauh • Kecamatan Mandingin • Kecamatan Air Hitam • Kecamatan Bathin VIII • Kecamatan Cermin Nan Gedang • Kecamatan Pelawan • Kecamatan Singkut
Jaringan Air Limbah	
Pembangunan IPAL komunal	• Kecamatan Sarolangun • Kecamatan Mandiangin

	• Kecamatan Singkut • Kecamatan Pelawan • Kecamatan Bathin VIII • Kecamatan Pauh
Pengelolaan limbah domestik berupa *septic tank*	• Kecamatan Sarolangun • Kecamatan Pelawan • Kecamatan Bathin VIII • Kecamatan Pauh • Kecamatan Mandiangin • Kecamatan Singkut • Kecamatan Batang Asai • Kecamatan Air Hitam • Kecamatan Limun • Kecamatan Cermin Nan Gedang
Pembangunan IPLT	Kecamatan Pelawan
Pengelolaan limbah non domestik	• Kecamatan Sarolangun • Kecamatan Pauh
Sistem Persampahan	
Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	• Kecamatan Sarolangun • Kecamatan Pelawan • Kecamatan Limun • Kecamatan Cermin Nan Gedang
Pembangunan TPA	• Kecamatan Batang Asai • Kecamatan Bathin VIII • Kecamatan Singkut
Sistem Drainase	
Pengembangan sistem drainase terpadu	PKNp, PKL, dan PPK serta kawasan peruntukan industri di Kecamatan Singkut
Pembangunan pengendali banjir	Sepanjang aliran sungai Batang Hari
Jalur Evakuasi	
Pengembangan jalur evakuasi bencana longsor	• Kecamatan Limun • Kecamatan Batang Asai
Pengembangan jalur evakuasi banjir	• Kecamatan Sarolangun • Kecamatan Cermina Nan Gedang • Kecamatan Pelawan • Kecamatan Limun • Kecamatan Bathin VIII • Kecamatan Pauh • Kecamatan Mandiangin • Kecamatan Singkut
Pengembangan Jalur evakuasi gempa bumi	• Kecamatan Limun • Kecamatan Batang Asai

Sumber: RTRW Kabupaten Sarolangun, 2014-2034

Kawasan strategis Kabupaten Sarolangun meliputi kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari perspektif ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan Bangko – Sarolangun – Singkut;
2. Kawasan Perkotaan Sarolangun;
3. Kawasan Agropolitan Singkut;
4. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin;dan
5. Kawasan Wisata Batang Asai dan Danau Biaro.

Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya terdiri atas kawasan permukiman suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Pauh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, dan Kecamatan Limun. Kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:

1. Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Kecamatan Air Hitam;
2. Kawasan suaka perikanan di Kecamatan Limun;dan
3. Kawasan hutan tanaman rakyat di Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Sarolangun.

2.1.4.9 RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013. Struktur ruang yang terdiri atas sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.16 Struktur Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rencana Sistem Perkotaan	
PKW	
Perkotaan Kuala Tungkal	
Jaringan Prasarana Utama	
Sistem Jaringan Transportasi Darat	
Jalan bebas hambatan	Ruas Jambi – Rengat (Batas Batanghari – Batas Riau)
Jalan arteri primer	• Ruas Batas Provinsi Riau – Merlung

	• Ruas Merlung – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten Muara Jambi. • Ruas Batas Kabupaten Muara Jambi – Pematang Lumut • Ruas Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal • Ruas Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal • Ruas Jalan Sudirman Kuala Tungkal • Ruas Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal • Ruas Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal
Jalan kolektor primer (K1)	Ruas Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Lubuk Kambing – Merlung
Jalan kolektor primer (K2)	• Ruas Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kuala Tungkal • Ruas Sungai Saren – Teluk Nilau – Seyerang • Ruas Senyerang – Mekarjati/Batas Riau • Ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Merlung • Ruas Senyerang – Tebing Tinggi – Simpang Kuala Dasal.
Jalan lokal primer	• Ruas Simpang Rambutan – Margo Rukun – Mekarjati – Tungkal V – Tungkal IV Desa – Muara Seberang • Ruas jalan Kuala Tungkal – Teluk Sialang – Sungai Gebar – Batas Tanjung Jabung Timur • Ruas jalan Tebing Tinggi – Pematang Lumut • Ruas perkotaan Merlung – Tanjung Benanak • Ruas perkotaan Pelabuhan Dagang – Purwodadi – Simpang Abadi • Ruas perkotaan Kemang Manis – Bukit Indah – Intan Jaya – Adi Purwa • Ruas perkotaan Pinang Gading – Bukit Harapan – Lampisi – Cinta Damai –Pulau Pauh.
Jalan Khusus	• Ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Taman Raja/Pelabuhan Dagang • Ruas Kelagian – Teluk Nilau.
Terminal barang	Desa Bram Itam Raya, Kecamatam Bram Itam
Jaringan jalur kereta api khusus	Merlung – Kuala Tungkal – Muara Sabak.
Prasarana perkeretaapian	Kuala Tungkal dan Merlung.
Sistem Jaringan Transportasi Laut	
Pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir

Terminal untuk kepentingan sendiri	Kecamatan Tungkal Ulu; Kecamatan Batang Asam; Kecamatan Tebing Tinggi; Kecamatan Pengabuan; Kecamatan Tungkal Ilir; Kecamatan Seberang Kota; dan Kecamatan Kuala Betara
Terminal khusus	Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Pengabuan.
Alur pelayaran laut	Kuala Tungkal – Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kepulauan Riau – Provinsi Riau – SIJORI (Singapura, Johor, Riau) – SIBAJO (Singapura – Batam – Johor)
Alur pelayaran penyebrangan	Kuala Tungkal – Provinsi Kepulauan Riau – Provinsi Riau
Jaringan Prasarana Lainnya	
Jaringan Sumber Daya Air	
Wilayah Sungai (WS)	• WS Pengabuan – Lagan yang merupakan WS kewenangan Provinsi • WS Batanghari, mencakup DAS Pengabuan-DAS Betara, DAS Pangkal Duri, DAS Mendahara, dan DAS Batanghari
Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Jambi – Dumai
Daerah Irigasi (DI)	• DI Sei Suban • DI Sei Bungin • DI Sei Melawai
Pengembangan dan pengolahan sumber air	Seluruh kecamatan disepanjang alur Sungai Pengabuan
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Seluruh kecamatan di kecamatan di wilayah Kabupaten
PDAM	Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang
Pengembangan dan pengolahan sumber air dari embung	Desa Pematang Lumut di Kecamatan Betara
Normalisasi kawasan aliran sungai	Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Kuala Betara
Pengembangan turap	Kuala Tungkal
Penempatan pintu air	Kecamatan Tungkal Ilir

Normalisasi daerah rawa	Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberangkota, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Betara
Jaringan Prasarana Lainnya	
Sistem Jaringan Persampahan	
Pengembangan TPA	Kecamatan Betara
Pengembangan TPS	Seluruh kecamatan di wilayah kabupaten
Sistem penyediaan air minum	
Pengembangan sistem distribusi melalui pipa transmisi PDAM dan atau SPAM	Seluruh kecamatan di wilayah kabupaten
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Seluruh kecamatan di wilayah kabupaten
Sistem pengelolaan air limbah	
Pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Merlung, Pelabuhan Dagang dan Kuala Tungkal
Pengolahan limbah non domestik	Perkotaan Kuala Tungkal
Pengembangan dan pengolahan limbah domestik berupa sistem terpusat (IPAL)	Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Tebing Tinggi, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Merlung
Pengembangan pengelolaan air limbah tangki septik	Perkotaan Kuala Tungkal
Pengembangan pengelolaan air limbah sistem cubluk	Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang
Sistem jaringan drainase	
Jaringan drainase primer	Sungai Pengabuan, Sungai Betar, dan sungai Pangkal Duri, dengan anak sungai meliputi, Sungai Bram Hitam, Sungai Lumahan, Sungai

	Baung, Sungai Dasal, Sungai Pengabuan, Sungai Luntuk, Sungai Langir, Sungai Asam, Sungai Tantang, Sungai Pisauan, Sungai Senyerang
Jaringan drainase sekunder	Sepanjang jalan utama perkotaan dan pedesaan
Sistem penyediaan pedistrian	
Pidistrian wilayah PKW	Kecamatan Tungkal Ilir
Jalur dan ruang evakuasi bencana	
Jalur evakuasi	**Bencana banjir** • Pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Kuala Betara • Pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Batang Asam • Pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ulu • Pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Muara Papalik **Bencana kebakaran** Pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Kuala Betara **Bencana tanah longsor** Pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Merlung **Bencana gelombang pasang** Pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Seberang Kota
Ruang evakuasi bencana banjir	**Bencana banjir** • Kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kuala Betara • Kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Batang Asam • Kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Tungkal Ulu • Kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Muara Papalik. **Bencana kebakaran** Stadion Persitaj dan fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Kuala Betara **Bencana tanah longsor** Fasilitas umum di Kecamatan Merlung **Bencana gelombang pasang**

	• Fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Seberang Kota • Fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ulu di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Betara **Bencana puting beliung** Fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ulu di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Betara

Sumber: RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2013-2033

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi kawasan strategis nasional berupa kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam. Sementara kawasan strategis provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi yang terdapat di Kawasan Pantai Timur meliputi Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Tungkal Ilir. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, kawasan sepanjang jalan lintas timur kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Tungkal I di kecamatan Tungkal Ilir dan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Betara, dan kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Betara.
3. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara serta kawasan linduung gambut terletak di Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Pengabuan.

2.1.4.10 RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012. Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 2.17 Struktur Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rencana Sistem Perkotaan	
PKWp	
Perkotaan Muara Sabak Barat	
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Jalan kolektor primer K2	• Ruas Pelabi – Simpang Lagan • Ruas Muara Sabak – Simpang - Suak Kandis.
Jalan lokal Primer	• Ruas Pauh – Batas Kabupaten Batang Hari • Ruas Pauh – Sarolangun.
Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K2	• Ruas Bandar Jaya – Nipah Panjang • Ruas Mendahara Ulu – Catur Rahayu - Rawasari – Bandar Jaya • Ruas Simpang Desa – Simpang Datuk • Ruas Nipah Panjang – Simpang Datuk - Sungai Lokan • Ruas Muara Sabak Timur– Alang-alang – Simbur Naik – Pemusiran – Nipah Panjang • Ruas Muara Sabak Timur – Kota Raja - Alang-alang • Ruas Lagan Tengah – Manunggal Makmur - Teluk Majelis • Ruas Mendahara Ilir – Sungai Tawar – Teluk Gora – Simpang Pandan Sejahtera • Ruas Koto Kandis – Tri Mulyo – Sungai Raya – Teluk Kijing – Pemusiran • Kampung Lama – Parit 6 Pangkal Duri – Parit 2 Pangkal Duri – Sinar Kalimantan • Tanjung Solok – Kuala Lagan – Lagan Ilir • Sungai Apung – Lagan Ilir

	• Parit Palatuang – Sungai Tawar • Pelabuhan Samudera – Teluk Majelis – Kampung Laut • Rantau Rasau – Pematan Mayan – Rantau Makmur
Jalan strategis nasional	• Ruas Muara Sabak – Pelabi • Ruas Pelabi – Talang Duku.
Rencana jaringan jalan baru	• Ruas Rawasari – Koto Kandis Dendang – Rantau Indah • Ruas Sungai Lokan - Air Hitam – Sungai Cemara – Sungai Benuh - Batas Sumsel • Ruas Simpang Datuk – Sungai Jambat; d. Kampung Lama – Bhakti Idaman • Rantau Indah (SK III Koto Kandis) – Koto Kandis Dendang • Rantau Indah – Kuala Dendang • Catur Rahayu – Jati Mulyo – Koto Kandis Dendang • Ruas Mendahara Ilir – Pangkal Duri – Batas Tanjung Jabung Barat • Ruas Mencolok – Sungai Toman.
Rencana Infrastruktur Perkotaan	
Penyediaan Air Minum	
Pengembangan sumber air baku	Sungai Batang Hari
Pengembangan instalasi pengolahan air minum	• Kecamatan Dendang • Kecamatan Geragai • Kecamatan Muara Sabak Barat • Kecamatan Muara Sabak Timur • Kecamatan Kuala Jambi
Pengembangan instalasi pengolahan air minum	• Kecamatan Rantau Rasau • Kecamatan Nipah Panjang • Kecamatan Muara Sabak Timur • Kecamatan Mendahara • Kecamatan Mendahala Ulu • Kecamatan Sadu • Kecamatan Berbak
Pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM/SPAM	• Kecamatan Mendahara • Kecamatan Mendahara Ulu • Kecamatan Geragai • Kecamatan Dendang • Kecamatan Muara Sabak Barat • Keccamatan Muara Sabak Timur • Kecamatan Kuala Jambi • Kecamatan Rantau Rasau

	• Kecamatan Berbak • Kecamatan Nipah Panjang • Kecamatan Sadu
Penyediaan distribusi air minum/air bersih	• Kecamatan Rantau Rasau • Kecamatan Nipah Panjang • Kecamatan Muara Sabak Timur • Kecamatan Dendang • Kecamatan Geragai • Kecamatan Muara Sabak Barat • Kecamatan Kuala Jambi • Kecamatan Berbak • Kecamatan Sadu • Kecamatan Mendahara Ulu • Kecamatan Mendahara.
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	• Kecamatan Rantau Rasau • Kecamatan Dendang • Kecamatan Sadu • Kecamatan Mendahara Ulu • Kecamatan Mendahara
Jaringan Air Limbah	
Pengelolahan limbah domestik berupa IPAL komunal	• Kecamatan Muara Sabak Barat • Kecamatan Nipah Panjang • Kecamatan Mendahara Ilir • Kecamatan Rantau Rasau • Kecamatan Geragai
Pengelolaan limbah domestik berupa septic tank	• Kecamatan Dendang • Kecamatan Kuala Jambi • Kecamatan Muara Sabak Timur • Kecamatan Mendahara Ulu
Pembangunan IPLT	• Kecamatan Mendahara Ulu
Pengelolaan limbah non domestik	• Kecamatan Muara Sabak Barat • Kecamatan Sadu
Sistem Persampahan	
Pembangunan TPA *Controlled Landfill*	• Kecamatan Mendahara Ulu • Kecamatan Muara Sabak Barat
Pembangunan TPA dengan sistem insenerator	• Kecamatan Sadu • Kecamatan Rantau Rasau
Pengembangan TPS	Seluruh kecamatan
Sistem Drainase	
Jaringan drainase primer	Sungai Batang Hari
Jaringan drainase sekuner	• Sungai Batang Berbak • Sungai Mendahara • Sungai Pangkalan • Sungai Duri • Sungai Lagan • Sungai Pemusiran • Sungai Sadu

	• Sungai Simpang Jelita • Sungai Simpang Datuk • Sungai Air Hitam Laut
Jaringan drainase tersier	Sepanjang jaringan jalan utama perkotaan dan perdesaan.
Jalur Evakuasi	
Pengembangan jalur kebakaran	• Kecamatan Sadu • Kecamatan Nipah Panjang • Kecamatan Mendahara • Kecamatan Kuala Jambi • Kecamatan Muara Sabak Timur
Pengembangan jalur evakuasi banjir	• Kecamatan Sadu • Kecamatan Nipah Panjang • Kecamatan Mendahara • Kecamatan Kuala Jambi • Kecamatan Muara Sabak Timur

Sumber: RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2031

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari perspektif ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
2. Kawasan Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur
3. Kawasan Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat
4. Kawasan Perindustrian Kecamatan Muara Sabak Barat
5. Kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya di Kecamatan Rantau Rasau
6. Kawasan Minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya di Kecamatan Nipah Panjang
7. Kawasan Pulau Berhala di Kecamatan Sadu
8. Kawasan strategis perindustrian provinsi dan kabupaten berupa rencana pengembangan kawasan ekonomi di Kecamatan Sadu.

Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya adalah kawasan strategis industri pertambangan minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai. Kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.

2.1.4.11 RTRW Kabupaten Tebo

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 dengan tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tebo berbasis agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berikut merupakan reviu rencana struktur ruang Kabupaten Tebo.

Tabel 2.18 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tebo

Rencana Sistem Perkotaan	
PKNp	
Perkotaan Tebo	
Jaringan Prasarana Utama	
Transportasi Darat	
Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer	• Ruas batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo – Muara Tebo • Ruas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo – Muara Tebo • Ruas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo – Muara Tebo
Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K2	• Ruas Muara Tebo – Pulau Temiang – Simpang Logpon – Tanjung (Batas Sumbar) • Ruas Simpang Logpon – Simpang Saumil
Pengembangan jaringan jalan lokal primer	• Ruas Muara Tebo (no. Ruas 173) dilanjutkan ke no. Ruas 116 menuju Kabupaten Bungo • Ruas jalan kolektor primer yang diusulkan ke arah Muara Sekalo (no. Ruas 30) • Ruas arah Suo-Suo • Ruas 73 dan 72 ke arah Jalan Arteri Primer (dekat Tebing Tinggi) • Ruas Bukit Pemuatan (Jalan Kolektor Primer yang diusulkan) ke arah Napal Putih • Sako Makmur • Melako Intan dan ke arah Jalan Kolektor Primer yang ada • Ruas jalan kolektor primer (no. Ruas 66) • Ruas 67 (ke Karang Dadi) dan no. Ruas 68 kearah Jalan Arteri Primer • Ruas jalan kolektor primer dekat Wirotho Agung (no. Ruas 64) dilanjutkan ke no. Ruas 65

	• Ruas 22 menuju Kabupaten Bungo • Ruas jalan kolektor primer dekat Wirotho Agung (no. Ruas 62) • Ruas 127 menuju Jalan Kolektor Primer dekat Rantau Langkap
Pembangunan jalur kereta api	• Sumatera Barat - Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Kota Jambi – Muara Sabak • Sumatera Barat - Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Sarolangun
Rencana Infrastruktur Perkotaan	
Penyediaan Air Minum	
Penyediaan air minum melalui PDAM	• Kecamatan Tebo Tengah
Penyediaan distribusi air minum/air bersih	• Kecamatan Tebo Tengah • Kecamatan Rimbo Bujang • Kecamatan Tebo Ulu • Kecamatan Sumay • Kecamatan Tebo Ilir
Jaringan Air Limbah	
Pembangunan IPAL komunal	• Perkotaan Muara Tebo • Perkotaan Wirotho Agung • Perkotaan Sungai Bengkal
Pengelolaan limbah domestik berupa *septic tank*	• Seluruh perkotaan Kabupaten Tebo
Pengelolaan limbah non domestik	• Perkotaan Muara Tebo • Perkotaan Rimbo Bujang
Sistem Persampahan	
Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	• Kecamatan Tebo Tengah • Kecamatan Rimbo Bujang
Pembangunan TPA	• Kecamatan Muara Tebo • Kecamatan Tebo Tengah • Kecamatan Rimbo Bujang
Sistem Drainase	
Pengembangan jaringan drainase primer	• Sungai Batanghari • Anak sungai Batang Hari • Anak SungaiBatang Sumay • Anak SungaiTabir • Anak SungaiLangsip • Anak SungaiTebo • Anak SungaiJujuhan
Pengembangan jaringan drainase sekunder	• Sepanjang jaringan jalan utama perkotaan dan pedesaan
Pengembangan jaringan drainase primer	• Saluran-saluran dari rumah tangga menuju ke saluran tepi jalan

Pengembangan sumur resapan	Areal olahraga dan wisata
Jalur Evakuasi	
Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir dan longsor	• Ruas jalan Simpang Logpon – Dharmasraya batas sumbar • Ruas jalan Simpang Logpon – Wirotho Agung • Ruas jalan Pintas Tuo - Simpang Niam – Batas Kabupaten Tanjung Barat
Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir dan longsor	• Kantor desa • Sekolah Kecamatan Tebo Ilir • Kecamatan Rimbo Bujang

Sumber: RTRW Kabupaten Tebo, 2013-2033

Kawasan strategis Kabupaten Tebo meliputi kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari perspektif ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan agroindustri di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto, dan Kecamatan VII Koto Ilir
2. Kawasan perkotaan di Muara Tebo
3. Kawasan Danau Sigombak di Kecamatan Tebo Ulu

Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya terdiri atas Kawasan Taman Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah. Sementara itu, kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas kawasan taman wisata alam Bukit Sari di Kecamatan Tebo Ilir dan kawasan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan Tebo Tengah.

2.2 Kebijakan Sektor

Kebijakan sektor menjadi salah satu dasar penguat dalam arahan pengembangan wilayah Provinsi Jambi. Kebijakan sektor dalam mendukung pengembangan wilayah Provinsi Jambi antara lain RPJN Tahuh 2005 – 2025, RPJMN 2020 – 2024, Visi Indonesia, Visium dan Renstra Kementerian PUPR, kebijakan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), pariwisata, industri, dan kebijakan terkait potensi dan isu di Provinsi Jambi.

2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

RPJPN 2005-2025 diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah untuk:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional,
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

1. RPJM ke-1 (2005 – 2009)
   RPJM ke-1 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. RPJM ke-2 (2010 – 2014)
   ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
3. RPJM ke-3 (2015 – 2019)

ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

4. RPJM ke-4 (2020 – 2024)
   ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024

Berikut merupakan uraian kebijakan terkait kawasan prioritas, arahan program infrastruktur PUPR, sentra hilirisasi pertanian, sentra perikanan, sentra industri pangan, sentra sumber gas bumi dan batu bara, koridor pertumbuhan dan pemerataan Provinsi Jambi berdasarkan RPJMN 2020-2024.

Tabel 2.19 Kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait Provinsi Jambi

Kawasan Prioritas	Arahan Program Infrastruktur PUPR
Kawasan Prioritas	1. PKN Jambi 2. KI Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi 3. KPPN Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi 4. Kawasan Transmigrasi Bhatin III Ulu di Kabupaten Bungo
Major Project	Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung : Jalan Tol Trans Sumatera Koridor III (Jambi – Rengat dan Ruas Betung – Tempino – Jambi)
Kawasan Industri Kemingking	1. Pembangunan jembatan akses Pelabuhan Ujung Jabung; 2. Pembangunan jalan akses KI Kemingking; 3. Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Kemingking; 4. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung : Jalan Tol Trans Sumatera Koridor III

Kawasan Prioritas	Arahan Program Infrastruktur PUPR
	(Jambi – Rengat dan Ruas Betung – Tempino – Jambi)
Kawasan Perkotaan Jambi	1. Pembangunan rumah susun untuk buruh, pekerja, dan ASN untuk Kawasan Perkotaan Jambi; 2. SPALD – T Skala Kota/Regional Kawasan Perkotaan Jambi; 3. SPALD – T Skala Permukiman Kawasan Perkotaan Jambi; 4. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) Kawasan Perkotaan Jambi; 5. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) Kawasan Perkotaan Jambi; 6. Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kawasan Perkotaan Jambi. 7. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung : Jalan Tol Trans Sumatera Koridor III.
Sentra Hilirisasi Pertanian	• Padi • Karet • Kelapa sawit
Sentra Industri Pangan	• Jagung • Padi • Kedelai • Daging Ayam
Sentra Sumber Gas Bumi dan Batu Bara	• Terminal LPG di Kabupaten Muaro Jambi
Koridor Pertumbuhan	• Kota Jambi • Kabupaten Muaro Jambi • Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Koridor Pemerataan	• Kota Sungai Penuh • Kabupaten Sarolangun • Kabupaten Bungo • Kabupaten Batang Hari • Kabupaten Tebo • Kabupaten Merangin • Kabupaten Kerinci

Sumber: RPJMN, 2020-2024

Adapun target pembangunan Wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Jambi tahun 2020 – 2024 antara lain :

Tabel 2.20 Target Pembangunan Wilayah Provinsi Jambi 2020-2024

Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target Pembangunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,30	4,7	5,4	6,00	6,40	6,70
Tingkat Kemiskinan (%)	7,60	7,29	6,85	6,35	5,75	5,35
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,70	3,50	3,40	2,90	2,60

Sumber: RPJMN Tahun 2020 - 2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022. Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah melalui pengembangan infrastruktur terdapat dukungan dari adanya percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Berikut merupakan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Provinsi Jambi yang termuat pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022.

Tabel 2.21 Daftar Proyek Strategis Nasional Provinsi Jambi

No	Daftar Proyek Strategis Nasional	Lokasi
1	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – Bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan
2	Jalan Tol Jambi – Rengat – Bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022

2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT. Berikut merupakan misi dan strategi yang ingin dicapai dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

1. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung

pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:

a. Pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi.
b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian.
c. Peningkatan dan Penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKW) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
d. Penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tembesi, Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau Ikil, Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan, Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang, dan Tempino menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

2. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui:
   a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
   b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
   c. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi

2.2.4 Visi Indonesia 2045

Dalam Visi Indonesia 2045, Pemerintah menargetkan Indonesia menuju negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045. Terkait hal tersebut, Pulau Sumatera diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% per tahun hingga tahun 2045. Pulau Sumatera juga diarahkan menjadi basis industri baru dan

gerbang kawasan Asia pada tahun 2045. Pada aspek pembangunan dan pemerataan infrastruktur, akan dibangun konektivitas darat berupa Jalan Tol di Pulau Sumatera.

Terkait pembangunan infrastruktur, infrastruktur PUPR diharapkan untuk (1) meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, (2) mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, (3) memenuhi prasarana dasar, (4) mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta (5) antisipasi terhadap perubahan iklim.

Adapun Sasaran Utama Pembangunan Infrastruktur 2045 yaitu:

1. Penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau; jalan tol Jawa dan Sumatera; jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua; serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untuk mengantisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa.
2. Pembangunan dan peningkatan akses prasarana dasar (kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim).
3. Penurunan biaya logistik terhadap PDB menjadi 8%.
4. Peningkatan kemampuan konektivitas broadband mencapai 100 GBPS.
5. Pembangunan pelabuhan hub internasional di 7 lokasi prioritas .
6. Pasokan listrik per kapita mencapai 7000 Kwh .
7. Pembangunan dan peningkatan sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi sampai dengan 30% dari sumber energi total di Indonesia.
8. Perwujudan 4 kota aerotropolis di Indonesia.

2.2.5 Visium Kementerian Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa **Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:**

1. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung

120 m^3/kapita/tahun;
2. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle;*
3. 100% *Smartliving* (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui beberapa tahapan yaitu:

Tabel 2.22 Target Visium Tahun 2020-2024 dan 2030

Target Visium	Sumber Daya Air	Bina Marga	Cipta Karya	Penyediaan Perumahan
2020-2024	Kapasitas tampung 68,11 m^3/c/th	• Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km • Jalan Baru 2.500 Km • Jembatan Baru/FO 60.000 Meter, Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 Triliun	• 88% Air Minum; • 17.000 ha Kumuh • 85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5 juta Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat
2030	Kapasitas Tampung 120 m3/c/th Anggaran Rp.1.423 T	• Jalan Mantap 99% • Jalan Tol 2.000 Km • Jalan Baru 3.000 Km • Jembatan Baru/FO 70.000 M Anggaran Rp.448 Triliun Investasi Rp.390 Triliun	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T	3 juta Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit Anggaran Rp.1.220 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat

Sumber: Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

2.2.6 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sasaran Strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis Kementerian PUPR diantaranya:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja:
   a. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
   b. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
   c. Kapasitas tampung per kapita;
   d. *Volume* layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau, dengan indikator kinerja:
   a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living;*
   b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
   a. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
   b. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator kinerja:
   a. Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR;

b. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
c. Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur;
d. Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR;
e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di kawasan strategis;
f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 tujuan dan 5 sasaran strategis. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja sasaran strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024.

Tabel 2.23 Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam							
	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	67	70	73	76	79	**79**
		Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	54,4	64	77	89	100	**100**
		Kapasitas tampung per kapita (m3/ kapita)	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	**58,5**
		Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m3 /tahun/ ha)	19.845	20.554	21.263	21.971	22.680	**22.680**
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing							
	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 km)	2.21		2.09	2.08	1.90	**1.90**
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat							
	Meningkatnya Penyediaan Akses	Persentase peningkatan	60,29	70,08	80,07	89,93	98,57	**98,57**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* (%)						
		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	**59,48**
4	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional							
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (%)	5,3	5,6	6,0	6,4	6,8	**6,8**
		Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Yang Kompeten dan Siap Kerja (%)	25	27,5	80	85	90	**90**
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%)	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	**81,44**
		Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	100	100	100	100	**100**
		Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%)	72	75	82	85	88	**88**
		Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	70	71	72	74	76	**76**
		Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	60	65	70	75	80	**80**
		Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi	43	51	57	63	68	**68**

Sumber: Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024

2.2.7 Rencana Induk Kepelabuhan Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan. Kepelabuhanan Nasional khususnya diarahkan untuk mewujudkan sektor kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan yang kompetitif dengan sistem operasi pelabuhan, baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Hasil penetapan titik lokasi Pelabuhan Nasional pada Provinsi Jambi yang tercantum dalam RIPN untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, meliputi

Tabel 2.24 Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
		2017	2022	2027	2037
Muaro Jambi	Talang Duku	PP	PP	PP	PP
Tanjung Jabung Barat	Kuala Tungkal	PR	PR	PR	PR
Tanjung Jabung Timur	Kuala Mendahara	PR	PR	PR	PR
	Muara Sabak	PP	PP	PP	PP
	Nipah Panjang	PR	PR	PR	PR
	Ujung Jabung	PP	PP	PP	PP

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017

Provinsi Jambi memiliki 2 Pelabuhan Pengumpul (PP) eksisting yaitu Pelabauhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi dan Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta 1 (satu) rencana Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu terdapat 3 (tiga) Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain Pelabuhan Kuala Mendahara, Nipah Panjang, dan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2.8 Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional

Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional termuat dalam dokumen Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 166 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Kebandarudaraan Nasional memuat peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara eksisting dan rencana induk nasional bandar udara. Penetapan lokasi bandar udara di Provinsi Jambi sebagai berikut.

Tabel 2.25 Rencana Induk Nasional Bandar Udara

Bandar Udara	Lokasi	Peran	Hierarki	Klasifikasi
Sulthan Thaha	Kota Jambi	• Simpul • Gerbang Ekonomi • Alih Moda Transportasi • Perindag/Pariwisata • Wawasan Nusantara	Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	4C
Muara Bungo	Kabupaten Bungo		Pengumpan	3C
Depati Parbo	Kabupaten Kerinci	• Simpul • Gerbang Ekonomi • Alih Moda Transportasi • Perindag/Pariwisata • Rawan Bencana • Wawasan Nusantara	Pengumpan	3C

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 166 Tahun 2019

2.2.9 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)

Rencana Induk Pembangunan Keparwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 termuat dalam PP Nomor 50 Tahun 2011. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Perwilayahan pembanggunan DPN meliputi 50 DPN yang tersebar di 33 provinsi dan 88 KSPN yang tersebar di 50 DPN. Pada wilayah perencanaan pembangunan infrastruktur Jambi yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah KSPN Muaro Jambi dan KSPN Kerinci Seblat.

Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPN dan KSPN diantaranya:

1. Menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPN dan KSPN
2. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPN dan KSPN.

2.2.10 Rencana Aksi Nasional Taman Bumi (Geopark)

Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*geopark*) termuat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan *Geopark*, salah satunya GN Merangin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang diupayakan menjadi UNESCO Global *Geopark.* Dengan adanya pengembangan *geopark* diharapkan dapat memicu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan industri pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Kegiatan Pengembangan Geopark tahun 2021-2025 yang berkaitan dengan *Geopark Merangin* Kabupaten Merangin diantaranya adalah:

1. Program Pengembangan Kawasan Karet di sekitar Kawasan *Geopark*
2. Program Bendungan Baru yang dibangun di sekitar Kawasan *Geopark.*

2.2.11 Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera umumnya berada di pesisir timur, diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri (KI) yang didukung oleh pelabuhan sebagai outlet. Kawasan-kawasan tersebut ada yang merupakan kawasan yang telah terbangun maupun yang masih dalam pembangunan atau rencana. Di Pulau Sumatera terdapat 33 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri (KI) yang tersebar di Pulau Sumatera dan terdapat 1 kawasan industri (KI) di Provinsi Jambi yaitu **KI Kemingking.**

Program pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) periode 2020-2035 adalah 1) pembangunan infrastruktur pendukung WPPI (jalan, pelabuhan, dan bandara); 2) Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI; 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM; 4) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi; 5) Penguatan peran kerjasama antar WPPI; 6) Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI; 7) Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk WPPI terutama di luar Pulau Jawa; 8) Penguatan konektivitas antar WPPI.

2.2.12 Kebijakan KSPN Muaro Jambi

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 259 Tahun 2013 tentang Penetapan Satuan Geografis Muarajambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, siSatuan ruang geografis Muarajambi adalah peninggalan Kerajan Malayu Kuno dan Sriwijaya menjadi pusat peribadatan agama dan pendidikan Budha abad VII-XIII terluas di Indonesia dan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Terbitnya keputusan tersebut berimplikasi pada upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2.2.13 Kebijakan Tentang Jalan

Kebijakan tentang jalan mengacu pada **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua tas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004,** kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa Badan Usaha diwajibkan untuk membangun jalan khusus untuk keperluan mobilitas usahanya. **Selain itu terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan**, kebijakan ini mengamanatkan terkait pemanfaatan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakukan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi muata sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar. Kondisi tersebut menggambarkan

kendaraan dengan kriteria ODOL *(Over Dimension/Overloading)* dapat melintas pada jalan nasional namun harus mendapatkan izin dispensasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.2.14 Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 97.K Tahun 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi, sebaran Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Provinsi Jambi terletak pada Kabupaten Tebo, Merangin, Bungo, Sarolangun, dan Batanghari.

2.2.15 Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Lingkup SPM terdiri dari SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat,

1. SPM Pekerjaan Umum meliputi
    a. pemenuhan kebutuhan air minum sehari – hari. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Penerima peranan dasar diprioritaskan untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
    b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.
2. SPM Perumahan Rakyat. mencakup SPM perumahan rakyat pemerintah daerah provinsi dan SPM Perumahan Rakyat

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

2.3 Agenda Global

Agenda Global yang menjadi acuan dalam arahan pengembangan wilayah di Provinsi Jambi antara lain :

Tabel 2.26 Kebijakan Agenda Global

No	Kebijakan Global	Arahan
1	*Sustainable Development Goals (SDGs)*	SDGs adalah 17 (tujuh belas) tujuan bersama global dan nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur PUPR mendukung terwujudnya SDGs pada tujuan: • Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua • Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi • Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Selain itu, secara tidak langsung implikasi SDGs terhadap arahan pengembangan infrastruktur PUPR antara lain. 1. Dukungan terhadap Tujuan 1 melalul pengentasan kemiskinan ekstrem. 2. Dukungan terhadap Tujuan 2 melalui peningkatan kapasitas air baku baik untuk irigasi dalam rangka kedaulatan pangan. 3. Dukungan terhadap Tujuan 3 dan 4 melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. 4. Dukungan terhadap Tujuan 5 melalui

No	Kebijakan Global	Arahan
		pengarusutamaan gender. Dukungan infrastruktur PUPR untuk mendorong perkembangan wilayah melalui pengembangan seluruh kawasan strategi
2	*New Urban Agenda (NUA)*	NUA adalah komitmen global, 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Komitmen ini membawa semangat inklusif, kolaboratif, dan partisipatif dalam pembangunan perkotaan. Pembangunan infrastruktur PUPR turut mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui penyediaan perumahan dan akses pelayanan dasar seperti: • Pembangunan perumahan yang terjangkau • Penanganan kawasan permukiman kumuh • Akses universal air minum dan sanitasi perkotaan • Sarana prasarana sosial perkotaan
3	*Paris Agreement*	*Paris Agreement* adalah kesepakatan 196 negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 20C dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario baseline tidak ada intervensi (Business as Usual/BAU) pada tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional.
4	*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)*	SFDRR adalah kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang disepakati 187 negara untuk membangun ketahanan negara dan masyarakat terhadap bencana. Terdapat 7 (tujuh) target global SFDRR seperti (1) mengurangi kematian, (2) mengurangi jumlah orang terdampak, (3) mengurangi kerugian ekonomi, (4) mengurangi kerusakan akibat bencana terhadap infrastruktur kritis dan layanan dasar, (5) meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana lokal

No	Kebijakan Global	Arahan
		dan nasional, (6) meningkatkan kerja sama internasional, (7) meningkatkan ketersediaan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan infrastruktur PUPR dapat mendukung melalui 2 (dua) aksi prioritas yaitu (1) Berinvestasi pada pengurangan risiko bencana untuk ketahanan melalui pengurangan dan pencegahan risiko bencana secara struktural, non struktural dan fungsional pada fasilitas kritis, khususnya sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur fisik dan (2) Meningkatkan kesiapan kebencanaan dan "Membangun Kembali Lebih Baik" melalui peningkatan ketangguhan infrastruktur kritis baru maupun eksisting termasuk infrastruktur air, transportasi, dan telekomunikasi, fasilitas pendidikan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan operasional selama dan setelah bencana..
	UNESCO	*World Heritage Convention* Dokumen *Guidelines on Culture Heritage (technical tools for heritage conservation and management)* yang diterbitkan pada bulan september tahun 2012 secara garis besar berisi beberapa sub bahasan, diantaranya yaitu: 1. *Guidelines* untuk penemu aset heritage budaya 2. *Guidelines* untuk penelitian arkeologi 3. *Gudelines* untuk lisensi riset arkeologis 4. *Guidelines* pada kondisi dan kriteria untuk evaluasi aset warisan budaya 5. *Guidelines* mengenai rancangan dasar konservasi untuk warisan budaya dalam proses perencanaan 6. *Guidelines* mengenai konservasi warisan budaya dan kegiatan pemulihan (desain proyek konservasi) 7. *Guidelines* tentag pelestarian warisan budaya yang bersifat *movable*

No	Kebijakan Global	Arahan
		Berdasarkan poin ke 5 terkait *Guidelines* mengenai rancangan dasar konservasi untuk warisan budaya dalam proses perencanaan dijelaskan bahwa pelestarian cagar budaya telah berubah dari yang hanya sebatas kegiatan pelindungan yang berfokus pada monumen tunggal berubah untuk melindungi dalam konteks yang lebih luas. Sejak gagasan konservasi terpadu IC dipromosikan dalam deklarasi Amsterdam tentang Warisan Arsitektur Eropa (1975) dan berbagai dokumen/instrumen internasional lainnya telah diproduksi dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan pengembangan pedoman untuk perencanaan dan warisan pengelolaan nilai-nilai warisan kota. Kebijakan ini berkaitan dengan Provinsi Jambi karena terdapat kawasan cagar budaya Candi Muaro Jambi yang perlu menjadi perhatian. Pada Mei 2023, Geopark Merangin menjadi salah satu bagian *UNESCO Global Ecopark.* *Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera* (TRHS) merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Situs ini terletak di jajaran Bukit Barisan dan memiliki potensi terbesar untuk konservasi keanekaragaman hayati Sumatera. Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera terdiri dari 3 taman yakni Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan. Ketiga taman tersebut merupakan lahan publik yang ditetapkan sebagai taman nasional dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan (PHKA). Adapun persyaratan perlindungan dari ketiga taman tersebut antara lain: 1. Memiliki rencana pengelolaan yang kuat dan jelas termasuk dalam strategi dan rencana aksi nasional 2. Membentuk forum pemangku kepentingan 3. Koordinasi intensif dalam perlindungan flora dan fauna khususnya untuk spesies yang terancam

No	Kebijakan Global	Arahan
		4. Diperlukan Satuan Tugas Anti Perambahan di seluruh Indonesia 5. Patroli hutan rutin.

Sumber : Analisis BPIW, 2022

2.4 Sintesa Kebijakan Pengembangan Wilayah

2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian arah kebijakan di atas, dirumuskan fokus dan lokus kebijakan penataan ruang, kebijakan sektor, kebijakan pengembangan kawasan prioritas, dan agenda global di Provinsi Jambi. Kebijakan penataan ruang Provinsi Jambi berfokus pada pengembangan industri hilirisasi, pengembangan kawasan perkotaan khususnya PKN dan PKW, pengembangan kawasan pariwisata berbasis alam, budaya, dan ilmu pengetahuan, serta peningkatan konektivitas dan keterpaduan transportasi antarmoda untuk mendukung sektor-sektor unggulan tersebut dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan sektor berfokus pada pengembangan infrastruktur wilayah seperti Jalan Tol Trans Sumatera Koridor III (Ruas Betung – Tempino – Jambi dan Ruas Jambi – Rengat), rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, dukungan terhadap pembangunan industri hilirisasi Kawasan Industri Kemingking, peningkatan kualitas kawasan perkotaan melalui dukungan infrastruktur ketahanan bencana.

Berdasarkan sintesa kebijakan, dirumuskan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi **Jambi** yang akan berfokus pada pengembangan: 1) **Perkotaan dan 2) Pariwisata**. **Kedua** fokus arah kebijakan pengembangan wilayah ini akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah. Pada Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah akan dijabarkan penentuan kawasan prioritas dengan fokus arah kebijakan pengembangan wilayah untuk: 1) **Perkotaan dan 2) Pariwisata**. Proses penentuan kawasan prioritas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Penyusunan daftar panjang (*longlist*) kawasan prioritas yang sesuai atau

mendukung **2 (dua) fokus** di atas; 2) Penapisan *longlist* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk didapatkan daftar pendek (*shortlist*) atau kawasan prioritas terpilih. Kriteria yang digunakan pada masing-masing fokus pengembangan wilayah adalah sebagai berikut terdapat arahan kawasan priroitas pada dokumen perencanaan skala nasional dan internasional, direktif presiden, ketersediaan simpul transportasi, kesiapan kawasan. Setelah penentuan kawasan prioritas terpilih, akan dijabarkan profil dan potensi setiap kawasan prioritas berdasarkan fokus perencanaan. Selain itu, Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah juga akan membahas mengenai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi **Jambi**.

Tabel 2.27 Sintesa Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
Agenda Global	Sustainable Development Goals (SDG's)	Percepatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui dukungan peningkatan kapasitas air baku untuk irigasi dan air bersih, mendukung pengelolaan sumber daya air, menyediakan air minum, sanitasi, dan hunian layak.	Pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur teritegrasi yang berketahanan bencana	**A. Kawasan Industri – Hilirisasi :** KI Kemingking **B. Kawasan Pariwisata Alam, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan :** 1. KSPN Muaro Jambi 2. KSPN Kerinci Seblat/ Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS); 3. Geopark Merangin; 4. Taman Nasional Berbak dan Bukit Tiga Puluh; 5. Taman Nasional Bukit Dua Belas **C. Kawasan Perktoaan :** 1. PKN Jambi 2. PKW Muara Sabak 3. PKW Kuala Tungkal 4. PKW Sarolangun 5. PKW Muara Bulian 6. PKW Muaro Bungo **D. Kawasan Pertanian :** **1.** KPPN Muaro Jambi
	New Urban Agenda	Mengurangi ketimpangan wilayah antara perkotaan dan perdesaan, peningkatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, dan menyusun kebijakan yang efektif terhadap isu perkotaan.		
	Paris Agreement	Mengurangi emisi gas rumah kaca karena dampak aktivitas industri.		
	Sendai Framework	Kerawanan bencana dengan resiko tinggi meliputi bencana banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, dan gempa bumi, sehingga dibutuhkan adanya penyediaan infrastruktur yang adaptif dan tangguh bencana.		
	UNESCO	Perlindungan terhadap Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera (TRHS) merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera terdiri dari 3 taman yakni Gunung Leuser, **Kerinci Seblat (Jambi)**, dan Bukit Barisan Selatan		
Kebijakan Penataan Ruang	RTRW Nasional	Pengembangan PKN Jambi sebagai kawasan perkotaan utama dengan arah pengembangan sektor perdagangan dan jasa serta industri hilirisasi yang didukung pengembangan PKW Muara Sabak, Kuala	a. Pengembangan Kawasan Perkotaaan : Pusat Kegiatan Nasional (PKN_	

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
		Tungkal dan Muara Bungo dengan sektor unggulan pariwisata berbasis alam dan budaya, pertanian dan pertambangan	dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); b. Industri Pengolahan c. Pariwisata skala nasional dan internasional; d. Simpul transportasi dan konektivitas; e. Konservasi lingkungan	
	RTR Pulau Sumatera	Provinsi Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berkelanjutan, industri hilirisasi yang berdaya saing, pariwisata berbasis budaya dan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dan berketahanan bencana.		
	RTRW Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan potensi unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, dan pariwisata dukungan infrastruktur terpadu dengan mempertahankan 30% kawasan lindung di Provinsi Jambi		
Kebijakan Sektor	Visi Indonesia 2045	Arah pengembangan wilayah Sumatera berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, pertambangan melalui agrohilirisasi serta sektor pariwisata berbasis budaya guna mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.	a. Pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan; b. Kawasan Industri; c. Pariwisata (KSPN) d. Pemenuhan infrastruktur dasar;	
	RPJMN 2020-2024 (sudah masuk Naskah RPIW)	Pengembangan Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan di kawasan - kawasan prioritas perkotaan (PKN Jambi), pertanian (KPPN Muaro Jambi), dan hilirisasi industri (KI Kemingking) dan Kawasan Transmigrasi Bungo dengan dukungan infrastruktur PUPR		

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 sudah masuk RPIW	Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta. Untuk di Provinsi Jambi berada di luar Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yaitu Kawasan Industri Kemingking	e. Simpul Transportasi; f. Pembangunan berkelanjutan dan berketahanan bencana	
	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025	Pengembangan kawasan pariwisata alam berskala nasional dan internasional KSPN Candi Muaro Jambi dan KSPN Kerinci Seblat		
	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 259 Tahun 2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Muarajambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional	Kawasan Candi Muaro Jambi ditetapkan menjadi kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013.		
	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (Keputusan	Provinsi Jambi memiliki 2 Pelabuhan Pengumpul (PP) eksisting Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara Sabak. Rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di		

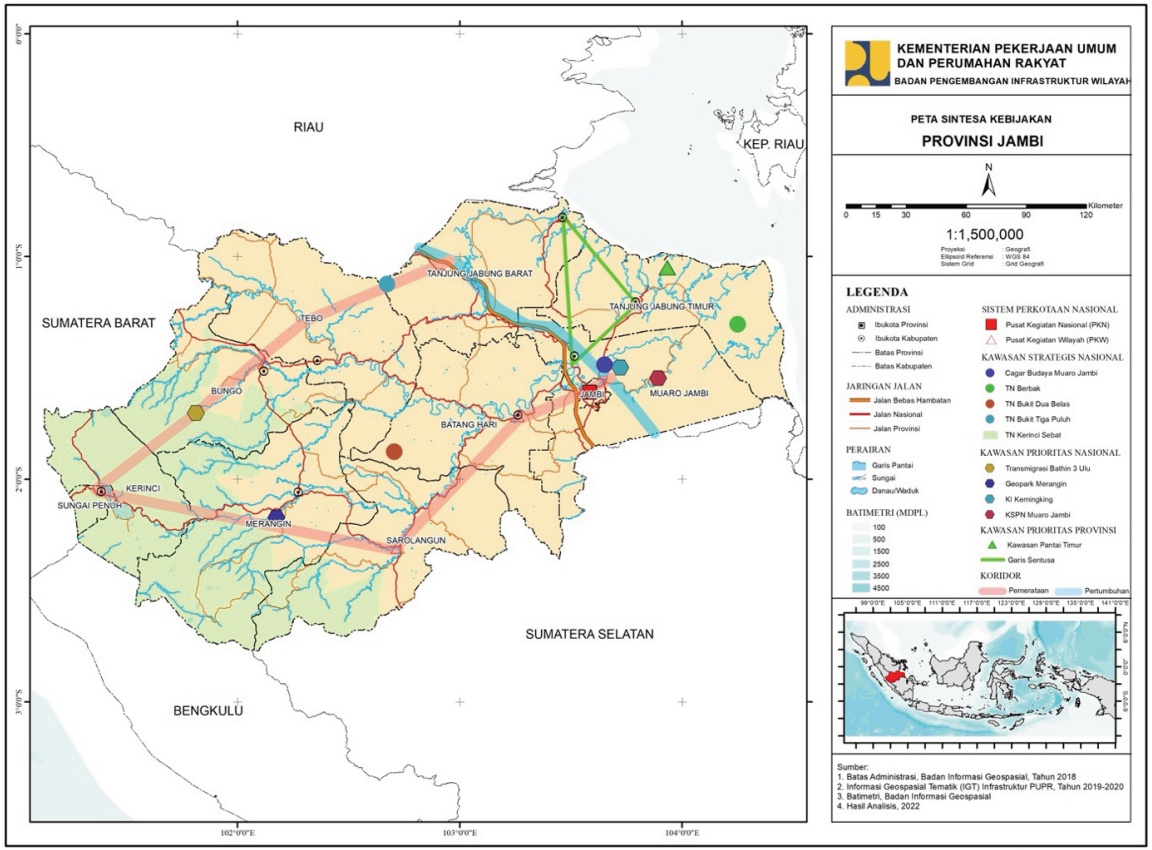
Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
	Menteri Perhubungan RI No. 432 Tahun 2017)	Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Pelabuhan Pengumpul berorientasi laut. Pelabuhan Ujung Jabung diharapkan dapat menjadi hub distribusi hasil pengolahan hilirisasi industri		
	Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional (Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	Provinsi Jambi memiliki 1 Bandar Udara skala pelayanan sekunder dan 2 bandar udara skala pengumpan. Bandar udara berperan sebagai simpul tranportasi dan gerbang ekonomi dalam mendukung kawasan strategis. Kementerian Perhubungan dapat melakukan pengaktifkan kembali Bandar Udata Depati Parbo di Kabupaten Kerinci sebagai pintu gerbang wisatawan ke KSPN Kerinci Seblat dan mengurangi waktu tempuh menuju wilayah barat Provinsi Jambi		
	Visium PUPR 2030 (Narasi disamakan semua provinsi)	Penyediaan infrastruktur PUPR melalui dukungan penyediaan air baku untuk air bersih, irigasi dalam mendukung kawasan pertanian, pengendalian daya rusak untuk menangani bencana seperti bajir, penanganan longsor, abrasi, erosi, dan karthula, peningkatan konektivitas, pemenuhan sarana dan prasana umum, dan penyediaan rumah layak huni dalam mendukung pengembangan wilayah		
	Renstra PUPR 2020-2024 Visium PUPR 2030	Penyediaan infrastruktur PUPR yang berketahanan bencana melalui dukungan penyediaan air baku, pembangunan air irigasi, peningkatan konektivitas, pemenuhan sarana		

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
		dan prasana umum, dan penyediaan rumah layak huni dalam mendukung pengembangan wilayah		
	RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026	Pengembangan Kawasan Perkotaan Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi dengan dukungan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, dan pertambangan, serta menjaga kawasan konservasi di wilayah hinterlandnya.		
	Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	Badan Usaha perlu membangun jalan khusus untuk mobilitas usahanya dan/atau badan usaha dapat memanfaatkan jalan umum namun wajib meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan khusus termasuk lebar dan muatan sumbu terberat		
	Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	Kendaraan dengan kriteria ODOL *(Over Dimension/Overloading)* dapat melintas pada jalan nasional namun harus mendapatkan izin dispensasi dari Kementerian PUPR dan sampai saat ini belum pernah ada permohonan dari perusahaan pemegang IUP		
	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor	Sebaran Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Provinsi Jambi terletak pada Kabupaten Tebo, Merangin, Bungo, Sarolangun, dan Batanghari		

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
	97 Tahun 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi			
	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021- 2025	Penetapan Rencana Aksi Nasional Pengembangan geopark dengan mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangan Geopark salah satunya Geopark Merangin.		
	Masterplan Geopark Merangin Tahun 2020	Geopark Merangin mempunyai 3 fungsi dasar yaitu fungsi konservasi (Konservasi geologi, flora dan fauna, budaya, serta mitigasi bencana), fungsi pendidikan (mengembangkan ilmu pengetahuan kebumian melalui menjadikan Geopark Merangin sebagai laboratorium kebumian) serta fungsi pembangunan ekonomi (pemberdayaan masyarakat)		
	Peraturan Menteri Koordinator Bidang	Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera III dengan Ruas Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi sebagai konektivitas Sumatera Selatan		

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
	Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar Strategis Nasional	dan Jambi. Ruas Jalan Tol Jambi - Rengat sebagai konektivitas Jambi - Riau		

Sumber : Analisis BPIW, 2022



Diproses oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, 2023

Gambar 2.2 Peta Sintesa Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jambi

Sumber : Analisis BPIW, 2022

2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2020-2024, sesuai dengan peraturan pemerintah . Infrastruktur PUPR meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (*Food Estate*), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- **Menurunnya kualitas infrastruktur**. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- **Menyebabkan ketimpangan pembangunan**. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi

masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.

- **Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi**. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- **Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup**. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- **Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah**. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- **Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR**. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.

- **Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR**. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- **Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR**. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
- **Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan**. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.28 Infrastruktur PUPR Prioritas Provinsi Jambi

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Provinsi	Kab/Kota	Dasar Hukum
1	Jalan dan Jembatan	Jalan akses Pelabuhan Muara Sabak (termasuk ke Pelabuhan Ujung Jabung)	Jambi	Tanjung Jabung TImur	
2	Jalan dan Jembatan	Jalan akses Bandara Sultan Thaha	Jambi	Kota Jambi	
3	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Jambi	Muaro Jambi	MP dan PSN
4	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Jambi	Tanjung Jabung Barat	MP dan PSN

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Provinsi	Kab/Kota	Dasar Hukum
5	Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jambi	Kota Jambi	MP

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Matriks Infrastruktur Prioritas PUPR berdasarkan: Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan Permenko Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.



BAB 3

PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan

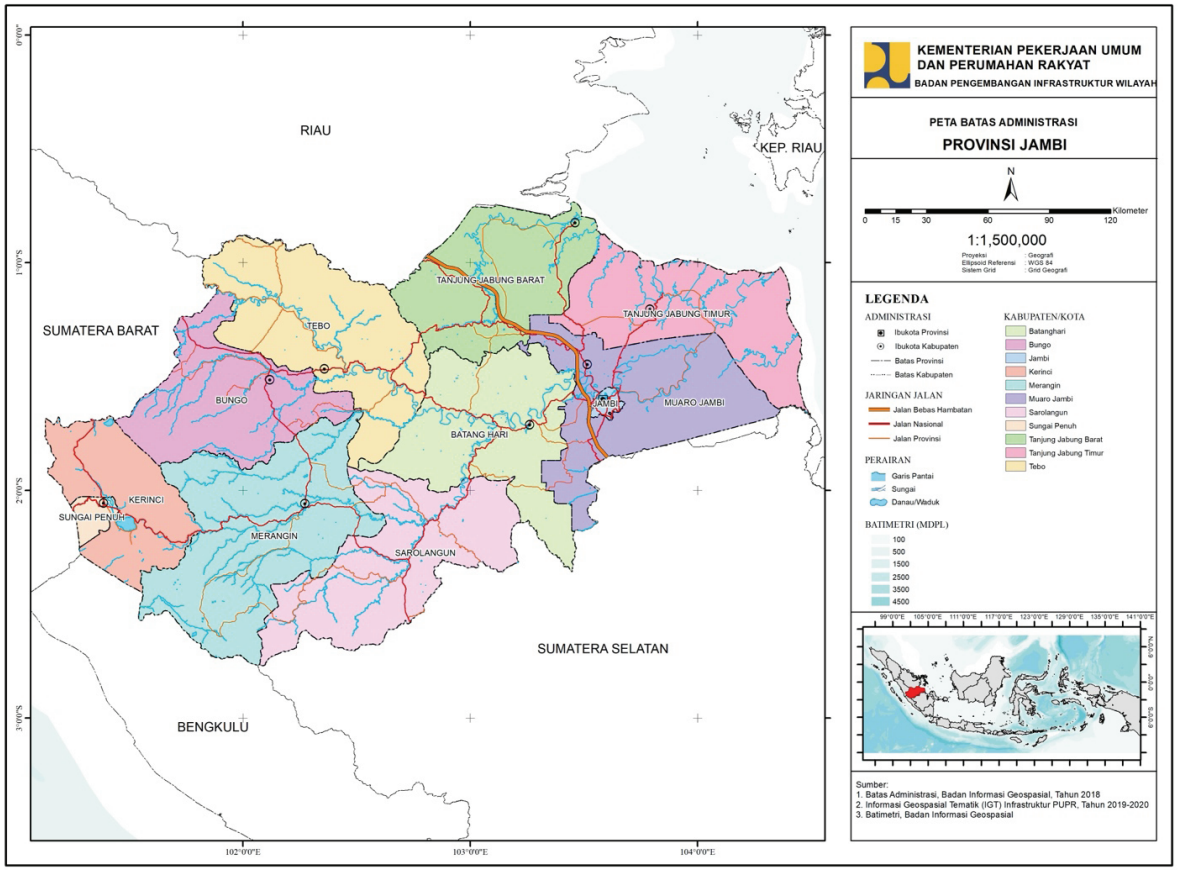
Secara geografis, letak Provinsi Jambi berada pada 0°45'-2°45' Lintang Selatan dan 101°10'-104°55 Bujur Timur dengan luasan wilayah 53.435 Km^2. Secara geomorfologis Provinsi Jambi terletak di bagian barat Cekungan Sumatera Bagian Selatan yang disebut Sub Cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera Timur. Bila ditinjau dari aspek administratif, batas-batas Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Sebelah Selatan: Provinsi Sumatera Selatan
Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu
Sebelah Timur : Selat Berhala dan Laut Cina Selatan

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi sebanyak 138 kecamatan dan 1.551 desa/ kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang mencapai 24 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci mencapai 287 desa/kelurahan.

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Kerinci	342.580,95	18	263	24
Merangin	557.092,62	24	207	8
Sarolangun	629.478,91	11	152	6
Batang Hari	757.380,53	8	117	7
Muaro Jambi	36.655,52	11	152	3
Tanjab Timur	596.240,27	11	80	13
Tanjab Barat	433.261,76	13	114	20
Tebo	459.110,38	12	109	3
Bungo	539.526,17	17	143	10
Kota Jambi	548.366,95	11	3	59
Kota Sungai Penuh	36.665,52	8	35	34

Sumber : Rupa Bumi Indonesia dan Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022



Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Jambi

Hidrologi. Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Berikut pada Tabel 3.2 adalah DAS yang berada pada Provinsi Jambi.

Tabel 3.2 Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi

Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Air Hitam Laut		**981.629**
	Muaro Jambi	548.366,95
	Tanjung Jabung Timur	433.261,76
Bantal		**757,381**
	Merangin	757.380,53
Batanghari		**4.916.759**
	Batanghari	539.526,17
	Bungo	459.110,38
	Kerinci	342.580,95
	Kota Jambi	17.064,79
	Kota Sungai Penuh	36.655,52
	Merangin	757.380,53
	Muaro Jambi	548.366,95
	Sarolangun	596.240,27
	Tanjung Jabung Barat	557.092,62
	Tanjung Jabung Timur	433.261,76
	Tebo	629.478,91
Dikit		**1.099.961**
	Kerinci	342.580,95
	Merangin	757.380,53
Gangsal		**1.186.572**
	Tanjung Jabung Barat	557.092,62
	Tebo	629.478,91
Indragiri		**629.479**
	Tebo	629.479
Indrapura		**379.236**
	Kerinci	342.580,95
	Kota Sungai Penuh	36.655,52
Ipuh		**757,381**
	Merangin	757,381

Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Manjunto Selagan		**1.099.961**
	Kerinci	342.580,95
	Merangin	757.380,53
Mendahara		**1.538.721,32**
	Muaro Jambi	548.366,95
	Tanjung Jabung Barat	557.092,62
	Tanjung Jabung Timur	433.261,76
Musi		**2.458.579**
	Batanghari	539.526,17
	Kota Jambi	17.064,79
	Merangin	757.380,53
	Muaro Jambi	548.366,95
	Sarolangun	596.240,27
Seblat		**757,381**
	Merangin	757,381
Sembilang/Benawang		**981,629**
	Muaro Jambi	548.366,95
	Tanjung Jabung Timur	433.261,76
Silaut		**379,236**
	Kerinci	342.580,95
	Kota Sungai Penuh	36.655,52
Tungkal		**2.707.726,41**
	Batanghari	539.526,17
	Muaro Jambi	548.366,95
	Tanjung Jabung Barat	557.092,62
	Tanjung Jabung Timur	433.261,76
	Tebo	629.478,91

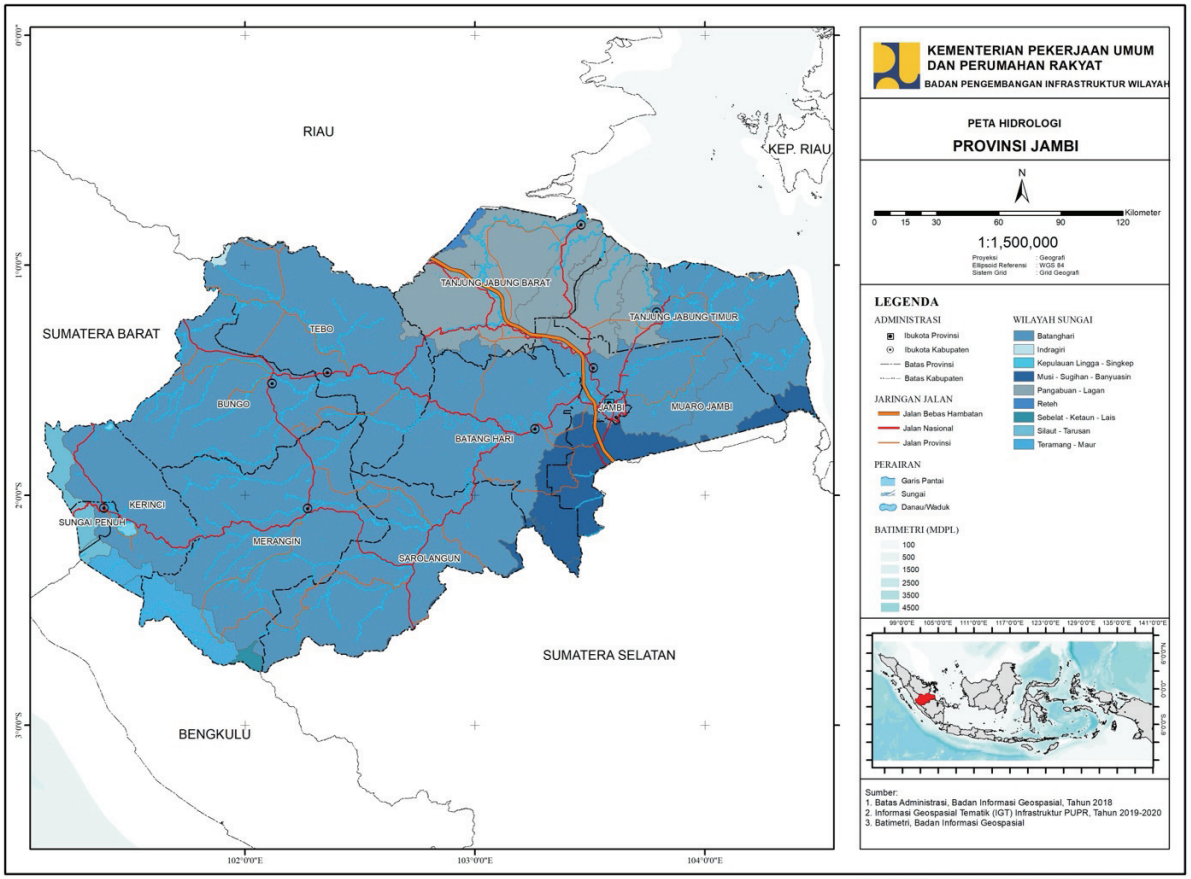
Sumber : Rupa Bumi Indonesia

Daerah aliran sungai (DAS) di Provinsi Jambi dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) meliputi, BPDAS Batanghari dengan cakupan kerja Provinsi Jambi-Sumatera Barat serta BPDAS Musi dengan cakupan kerja Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Sementara itu terdapat tujuh wilayah sungai yang mengalir di Provinsi Jambi dan dijabarkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Wilayah Sungai (WS) Provinsi Jambi

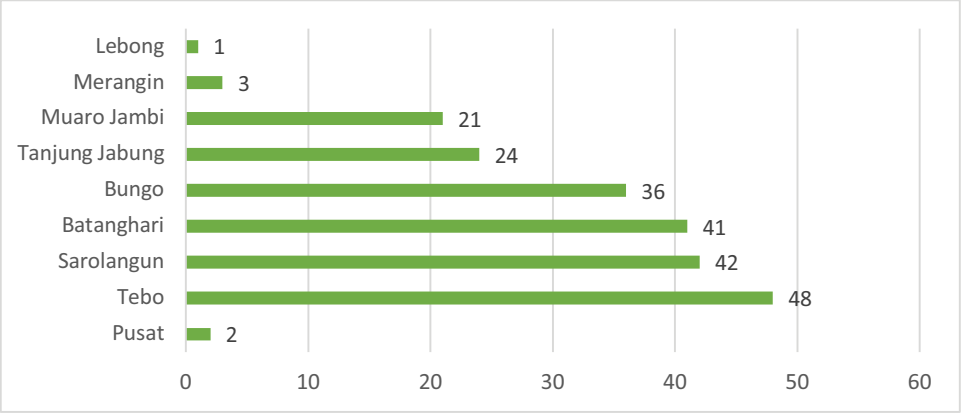
Wilayah Sungai (WS)	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Total
WS Batanghari	Batanghari	454.696,51	3.750.195,51
	Bungo	457.064,00	
	Kerinci	265.784,05	
	Kota Jambi	16.496,96	
	Kota Sungai Penuh	15.288,86	
	Merangin	657.547,07	
	Muaro Jambi	352.523,41	
	Sarolangun	582.540,10	
	Tanjung Jabung Barat	24.326,82	
	Tanjung Jabung Timur	307.703,88	
	Tebo	616.223,80	
WS Musi-Sugihan-Banyuasin	Batanghari	81.551,79	265.397,40
	Kota Jambi	491,78	
	Muaro Jambi	153.764,08	
	Sarolangun	11.024,91	
	Tanjung Jabung Timur	18.564,87	
WS Pangabuan-Lagan	Batanghari	874,23	666.953,84
	Muaro Jambi	39.635,35	
	Tanjung Jabung Barat	516.082,77	
	Tanjung Jabung Timur	104.579,70	
	Tebo	5.781,82	
WS Reteh	Tanjung Jabung Barat	13.634,09	13.634,52
	Tebo	0,43	
WS Sebelat-Ketahun-Lais	Merangin	10.311,46	10.335,93
	Sarolangun	24,47	
WS Silaut-Tarusan	Kerinci	41.704,89	62.908,22
	Kota Sungai Penuh	21.203,32	
WS Teramang-Muar	Kerinci	33.566,74	119.719,30
	Merangin	86.152,56	

Sumber : Rupa Bumi Indonesia



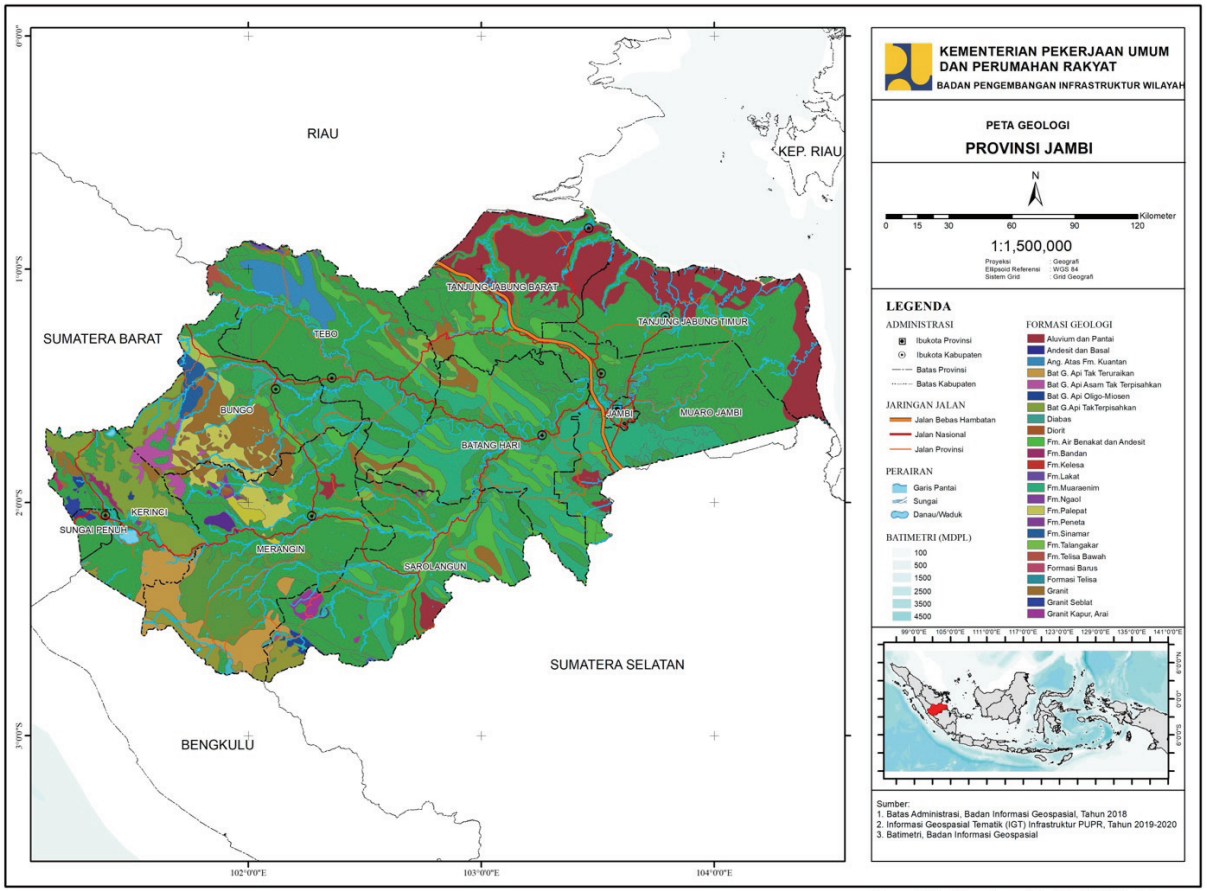
Gambar 3.2 Peta Hidrologi Provinsi Jambi

Geologi. Berdasarkan data dari Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Provinsi Jambi mempunyai banyak potensi sumber daya geologi, seperti mineral logam (besi primer. emas plaser. emas primer serta perak), mineral bukan logam, batuan *(ball/bond clay*. lempung. perlit. batugamping. bentonit. granit. marmer. tras serta andesit), bitumen padat, panas bumi, dan batubara. Terdapat 218 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dari total sebanyak 235 IUP. Pada gambar 3.4 mengenai grafik jumlah IUP pada tiap- tiap kabupaten di Provinsi Jambi tersaji info tersebut.



Gambar 3.3 Jumlah IUP Pada Tiap – tiap Kabupaten di Provinsi Jambi
Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2021

Berdasarkan data neraca cadangan sumber daya batubara Pusat Sumber Daya Geologi. terdapat 21 batubara yang berstatus tersedia pada tahun 2014 dimana 5 diantaranya adalah PKP2B dan 16 sisanya merupakan hasil kegiatan survei Pusat Sumber Daya Geologi.



Diproses oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, 2023

Gambar 3.4 Peta Geologi Provinsi Jambi

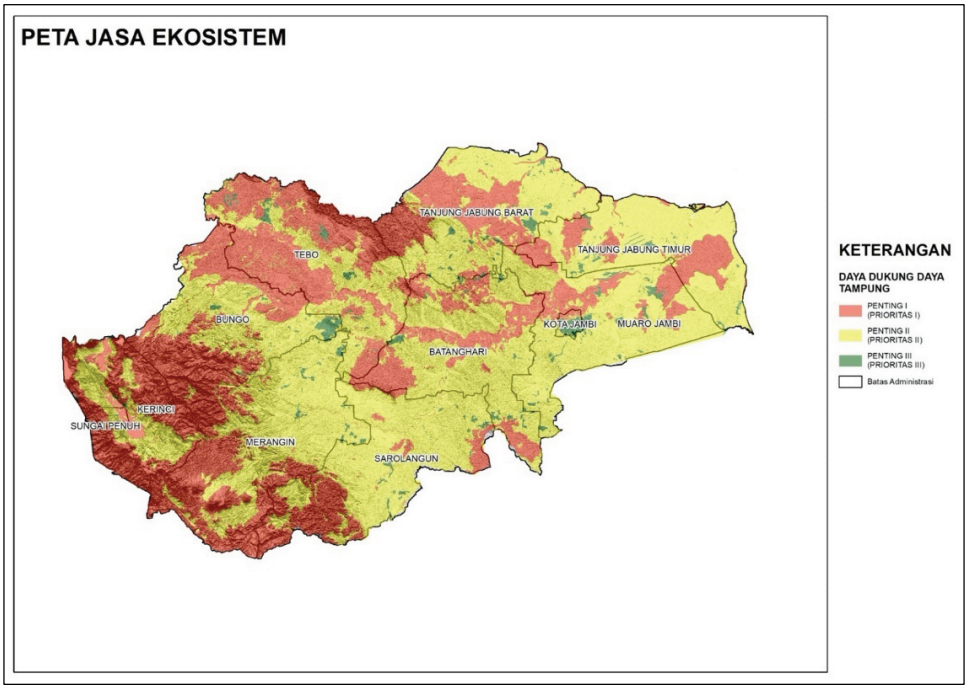
Jasa Ekosistem terdiri dari 2 yaitu jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih.

1. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

   Penyedia pangan kelas sangat tinggi terdapat di Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan sedikit wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

   Penyedia air kelas sangat tinggi terdapat di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Gambar 3.5 Peta Jasa Ekosistem Provinsi Jambi

Sumber : Olahan Data KLHK, 2022

Perubahan Tutupan Lahan. Tutupan lahan terbesar di Provinsi Jambi adalah perkebunan seluas 1.504.336,52 hektar atau sekitar 30,74% dari luas tutupan lahan keseluruhan di Provinsi Jambi. Dominasi tutupan lahan selanjutnya yaitu belukar sebesar 23,39%.

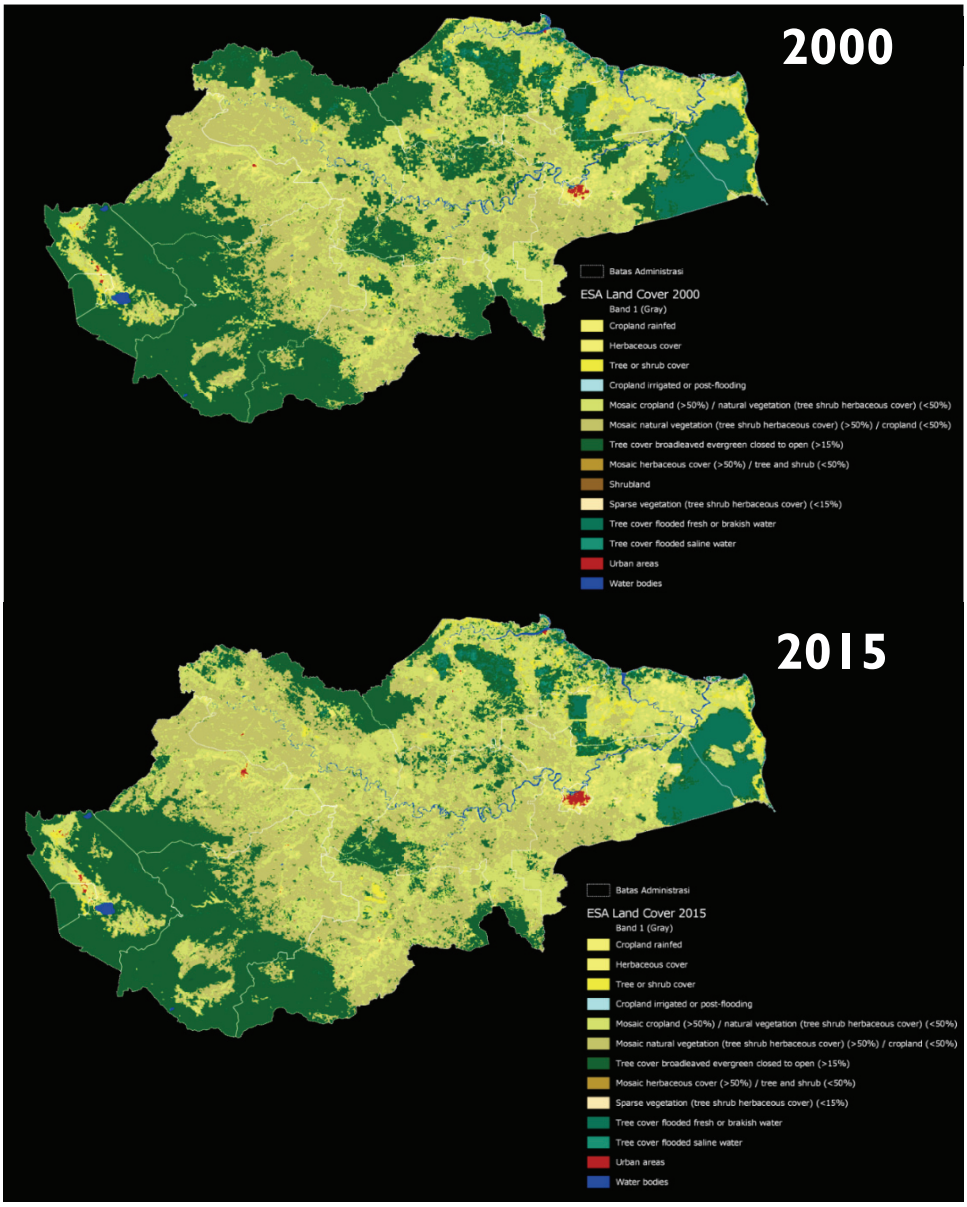
Tabel 3.4 Tutupan Lahan Provinsi Jambi

Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
Bandara / Pelabuhan	82,60	0,00%
Belukar	1.242.662,23	23,39%

Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
Belukar Rawa	245.779,39	5,02%
Hutan Lahan Kering Primer	555.626,13	11,35%
Hutan Lahan Kering Sekunder	272.938,11	5,58%
Hutan Mangrove Primer	236,20	0,00%
Hutan Mangrove Sekunder	6.545,83	0,13%
Hutan Rawa Primer	100.458,66	2,05%
Hutan Rawa Sekunder	69.143,55	1,41%
Hutan Tanaman	247.444,38	5,06%
Pemukiman	91.529,00	1,87%
Perkebunan	1.504.336,52	30,74%
Pertambangan	16.759,60	0,34%
Pertanian Lahan Kering	95.782,13	1,96%
Pertanian Lahan Kering Campur	270.882,09	5,54%
Savana / Padang rumput	84,13	0,00%
Sawah	19.240,11	0,39%
Tambak	211,98	0,00%
Tanah Terbuka	126.975,42	2,59%
Transmigrasi	27.041,77	0,55%
Total	**4.893.759,83**	**100,00%**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia

Berdasarkan hasil interpretasi citra Landsat tahun 2000 dan 2015, menggunakan kombinasi *band* terbaik untuk klasifikasi tutupan lahan dan pengamatan kebenaran objek-objek tutupan lahan secara visual di lapangan teridentifikasi menjadi 15 kelas tutupan lahan. Dari Gambar 3.8, dapat dilihat bahwa sepanjang 15 tahun, perkembangan kawasan perkotaan atau kawasan permukiman di Provinsi Jambi hanya terfokus ke Kota Jambi dan sekitarnya. Kemudian tutupan lahan hutan mengalami pengurangan yang cukup signifikan khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo.



Gambar 3.6 Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Jambi 2000 - 2015
Sumber: Olahan Citra Landsat, 2022

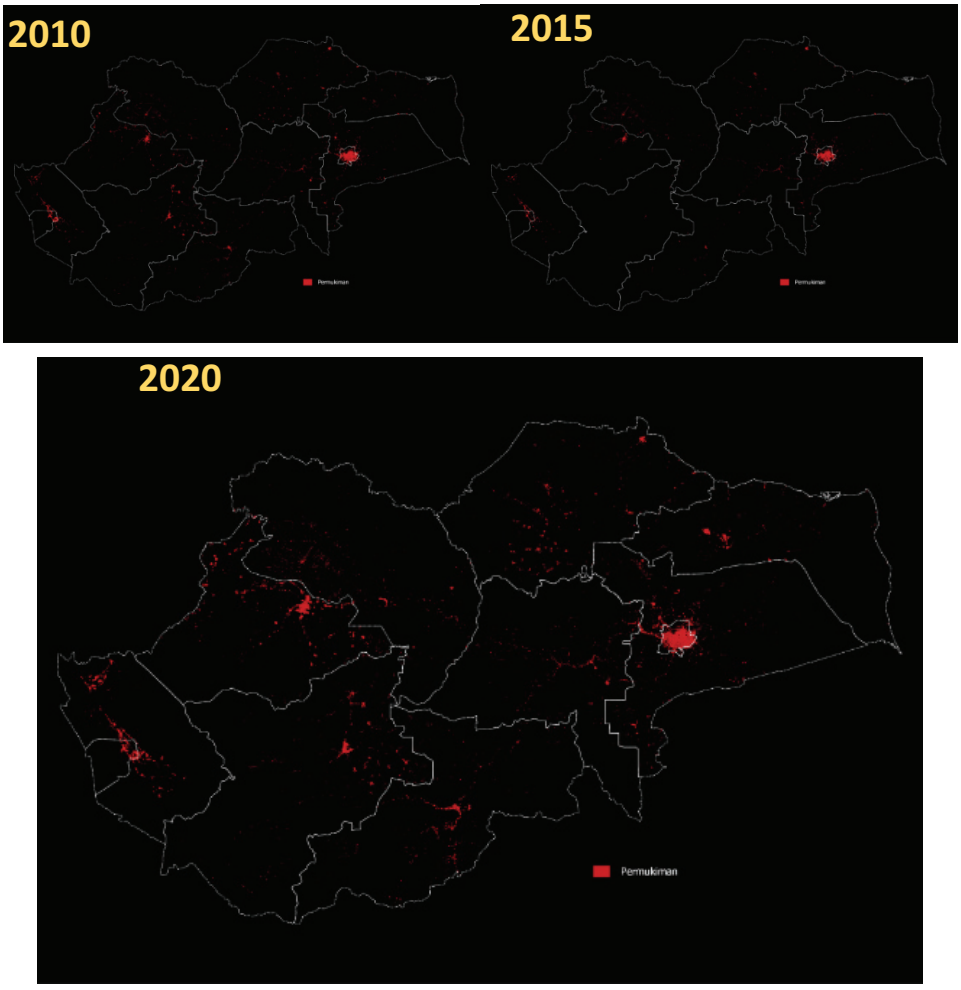
Jika ditinjau dari visualisasi perkembangan permukiman (Gambar 3.7), diketahui bahwa perkembangan permukiman dari taun 2010 hingga tahun 2020 di Provinsi Jambi mengalami kenaikan hingga 60%. Dimana pusat permukiman utama tetap berada pada Kota

Jambi dan sekitarnya yang menjalar secara linier disepanjang jaringan jalan utama.

Tabel 3.5 Perkembangan Luasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2020

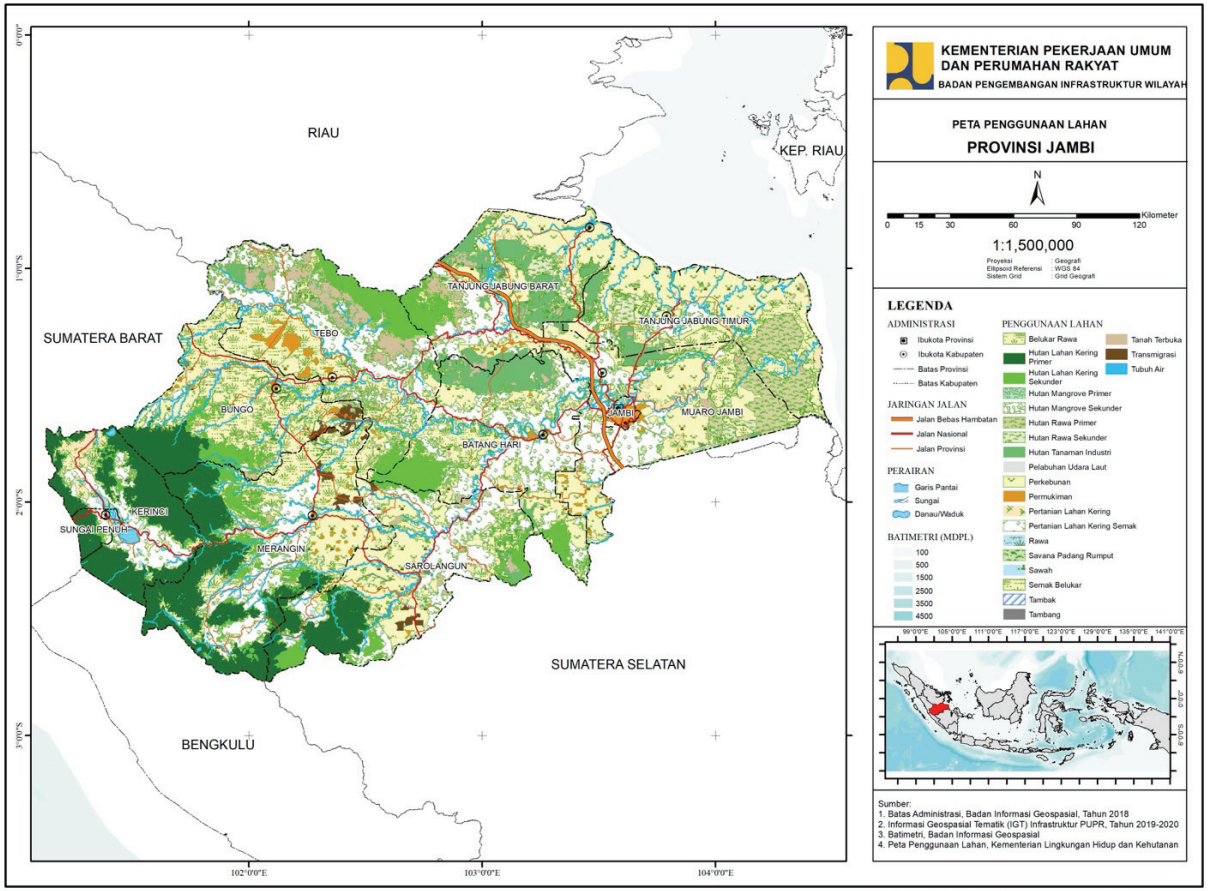
	Tahun 2010	Tahun 2015	Tahun 2020
Luasan (Ha)	285,487 Km^2	476,922 Km^2	651,716 Km^2

Sumber: WorldPop.org diolah, 2022



Gambar 3.7 Visualisasi Spasial Permukiman Provinsi Jambi 2010 – 2020

Sumber: WorldPop.org diolah, 2022



Diproses oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, 2023

Gambar 3.8 Peta Tutupan Lahan Provinsi Jambi

Indonesia terletak di wilayah yang rawan akan terjadi bencana. Wilayah Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik, bentuk negara kepulauan, serta terletak di wilayah tropis dengan kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana seperti angin puting beliung, gunung meletus, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Di sisi lain, tidak hanya bencana alam yang terjadi di Indonesia, melainkan juga bencana non alam yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi. Kondisi ini berkaitan dengan keberadaan Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kerawanan terhadap terjadinya bencana, berikut merupakan penjabaran mengenai rawan bencana dari Provinsi Jambi.

Tabel 3.6 Rawan Bencana Banjir Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Batanghari	86.262,33
Bungo	39.121,33
Kerinci	8.594,21
Kota Jambi	9.531,75
Kota Sungai Penuh	440,98
Merangin	106.713,63
Muaro Jambi	59284,37
Sarolangun	42.883,78
Tanjung Jabung Barat	50389,33
Tanjung Jabung Timur	72.562,72
Tebo	107.326,64
Total	**583.131,09**

Sumber: RTRW Provinsi Jambi, Tahun 2013-2033

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jambi memiliki potensi rawan terhadap bencana banjir. Terdapat total luasan sebesar 583.131,09 Ha yang rawan terhadap bencana banjir di Provinsi Jambi. Kabupaten Tebo menjadi wilayah yang memiliki luasan terluas yang rawan akan bencana banjir yaitu seluas 107.326,64 Ha atau 18,41% dari total keseluruhan wilayah yang rawan banjir di Provinsi Jambi.

Tabel 3.7 Rawan Bencana Kebakaran Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Batanghari	1.635,33
Bungo	9.525,04
Kerinci	-
Kota Jambi	-
Kota Sungai Penuh	-
Merangin	358,69
Muaro Jambi	52.324,09
Sarolangun	2499,02
Tanjung Jabung Barat	15.701,70
Tanjung Jabung Timur	32.665,06
Tebo	17.316,57
Total	**132.025,50**

Sumber: RTRW Provinsi Jambi, Tahun 2013-2033

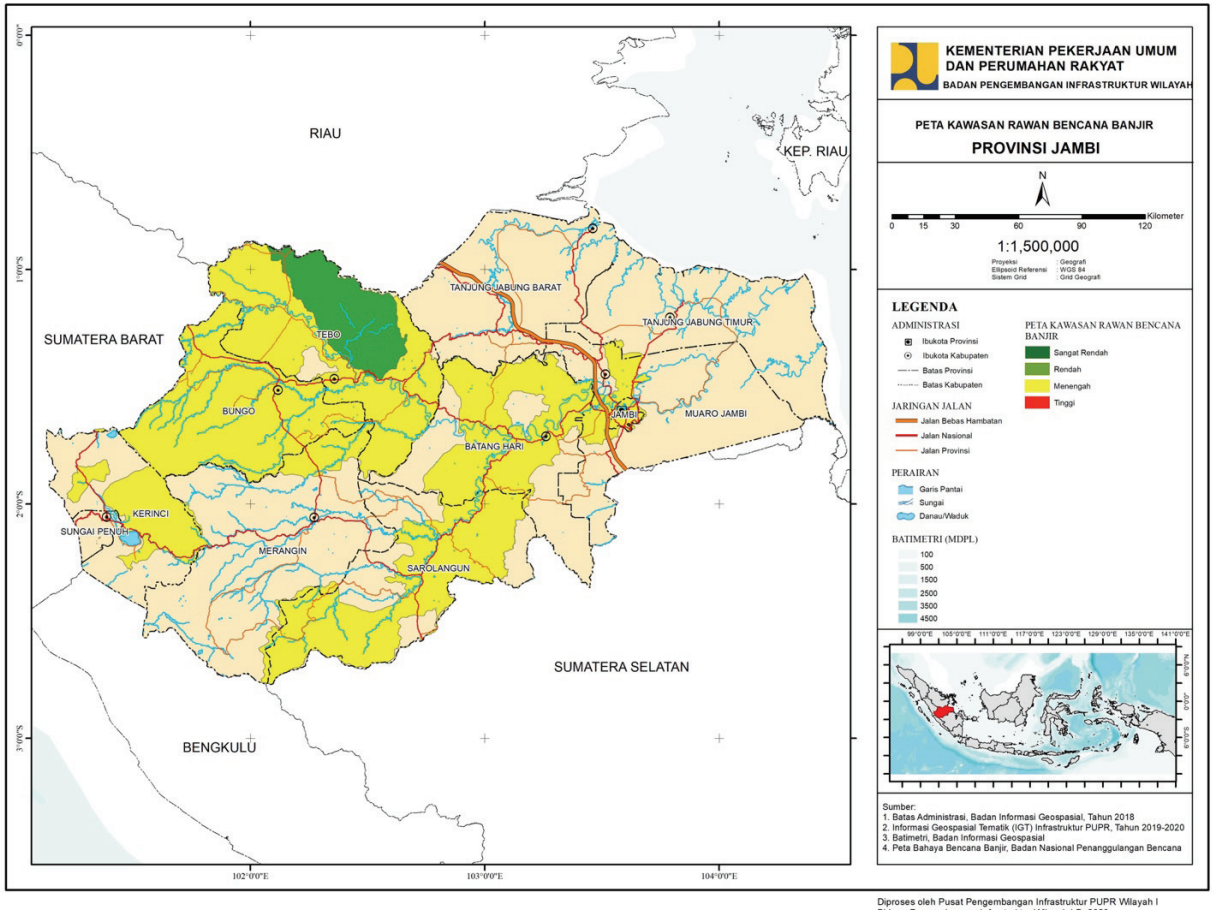
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat total keselurahan wilayah yang rawan terhadap bencana kebakaran adalah seluas 132.025,50. Kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang tidak memiliki kerawanan akan bencana kebakaran adalah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Sementara itu, Kabupaten Muaro Jambi menjadi wilayah yang memiliki luasan terluas yang rawan akan bencana banjir yaitu seluas 52.324,09 Ha atau 39,63% dari total keseluruhan wilayah yang rawan kebakaran di Provinsi Jambi.

Tabel 3.8 Rawan Bencana Gunung Api Provinsi Jambi

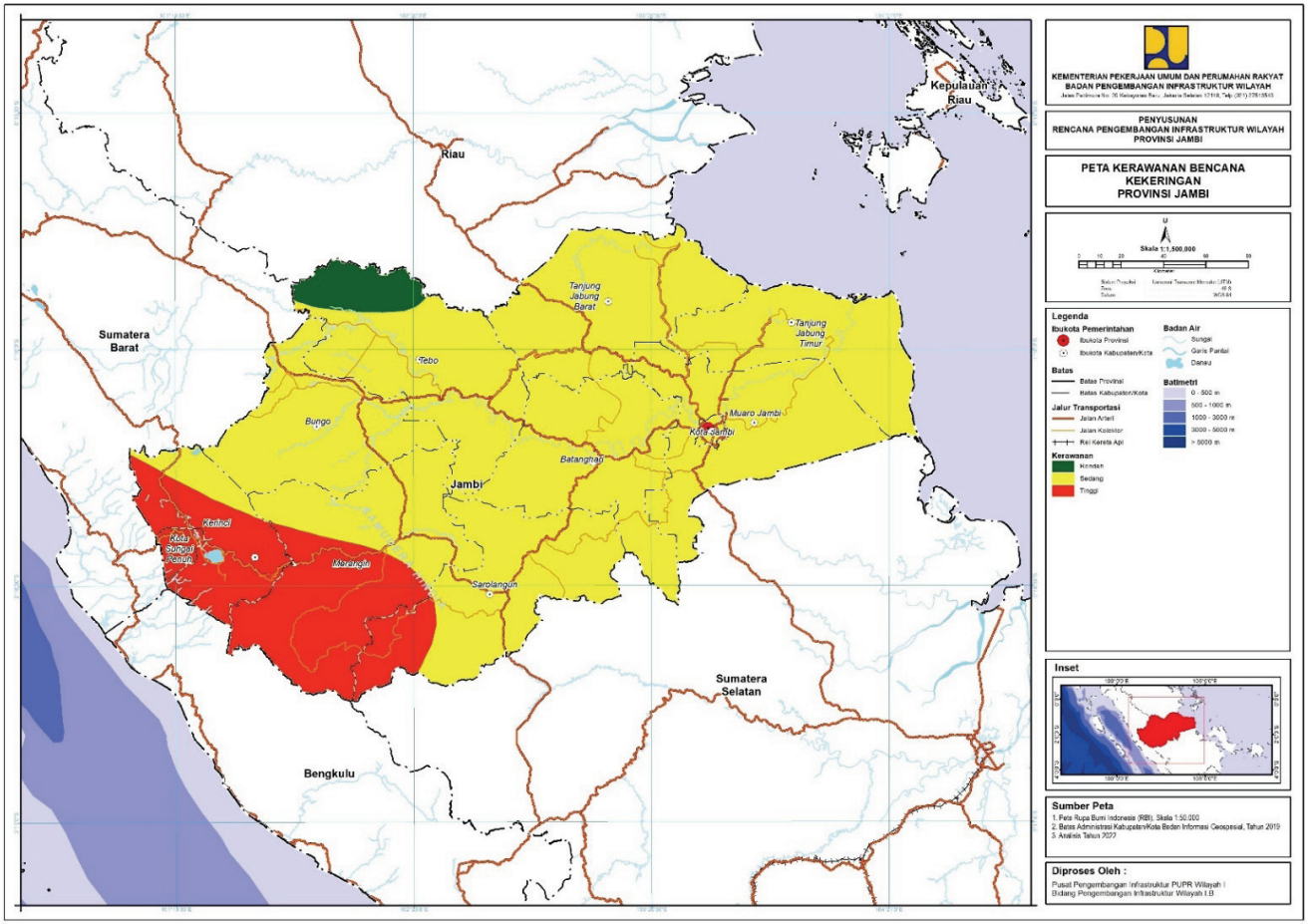
Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Kerinci	149.994,26

Sumber: RTRW Provinsi Jambi, Tahun 2013-2033

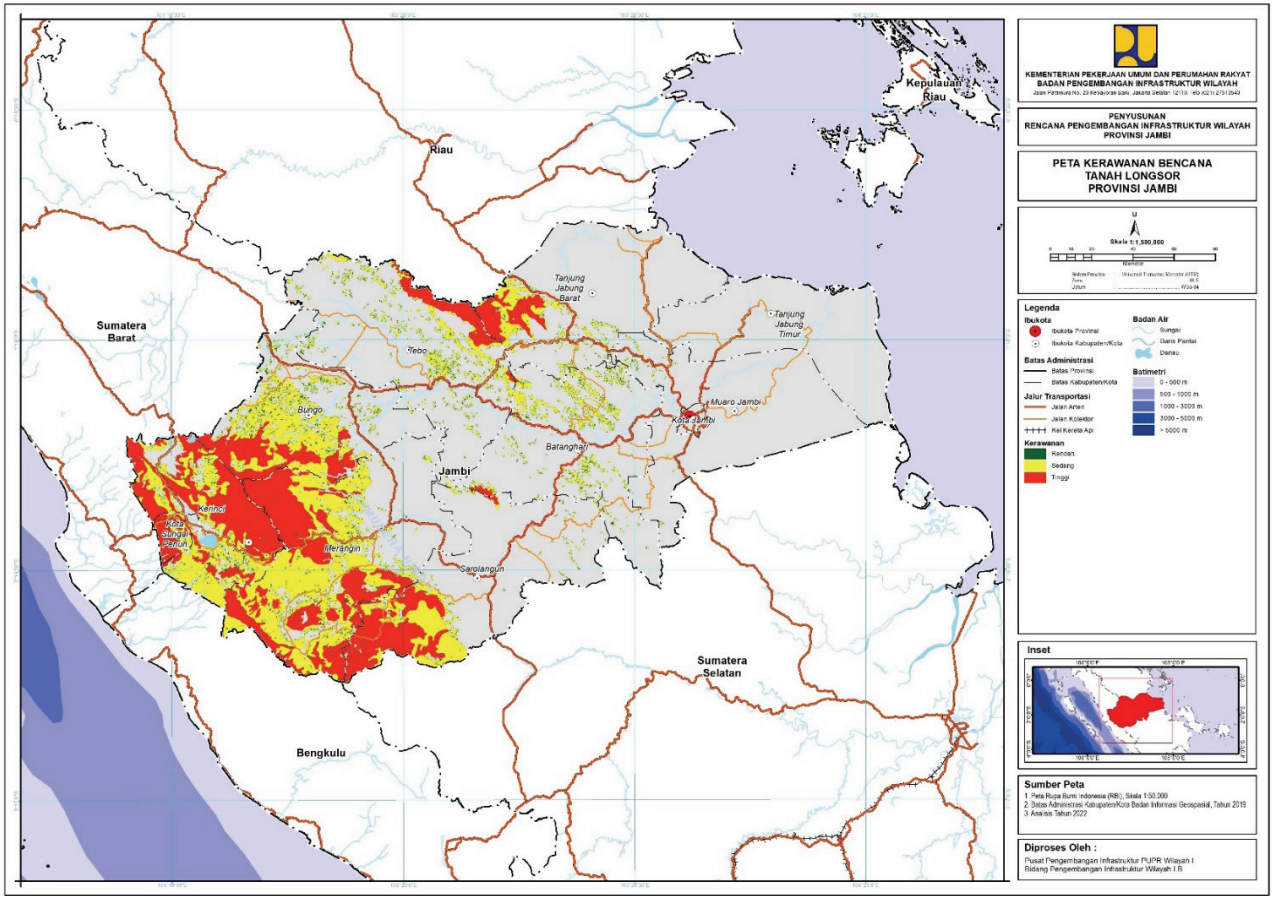
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Kerinci menjadi satu-satunya wilayah yang berpotensi terhadap rawan bencana gunung api di Provinsi Jambi. Terdapat kawasan seluas 149.994,26 Ha di Kabupaten Kerinci yang rawan bencana gunung api. Hal ini dikarenakan pada Kabupaten Kerinci terdapat aktivitas gunung api aktif yaitu Gunung Kerinci.



Gambar 3.9 Peta Bahaya Banjir Provinsi Jambi



Gambar 3.10 Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jambi



Gambar 3.11 Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di cekungan belakang busur bukit barisan yang juga banyak terdapat lahan gambut. Salah satu bencana yang terjadi hampir setiap tahun adalah kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan di Jambi termasuk dalam kategori terparah. Provinsi Jambi menduduki peringkat kedua sebagai provinsi penyumbang kebakaran hutan dan lahan terbanyak di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau.

Indeks Resiko Bencana. Berdasarkan tabel 3.10 dapat diketahui bahwa nilai IRB pada Provinsi Jambi sebesar 135.32 atau termasuk ke dalam kategori sedang. Ancaman bencana yang ada pada Provinsi Jambi yakni gempa bumi, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi, serta kebakaran hutan, dan lahan.

Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Risiko Bencana	Kelas Risiko Bencana
Kerinci	125.06	Tinggi
Merangin	166.00	Tinggi
Serolangun	131.44	Sedang
Batanghari	120.40	Sedang
Muaro jambi	127.31	Sedang
Tanjung Jabung Timur	156.40	Sedang
Tanjung Jabung Barat	143.88	Sedang
Tebo	131.20	Sedang
Bungo	143.20	Sedang
Kota Jambi	127.23	Sedang
Kota Sungai Penuh	116.44	Sedang

Sumber: IRBI, 2022

Kerawanan Bencana. Berdasarkan tabel 3.9, dapat diketahui bahwa Provinsi Jambi didominasi dengan tingkat kerawanan bencana banjir tinggi dengan persentase sebesar 60,92% dari total seluruh wilayah. Sementara itu, terdapat 37,17% wilayah dengan tingkat kerawanan sedang, dan 1,91% dengan tingkat kerawanan rendah. Kerawanan banjir dengan tingkat tinggi tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Tabel 3.10 Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

Kota / Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Banjir	Klasifikasi
Batanghari	1991,72	Rendah
	40543,78	Sedang
	106842,91	Tinggi
Bungo	609,56	Rendah
	23732,25	Sedang
	41586,80	Tinggi
Kerinci	112,66	Rendah
	4467,84	Sedang
	10089,60	Tinggi
Kota Jambi	80,71	Rendah
	2550,33	Sedang
	4890,09	Tinggi
Kota Sungai Penuh	8,21	Rendah
	773,98	Sedang
	2933,45	Tinggi
Merangin	864,49	Rendah
	27638,83	Sedang
	50113,71	Tinggi
Muaro Jambi	5709,45	Rendah
	122158,46	Sedang
	189199,72	Tinggi
Sarolangun	2679,01	Rendah
	58762,86	Sedang
	98291,88	Tinggi
Tanjung Jabung Barat	6893,29	Rendah
	125487,70	Sedang
	170094,31	Tinggi
Tanjung Jabung Timur	10205,74	Rendah
	146307,78	Sedang
	203711,26	Tinggi
Tebo	1531,72	Rendah
	44033,14	Sedang
	99807,93	Tinggi

Sumber : INARisk, 2022

Tabel 3.11 Bahaya Karhutla di Provinsi Jambi

Kota / Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Karhutla	Klasifikasi
Batanghari	44449,84	Rendah
	143084,72	Sedang
	324887,46	Tinggi
Bungo	30335,12	Rendah
	197833,83	Sedang
	141974,14	Tinggi

Kota / Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Karhutla	Klasifikasi
Kerinci	123205,60	Rendah
	15556,94	Sedang
	3199,05	Tinggi
Kota Jambi	972,54	Rendah
	2034,65	Sedang
	693,90	Tinggi
Kota Sungai Penuh	12068,72	Rendah
	499,57	Sedang
Merangin	135864,71	Rendah
	265552,56	Sedang
	92518,61	Tinggi
Muaro Jambi	1811,66	Rendah
	192557,20	Sedang
	303886,44	Tinggi
Sarolangun	66028,67	Rendah
	172371,97	Sedang
	246570,79	Tinggi
Tanjung Jabung Barat	28269,97	Rendah
	72267,94	Sedang
	425909,69	Tinggi
Tanjung Jabung Timur	82,13	Rendah
	99868,58	Sedang
	290372,98	Tinggi
Tebo	56044,54	Rendah
	186958,00	Sedang
	336211,34	Tinggi

Sumber : INARisk, 2022

Bedasarkan tabel 3.11, dapat diketahui bahwa Provinsi Jambi didominasi bencana bahaya karhutla dengan tingkat tinggi memiliki persentase sebesar 53,97% dari total seluruh wilayah yang tersebar di Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Merangin, Sarolangun, Bungo, Batang Hari, dan Kota Sungai Penuh.

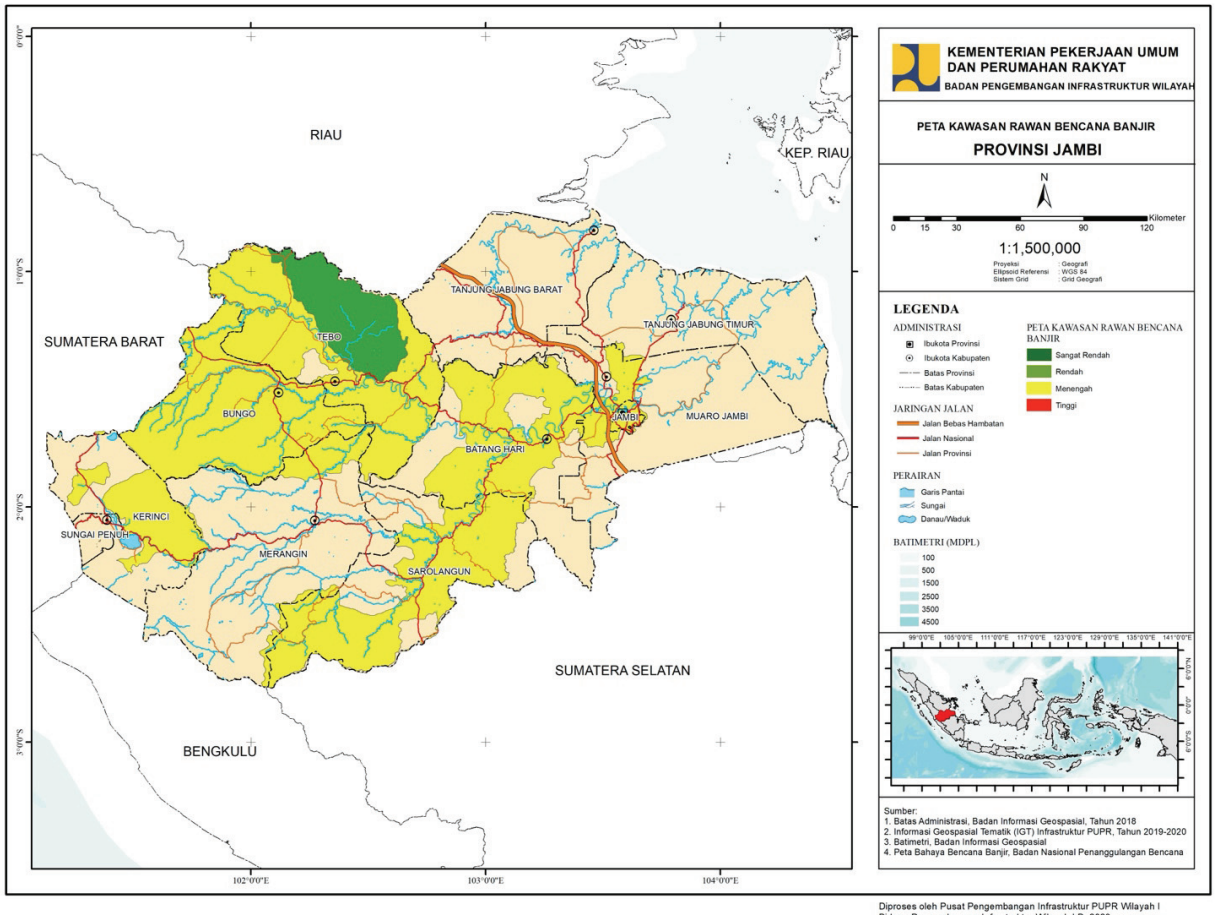
Tabel 3.12 Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Jambi

Kota / Kabupaten	Luas Wilayah Tanah Longsor	Klasifikasi
Batanghari	14411,12	Rendah
	44439,02	Sedang
	3060,83	Tinggi
Bungo	18883,52	Rendah
	130292,73	Sedang
	76772,49	Tinggi
Kerinci	9179,24	Rendah
	119163,15	Sedang

Kota / Kabupaten	Luas Wilayah Tanah Longsor	Klasifikasi
	158834,69	Tinggi
Kota Sungai Penuh	389,61	Rendah
	7374,40	Sedang
	23547,72	Tinggi
Merangin	16760,82	Rendah
	243500,60	Sedang
	207279,62	Tinggi
Muaro Jambi	1825,33	Rendah
	3243,26	Sedang
Sarolangun	4881,91	Rendah
	69308,23	Sedang
	98567,69	Tinggi
Tanjung Jabung Barat	5428,10	Rendah
	37216,21	Sedang
	36279,86	Tinggi
Tebo	14802,68	Rendah
	52140,04	Sedang
	37203,69	Tinggi

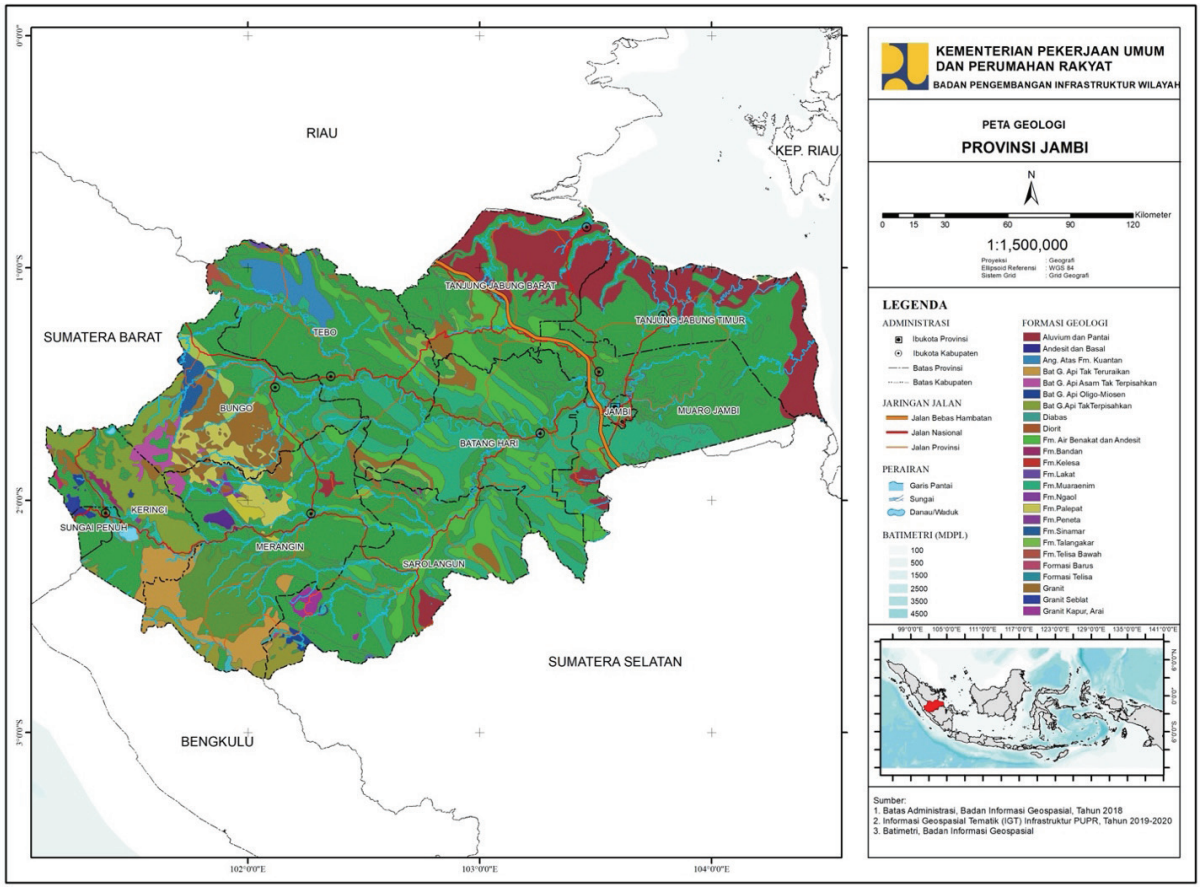
Sumber : INARisk, 2022

Berdasarkan tabel 3.12, dapat diketahui bahwa bencana longsor dengan tingkat tinggi memiliki persentase sebesar 44,71% dari total seluruh wilayah yang tersebar di Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Merangin, Sarolangun, Bungo, Batang Hari, dan Kota Sungai Penuh,



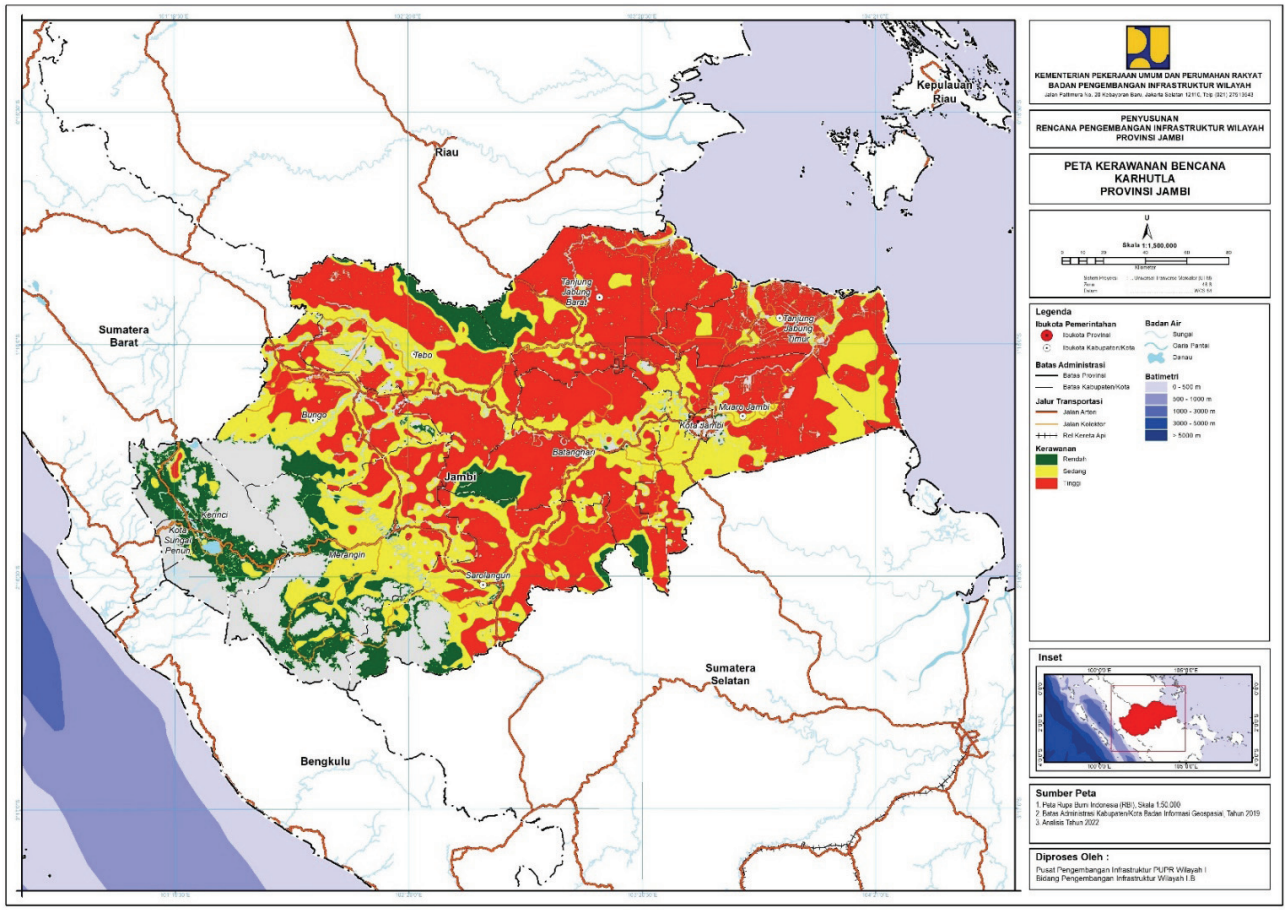
Diproses oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, 2023

Gambar 3.12 Peta Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

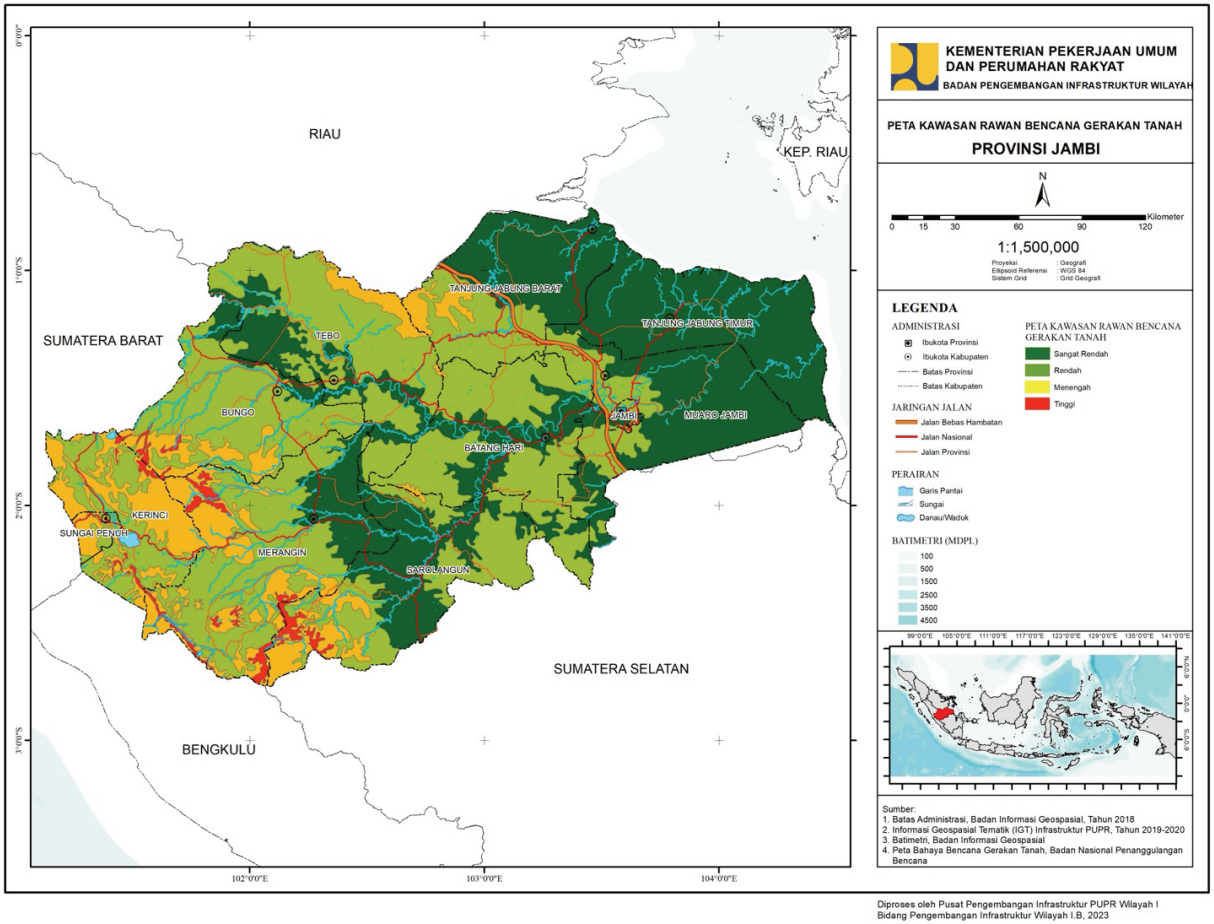


Diproses oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, 2023

Gambar 3.13 Peta Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Jambi



Gambar 3.14 Peta Bahaya Karhutla di Provinsi Jambi



Diproses oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, 2023

Gambar 3.15 Peta Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Jambi

3.2 Profil Demografi

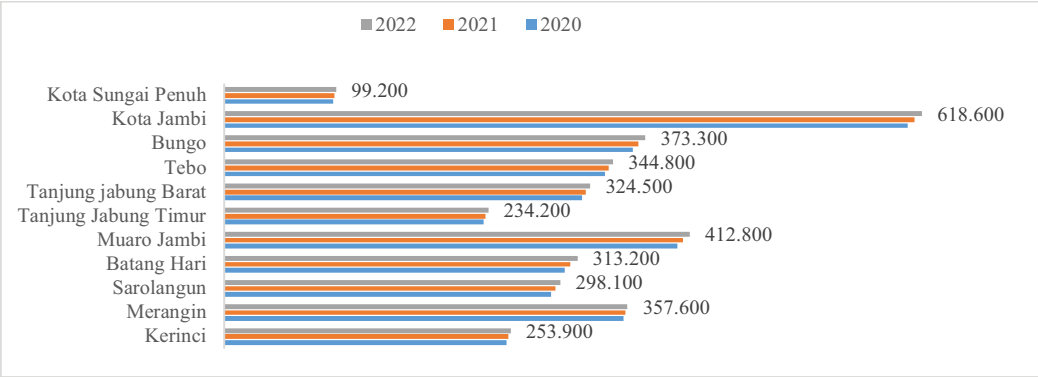
Perkembangan Jumlah Penduduk. Dengan adanya data jumlah penduduk beberapa tahun terakhir menjadi pertimbangan untuk proyeksi jumlah penduduk beberapa tahun kedepan. Adapun data jumlah penduduk menurut kabupaten/ kota di Jambi dapat dilihat pada tabel 3.13

Tabel 3.13 Perkembangan Jumlah Penduduk Povinsi Jambi 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	237.791	238.700	250.300	251.900	253.900
Merangin	383.480	388.900	354.100	355.700	357.600
Sarolangun	295.985	301.900	290.100	293.600	298.100
Batang Hari	269.966	272.900	301.700	306.700	313.200
Muaro Jambi	432.305	443.400	402.000	406.800	412.800
Tanjung Jabung Timur	218.413	220.000	229.800	231.800	234.200
Tanjung jabung Barat	328.343	333.900	317.500	320.600	324.500
Tebo	348.760	354.500	337.700	340.900	344.800
Bungo	367.182	374.500	362.400	367.200	373.300
Kota Jambi	598.103	604.700	606.200	612.200	618.600
Kota Sungai Penuh	89.944	90.900	96.600	97.800	99.200
Provinsi Jambi	**3.570.272**	**3.624.300**	**3.548.400**	**3.585.200**	**3.630.200**

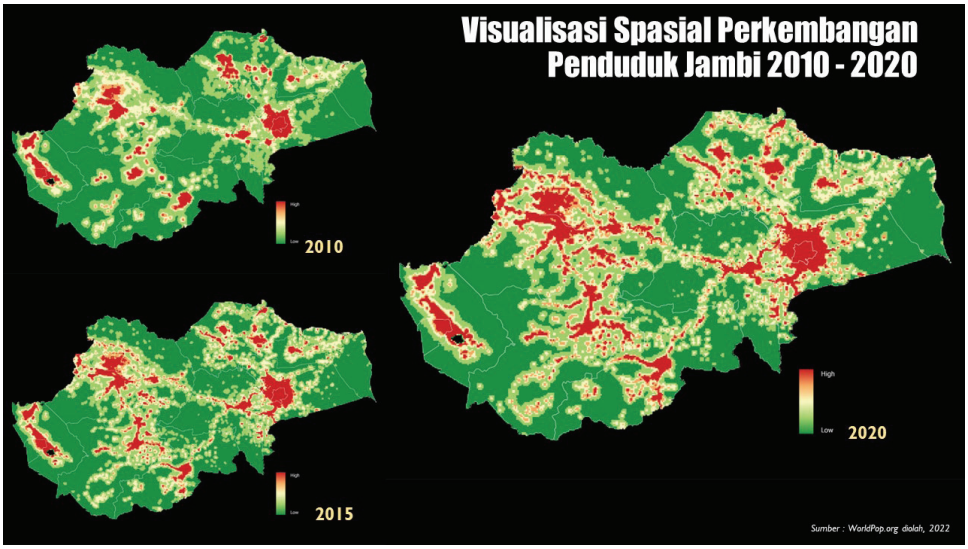
Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka. 2022

Kota Jambi menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi diantara kabupaten/kota yang lainnya, diikuti dengan Kabupaten Muaro Jambi. Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang paling terakhir dibentuk menjadi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit.



Gambar 3.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2020 - 2022

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka. 2023



Gambar 3.17 Visualisasi Spasial Perkembangan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2020

Sumber: WorldPop diolah. 2022

Kepadatan Penduduk. Jumlah penduduk dalam suatu wilayah berubah-ubah seiring berjalannya waktu. jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah ikut meningkat. kegunaan dalam mengetahui kepadatan penduduk dalam suatu wilayah adalah dapat membandingkan besarnya angka kelahiran dan kematian. dapat menghitung mortalitas dan natalitas pend6uduk. Selain itu, juga dapat

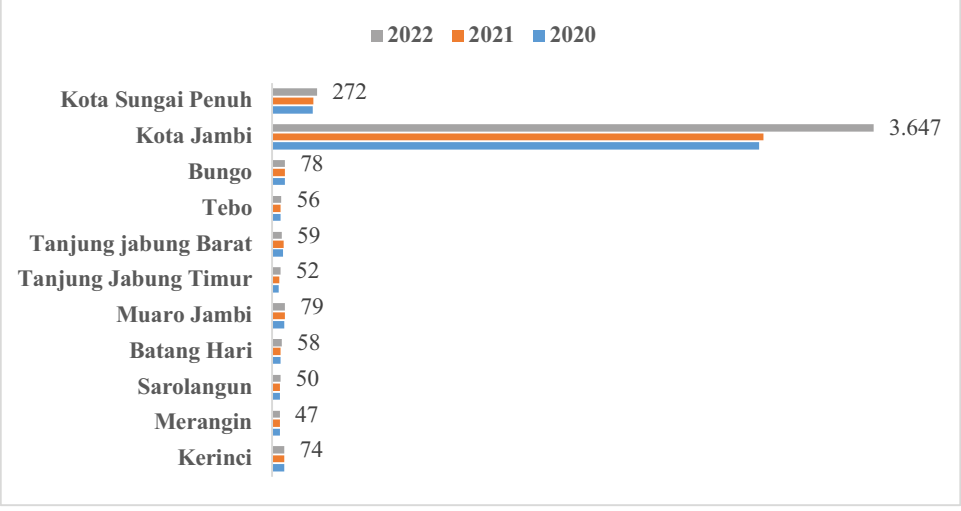
menghitung persentase pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Berikut tersaji data kepadatan penduduk Provinsi Jambi pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	71	71	75	75	74
Merangin	50	51	46	46	47
Sarolangun	48	49	47	48	50
Batang Hari	46	47	52	53	58
Muaro Jambi	81	83	75	76	79
Tanjung Jabung Timur	40	40	42	43	52
Tanjung jabung Barat	71	72	68	69	59
Tebo	54	55	52	53	56
Bungo	79	80	78	79	78
Kota Jambi	2.911	2.944	2.951	2.980	3.647
Kota Sungai Penuh	230	232	247	250	272

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2023

Kota Jambi menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 3.647 jiwa/ km^2. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk tahun 2022 di Provinsi Jambi yaitu sebesar 342 jiwa/km^2.



Gambar 3.18 Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi tahun 2018 - 2022

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2023

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin ditujukan untuk mengetahui struktur penduduk usia

produktif dan non-produktif yang didasarkan oleh jenis kelamin. Dengan mengetahui pengelompokan kriteria tersebut, dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan. Berikut merupakan data komposisi penduduk Provinsi Jambi menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Usia Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)							
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>65
Batanghari	21.182	58.071	55.486	50.084	50.822	36.460	22.353	12.407
Bungo	29.619	71.221	56.438	60.002	56.670	38.514	25.480	14.412
Kerinci	16.462	40.176	36.760	35.420	41.565	32.785	24.421	18.370
Kota Jambi	47.385	112.430	103.349	98.956	101.614	78.580	50.212	28.406
Kota Sungai Penuh	6.190	15.858	16.804	13.962	16.489	12.652	8.900	7.609
Merangin	26.377	71467	56.159	58.717	59.623	41.426	26.612	13.534
Muaro Jambi	30.494	72.320	61.696	65.644	68.959	49.513	27.764	13.568
Sarolangun	20.934	58.063	49.308	46.134	45.671	31.071	19.158	9.957
Tanjung Jabung Barat	23.114	62.229	58.198	50.517	52.491	38.804	22.486	13.252
Tanjung Jabung Timur	14.364	41.133	39.300	35.828	38.944	28.187	17.978	13.639
Tebo	21.883	64.887	55.373	55.483	58.476	40.572	24.755	14.265
Total	**258.004**	**667.855**	**588.841**	**570.777**	**591.324**	**428.564**	**270.119**	**159.419**

Sumber: Rest Service Kemendagri, 2022

Berdasarkan tabel 3.15 dapat diketahui pengelompokan penduduk di Provinsi Jambi menurut usia dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia 5-14 Tahun dan usia 35-44 tahun. Persentase penduduk usia 5-14 tahun adalah sebesar 18,89% dan usia 35-44 tahun sebesar 16,66% dari total penduduk Provinsi Jambi.

Pengelompokan penduduk menurut pekerjaan ditujukan untuk mengetahui tolak ukur dari struktur ekonomi di masyarakat pada suatu wilayah. Klasifikasi jenis pekerjaan masyarakat dapat dijadikan sebagai analisis untuk mengetahui penduduk dalam usia produktif maupun non-produktif sehingga dapat dijadikan sebagi dasar kebijakan pengurangan angka pengangguran pada suatu wilayah. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk menurut pekerjaan di Provinsi Jambi.

Tabel 3.16 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Provinsi Jambi 2021

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)										
	Belum/ tidak kerja	ASN	Tenaga Pendidik	Wiraswasta	Petani	Nelayan	Keagamaan	Pelajar/ Mahasiswa	Tenaga Kesehatan	Pensiunan	Lainnya
Batanghari	79.928	6.722	1.530	37.071	571.82	122	90	56.858	647	817	65.541
Bungo	111.765	8.431	1.133	44.317	60.025	41	97	46.510	661	902	78484
Kerinci	61.017	9.321	850	24.514	82.383	177	20	33.651	577	2.143	30.790
Kota Jambi	140.687	30.390	6.890	165.008	6.403	326	193	139.655	3.053	5.559	122.539
Kota Sungai Penuh	24.189	4.957	531	18.052	13.291	11	16	17.627	379	1.202	17.917
Merangin	93.018	8.188	1.650	41.304	73.661	38	176	58.965	1.164	867	74.674
Muaro Jambi	82.804	6.136	2.155	76.184	50.683	205	67	79.293	736	515	91.569
Sarolangun	82.310	5.894	1.549	38.321	44.941	35	86	46.951	634	394	58.313
Tanjung Jabung Barat	85.048	4.967	1.813	44.754	45.203	3.649	104	58.707	521	377	76.329
Tanjung Jabung Timur	65.466	3.680	797	21.028	45.984	4.880	58	31.370	276	168	55.499
Tebo	93.411	5.357	1.624	30.941	83.705	37	48	50.621	639	360	68.545
Jumlah	**919.643**	**94.043**	**20.522**	**541.494**	**506.279**	**9.521**	**955**	**620.208**	**9.287**	**13.304**	**740.200**

Sumber: Rest Service Kemendagri, 2022

Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. sehingga harus diketahui bagaimana perkembangan jumlah miskin dari tahun ke tahun serta presentasenya guna kebijakan yang diambil tepat sasaran. **Berikut data tingkat kemiskinan Provinsi Jambi** pada Tabel 3.17

Tabel 3.17 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi 2019 - 2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)			
	2019	2020	2021	2022
Kerinci	7,12	7,30	7,71	7,57
Merangin	8,45	8,63	9,11	8,70
Sarolangun	8,41	8,42	8,87	8,48
Batang Hari	9,72	9,65	10,05	9,63
Muaro Jambi	3,80	3,83	4,53	4,47
Tanjung Jabung Timur	**11,52**	**10,95**	**11,39**	**10,91.**
Tanjung jabung Barat	**10,52**	**10,29**	**10,75**	**10,00**
Tebo	6,44	6,26	6,68	6,34
Bungo	5,57	5,80	6,23	5,38
Kota Jambi	8,09	8,27	9,02	8,33
Kota Sungai Penuh	2,80	3,03	3,41	2,97
Provinsi Jambi	**7,57**	**7,58**	**8,09**	**7,62**

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi yaitu berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 10,91% dan 10,00%. Adapun total tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi yaitu sebesar 7,62%. Persentase tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan. kesehatan. pendidikan. dan sebagainya.

Tabel 3.18 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2019-2022

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
Kerinci	70.95	71.21	71.45	71,99

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
Merangin	69.07	69.19	69.53	69,98
Sarolangun	69.72	69.86	70.25	70,89
Batang Hari	69.67	69.84	70.11	70,51
Muaro Jambi	69.01	69.18	69.55	70,18
Tanjung Jabung Timur	63.92	64.43	64.91	65,77
Tanjung jabung Barat	67.54	67.54	68.16	68,79
Tebo	69.02	69.14	69.35	69,78
Bungo	69.86	69.92	70.15	70,55
Kota Jambi	78.26	78.37	79.12	79,58
Kota Sungai Penuh	75.36	75.42	75.7	76,17

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

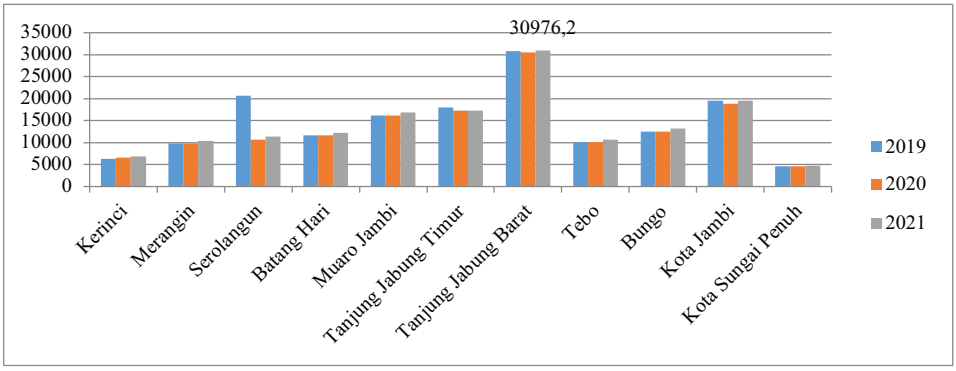
3.3 Profil Ekonomi

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat nasional (provinsi) menggambarkan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Tabel 3.19 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Kerinci	6.326,54	6.570,81	6.844,24
Merangin	9.787,46	9.869,18	10.371,68
Serolangun	20.727,75	10.690,79	11.397,73
Batang Hari	11.713,38	11.667,61	12.221,19
Muaro Jambi	16.126,72	16.186,86	16.847,01
Tanjung Jabung Timur	17.967,59	17.262,51	17.284,93
Tanjung Jabung Barat	30.744,99	30.559,42	30.976,20
Tebo	10.160,98	10.158,89	10.597,49
Bungo	12.549,93	12.494,42	13.133,52
Kota Jambi	19.550,81	18.775,82	19.515,49
Kota Sungai Penuh	4.607,81	4.600,23	4.768,84

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022



Gambar 3.19 Grafik PDRB ADHK Provinsi Jambi

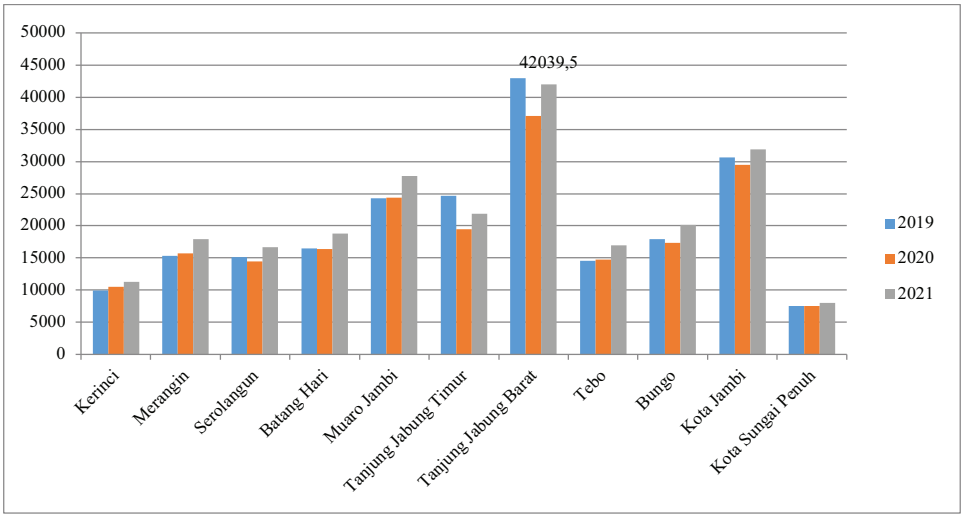
Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa penyumbang PDRB terhadap Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 terbesar yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.20 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Kerinci	9.912,47	10.466,73	11.291,29
Merangin	15.288,07	15.698,89	17.886,76
Serolangun	15.126,92	14.443,78	16.635,76
Batang Hari	16.463,29	16.401,51	18.810,82
Muaro Jambi	24.294,99	24.419,84	27.749,95
Tanjung Jabung Timur	24.680,30	19.475,30	21.881,30
Tanjung Jabung Barat	42.945,45	37.097,80	42.039,50
Tebo	14.593,44	14.746,66	16.960,38
Bungo	17.895,94	17.315,17	20.153,11
Kota Jambi	30.636,93	29.511,69	31.918,13
Kota Sungai Penuh	7.479,42	7.562,25	7.980,86

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022



Gambar 3.20 Grafik PDRB ADHB Provinsi Jambi

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

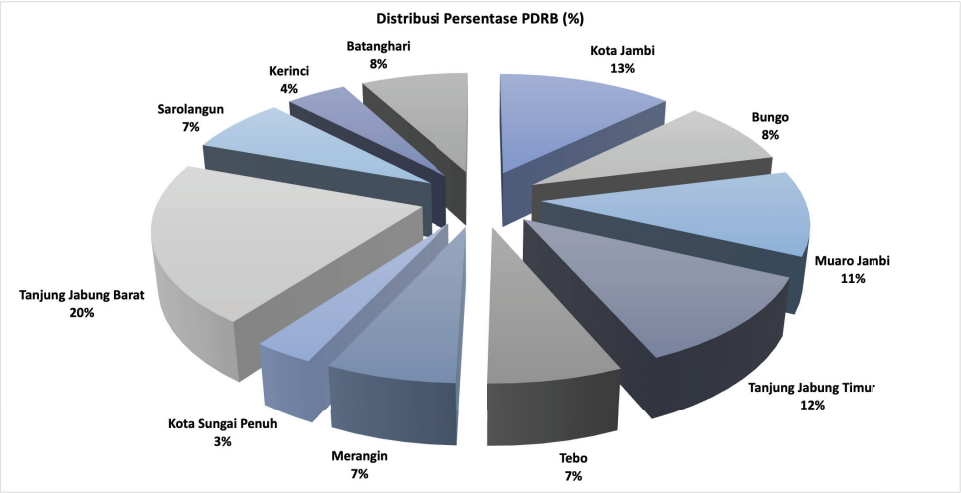
Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa penyumbang PDRB terhadap Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 terbesar yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara itu, sektor lapangan usaha juga berkontribusi dalam perkembangan PDRB termasuk pada Provinsi Jambi. Diketahui bahwa PDRB tertinggi pada tiap lapangan usaha terkonsentrasi di Kota Jambi dan distribusi persentase PDRB paling tinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berikut merupakan penjabaran mengenai kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi.

Tabel 3.21 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi

Distribusi Persentase PDRB (%)	Kabupaten/Kota										
	Kota Jambi	Bungo	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur	Tebo	Merangin	Kota Sungai Penuh	Tanjung Jabung Barat	Sarolangun	Kerinci	Batanghari
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,48	6,49	**17,14**	7,11	**13,36**	12,17	0,61	**17,00**	7,35	8,21	11,59
B. Pertambangan dan Penggalian	1,27	7,85	6,00	**27,46**	2,47	0,64	0,10	**36,85**	**8,61**	0,32	5,13
C. Industri Pengolahan	**14,23**	5,32	**16,99**	7,94	4,09	4,86	0,20	**35,68**	2,66	1,18	8,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	**45,23**	6,72	7,47	2,86	**8,63**	7,39	1,40	5,37	4,07	3,56	**7,83**
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	**22,23**	**13,04**	7,75	5,40	2,47	8,88	7,93	8,00	6,89	**11,19**	4,85
F. Konstruksi	**17,25**	**13,83**	8,06	7,19	6,42	6,41	5,20	12,51	**12,93**	5,63	7,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**36,88**	**10,45**	5,63	6,80	5,84	7,70	**8,44**	6,59	4,36	4,24	6,10
H. Transportasi dan Pergudangan	**47,28**	**7,41**	**12,37**	4,38	3,49	4,44	4,04	5,32	4,89	3,95	4,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**28,08**	**19,49**	6,21	3,44	2,34	12,25	3,17	7,57	**12,64**	3,43	2,80
J. Informasi dan Komunikasi	**18,53**	**11,28**	7,34	4,23	6,98	7,95	**12,01**	9,33	6,91	8,07	6,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	**34,35**	**13,67**	8,10	3,69	3,79	4,22	6,85	**8,95**	7,50	1,96	5,85
L. Real Estate	**23,09**	13,32	9,18	4,48	8,72	9,81	5,63	8,92	6,36	5,04	6,30
M.N. Jasa Perusahaan	**35,46**	1,62	11,92	**12,39**	0,41	0,88	**18,34**	21,16	1,65	0,17	0,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	**27,31**	7,50	**9,69**	5,92	6,41	6,69	4,94	8,74	8,01	6,87	**9,04**

Distribusi Persentase PDRB (%)	Kabupaten/Kota										
	Kota Jambi	Bungo	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur	Tebo	Merangin	Kota Sungai Penuh	Tanjung Jabung Barat	Sarolangun	Kerinci	Batanghari
P. Jasa Pendidikan	**18,63**	**12,59**	6,07	9,72	4,62	6,85	8,42	10,45	6,47	5,60	**11,15**
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	**30,09**	5,30	**9,51**	4,56	5,48	7,69	6,59	7,91	8,51	6,00	**9,33**
R.S.T.U. Jasa lainnya	10,05	5,23	**14,75**	3,27	**12,54**	9,59	7,19	10,59	**10,84**	7,01	8,19
Total Konstribusi PDRB	**12,74**	**8,43**	**10,91**	**11,64**	**6,84**	**6,65**	**3,10**	**20,58**	**7,23**	**4,42**	**7,86**

Sumber : Analisis BPIW, 2022



Gambar 3.21 Grafik Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing – masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Untuk Provinsi Jambi indeks kapasitas fiskal daerah 0,249 berada di kelas sagat rendah Nilai indeks tertinggi berada di Kota Jambi 1,37.

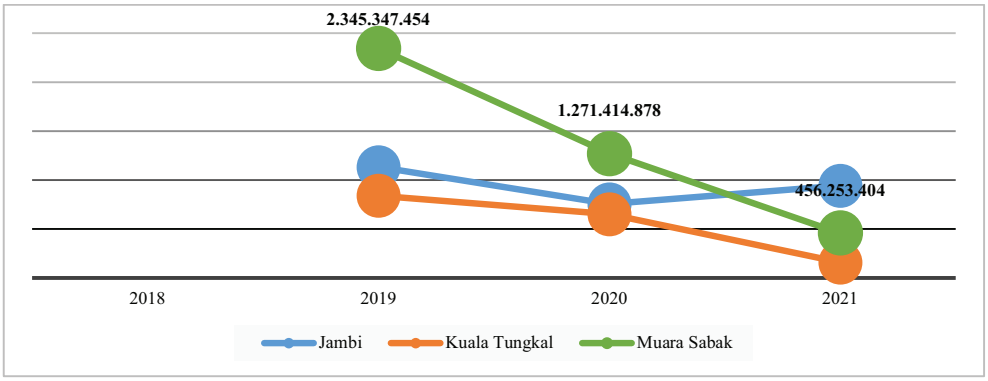
Tabel 3.22 Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal Daerah	Klasifikasi Fiskal Daerah Tahun 2021	Keterangan
Provinsi Jambi		0,249	Sangat Rendah	
1	Kerinci	0,547	Rendah	Rentang Kategori Kapasitas FIskal Daerah : 1. IKFD<0,275 (Sangat Rendah) 2. 0,275≤IKFD<0,458 (Rendah) 3. 0,458≤IKFD<0,863 (Sedang) 4. 0,863≤IKFD<1,745 (Tinggi)
2	Merangin	0,562	Rendah	
3	Sarolangun	0,68	Rendah	
4	Batanghari	0,854	Sedang	
5	Muaro Jambi	0,834	Sedang	
6	Tanjung Jabung Timur	0,667	Rendah	
7	Tanjung Jabung Barat	0,885	Sedang	
8	Tebo	0,616	Rendah	
9	Bungo	0,704	Rendah	

No	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal Daerah	Klasifikasi Fiskal Daerah Tahun 2021	Keterangan
10	**Kota Jambi**	**1,37**	**Tinggi**	5. IKFD≥1,745 (Sangat Tinggi)
11	Kota Sungai Penuh	0,443	Sangat Rendah	

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 116 Tahun 2021

Investasi dan Volume Ekspor. Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) pelabuhan muat yaitu Pelabuhan Muat Jambi, Pelabuhan Muat Kuala Tungkal, Pelabuhan Muat Muara Sabak dan Pelabuhan Muat Palmerah/Sultan Thaha. Nilai ekspor tertinggi pada tahun 2021 diperoleh dari Pelabuhan muat Muara Sabak sebesar 2.200,5 ton dan nilai ekspor terbesar berasal dari Pelabuhan muat Jambi sebesar US$ 942.466.757. Ditahun 2020 volume ekspor Provinsi Jambi sebesar 2.681,7 ribu ton dan ditahun 2021 meningkat menjadi 3.963,9 ribu ton, khususnya di pelabuhan muat Jambi.



Gambar 3.22 Nilai Ekspor Berdasarkan Pelabuhan Muat di Provinsi Jambi Tahun 2020-2021

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

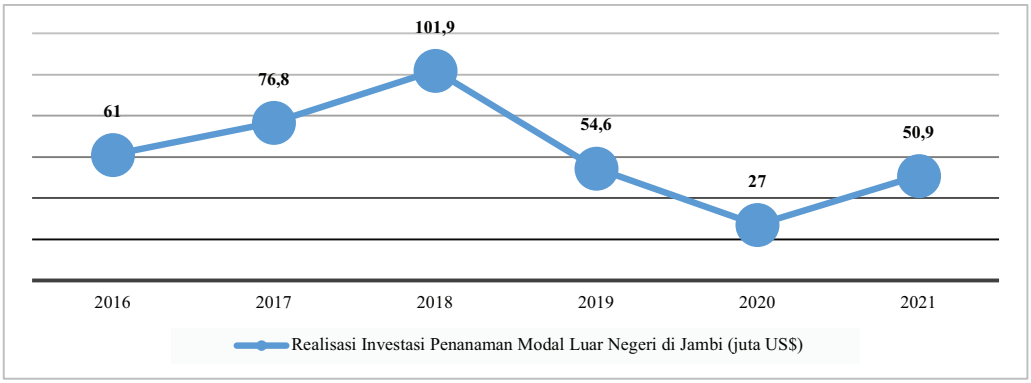
Pada tahun 2021, sebagian besar ekspor Provinsi Jambi terdiri atas bahan bakar mineral dengan nilai sekitar 1,32 miliar US dollar atau sekitar 55,60% dari total ekspor berdasarkan komoditas. Hal ini dikarenakan Provinsi Jambi memiliki potensi bahan bakar mineral batu bara, kilang minyak dan terminal LPG yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tebo.

Tabel 3.23 Ekspor Komoditi di Provinsi Jam

Jenis Komoditi	Volume Ekspor (Kg)	
	2020	2021
Ampas/Sisa Industri Makanan	311.810	384.295
Bahan bakar mineral	3.614.026.902	5.123.794.419
Bahan kimia organik	9	0
Bahan-bahan nabati	998.479.558	1.401.271.920
Barang kiriman	619	375
Barang-barang rajutan	138	1
Berbagai barang buatan pabrik	923.029	1.286.396
Berbagai barang logam dasar	240	0
Berbagai makanan olahan	43.720	54.001
Berbagai produk kimia	3.957.570	1.290.00
Biji-bijian berminyak	2.471.275	4.722.494
Binatang hidup	6.617	20.785
Buah-buahan	97.442.612	117.744.454
Bubur kayu/pulp	139.346.966	78.186.136
Daging dan ikan olahan	5.150	0
Garam, belerang, kapur	0	15
Gula dan kembang gula	15.000	26.000
Ikan dan udang	11.358	0
Karet dan barang dari karet	290.325.335	285.672.393
Kayu, barang dari kayu	63.047.717	57.535.362
Kertas/karton	103.192.630	21.514.265
Kopi, teh, rempah-rempah	7.985.507	8.373.054
Lak, getah, dan damar	45.550	114.180
Lemak & minyak hewan/nabati	139.582.285	120.070.399
Lokomotif dan peralatan kereta api	363.968	540.736
Mesin.peralatan listrik	2.893	30
Mesin-mesin/pesawat mekanik	38.490	3
Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian	512	51
Olahan dari buah-buahan/sayuran	0	1.500
Olahan dari tepung	0	3
Pakaian jadi bukan rajutan	0	2
Perangkat optik	63	0
Perhiasan/permata	0	17
Perkakas, perangkat potong	12	0
Plastik dan barang dari plastik	45	0
Sabun dan preparat pembersih	104	3
Sari bahan samak & celup	0	14.336
Sayuran	25	45
Serat tekstil dan benang kertas	4.19.710	501.095
Susu, mentega, telur	78.099	127.870

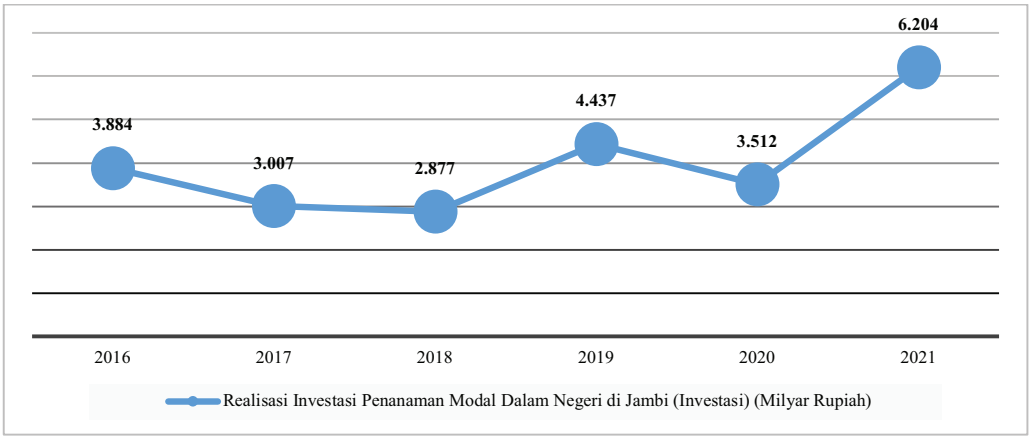
Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

Selain itu, ditinjau dari realisasi investasi penanaman modal luar negeri, Provinsi Jambi mengalami penurunan drastis pada tahun 2019 hingga 2020, kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2021. Sedangkan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan pada tahun 2019 tetapi terjadi penurunan di tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 mengalami pandemi covid sehingga berpengaruh pada perekonomian daerah terutama nilai investasi di Provinsi Jambi.



Gambar 3.23 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022



Gambar 3.24 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

Tabel 3.24 Komoditas Ekspor Provinsi Jambi Tahun 202

Komoditi	Total Nilai (US $)	% Komoditas Ekspor
A. Pertanian	64.343.797	9,39%
• Ikan dan Udang	-	-
• Pinang	54.711.008,0	7,98%
• Kopi, Teh, Rempah-Rempah	9.632.789,0	1,41%
• Lainnya		0,00%
B. Industri	104.495.106	15,25%
• Daging, ikan dan udang olahan	-	-
• Makanan Olahan	-	-
• Minyak Nabati	104.495.106	15,25%
• Karet & Olahannya	162.755.671	23,75%
• Kayu Lapis dan Olahan lainnya	16.387.893	2,39%
• Kertas/Pulp	1.324.553	0,19%
• Arang	22.922	0,00%
• Lainnya	401.408	0,06%
C.Pertambangan	516.469.232	75,36%
• Migas	422.909.375	61,71%
• Pertambangan Lainnya	93.559.857	13,65%
• Batubara	93.559.857	13,65%
• Lainnya	-	-
Total Ekspor Non Migas [Melalui Pelabuhan Jambi]	**262.398.760**	**38,29%**
Total Ekspor Migas	**422.909.375**	**61,71%**
Total Ekspor (Melalui Pelabuhan Jambi)	**685.308.135**	**100,00%**

Sumber : Disperindag, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai ekspor non migas berasal dari sektor pertanian, industri dan batubara. Komoditas ekspor terbesar adalah pertambangan sebesar 75,36% dari total komoditas ekspor. Provinsi Jambi memiliki potensi yang menjadi dasar dalam mendukung pengembangan wilayah, berikut **potensi -potensi di Provinsi Jambi :**

Potensi dari sektor pertanian dan pangan di Provinsi Jambi merupakan salah satu penunjang perekonomian wilayah. Potensi

ini dijabarkan melalui kondisi luas panen, produktivitas, dan produksi serta luas lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Berikut pada Tabel 3.25 penjabaran data luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2021.

Tabel 3.25 Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
Kerinci	18.028,64	54,15	97.617,81
Merangin	5.898,26	42,31	24.953,70
Serolangun	4.041,16	36,76	14.854,07
Batang Hari	5.422,96	43,64	23.663,43
Muaro Jambi	4.130,09	38,78	16.018,11
Tanjung Jabung Timur	7.423,50	42,41	31.483,91
Tanjung Jabung Barat	6.719,04	43,11	28.966,10
Tebo	4.845,03	49,02	23.749,63
Bungo	4.401,03	36,23	15.946,24
Kota Jambi	367,20	43,30	1.590,14
Kota Sungai Penuh	5.966,42	63,65	37.973,67
Jambi	**67.243,33**	**47,11**	**316.816,81**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel 3.24 diketahui sebaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan luas panen, produktivitas, dan produksi padi. Tingkat produktivitas padi tertinggi di Kota Sungai Penuh 37.973,67 ton dan luas panen tertinggi di Kabupaten Kerinci 18.028,64 Ha.

Tabel 3.26 Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)	Produksi Beras (ton)
Kerinci	97.617,81	56.178,45
Merangin	24.953,70	14.360,71
Serolangun	14.854,07	8.548,44
Batang Hari	23.663,43	13.618,15
Muaro Jambi	16.018,11	9.218,33
Tanjung Jabung Timur	31.483,91	18.118,79
Tanjung Jabung Barat	28.966,10	16.669,79
Tebo	23.749,63	13.667,77
Bungo	15.946,24	9.176,98
Kota Jambi	1.590,14	915,11

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)	Produksi Beras (ton)
Kota Sungai Penuh	37.973,67	21.853,62
Jambi	**316.816,81**	**182.326,14**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel 3.25 diketahui produksi padi dan beras pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci merupakan wilayah dengan jumlah produksi padi terbesar di Provinsi Jambi sebesar 97.617,81 ton.

Tabel 3.27 Luas Lahan Tidak diusahakan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Tegal/Kebun (ha)	Ladang/Huma (ha)	Sementara Tidak diusahakan (ha)
Kerinci	40.326	30.517	8.189
Merangin	63.478	71.623	49.339
Serolangun	10.147	18.032	33.483
Batang Hari	28.690	16.192	29.043
Muaro Jambi	37.098	34.946	12.465
Tanjung Jabung Timur	16.640	12.552	10.459
Tanjung Jabung Barat	4.727	259	5.159
Tebo	32.015	9.543	49.261
Bungo	36.402	23.622	55.620
Kota Jambi	697	248	2.229
Kota Sungai Penuh	686	2.307	626
Jambi	**270.906**	**219.841**	**255.870**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan Tabel 3.26 diketahui sebaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan luas lahan tegal/kebun, luas lahan ladang/huma, dan luas lahan sementara tidak diusahakan. Kabupaten Merangin merupakan wilayah yang memiliki luas lahan tegal/kebun dan ladang/gulma terluas di Provinsi Jambi yaitu masing-masing seluas 18.028,64 Ha dan 71.623 Ha. Sementara itu, Kabupaten Bungo memiliki luas lahan semetara tidak diusahakan terluas sebesar 55.620 Ha.

Potensi dari sektor perkebunan di Provinsi Jambi merupakan salah satu penunjang perekonomian wilayah. Potensi ini dijabarkan melalui kondisi luas areal tanaman perkebunan serta hasil produksi

perkebunan di Provinsi Jambi. Berikut pada Tabel 3.27 penjabaran data luas areal tanaman perkebunan menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2021.

Tabel 3.28 Luas Areal Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi 2021

Kabupaten/ Kota	Kelapa Sawit (ha)	Kelapa (ha)	Karet (ha)	Kopi (ha)	Kakao (ha)	Tebu (ha)	Teh (ha)	Tembakau (ha)
Kerinci	84,00	37,00	1.871,00	9.231,00	220,00	1.932,00	1.707,61	9,00
Merangin	71.125,00	1.341,00	138.203,00	11.548,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Serolangun	37.495,00	599,00	126.425,00	694,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Batang Hari	53.152,00	315,00	113.531,00	7,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Muaro Jambi	136.404,95	892,00	55.888,00	94,00	856,00	0,00	0,00	0,00
Tanjung Jabung Timur	33.872,00	58.912,00	7.756,00	3.450,40	441,00	0,00	0,00	0,00
Tanjung Jabung Barat	72.769,83	55.384,00	8.109,00	2.751,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Tebo	60.985,15	1.087,00	114.263,00	284,00	341,00	0,00	0,00	0,00
Bungo	64.834,00	763,00	93.642,00	913,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Kota Jambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Sungai Penuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	50,00
Jambi	530.721,96	119.330,00	659.688,00	28.972,40	2.682,00	1.935,00	1.707,61	59,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Jambi memiliki potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian berupa luas areal tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit. Wilayah kabupaten/kota dengan areal terluas sebagai tempat tumbuhnya tanaman kelapa sawit berada di Kabupaten Muaro Jambi dengan total 136.404,95 Ha. Sementara itu, Kabupaten Merangin menjadi wilayah dengan areal tanaman karet terluas yaitu 138.203,00 Ha.

Tabel 3.29 Produksi Perkebunan di Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Kelapa Sawit (ton)	Kelapa (ton)	Karet (ton)	Kopi (ton)	Kakao (ton)	Tebu (ton)	Teh (ton)	Tembakau (ton)
Kerinci	14,00	13,00	448,00	5 973,00	53,00	9.833,00	5.030,08	0,00
Merangin	217.150,00	751,00	77.831,00	10 682,00	58,00	0,00	0,00	2,00
Serolangun	54.271,00	354,00	60.565,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Batang Hari	140.905,00	325,00	75.475,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Muaro Jambi	232.725,00	566,00	34.293,00	27,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Tanjung Jabung Timur	76.378,00	57.295,00	4.503,00	1.237,00	241,00	0,00	0,00	0,00
Tanjung Jabung Barat	119.510,00	55.384,00	3.822,20	1.161,60	31,00	0,00	0,00	0,00
Tebo	118.677,60	443,50	50.315,20	41,60	54,00	0,00	0,00	0,00
Bungo	104.047,00	523,00	50.803,00	776,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Kota Jambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Sungai Penuh	0,00	3,00	0,00	215,00	40,00	6,00	0,00	9,00
Jambi	**1.063.677,60**	**115.657,50**	**358.055,40**	20.135,20	929,00	9.839,00	5.030,08	11,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Jika dilihat dari hasil produksi tanaman, Provinsi Jambi memiliki potensi berupa karet dan kelapa sawit. Wilayah kabupaten/kota dengan hasil produksi kelapa sawit terbesar berada di Kabupaten

Muaro Jambi dengan total luasan 232.725 ton, hal ini seiring dengan Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki areal tanaman kelapa sawit terluas di Provinsi Jambi. Sementara itu, hasil produksi tanaman karet terluas berada di Kabupaten Merangin yang seiring dengan wilayah yang memiliki areal wilayah tanaman karet terluas dengan hasil produksi terbesar yaitu sebesar 77.831 ton.

Sektor kehutanan memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa, maupun penghasil bahan baku industri. Provinsi Jambi memiliki area hutan yang cukup luas yang terdiri atas beberapa komoditas berbeda.

Tabel 3.30 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung (ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (ha)	Hutan Produksi Terbatas (ha)	Hutan Produksi Tetap (ha)	Hutan Produksi Dapat dikonversi (ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan (ha)
Kerinci	-	-	-	33.301,29	-	33.301,29
Merangin	35.609,02	-	33.539,69	111.979,61	-	181.119,32
Serolangun	56.399,08	74,17	61,957,04	117.565,55	-	235.995,84
Batang Hari	-	48,69	51.040,26	129.578,61	73,85	180.741,41
Muaro Jambi	23.636,58	-	57.458,76	34.155,01	4.732,29	119.982,64
Tanjung Jabung Timur	22.190,13	4.618,68	-	55.197,58	1.205,47	83.211,86
Tanjung Jabung Barat	15.017,74	864,10	35.664,16	179.163,01	616,00	231.325,01
Tebo	6.712,49	1.173,85	19.679,04	223.799,28	-	251.364,66
Bungo	22.110,42	-	-	85.132,50	4.713,77	111.956,69
Kota Jambi	-	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	-	-	-	941,03	-	941,03
Jambi	181.675,46	6.770,49	259.329,95	970.813,47	11.341,38	1.429.939,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan Tabel 3.30 diketahui terdapat beberapa jenis kawasan hutan di Provinsi Jambi, diantaranya hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi dapat dikonversi. Kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi memiliki total seluas 1.429.939,75 Ha. Sementara, luasan kawasan hutan terbesar di Provinsi Jambi berupa hutan produksi tetap dengan luas sebesar 970.813,47 Ha.

Dalam beberapa tahun terakhir, **sektor pariwisata** merupakan pendorong tumbuhnya ekonomi kreatif mempercepat peningkatan ekonomi daerah. Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki keberagaman budaya dan destinasi wisata menarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik berupa wisata alam

maupun wisata budaya. Berikut pada Tabel 3.31 tersaji data persebaran destinasi wisata yang terdapat di Provinsi Jambi.

Tabel 3.31 Persebaran Destinasi Wisata Provinsi Jambi

Destinasi	Lokasi
Kota Seberang Jambi, *Jambi City*	Jambi
Tanggo Rajo Park	Jambi
Talang Mamak Trieb, Harapan Rainforest	Muaro Jambi
Kuala Tungkal Traditional Market	Tanjung Jabung Barat
Anak Dalam Tribe, Bukit Duabelas National Park	Sarolangun
Batang Asai Village	Sarolangun
Rantau Panjang Old House	Merangin
Geopark Merangin *(Geological Site)*	Merangin
Lake Kaco	Kerinci
Lempur Village	Kerinci
Pondok Tinggi Great Mosque	Sungai Penuh
Jangkat Agrotourism Compound	Merangin
Anak Dalam Tribe, Bukit Tigapuluh National Park	Tebo
Kanal Kuno Kota Mahligai Danau Lamo	Muaro Jambi
Candi Muaro Jambi	Muaro Jambi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2022

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik pariwisata yang serupa dengan Provinsi Jambi yaitu memiliki Kawasan Percandian yaitu Candi Borobudur. Jika dibandingkan jumlah wisawatan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya. Sedangkan tingkat pertumbuhan jumlah wisawatan di Provinsi Jambi secara umum mengalami kenaikan yang stabil sejak tahun 2010 hingga 2022. Kondisi tersebut dapat menjadi potensi yang besar bagi Provinsi Jambi untuk dapat bersaing dalam pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia.

Tabel 3.32 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2020 - 2022

No	Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara		
		2020	2021	2022
A	Indonesia	524.571.392	613.299.459	734.864.693
1	Jawa Timur	126.676.862	158.616.085	198.913.339
2	Jawa Tengah	118.895.290	134.782.286	103.991.668
3	Jawa Barat	90.818.341	97.358.488	128.667.116

No	Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara		
		2020	2021	2022
4	DKI Jakarta	44.352.288	51.705.258	63.081.040
5	Banten	30.449.271	38.396.859	48.935.825
6	Di Yogyakarta	22.474.988	24.551.526	18.888.517
7	Sumatera Utara	13.442.477	16.857.305	21.892.296
8	Sulawesi Selatan	8.845.896	9.974.040	30.089.324
9	Bali	7.874.397	9.009.667	11.132.389
10	Lampung	7.870.192	8.855.256	10.745.577
11	Sumatera Barat	7.187.800	8.477.593	10.750.168
12	Sumatera Selatan	5.632.226	6.534.906	8.088.606
13	Riau	5.440.820	6.465.613	9.084.411
14	Aceh	4.741.268	5.632.315	7.483.957
15	Kalimantan Selatan	4.399.364	4.506.915	5.716.978
16	Nusa Tenggara Barat	3.561.028	3.172.037	4.030.281
17	**Jambi**	**2.399.034**	**3.066.614**	**3.892.005**
18	Sulawesi Utara	2.378.983	3.690.956	4.809.131
19	Kalimantan Timur	2.291.348	2.365.615	5.266.467
20	Nusa Tenggara Timur	1.970.671	2.762.675	3.264.914
21	Sulawesi Tenggara	1.938.708	2.509.188	2.754.805
22	Kalimantan Barat	1.755.287	2.271.124	3.138.799
23	Bengkulu	1.460.728	1.639.658	1.988.998
24	Kalimantan Tengah	1.451.039	1.727.916	2.438.971
25	Sulawesi Tengah	1.388.356	1.791.212	5.205.728
26	Gorontalo	945.856	1.299.319	1.619.987
27	Kep. Bangka Belitung	864.359	1.005.293	1.586.000
28	Sulawesi Barat	710.969	952.328	3.021.169
29	Papua	604.721	878.435	1.052.891
30	Maluku Utara	480.376	621.652	1.146.400
31	Kep. Riau	441.966	504.707	782.185
32	Papua Barat	348.137	551.066	473.811
33	Maluku	266.371	535.755	596.315
34	Kalimantan Utara	211.975	229.797	334.625

Sumber : BPS Tahun, 2022

Hal tersebut memunculkan akan kebutuhan penyediaan pelayanan penginapan atau hotel. Hotel yang terdapat pada Provinsi Jambi

dibedakan menjadi hotel berbintang dan hotel non berbintang. Berikut pada Tabel 3.33 merupakan data hotel berbintang dan hotel non berbintang di Provinsi Jambi.

Tabel 3.33 Jumlah Hotel Bintang Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
Kerinci	-	-	-
Merangin	-	-	-
Serolangun	1	48	78
Batang Hari	-	-	-
Muaro Jambi	-	-	-
Tanjung Jabung Timur	-	-	-
Tanjung Jabung Barat	2	49	71
Tebo	-	-	-
Bungo	2	173	260
Kota Jambi	30	2.281	3.431
Kota Sungai Penuh	2	93	147

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

Hotel berbintang pada Provinsi Jambi hanya terdapat pada lima Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupate Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh dengan jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur paling banyak terdapat pada Kota Jambi. Sedangkan jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur dengan jumlah paling kecil terdapat pada Kabupaten Sarolangun.

Tabel 3.34 Jumlah Hotel Non bintang Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
Kerinci	12	137	331
Merangin	25	380	601
Serolangun	15	261	388
Batang Hari	11	206	338
Muaro Jambi	1	14	14
Tanjung Jabung Timur	4	71	91
Tanjung Jabung Barat	8	209	300
Tebo	15	238	330
Bungo	33	550	877
Kota Jambi	59	1.556	2.122
Kota Sungai Penuh	16	342	589

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

Berdasarkan Tabel 3.34 hotel non berbintang pada Provinsi Jambi terdapat pada keseluruhan kabupaten/kota dengan jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur dengan jumlah paling banyak terdapat pada Kota Jambi. Sedangkan jumlah akomodasi, kamar,

dan tempat tidur dengan jumlah paling kecil terdapat pada Kabupaten Muaro Jambi.

Sektor Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Sedangkan bahan tambang adalah hasil produksi dari kegiatan pertambangan yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan tambang yang terdapat pada Provinsi Jambi diantaranya minyak dan gas bumi yang berada di Kabupaten Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat. Selain itu, terdapat bahan tambang berupa batubara yang lokasi potensialnya mengumpul di bagian tengah Provinsi Jambi.

Tabel 3.35 Luas Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi

Wilayah Pertambangan	Luas (Ha)
Wilayah Pencadangan Negara	**389.252,93**
Batanghari	83.176,55
Kerinci	48.005,92
Muaro Jambi	4.144,64
Sarolangun	25.508,59
Sungai Penuh	5.737,93
Tanjung Jabung Barat	18.734,63
Tanjung Jabung Timur	137.945,74
Tebo	65.998,94
Wilayah Usaha Pertambangan	**3.896.480,26**
Batanghari	408.837,77
Bungo	422.771,20
Kerinci	106.978,89
Kota Jambi	7,29
Merangin	570.231,01
Muaro Jambi	455.555,52
Sarolangun	568.079,73
Tanjung Jabung Barat	535.462,82
Tanjung Jabung Timur	284.243,57
Tebo	544.312,47
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus	**3.411,93**
Bungo	3411,93
Total	**4.289.145,12**

Sumber: KEPMEN ESDM No 99.K/MB.01/MEM.B/2022

Tabel 3.36 Data Produksi Minyak dan Gas Bumi Provinsi jambi

Kontraktor	Kegiatan Usaha	Rata-Rata Produksi (BOPD)
Petrochina International Bangko Ltd.	Produksi Minyak dan Kondensat	167
PT. Medco E&P Indonesia	Produksi Minyak dan Kondensat	3625
PT Sele Raya Merangin Dua.	Produksi Minyak dan Kondensat	2597
Montd'or Oil Tungkal Limited	Produksi Minyak dan Kondensat	0,28
Conocophillips (Grissik) Ltd.	Produksi Minyak dan Kondensat	6343
Petrochina International Jabung Ltd	Produksi Minyak dan Kondensat	14870
Tately N.V. (Company No.87301) P	Produksi Minyak dan Kondensat	132
Petrochina (Jabung)	Produksi LPG	269058
PT. Medco E&P Lematang	Produksi Gas Bumi	23,10
Total		**296815,38**

Sumber: KEPMEN ESDM No 99.K/MB.01/MEM.B/2022

Berdasarkan Tabel 3.36 dapat diketahui bahwa produksi untuk kegiatan usaha LPG dengan kontraktor Petrochina (Jabung) memiliki rata-rata produksi paling besar yaitu 269.058 BOPD. Produksi minyak dan gas bumi di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan peta di atas, dapat diketahui bahwa potensi batubara kalori tinggi berada di kabupaten Bungo dan Batanghari. Batubara kalori tinggi umumnya digunakan untuk ekspor, sedangkan kategori sedang – rendah untuk konsumsi dalam negeri.

Tabel 3.37 Akses Jalur Batubara Jalan Nasional Provinsi jambi

Satuan Kerja	Panjang (km)
PJN 1 Jambi	263,85
PJN II Jambi	325,04
Total	588,89

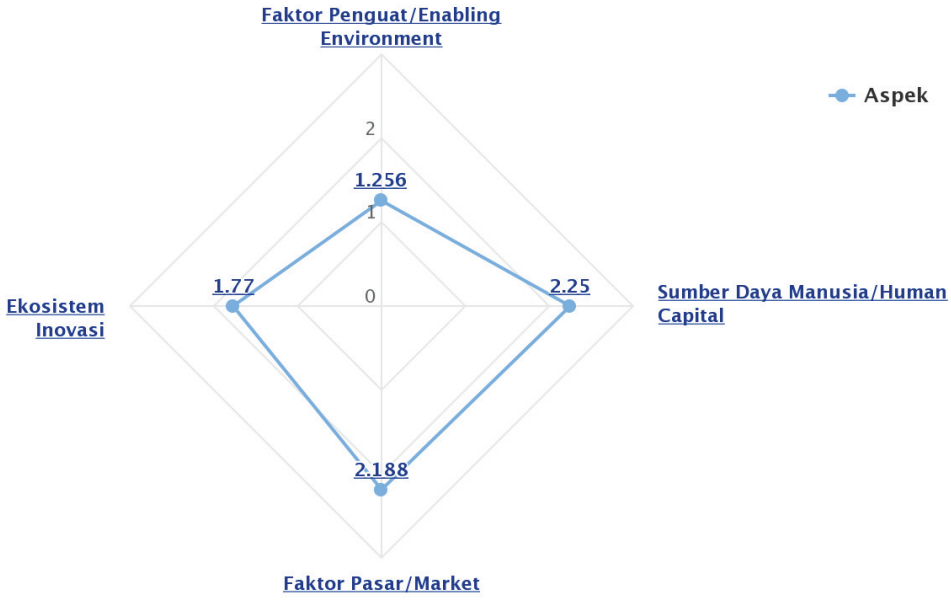
Sumber : BPJN Jambi, 2022

Berdasarkan Tabel 3.37, dapat diketahui bahwa jalur batubara menggunakan jalan nasional sepanjang 588,89 km. Rencana jalur khusus batubara diharapkan dapat mengurangi arus dari

Sarolangun ke Pelabuhan Talang Duku yang telah menyebabkan kepadatan di jalan umum.

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. **Tingkat daya saing** *(competitiveness)* merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi dan 90 indikator (kuisioner).

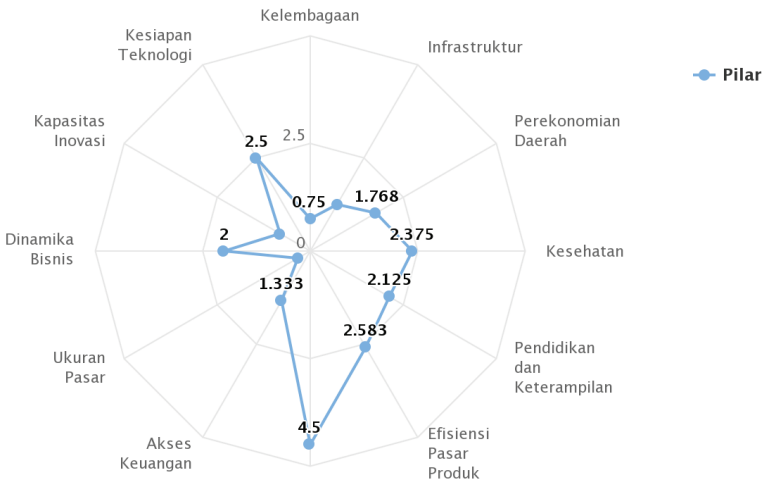
Hasil pengukuran IDSD Provinsi Jambi menggunakan indikator BRIN, menunjukkan bahwa dari 4 aspek utama IDSD, terdapat 1 aspek yang masih memerlukan perhatian dan kerja keras yaitu aspek ekosistem inovasi dengan nilai 1,77 yang berarti masuk dalam kategori kurang inovatif.



Gambar 3.25 Penilaian Aspek Utama Indeks Daya Saing Wilayah Provinsi Jambi

Sumber: Badan Riset & Inovasi Nasional

Dari 4 (empat) aspek tersebut dilakukan analisis lebih mendalam, berdasarkan nilai 12 pilar yang ada pada 4 aspek tersebut, menunjukkan hasil bahwa beberapa pilar telah bagus kondisinya, yaitu pilar ketenagakerjaan, kesiapan teknologi, dinamika bisnis, kesehatan, dan efisiensi pasar produk. Namun masih ada beberapa pilar yang memerlukan perhatian untuk ditingkatkan yaitu pilar akses kapasitas inovasi, ukuran pasar, infrastruktur dan kelembagaan.



Gambar 3.26 Penilaian 12 Pilar Indeks Daya Saing Wilayah Provinsi Jambi

Sumber: Badan Riset & Inovasi Nasional

Dari keempat penilaian aspek, Provinsi Jambi mendapatkan nilai 1,8660 untuk daya saing wilayah (kategori sedang). Penilaian pada keempat aspek masih dalam kategori sedang yaitu di bawah 2,5. Pada komponen aspek faktor penguat memiliki nilai 1,2560 dan Pilar Infrastruktur di Provinsi memiliki nilai yaitu 1,2500. Dimensi infrastruktur di Provinsi Jambi terdiri dari Infrastruktur transportasi dengan nilai 0,5000 dan dimensi infrastruktur air bersih dan kelistrikan dengan nilai 2,0000. Hal ini berarti, kondisi infrastruktur Provinsi Jambi masih dalam kategori sedang.

3.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas

Perumusan Kawasan Prioritas Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan disusu berdasarkan metode *multicriteria analysis.* Daftar panjang (*longlist)* kawasan prioritas yang telah disusun pada bab 2 diberikan bobot dengan kriteria yang sesuai untuk mendapatkan kawasan prioritas yang akan ditangani hingga 2029.

Tabel 3.38 Justifikasi Kawasan Prioritas Industri

Kawasan	1	2	3	4	5	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
KI Kemingking	V	V	V	V	-	4	Prioritas	1. Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih dalam proses revisi RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Kabupaten Muaro Jambi untuk peruntukkan kawasan industri besar di Kabupaten Muaro Jambi.

Kawasan	1	2	3	4	5	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
								2. Lahan Kawasan Industri Kemingking dalam proses sengketa antara Pengelola lama (PT. Jambi Kemingking Ecopark) dan pengelola baru (PT. Bhaktimitra Rielma Intiharmoni). Oleh karena itu, belum menjadi prioritas kawasan industri (Kemenperin, 25 Mei 2023) 3. Belum memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
KI Tanjung Jabung Timur	-	-	-	V	-	1	Tidak Prioritas	Belum memiliki jalan akses, belum memiliki masterplan kawasan industri, belum adanya dukungan perencanaan nasional.

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Kriteria :

1. Kawasan Prioritas Pada Perencanaan Nasional dan Kebijakan Nasional (contoh RPJMN 2020 – 2024);
2. Keberadaan Pengelola Kawasan
3. Keberadaan Infrastruktur Eksisting di Luar Kawasan
4. Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi
5. Kesiapan Kawasan (Pengelola, Perizinan)

Tabel 3.39 Justifikasi Kawasan Prioritas Pertanian

Kawasan	1	2	3	4	5	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
KPPN Muaro Jambi	V	-	-	-	V	2	Tidak Menjadi Prioritas	1. Memiliki potensi pertanian seperti padi, delineasi berdasarkan arahan RPJMN 2020 - 2024 2. Arahan Program RPJMN Tahun 2020 - 2024 untuk KPPN Muaro Jambi diarahkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Potensi pertanian akan diakomodir dalam rencana pengembangan kawasan industri hilirisasi pengolahan 4. Jambi bukan lumbung pangan nasional Produksi Padi Menurut Provinsi di Indonesia Jambi berada di peringkat 24. Luas Panen padi dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan 64.412 Ha menjadi 60.540 Ha.
Kawasan Transmigrasi Bhatin Iii Ulu	-	-	-	-	V	1	Tidak Menjadi Prioritas	1. Berdasarkan hasil survei Tim BPIW ke lokasi kawasan tersebut tidak terlihat adanya kegiatan ekonomi, dan kawasan tersebut tidak memiliki potensi komoditas unggulan. 2. Arahan Program RPJMN Tahun 2020 - 2024 untuk Kawasan Transmigrasi Bhatin III Ulu diarahkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Kriteria :

1. Memiliki Komoditas Unggulan Kawasan Pertanian;

2. Luas Panen dan Produksi terbesar di Wilayah Sumatera Bagian Selatan
3. Keberadaan Daerah Irigasi Kewenangan Pusat;
4. Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi
5. Kesesuaian Arahan Program di RPJMN 2020 - 2024

Berdasarkan analisis pemilihan kawasan prioritas, Sektor Pertanian di Provinsi Jambi belum menjadi fokus prioritas kawasan hingga tahun 2029.

Tabel 3.40 Justifikasi Kawasan Prioritas Perkotaan

Kawasan	1	2	3	4	5	6	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
PKN Jambi	V	-	V	V	V	V	5	Prioritas	Merupakan ibu kota Provinsi Jambi, memiliki Bandar Udara Sultan Thaha (bandar udara pengumpul tersier), memiliki terminal kelas A, memiliki pelabuhan pengumpul Talang Duku
PKW Muara Sabak	V	-	V	-	-	V	3	Prioritas	Memiliki Pelabuhan Pengumpul Muara Sabak, sudah terkoneksi jalan nasional, dan terdapat rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan rencana kawasan ekonomi baru
PKW Kuala Tungkal	V	-	-	-	-	-	2	Tidak Prioritas	
PKW Muaro Bungo	V	-	-	V	-	V	3	Tidak Prioritas	
PKW Sarolangun	V	-	-	-	-	-	1	Tidak Prioritas	Tidak memiliki simpul transportasi sebagai konektivitas menuju PKW Sarolagun
PKW Muara Bulian	V	V	-	-	-	-	2	Tidak Prioritas	Tidak memiliki simpul transportasi sebagai konektivitas menuju PKW Muara Bulian

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Kriteria :

1. Sistem Perkotaan Nasional (RTRWN)
2. Kawasan Andalan
3. Memiliki Simpul Transportasi Pelabuhan Pengumpul
4. Memiliki SImpul Transportasi Bandara
5. Prioritas Kawasan RPJMN 2020 – 2024
6. Simpul Transportasi terkoneksi dengan jalan nasional

Tabel 3.41 Justifikasi Kawasan Prioritas Pariwisata

Kawasan	1	2	3	4	5	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
Taman Nasional Kerinci Seblat/KSPN Kerinci Seblat	V	V	-	V	V	4	Tidak Prioritas	1. Dukungan infrastruktur PUPR tidak lokasi langsung di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. 2. TNKS merupakan kawasan lindung sehingga adanya limitasi dalam pengembangan wilayahnya 3. Belum ditetapkannya RTR Taman Nasional Kerinci Seblat
KSPN Muaro Jambi	V	V	V	V	V	5	Prioritas	1. Muarajambi merupakan situs purbakala dan peninggalan dari Kerajaan Melayu Kuno dan Sriwijaya yang menjadi pusat peribadatan agama Budha terluas di Nusantara pada abad ke VII-XII.

Kawasan	1	2	3	4	5	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
								Muarajambi menjadi pusat pendidikan agama Budha di Sumatera selama kurang lebih 500 tahun. 2. Tahun 2022 – 2023 dalam penyusuan RTR KSN Candi Muara Jambi 3. Direktif Presiden RI dan Menteri PUPR 4. Balai Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam proses penyusunan Masterplan Pengembangan KSPN Muaro Jambi
Geopark Merangin	-	-	-	V	V	2	Tidak Prioritas	
Taman Nasional Berbak dan Bukit Tiga Puluh	-	V	-	V	-	2	Tidak Prioritas	
Taman Naisonal Bukit Dua Belas	-	V	-	V	-	2	Tidak Prioritas	

Sumber : Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kriteria :
1. Kawasan Prioritas RIPPARNAS;
2. Kawasan Strategis Nasional RTRWN
3. Direktif Presiden
4. Aksesibilitas : Simpul Transportasi,
5. UNESCO

Berdasarkan hasil penentuan fokus perencanaan dan kawasan prioritas diperoleh shortlist fokus dan kawasan prioritas, dari total 4 fokus perencanaan, diperoleh 2 fokus perencanaan prioritas yaitu Fokus Pariwisata dengan kawasan prioritas KSPN Muaro Jambi dan Fokus Perkotaan dengan Kawasan Prioritas PKN Jambi.
Wilayah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan wilayah diluar kawasan prioritas dengan delineasi wilayah administrasi kabupaten/kota antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PKW Kuala Tungkal), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (PKW Muara Sabak), Kabupaten Batanghari (PKW Muara Bulian), Kabupaten Sarolangun (PKW Sarolangun), Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo (PKW Muaro Bungo), Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin.

3.3.2. Profil dan Potensi Fokus Perkotaan

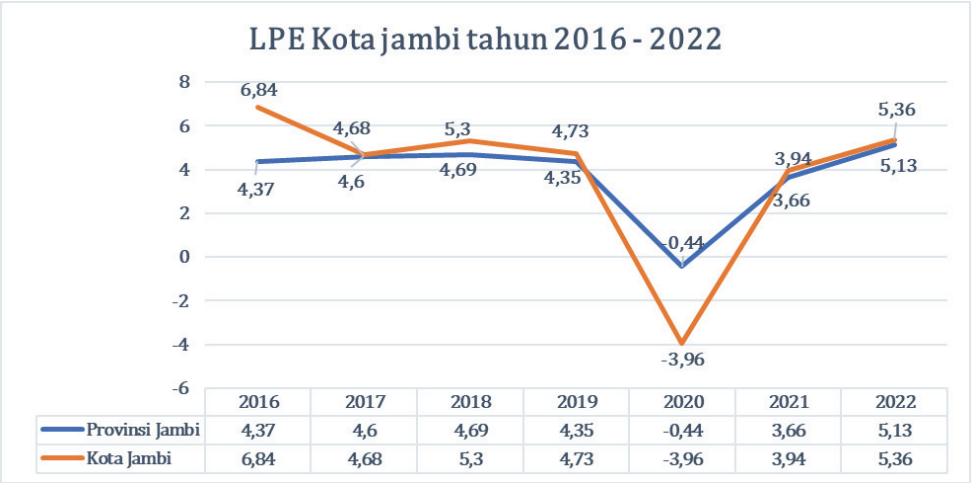
Tema kawasan perkotaan perlu dikembangkan karena memiliki fungsi sebagai pusat permukiman dalam lingkup nasional dan

wilayah yang juga menjadi pusat perekonomian masyarakat. Pengembangan Kawasan perkotaan diharapkan tidak hanya membangkitkan perekonomian masyarakat yang tinggal di dalamnya maupun di Kawasan sekitarnya, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas hidup permukiman perkotaan menuju standar dan berkelanjutan. Kawasan Perkotaan prioritas di Provinsi jambi yaitu PKN Jambi.

PKN Jambi mencakup Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi, merupakan pusat distribusi utama Provinsi Jambi dengan adanya bandara pengumpul, pelabuhan ekspor dan dilalui jalur trans Sumatera bagian timur. Fungsi lainnya meliputi pusat perdagangan dan jasa regional, pusat permukiman perkotaan terpadat, dan pusat pengumpulan industri pengolahan. Pengembangan Perkotaan Jambi sejalan dengan pengembangan koridor pertumbuhan di RPJMN 2020 – 2024.

Berdasarkan nilai kapasitas fiskal daerah pada tahun 2021, Kota Jambi memiliki nilai 1,370 dengan kategori fiskal daerah tinggi. Tingginya indeks kapasitas fiskal daerah menunjukkan kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat juga menggambarkan sampai seberapa besar tingkat ketergantungan finansial Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan Bantuan dan Sumbangan Daerah. Hal tersebut sejalan dengan nilai Kontribusi PDRB Kota Jambi terhadap PDRB Provinsi Jambi, PDRB Kota Jambi menyumbang kontirbusi tertinggi dengan persentase 12,74%

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mengalai kenaikan yang signifikan sejak pandemi di tahun 2020 -3,96% menjadi 5,36% pada tahun 2022. Sektor Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kota Jambi Tahun 2021 adalah **Sektor Perdagangan, Besar, dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** dengan 32,70% dari total pertumbuhan regional



Gambar 3.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi 2016-2022

Sumber : Olahan Data BPS Provinsi Jambi, 2022

3.3.3 Profil dan Potensi Fokus Pariwisata

Dalam beberapa tahun terakhir, **sektor pariwisata** merupakan pendorong tumbuhnya ekonomi kreatif mempercepat peningkatan ekonomi daerah. Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki keberagaman budaya dan destinasi wisata menarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik berupa wisata alam maupun wisata budaya. Berikut pada Tabel 3.42 tersaji data persebaran destinasi wisata yang terdapat di Provinsi Jambi.

Tabel 3.42 Persebaran Destinasi Wisata Provinsi Jambi

Destinasi	Lokasi
Kota Seberang Jambi, *Jambi City*	Jambi
Tanggo Rajo Park	Jambi
Talang Mamak Trieb, Harapan Rainforest	Muaro Jambi
Kuala Tungkal Traditional Market	Tanjung Jabung Barat
Anak Dalam Tribe, Bukit Duabelas National Park	Sarolangun
Batang Asai Village	Sarolangun
Rantau Panjang Old House	Merangin
Geopark Merangin *(Geological Site)*	Merangin
Lake Kaco	Kerinci
Lempur Village	Kerinci
Pondok Tinggi Great Mosque	Sungai Penuh
Jangkat Agrotourism Compound	Merangin

Destinasi	Lokasi
Anak Dalam Tribe, Bukit Tigapuluh National Park	Tebo
Kanal Kuno Kota Mahligai Danau Lamo	Muaro Jambi
Candi Muaro Jambi	Muaro Jambi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2022

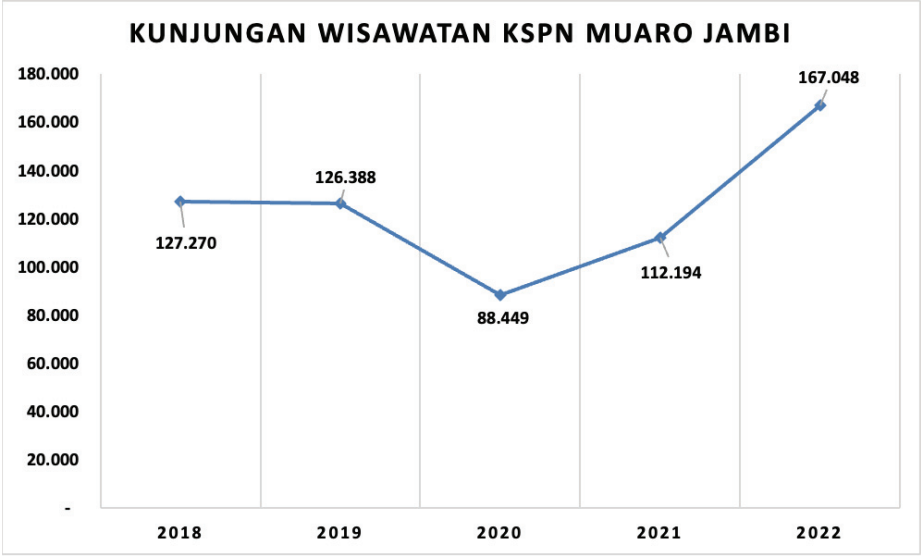
Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik pariwisata yang serupa dengan Provinsi Jambi yaitu memiliki Kawasan Percandian yaitu Candi Borobudur. Jika dibandingkan jumlah wisawatan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya. Sedangkan tingkat pertumbuhan jumlah wisawatan di Provinsi Jambi secara umum mengalami kenaikan yang stabil sejak tahun 2010 hingga 2022. Kondisi tersebut dapat menjadi potensi yang besar bagi Provinsi Jambi untuk dapat bersaing dalam pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia.

Tabel 3.43 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2020 - 2022

No	Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara		
		2020	2021	2022
A	Indonesia	524.571.392	613.299.459	734.864.693
1	Jawa Timur	126.676.862	158.616.085	198.913.339
2	**Jawa Tengah**	**118.895.290**	**134.782.286**	**103.991.668**
3	Jawa Barat	90.818.341	97.358.488	128.667.116
4	DKI Jakarta	44.352.288	51.705.258	63.081.040
5	Banten	30.449.271	38.396.859	48.935.825
6	Di Yogyakarta	22.474.988	24.551.526	18.888.517
7	Sumatera Utara	13.442.477	16.857.305	21.892.296
8	Sulawesi Selatan	8.845.896	9.974.040	30.089.324
9	Bali	7.874.397	9.009.667	11.132.389
10	Lampung	7.870.192	8.855.256	10.745.577
11	Sumatera Barat	7.187.800	8.477.593	10.750.168
12	Sumatera Selatan	5.632.226	6.534.906	8.088.606
13	Riau	5.440.820	6.465.613	9.084.411
14	Aceh	4.741.268	5.632.315	7.483.957
15	Kalimantan Selatan	4.399.364	4.506.915	5.716.978
16	Nusa Tenggara Barat	3.561.028	3.172.037	4.030.281
17	**Jambi**	**2.399.034**	**3.066.614**	**3.892.005**
18	Sulawesi Utara	2.378.983	3.690.956	4.809.131
19	Kalimantan Timur	2.291.348	2.365.615	5.266.467

No	Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara		
		2020	2021	2022
20	Nusa Tenggara Timur	1.970.671	2.762.675	3.264.914
21	Sulawesi Tenggara	1.938.708	2.509.188	2.754.805
22	Kalimantan Barat	1.755.287	2.271.124	3.138.799
23	Bengkulu	1.460.728	1.639.658	1.988.998
24	Kalimantan Tengah	1.451.039	1.727.916	2.438.971
25	Sulawesi Tengah	1.388.356	1.791.212	5.205.728
26	Gorontalo	945.856	1.299.319	1.619.987
27	Kep. Bangka Belitung	864.359	1.005.293	1.586.000
28	Sulawesi Barat	710.969	952.328	3.021.169
29	Papua	604.721	878.435	1.052.891
30	Maluku Utara	480.376	621.652	1.146.400
31	Kep. Riau	441.966	504.707	782.185
32	Papua Barat	348.137	551.066	473.811
33	Maluku	266.371	535.755	596.315
34	Kalimantan Utara	211.975	229.797	334.625

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi, 2022



Gambar 3.28 Jumlah Wisatawan di KSPN Muaro Jambi 2018 - 2022

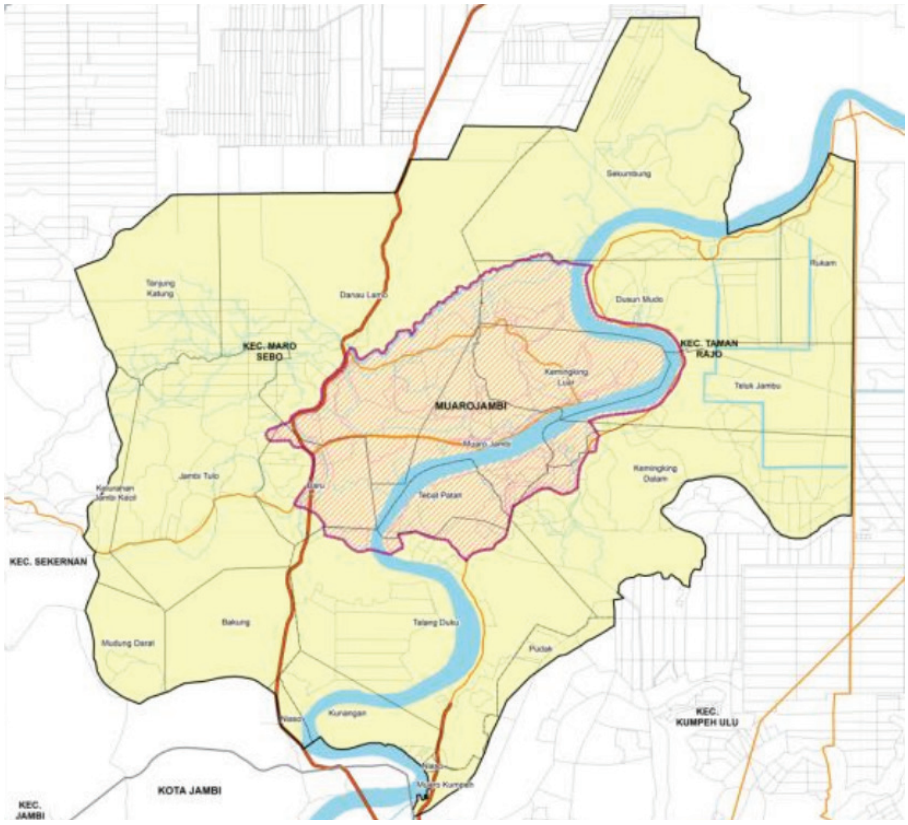
Sumber : Olahan Data Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, 2023

Jumlah wisatawan mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2018 – 2019 namun mengalami penurunan jumlah pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid19 dari 126.388 wisawatan menjadi 88.449 wisatawan. Paska pandemi jumlah wisatawan naik menjadi 112.194 pada tahun 2021 dan 167.048 wisatawan pada tahun 2022.

Kawasan prioritas pariwisata di Provinsi Jambi diutamakan pada KSPN Muaro Jambi Berikut merupakan penjelasan mengenai kawasan pariwisata yang ada di Provinsi jambi. Cagar Budaya Muaro Jambi merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan potensi wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Daya tarik utamanya adalah kompleks percandian Hindu – Budha sebagai wisata budaya/ religi dan menjadi situs warisan dunia. Lokasi Candi Muaro Jambi berdekatan dengan Kota Jambi sebagai penyedia fasilitas pendukung wisatanya. Peringkat Cagar Budaya Nasional ditetapkan dengan No SK : 259/M/2013 Tanggal SK : 30 Desember 2013 dan No SK : 045/M/2000 Tanggal SK : 3 Maret 2004.

Kawasan strategis nasional Cagar Budaya Muarajambi berada di Kabupaten Muaro Jambi seluas kurang lebih 21.288 ha mencakup 3 kecamatan, 1 kelurahan, dan 19 desa yang meliputi :

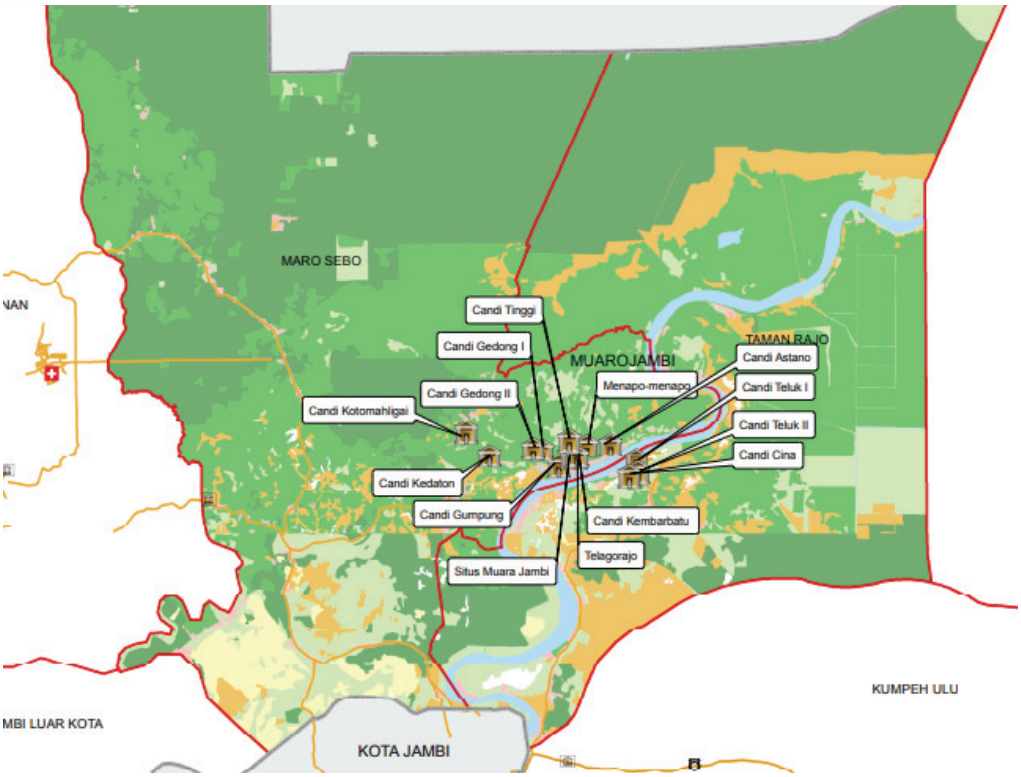
a. Sebagian wilayah Desa Muaro Kumpeh, sebagian wilayah Desa Pudak di Kecamatan Kumpeh Ulu;
b. Sebagian wilayah Desa Bakung, seluruh wilayah Desa Baru, sebagian wilayah Desa Danau Lamo, seluruh wilayah Desa Jambi Tulo, sebagian Desa Mundung Darat, seluruh wilayah Desa Muaro Jambi, sebagian wilayah Desa Niaso, sebagian wilayah Desa Tanjung Katung, dan sebagian Kelurahan Jambi Kecil di Kecamatan Maro Sebo dan
c. Seluruh wilayah Desa Dusun Mudo, sebagian wilayah Desa Kemingking Dalam, seluruh wilayah Desa Kemingking Luar, sebagian wilayah Desa Kunangan, sebagian wilayah Desa Rukam, sebagian wilayah Desa Sekumbung, seluruh wilayah Desa Talang Duku, seluruh wilayah Desa Tebet Patah, dan sebagian wilayah Desa Teluk Jambu di Kecamatan Taman Rajo.



Gambar 3.29 Delineasi KSPN Muaro Jambi
Sumber : Draft RTR Kawasan Strategis Nasional Cagar Budaya Muarajambi, 2023

Satuan ruang geografis Muarajambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saat ini dimanfaatkan sebagai daerah hunian, kebun rakyat, perkebunan kelapa sawit, pembudidayaan ikan, dan tempat penimbunan batu bara *(stockpile).* Di tengah-tengahnya mengalir Sungai Batanghari yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan bermuara di Selat Berhala. Lingkungannya ditandai oleh rawa air tawar dan tanggul alam purba *(natural levee)* yang terbentuk pada Masa Plestosen. Pada awalnya satuan ruang geografis ini pernah merupakan laut dangkal, hal inilah yang menyebabkan terbentuknya kawasan rawa yang sangat luas di Desa Muarajambi dan sekitarnya. Setiap tahun pada musim hujan lingkungan ini digenangi oleh banjir, menenggelamkan tanggul alam purba dan menyatukan kawasan rawa dengan aliran Sungai Batanghari.

Temuan-temuan purbakala berada di atas tanggul alam purba baik di sisi selatan maupun sisi utara dari Sungai Batanghari, menandakan bahwa pada masa lalu permukiman kuno sejak abad VIII sudah menempati kedua sisi tanggul alam ini, terbukti dari ditemukannya sisa-sisa kegiatan manusia kuno di kedua sisi sungai.



Gambar 3.30 Sebaran Cagar Budaya Muaro Jambi
Sumber : Analisis BPIW, 2022

3.4 Profil Sosial Budaya

Menurut teks Hikayat Negeri Jambi, kata Jambi berasal dari perintah seorang raja yang bernama Raja Tun Telanai untuk menggali kanal dari ibu kota kerajaan hingga ke laut, dan tugas tersebut harus diselesaikan dalam kurun waktu hanya satu jam. Kata jam inilah yang kemudian menjadi asal kata Jambi. Jambi terbentuk ketika Kerajaan Melayu Jambi berdiri sekitar abad XVII. Terletak di sekitar tepian Sungai Batang Hari, Jambi dibentuk dari berbagai kebudayaan yang berasal dari berbagai etnik, strata sosial,

ekonomi, dll yang dapat dilihat dari bangunan dan suasana tepi sungai. Pada tahun 70an, Gubernur Jambi pernah mengadakan sayembara "Sepucuk Jambi Sembilan Rumah" untuk mencari rumah adat yang menjadi jati diri daerah Jambi. Dari hasil Sayembara tersebut, yang dipilih dan dijadikan sebagai rumah adat jambi adalah Rumah Panggung Kajang Leko. Selain Rumah Adat Kajang Leko, di Jambi juga terdapat rumah adat Merangin yang dikenal dengan sebutan Rumah Tuo Rantau Panjang. Rumah adat ini berada di Desa Rantau Panjang, Kabupaten Merangin yang merupakan tempat tinggal Suku Batin.

Suku Melayu Jambi merupakan suku yang berasal dari Provinsi Jambi. Suku tersebut mendiami wilayah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, dana Kabupaten Tebo. Suku Melayu Jambi dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar menggunakan Bahasa Melayu Jambi atau masyarakat jambi sering menyebut dengan Baso Jambi yang masih satu rumpun dengan bahasa melayu lainnya. Kehidupan orang Melayu Jambi sekarang masih dapat dilihat dari pengelompokan suku atau kalbu yang merupakan pengelompokan sosial yang erat hubungannya dengan Kesultanana Jambi dulu. Jumlah Kalbu yang masih tersisa ada dua belas yaitu Jebus, Pemayung, Maro Sebo, Awin, Petajin, Suku Tujuh Koto, Mentong, Panagan, Serdadu, Kebalen, Aur Hitam, dan Pinokowan tengah. Selain terdapat rumah adat Jambi, terdapat beberapa tradisi adat dari jambi yaitu Tradisi Berburu Sumbun, Tradisi Maanta, Tradisi Malam Berinai, Tradisi Makan Kelung, Tradisi Kenduri Sko, dan Tradisi Kumau. Tak lupa juga terdapat kesenian yang menjadi ciri khas dari Jambi yaitu Tari Sekapur Sirih, Tari Selampit Delapan, Tari Inai, Tari Tauh (Rantau Pandan), Tari Rentak Besapih, Tari Rentak Kudo, Tari Nitih Naik Mahligai, Trai Kubu, Tari Rangguk, dan Tari Kisan.

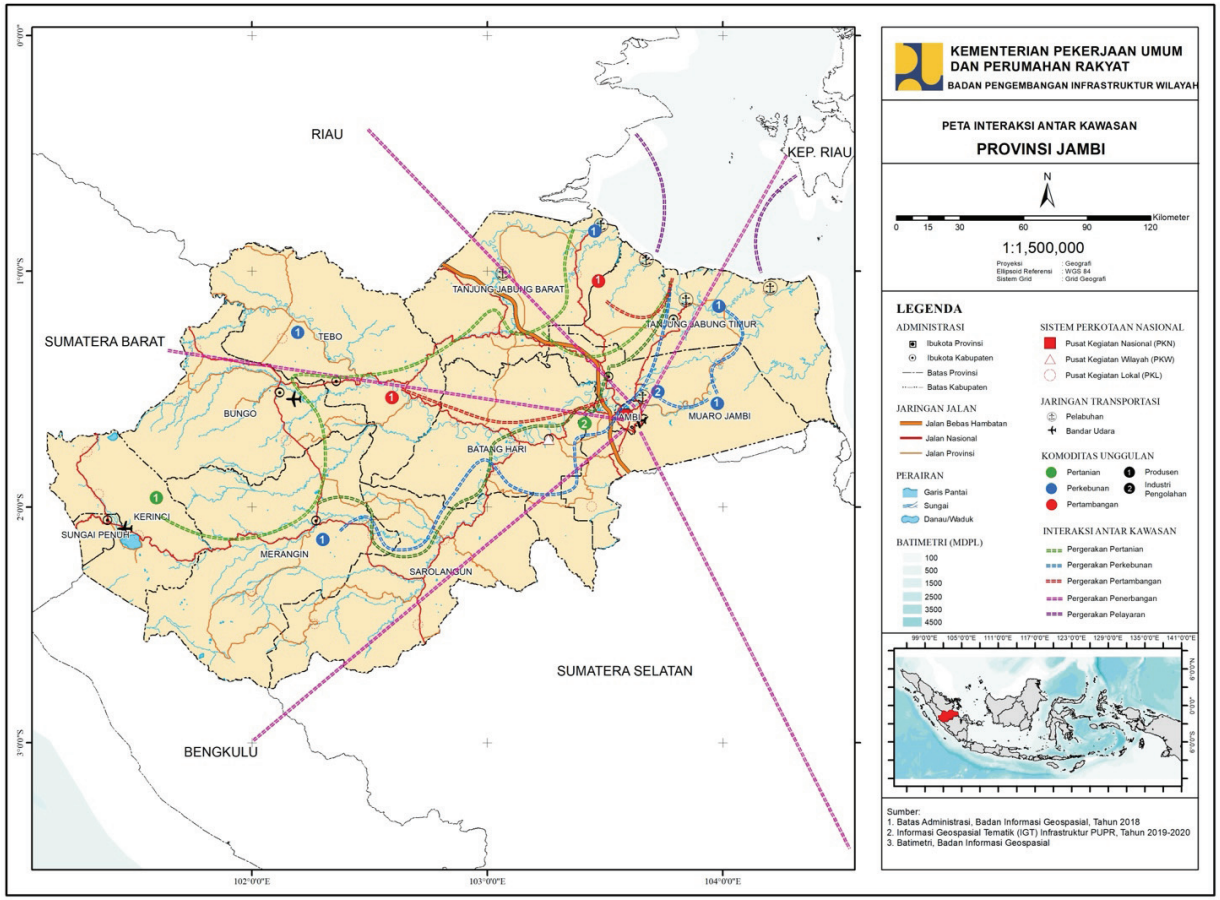
Desa wisata Muaro Jambi merupakan salah satu dari 100 desa wisata terbaik di Indonesia yang masuk nominasi anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021. Desa Wisata ini berada di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Desa ini berdampingan langsung dengan Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Muaro Jambi. Adapun atraksi wisata di lokasi tersebut yaitu adanya kanal purba, Sungai

Batanghari, rumah panggung masyarakat melayu. Daya tarik lainnya yaitu kesenian tradisional pencak silat, Rebana Siam, Hadrah, Tari Topeng, dan Tari Bayangan.

3.5 Profil Interaksi Antarkawasan

Profil interaksi antarkawasan berkaitan dengan pola intensitas pergerakan manusia/orang. Profil interaksi antar kawasan mempertimbangkan beberapa hal yaitu pusat aktivitas kegiatan, jaringan jalan, simpul transportasi, komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan pada kawasan prioritas yang telah ditetapkan.

a. Kawasan Pariwisata di Provinsi Jambi tersebar di 3 lokasi yaitu KSPN Muaro Jambi Bungo Kawasan KSPN Muaro Jambi dapat diakses melalui jalan nasional dengan kondisi kemantapan 98% dengan waktu tempuh 45 menit dari pusat Kota Jambi dan Bandara Sultan Thaha. Selain itu, terdapat Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Koridor III : Betung – Tempino – Jambi menjadi konektivitas wisatawan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Riau. Keberadaan simpul transportasi dan konektivitas jalan tol tersebut memudahkan wisatawan dalam mengakses kawasan pariwisata di Provinsi Jambi.
b. Kawasan Perkotaan Jambi. Perkembangan kawasan Perkotaan di Jambi tidak terlepas dengan adanya dukungan simpul transportasi dan infrastruktur dasar. Bandar udara Sultan Thaha, Pelabuhan Talang Duku di Kota Jambi, Pelabuhan Muara Sabak di PKW Muara Sabak untuk simpul transportasi mendukung pengembangan wilayah tengah dan timur Provinsi Jambi. Wilayah Barat didukung oleh 2 bandar udara yaitu Bandar Udara Muara Bungo dan Bandar Udara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci. Konektivitas di kawasan perkotaan sudah didukung oleh jalan nasional yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dan simpul transportasi.



Diproses oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, 2023

Gambar 3.31 Peta Interaksi Antar Kawasan Provinsi Jambi



BAB 4
PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Wilayah Sungai (WS) Batanghari merupakan WS Lintas Provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, secara administratif WS. Batanghari tersebar dibeberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah mayoritas serta Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau sebagai wilayah yang minoritas luasannya. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari telah ditetapkan Tahun 2012 dengan Nomor 51/KPTS/M/2012 dan telah diperbaharui pada dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1316 Tahun 2021 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS. Batanghari..

Provinsi Jambi teraliri oleh 3 (tiga) wilayah sungai diantaranya WS. Batanghari, WS Teramang Muar, dan WS. Musi -Sugihan-Banyuasin-Lemau. Berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Tabel 4.1 Wilayah Sungai Provinsi Jambi

WS Lintas Provinsi		
Kode W.S	**Sungai**	**Provinsi**
01.34.A2	Batanghari	Jambi - Sumatera Barat
01.35.A2	Teramang – Muar	Bengkulu – Jambi
01.40.A2	Musi - Sugihan - Banyuasin – Lemau	Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu – Lampung
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/kota		
01.33.B	Pengabuan – Lagan	Jambi

Sumber: Pola PSDA WS Batanghari, 2021

Provinsi Jambi sebagian besar dilalui oleh WS. Batanghari. WS. Batanghari meliputi 2 (dua) wilayah yaitu wilayah daeratan yang berada di Pulau Sumatera yaitu DAS Batanghari dan DAS Air Hitam. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Wilayah Sungai (WS) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi memiliki tiga unit bendung dengan Daerah Aliran Sungai Batanghari yang terletak di Kabupaten Kerinci. Bendung ini yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai

pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Ketiga embung tersebut diantaranya:

1. Bendung Siulak Deras dengan debit 9,40 m3/detik;
2. Bendung Betung Kuning dengan debit 4,13 m^3/detik;
3. Bendung Batang Sangkir dengan debit 4,35 m^3/detik.

Berdasarkan data yang dianalisis dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 14 Tahun 2015 daerah irigasi (D.I) permukaan ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut. D.I. total WS Batanghari sebesar 66.344 Ha dan D.I. rawa seluas 27.851 Ha. Gambar 4.3 menunjukkan lokasi D.I. rawa eksisting. Total luasan Daerah Irigasi Permukaan di WS. Batanghari 15.211 yang melintas di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Dari luasan tersebut, 10.629 Ha (69,9%) berada di Provinsi Jambi. Tahun 2021-2022 proses pembangunan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun dengan rencana luasan 6.500. Kondisi ini menjadi potensi besar dimanfaatkan untuk sektor pertanian guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Tabel 4.2 D.I. Permukaan WS Batanghari

A.	D.I. Kewenangan Pusat	Provinsi	Kabupaten	Luas (Ha)	SubDAS
1	DI. Batanghari	Jambi	Bungo	400	Sub DAS Batanghari Hulu
		Jambi	Tebo	800	Sub DAS Batanghari Hulu
		Sumatera Barat	Dharmasraya	4.582	Sub DAS Batanghari Hulu
		Total		**5.782**	
2	DI. Sei Siulak Deras	Jambi	Kerinci	5.801	Sub DAS Batang Tembesi
3	DI. Sei Batang Sangkir	Jambi	Kerinci	3.628	Sub DAS Batang Tembesi
Total Luas DI. Kewenangan Nasional				**15.211**	
B.	**D.I. Kewenangan Provinsi**	**Provinsi**	**Kabupaten**		**SubDAS**
1	D.I. Sei Batang Uleh	Jambi	Bungo	2.043	Sub DAS Batang Tebo
2	D.I. Sei Tanduk	Jambi	Kerinci	1.265	Sub DAS Batang Tembesi
3	D.I. Sei Batang Limun Singkut	Jambi	Sarolangun	1.600	Sub DAS Batang Tembesi
4	D.I. Sei Samek	Sumatera Barat	Sijunjung	105,58	Sub DAS Batanghari Hulu
5	Muaro Danau	Sumatera Barat	Solok	1.228,08	Sub DAS Batanghari Hulu

6	Sapan Kayu Manang	Sumatera Barat	Solok	564,22	Sub DAS Batanghari Hulu
7	Bandar Pekonina	Sumatera Barat	Solok Selatan	462,76	Sub DAS Batanghari Hulu
8	Bandar Sawah Padang	Sumatera Barat	Solok Selatan	390,92	Sub DAS Batanghari Hulu
9	Batang Suliti	Sumatera Barat	Solok Selatan	1.036,60	Sub DAS Batanghari Hulu
10	Bandar Bangko	Sumatera Barat	Solok Selatan	692,39	Sub DAS Batanghari Hulu
11	Bandar Sungai Aro	Sumatera Barat	Solok Selatan	1.014,81	Sub DAS Batanghari Hulu
Total Luas DI Kewenangan Provinsi				**10.403**	
C.	**D.I. KEWENANGAN KABUPATEN**				
No	**Jumlah D.I**	**Provinsi**	**Kabupaten**		**SubDAS**
1	5	Jambi	Batanghari	625	Sub DAS Sei Pijoan
2	85	Jambi	Bungo	5.326	Sub DAS Batang Tebo
3	104	Jambi	Kerinci	8.963	Sub DAS Batang Tembesi
4	139	Jambi	Sarolangun	7.762	Sub DAS Batang Tembesi
5	5	Jambi	Tebo	1.284	Sub DAS Bungin
6	55	Jambi	Merangin	4.536	Sub DAS Batang Tembesi
7	66	Jambi	Kota Sungai Penuh	4.348	Sub DAS Batang Tembesi
8	77	Sumatera Barat	Dharmasraya	1.923,44	Sub DAS Batang Rumbai
9	92	Sumatera Barat	Solok Selatan	4.491,69	Sub DAS Batanghari Hulu

Sumber: Pola PSDA WS Batanghari, 2021

Tabel 4.3 D.I. Rawa (D.I.R) WS Batanghari

D.I.R Kewenangan Provinsi				
No	**Nama D.I.R**	**Provinsi**	**Kabupaten**	**Luas (Ha)**
1	D.I.R. Koto Kandis	Jambi	Tanjung Jabung Timur	1.077
2	D.I.R. Nipah Panjang I – II	Jambi	Tanjung Jabung Timur	1.300
3	D.I.R. Rantau Rasau	Jambi	Tanjung Jabung Timur	1.734
4	D.I.R. Simpang Datuk	Jambi	Tanjung Jabung Timur	1.050
5	D.I.R. Sungai Raya	Jambi	Tanjung Jabung Timur	1.200
Total				**6.361**
D.I.R Kewenangan Kabupaten				
No	**Jumlah D.I**	**Provinsi**	**Kabupaten**	**Luas (Ha)**
1	74	Jambi	Batanghari	5.248
2	1	Jambi	Sarolangun	320
3	30	Jambi	Tanjung Jabung Timur	12.869
4	1	Jambi	Tebo	105
5	1	Jambi	Merangin	144
6	7	Jambi	Muaro Jambi	2.804

Total	**21.490**
TOTAL KESELURUHAN	**27.851**

Sumber: Pola PSDA WS Batanghari, 2021

Kondisi jaringan irigasi pada D.I Kewenangan Pusat Berdasarkan nilai IKSI Tahun 2022, DI Sei Siulak Deras dan DI. Batang Sangkir mendapat nilai yang kurang baik. Sedangkan DI Batanghari mendapat nilai sedang. Berikut merupakan tabel kondisi jaringan irigasi berdasarkan nilai IKSI.

Tabel 4.4 Nilai IKSI Daerah Irigasi Provinsi Jambi

No.	D.I Kewenangan Pusat	Nilai IKSI/Tahun					
		2021			2022		
		Utama	Tersier	Gabungan	Utama	Tersier	Gabungan
1.	D.I Batanghari (Lintas Provinsi)				49,2	64,7	52,3
2.	DI Sei Siulak Deras	72,2	56,5	69,1	51,8	46,4	50,7
3.	DI Sei Batang Sangkir	70,8	62,3	69,1	56,1	46,7	54,2

Sumber: Epaksi, 2022

Berdasarkan Permen. PUPR No. 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi:

1. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi baik sekali : bila IK > 90%
2. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi baik : bila nilai 90%> IK > 80%
3. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi sedang: bila nilai 80%> IK > 60%
4. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi kurang : bila nilai IK < 60%.

Keberadaan air permukaan di WS Batanghari cukup melimpah. DAS Batanghari merupakan sungai besar yang memiliki potensi air yang besar. Potensi air DAS Batanghari sebesar 1.887,45 m^3/detik. Pada Tabel 4.6 menunjukkan data debit rata-rata WS Batanghari.

Tabel 4.5 Debit Rata-rata WS Batanghari

No.	DAS	Luas DAS (Ha)	Debit Rata-rata		
			m^3/dtk	Juta m^3/tahun	mm/tahun
1	Air Hitam	162.440,49	48,07	1.520,24	933,32
2	Balai	18,61	0,01	0,17	918,19
3	Burung	5,39	0,00	0,05	918,19
4	Mudo I	74,88	0,02	0,69	918,19
5	Pedado Anak	28,31	0,01	0,26	918,19
6	Peran Kudu	34,66	0,01	0,32	900,20
7	Tengah I	1.052,99	0,31	9,67	915,64
8	Waitambi I	335,96	0,10	3,09	918,19
9	Batanghari	4.424.708,87	1.887,45	59.685,67	1.345,23
WS Batanghari		**4.588.700,16**	**1.935,97**	**61.220,16**	**1.330,51**

Sumber: Pola PSDA WS Batanghari, 2021

Sarana dan prasarana penyediaan air baku dengan sumber air baku dari WS Batanghari di Provinsi Jambi antara lain jaringan intake air baku, bendung, dan embung *multipurpose*. **Berikut sebaran embung (multipurpose) di WS. Batanghari**

Tabel 4.6 Embung (*Multipurpose*) WS Batanghari di Provinsi Jambi

No	Nama Embung	Lokasi		Debit
		Desa/Kel.	Kecamatan	m3/detik
A	**Kabupaten Bungo**			
1	Embung Purwosari	Purwosari	Pelepat Ilir	0,001
2	Embung Sei Buluh	Sei Buluh	Rimbo Tengah	0,001
B	**Kabupaten Tebo**			
1	Embung Air Menghilang	Sei Bengkal	Tebo Ilir	0,001
2	Embung Kilis	Kilis	Tebo Tengah	0,002
C	**Kabupaten Merangin**			
1	Embung Sungai Sahut	Sungai Sahut	Tabir Selatan	0,0237
2	Embung Pinang Merah	Pinang Merah	Pemenang Barat	0,0453
D	**Kota Jambi**			
1	Embung Kota Jambi	Kota Jambi	Alam Barajo	0,0086
E	**Kabupaten Sarolangun**			
1	Embung Desa Bukit	Bukit	Pelawan	0,0095
2	Embung Danau Pauh	Pauh	Pauh	0,0017
Total				**0,0938**

Sumber: Pola PSDA WS Batanghari, 2021

Dari data tabel tabel 4.6, embung di Provinsi Jambi berjumlah 9 (sembilan) dengan total debit 0,0938 m^3/detik atau 93,80 liter/detik yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota : Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, dan Kabupaten Sarolangun. Embung tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku di Provinsi Jambi

Tabel 4.7 Prasarana Penyediaan Air Baku Eksisting WS Batanghari - Provinsi Jambi

No	Lokasi	Kota/Kabupaten	Jenis Prasarana	Debit (m3/detik)
1	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Muara Sabak	Tanjung Jabung Timur	Bendung	0,1
2	Prasarana Air Baku Desa Rantai Panjang Besar	Sarolangun	Bendung	0,08
3	Prasarana Air Baku Desa Rantau Panjang Kecil	Sarolangun	Bendung	0,07

No	Lokasi	Kota/Kabupaten	Jenis Prasarana	Debit (m3/detik)
4	Prasarana Air Baku Desa Pulau Salak Baru	Sarolangun	Bendung	0,08
5	Prasarana Air Baku Desa Pekan Gedang	Sarolangun	Bendung	0,07
6	Prasarana Air Baku Desa Raden Anum	Sarolangun	Bendung	0,07
7	Prasarana Air Baku Desa Padang Jering Ulu	Sarolangun	Bendung	0,07
8	Prasarana Air Baku Desa Padang Jering Batin	Sarolangun	Bendung	0,06
9	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	Bungo	Bendung	0,1
10	Prasarana Air Baku Desa Marigeh	Bungo	Bendung	0,26
11	Prasarana Air Baku Desa Timulasi	Bungo	Free Intake	0,1
12	Prasarana Air Baku Desa Laman Panjang	Bungo	Free Intake	0,26
13	Prasarana Air Baku Desa Karak	Bungo	Bendung	0,1
14	Prasarana Air Baku Desa Lubuk Layu Kayu Aro	Bungo	Bendung	0,15
15	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	Bungo	Bendung	0,3
16	Prasarana Air Baku Desa Durian Lencak 1	Merangin	Bendung	0,07
17	Prasarana Air Baku Desa Durian Lencak 2	Merangin	Bendung	0,06
18	Prasarana Air Baku Desa Tanjung Mudo	Merangin	Bendung	0,06
19	Prasarana Air Baku Desa Birun	Merangin	Bendung	0,06
20	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	Merangin	Bendung	0,1
21	Prasarana Air Baku Desa Danau Tinggi	Kerinci	Free Intake	0,07
22	Prasarana Air Baku Desa Suku Pangkat	Kerinci	Bendung	0,07
23	Prasarana Air Baku Desa Galampek	Kerinci	Free Intake	0,07
24	Prasarana Air Baku Desa Air Terjun	Kerinci	Free Intake	0,07
25	Prasarana Air Baku Desa Kemantan Darat	Kerinci	Bendung	0,07
26	Prasarana Air Baku Desa Kemantar Tinggi	Kerinci	Free Intake	0,07
27	Prasarana Air Baku Desa Sungai Tutung	Kerinci	Free Intake	0,07
28	Prasarana Air Baku Desa Tarutung 1 dan 2	Kerinci	Free Intake	0,14
29	Prasarana Air Baku Desa Telun Berasap	Kerinci	Free Intake	0,08
30	Prasarana Air Baku Desa Pesisir Bukit	Kerinci	Free Intake	0,07
31	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Desa Koto Petai	Kerinci	Bendung	0,06
32	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Mukai Tinggi	Kerinci	Bendung	0,03

No	Lokasi	Kota/Kabupaten	Jenis Prasarana	Debit (m3/detik)
33	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Deras Mudik	Kerinci	Bendung	0,03
34	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Ampuh	Kerinci	Bendung	0,03
35	Intake dan Jaringan PipaTransmisi Jambi Barat	Kota Jambi	Free Intake	0,15
36	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi IKK Jambi Barat	Kota Jambi	Free Intake	0,15
37	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sijenjang	Kota Jambi	Free Intake	0,3
38	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Batang Merao	Kota Sungai Penuh	Free Intake	0,1
39	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Tebo	Tebo	Free Intake	0,05
40	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	Tebo	Free Intake	0,36
41	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi IKK Jaluko	Muaro Jambi	Free Intake	0,1
42	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Duren	Muaro Jambi	Free Intake	0,06
43	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Muara Tembesi	Batanghari	Free Intake	0,06
TOTAL				**4,48**

Sumber : Pola Sumber Daya Air WS. Batanghari, 2021

Prasarana Penyediaan Air Baku Eksisting (Intake dan Jaringan Air Baku) WS Batanghari di Provinsi Jambi terdapat 43 prasarana dengan total *supply* air baku sebesar 4,48 m^3/detik atau 4.480 liter/detik.

Tabel 4.8 Air Baku Intake Sungai

No	Nama Sistem Air Baku	Jenis Intake	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Debit (l/detik)	Tahun Pembuatan	Status Operasi
1	SPAB Tabir Selatan	Jembatan	Kab. Merangin	Pamenang Barat	Tanjung Lamin	40	2017	Operasi
2	SPAB Durian Luncuk	Jembatan	Kab. Batanghari	Batin Xxiv	Durian Luncuk	30	2017	Operasi
3	SPAB Tamiai	Free Intake	Kab. Kerinci	Batang Merangin	Batang Merangin	20	2017	Operasi
4	SPAB Kota Jambi	Jembatan	Kota Jambi	Danau Sipin	Legok	600	2016	Operasi
5	SPAB Jangkat	Free Intake	Kab. Merangin	Jangkat Timur	Jangkat	20	2016	Operasi
6	SPAB Bulian	Jembatan	Kab. Batanghari	Muara Bulian	Muara Bulian	60	2016	Operasi
7	SPAB Sungai Baung	Jembatan	Kab. Batanghari	Muara Bulian	Sungai Baung	30	2016	Operasi
8	SPAB Sungai Bengkal	Jembatan	Kab. Tebo	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	60	2015	Operasi
9	SPAB Bungo 1	Free Intake	Kab. Bungo	Bathin Iii Ulu	Senamat Ulu	20	2015	Operasi
10	SPAB Bungo 2	Free Intake	Kab. Bungo	Bathin Iii Ulu	Lubuk Beringin	20	2015	Operasi
11	SPAB Sarolangun 1	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Kasiro	20	2015	Operasi
12	SPAB Sarolangun 2	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Kasiro Hilir	20	2015	Operasi
13	SPAB Sarolangun 3	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Bukit Sulah	20	2015	Operasi
14	SPAB Sarolangun 4	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Padang Jering	20	2015	Operasi
15	SPAB Bangko	Jembatan	Kab. Merangin	Bangko	Pasar Bangko	40	2015	Operasi
16	SPAB Merangin 1	Free Intake	Kab. Merangin	Renah Pembarap	Muaro Panco Timur	30	2014	Operasi
17	SPAB Merangin 2	Free Intake	Kab. Merangin	Muara Siau	Pulau Raman	30	2014	Operasi
18	SPAB Merangin 3	Free Intake	Kab. Merangin	Renah Pembarap	Air Batu	30	2014	Operasi
19	SPAB Sarolangun 1	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Paniban Baru	30	2014	Operasi
20	SPAB Sarolangun 2	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Batin Pengambang	30	2014	Operasi
21	SPAB Sarolangun 3	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Tambak Ratu	30	2014	Operasi
22	SPAB Singkut	Jembatan	Kab. Sarolangun	Pelawan	Bukit	100	2014	Operasi

No	Nama Sistem Air Baku	Jenis Intake	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Debit (l/detik)	Tahun Pembuatan	Status Operasi
23	SPAB Sungai Penuh	Free Intake	Kota Sungai Penuh	Hamparan Rawang	Simpang Tiga Rawang	100	2014	Operasi
24	SPAB Jambi Barat	Free Intake	Kota Jambi	Telanaipura	Telanaipura	150	2012	Operasi
25	SPAB Desa Koto petai	Jembatan	Kab. Kerinci	Danau Kerinci	Koto Petai	60	2013	Operasi
26	SPAB Bungo	Jembatan	Kab. Bungo	Bathin Iii	Bungo Taman Agung	100	2013	Operasi
27	SPAB Tebo	Jembatan	Kab. Tebo	Tebo Ulu	Teluk Kuali	150	2013	Operasi
28	SPAB Jaluko	Free Intake	Kota Jambi	Telanaipura	Penyengat Rendah	100	2012	Operasi
29	SPAB Mukai Tinggi	Free Intake	Kab. Kerinci	Siulak Mukai	Mukai Pintu	30	2011	Operasi
30	SPAB Siulak Deras Mudik	Free Intake	Kab. Kerinci	Air Hangat Barat	Air Panas	30	2011	Operasi
31	SPAB Sungai Ampuh	Free Intake	Kota Sungai Penuh	Pondok Tinggi	Sungai Jernih	30	2011	Operasi
32	SPAB Perentak	Free Intake	Kab. Merangin	Sungai Manau	Bukit Batu	30	2010	Operasi
33	SPAB Sijenjang	Free Intake	Kota Jambi	Jambi Timur	Sijenjang	300	2009	Operasi
34	SPAB Muaro Sabak	Free Intake	Kab. Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Barat	Kampung Singkep	100	2009	Operasi
35	SPAB Sungai Duren	Free Intake	Kab. Muaro Jambi	Jambi Luar Kota	Simpang Sungai Duren	60	2009	Operasi
36	SPAB Muara Tembesi	Free Intake	Kab. Batanghari	Muara Tembesi	Suka Ramai	60	2009	Operasi
37	SPAB Merangin 1	Free Intake	Kab. Merangin	Batang Masumai	Pulau Layang	15	2008	Operasi
38	SPAB Merangin 2	Free Intake	Kab. Merangin	Batang Masumai	Pulau Layang	15	2008	Operasi
39	SPAB Merangin 3	Free Intake	Kab. Merangin	Batang Masumai		20	2008	Operasi
40	SPAB Merangin 4	Free Intake	Kab. Merangin	Sungai Manau	Durian Lecah	20	2008	Operasi
41	SPAB Merangin 5	Free Intake	Kab. Merangin	Pangkalan Jambu	Birun	17	2008	Operasi
42	SPAB Merangin 6	Free Intake	Kab. Merangin	Pangkalan Jambu	Tanjung Mudo	15	2008	Operasi
43	SPAB Merangin 7	Free Intake	Kab. Merangin	Jangkat Timur	Pematang Pauh	20	2008	Operasi

No	Nama Sistem Air Baku	Jenis Intake	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Debit (l/detik)	Tahun Pembuatan	Status Operasi
44	SPAB Merangin 8	Free Intake	Kab. Merangin	Jangkat	Pulau Tengah	15	2008	Operasi
45	SPAB Kerinci 1	Free Intake	Kab. Kerinci	Batang Merangin	Tarutung	20	2008	Operasi
46	SPAB Tarutung	Free Intake	Kab. Kerinci	Batang Merangin	Tarutung	20	2008	Operasi
47	SPAB Kerinci 3	Free Intake	Kab. Kerinci	Air Hangat Timur	Kemantan Tinggi	30	2008	Operasi
48	SPAB Kerinci 4	Free Intake	Kab. Kerinci	Air Hangat Timur	Kemantan Darat	20	2008	Operasi
49	SPAB Kerinci 5	Free Intake	Kab. Kerinci	Air Hangat Timur	Air Hangat	25	2008	Operasi
50	SPAB Kerinci 6	Free Intake	Kab. Kerinci	Gunung Kerinci	Siulak Deras Mudik	20	2008	Operasi
51	SPAB Kerinci 7	Free Intake	Kab. Kerinci	Siulak	Lubuk Nagodang	20	2008	Operasi
52	SPAB Kerinci 8	Free Intake	Kab. Kerinci	Gunung Kerinci	Siulak Deras Mudik	20	2008	Operasi
53	SPAB Kerinci 9	Free Intake	Kab. Kerinci	Gunung Kerinci	Siulak Deras	20	2008	Operasi
54	SPAB Kerinci 10	Free Intake	Kab. Kerinci	Gunung Tujuh	Bengkolan Duo	20	2008	Operasi
55	SPAB Bungo 1	Free Intake	Kab. Bungo	Rantau Pandan	Lubuk Kayu Aro	29	2008	Operasi
56	SPAB Bungo 2	Free Intake	Kab. Bungo	Rantau Pandan	Lubuk Kayu Aro	17	2008	Operasi
57	SPAB Bungo 3	Free Intake	Kab. Bungo	Rantau Pandan	Lubuk Kayu Aro	29	2008	Operasi
58	SPAB Bungo 4	Free Intake	Kab. Bungo	Bathin Iii Ulu	Karak Apung	25	2008	Operasi
59	SPAB Bungo 5	Free Intake	Kab. Bungo	Rantau Pandan	Rantau Duku	20	2008	Operasi
60	SPAB Bungo 6	Free Intake	Kab. Bungo	Muko-Muko Bathin Vii	Tanjung Agung	22	2008	Operasi
61	SPAB Sarolangun 1	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Muaro Air Dua	27	2008	Operasi
62	SPAB Sarolangun 2	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Tambak Ratu	29	2008	Operasi
63	SPAB Sarolangun 3	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Sungai Keradak	20	2008	Operasi
64	SPAB Sarolangun 4	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Muaro Air Dua	32	2008	Operasi
65	SPAB Sarolangun 5	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Sungai Keradak	25	2008	Operasi

No	Nama Sistem Air Baku	Jenis Intake	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Debit (l/detik)	Tahun Pembuatan	Status Operasi
66	SPAB Sarolangun 6	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Tambak Ratu	35	2008	Operasi
67	SPAB Sarolangun 7	Free Intake	Kab. Sarolangun	Batang Asai	Simpang Narso	35	2008	Operasi
68	SPAB Sungai Penuh	Jembatan	Kota Sungai Penuh	Hamparan Rawang	Simpang Tiga Rawang	30	2018	Operasi
69	SPAB Batanghari	Free Intake	Kab. Batanghari	Muara Bulian	Rengas Condong	90	2019	Operasi
70	Intake Pegambilan	Free Intake	Kota Jambi	Telanaipura	Penyengat Rendah	200	2021	Operasi
71	Intake Pengambilan	Jembatan	Kab. Sarolangun	Sarolangun	Pasar Sarolangun	200	2021	Operasi
Total Debit						3.817		

Sumber : WRDC BWS Sumatera VI, 2022

Berdasarkan data Pusat Data Sumber Daya Air (WRDC) Tahun 2022, jumlah sistem air baku di Provinsi Jambi sebanyak 71 buah dengan total debit 3.817 liter/detik atau 3,817. Sistem air baku ini akan dimanfaatkan sebagai sumber air minum bagi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan dan pemenuhan standar pelayanan minimal wilayah di Provinsi Jambi.

Tabel 4.9 Sumur Sebagai Sumber Air Baku di Provinsi Jambi

No	Nama Sumur	Informasi Wilayah Sungai	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Andalan (Debit Pompa) (l/det)	Tahun Pembangunan	Kondisi
1	DW-TJT-01-2018	WS PENGABUAN-LAGAN	Kab. Tanjung Jabung Timur	Geragai	Suka Maju	2,5	2018	Baik
2	DW-TJT-02-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Barat	Telukdawan	2,5	2018	Baik

No	Nama Sumur	Informasi Wilayah Sungai	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Andalan (Debit Pompa) (l/det)	Tahun Pembangunan	Kondisi
3	DW-TJT-03-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Barat	Parit Culum I	2,5	2018	Baik
4	DW-TJT-04-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Timur	Kuala Jambi	Teluk Majelis	2,5	2018	Baik
5	DW-TJT-05-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Timur	Geragai	Pandan Lagan	2,5	2018	Baik
6	DW-TJT-06-2018	WS PENGABUAN-LAGAN	Kab. Tanjung Jabung Timur	Geragai	Lagan Tengah	2,5	2018	Baik
7	DW-TJT-07-2018	WS PENGABUAN-LAGAN	Kab. Tanjung Jabung Timur	Mendahara	Mendahara Ilir	2,5	2018	Baik
8	DW-TJT-08-2018	WS PENGABUAN-LAGAN	Kab. Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Timur	Kota Raja	2,5	2018	Baik
9	DW-TJT-09-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Timur	Sungai Ular	2,5	2018	Baik
10	DW-TJT-10-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang	Teluk Kijing	2,5	2018	Baik
11	DW-TJB-01-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Jati Emas	2,5	2018	Baik
12	DW-TJB-02-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Barat	Betara	Mekar Jaya	2,5	2018	Baik
13	DW-TJB-03-2018	WS PENGABUAN-LAGAN	Kab. Tanjung Jabung Barat	Merlung	Merlung	2,5	2018	Baik

No	Nama Sumur	Informasi Wilayah Sungai	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Andalan (Debit Pompa) (l/det)	Tahun Pembangunan	Kondisi
14	DW-TJB-04-2018	WS PENGABUAN-LAGAN	Kab. Tanjung Jabung Barat	Merlung	Pinang Gading	2,5	2018	Baik
15	DW-TJB-05-2018	WS BATANGHARI	Kab. Tanjung Jabung Barat	Merlung	Adi Purwa	2,5	2018	Baik
16	DW-TJB-06-2018	WS PENGABUAN-LAGAN	Kab. Tanjung Jabung Barat	Merlung	Penyabungan	2,5	2018	Baik
17	DW-SRG-01-2018	WS BATANGHARI	Kab. Sarolangun	Cermin Nan Gedang	Lubuk Resam	2,5	2018	Baik
Total Debit (liter/detik						**42,5**		

Sumber : WRDC BWS Sumatera VI, 2022

Sumber air baku di Provinsi Jambi selain memanfaatkan air permukaan, beberapa kabupaten/kota menggunakan sumur dengan total debit 42,5 liter/detik atau 0,0425 m^3/detik Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan sumur dikarenakan Wilayah Sungai di kabupaten tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

Wilayah pengembangan melalui pemenuhan SPM antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PKW Kuala Tungkal), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (PKW Muara Sabak), Kabupaten Batanghari (PKW Muara Bulian), Kabupaten Sarolangun (PKW Sarolangun), Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo (PKW Muaro Bungo), Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin. Berikut profil dan kinerja infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Wilayah SPM:

Tabel 4.10 Prasarana Penyediaan Air Baku Wilayah SPM di Provinsi Jambi

No	Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Debit (m^3/detik)	Kondisi
I	**Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PKW Kuala Tungkal)**		**0,015**	
1	Tidak Intake Air Baku Permukaan (Sungai) karena Wilayah Sungai bukan kewenangan nasional)			
2	DW-TJB-01-2018 Jati Emas	Sumur	0,0025	Beroperasi
3	DW-TJB-02-2018 Mekar Jaya	Sumur	0,0025	Beroperasi
4	DW-TJB-03-2018 Merlung	Sumur	0,0025	Beroperasi
5	DW-TJB-04-2018 Pinang Gading	Sumur	0,0025	Beroperasi
6	DW-TJB-05-2018 Adi Purwa	Sumur	0,0025	Beroperasi
7	DW-TJB-06-2018 Penyabungan	Sumur	0,0025	Beroperasi
II	**Kabupaten Tanjung Jabung Timur (PKW Muara Sabak)**		**0,225**	
1	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Muara Sabak	Bendung	0,1	Beroperasi
2	SPAB Muaro Sabak	Free Intake	0,1	Beroperasi
3	DW-TJT-01-2018 Suka Maju	Sumur	0,0025	Beroperasi
4	DW-TJT-02-2018 Telukdawan	Sumur	0,0025	Beroperasi
5	DW-TJT-03-2018 Parit Culum I	Sumur	0,0025	Beroperasi
6	DW-TJT-04-2018 Teluk Majelis	Sumur	0,0025	Beroperasi

No	Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Debit (m^3/detik)	Kondisi
7	DW-TJT-05-2018 Pandan Lagan	Sumur	0,0025	Beroperasi
8	DW-TJT-06-2018 Lagan Tengah	Sumur	0,0025	Beroperasi
9	DW-TJT-07-2018 Mendahara Ilir	Sumur	0,0025	Beroperasi
10	DW-TJT-08-2018 Kota Raja	Sumur	0,0025	Beroperasi
11	DW-TJT-09-2018 Sungai Ular	Sumur	0,0025	Beroperasi
12	DW-TJT-10-2018 Teluk Kijing	Sumur	0,0025	Beroperasi
III	**Kabupaten Bungo (PKW Muaro Bungo)**		**1,554**	
1	Embung Purwosari	Embung	0,001	Beroperasi
2	Embung Sei Buluh	Embung	0,001	Beroperasi
3	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	Bendung	0,1	Beroperasi
4	Prasarana Air Baku Desa Marigeh	Bendung	0,26	Beroperasi
5	Prasarana Air Baku Desa Timulasi	Free Intake	0,1	Beroperasi
6	Prasarana Air Baku Desa Laman Panjang	Free Intake	0,26	Beroperasi
7	Prasarana Air Baku Desa Karak	Bendung	0,1	Beroperasi
8	Prasarana Air Baku Desa Lubuk Layu Kayu Aro	Bendung	0,15	Beroperasi
9	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	Bendung	0,3	Beroperasi
10	SPAB Bungo 1	Free Intake	0,02	Beroperasi
11	SPAB Bungo 2	Free Intake	0,02	Beroperasi
12	SPAB Bungo	Jembatan	0,1	Beroperasi
13	SPAB Bungo 1	Free Intake	0,029	Beroperasi
14	SPAB Bungo 2	Free Intake	0,017	Beroperasi
15	SPAB Bungo 3	Free Intake	0,029	Beroperasi
16	SPAB Bungo 4	Free Intake	0,025	Beroperasi
17	SPAB Bungo 5	Free Intake	0,02	Beroperasi
18	SPAB Bungo 6	Free Intake	0,022	Beroperasi

No	Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Debit (m^3/detik)	Kondisi
IV	**Kabupaten Batanghari (PKW Muara Bulian)**		**0,24**	
1	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Muara Tembesi	Free Intake	0,06	Beroperasi
2	SPAB Bulian	Jembatan	0,03	Beroperasi
3	SPAB Sungai Baung	Jembatan	0,06	Beroperasi
4	SPAB Muara Tembesi	Free Intake	0,03	Beroperasi
5	SPAB Batanghari	Free Intake	0,06	Beroperasi
V	**Kabupaten Sarolangun (PKW Sarolangun)**		**2,9867**	
1	SPAB Sarolangun 1	Free Intake	0,02	Operasi
2	SPAB Sarolangun 2	Free Intake	0,02	Operasi
3	SPAB Sarolangun 3	Free Intake	0,02	Operasi
4	SPAB Sarolangun 4	Free Intake	0,02	Operasi
5	SPAB Sarolangun 1	Free Intake	0,03	Operasi
6	SPAB Sarolangun 2	Free Intake	0,03	Operasi
7	SPAB Sarolangun 3	Free Intake	0,03	Operasi
8	SPAB Singkut	Jembatan	0,1	Operasi
9	SPAB Sarolangun 1	Free Intake	0,027	Operasi
10	SPAB Sarolangun 2	Free Intake	0,029	Operasi
11	SPAB Sarolangun 3	Free Intake	0,02	Operasi
12	SPAB Sarolangun 4	Free Intake	0,032	Operasi
13	SPAB Sarolangun 5	Free Intake	0,025	Operasi
14	SPAB Sarolangun 6	Free Intake	0,035	Operasi
15	SPAB Sarolangun 7	Free Intake	0,035	Operasi
16	Intake Pengambilan	Jembatan	2	Operasi
17	Prasarana Air Baku Desa Rantai Panjang Besar	Bendung	0,08	Operasi
18	Prasarana Air Baku Desa Rantau Panjang Kecil	Bendung	0,07	Operasi
19	Prasarana Air Baku Desa Pulau Salak Baru	Bendung	0,08	Operasi
20	Prasarana Air Baku Desa Pekan Gedang	Bendung	0,07	Operasi
21	Prasarana Air Baku Desa Raden Anum	Bendung	0,07	Operasi
22	Prasarana Air Baku Desa Padang Jering Ulu	Bendung	0,07	Operasi

No	Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Debit (m^3/detik)	Kondisi
23	Prasarana Air Baku Desa Padang Jering Batin	Bendung	0,06	Operasi
24	DW-SRG-01-2018 LUBUK RESAM	Sumur	0,0025	Operasi
25	Embung Desa Bukit	Embung	0,0095	Operasi
26	Embung Danau Pauh	Embung	0,0017	Operasi
VI	**Kabupaten Kerinci**		**1,285**	
1	SPAB Tamiai	Free Intake	0,02	Beroperasi
2	SPAB Desa Koto petai	Jembatan	0,06	Beroperasi
3	SPAB Mukai Tinggi	Free Intake	0,03	Beroperasi
4	SPAB Siulak Deras Mudik	Free Intake	0,03	Beroperasi
5	SPAB Kerinci 1	Free Intake	0,02	Beroperasi
6	SPAB Tarutung	Free Intake	0,02	Beroperasi
7	SPAB Kerinci 3	Free Intake	0,03	Beroperasi
8	SPAB Kerinci 4	Free Intake	0,02	Beroperasi
9	SPAB Kerinci 5	Free Intake	0,025	Beroperasi
10	SPAB Kerinci 6	Free Intake	0,02	Beroperasi
11	SPAB Kerinci 7	Free Intake	0,02	Beroperasi
12	SPAB Kerinci 8	Free Intake	0,02	Beroperasi
13	SPAB Kerinci 9	Free Intake	0,02	Beroperasi
14	SPAB Kerinci 10	Free Intake	0,02	Beroperasi
15	Prasarana Air Baku Desa Danau Tinggi	Free Intake	0,07	Beroperasi
16	Prasarana Air Baku Desa Suku Pangkat	Bendung	0,07	Beroperasi
17	Prasarana Air Baku Desa Galampek	Free Intake	0,07	Beroperasi
18	Prasarana Air Baku Desa Air Terjun	Free Intake	0,07	Beroperasi
19	Prasarana Air Baku Desa Kemantan Darat	Bendung	0,07	Beroperasi
20	Prasarana Air Baku Desa Kemantar Tinggi	Free Intake	0,07	Beroperasi
21	Prasarana Air Baku Desa Sungai Tutung	Free Intake	0,07	Beroperasi
22	Prasarana Air Baku Desa Tarutung 1 dan 2	Free Intake	0,14	Beroperasi

No	Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Debit (m^3/detik)	Kondisi
23	Prasarana Air Baku Desa Telun Berasap	Free Intake	0,08	Beroperasi
24	Prasarana Air Baku Desa Pesisir Bukit	Free Intake	0,07	Beroperasi
25	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Desa Koto Petai	Bendung	0,06	Beroperasi
26	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Mukai Tinggi	Bendung	0,03	Beroperasi
27	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Deras Mudik	Bendung	0,03	Beroperasi
28	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Ampuh	Bendung	0,03	Beroperasi
VII	**Kota Sungai Penuh**		**0,26**	
1	SPAB Sungai Penuh	Free Intake	0,1	Beroperasi
2	SPAB Sungai Ampuh	Free Intake	0,03	Beroperasi
3	SPAB Sungai Penuh	Jembatan	0,03	Beroperasi
4	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Batang Merao	Free Intake	0,1	Beroperasi
VIII	**Kabupaten Merangin**		**0,776**	
1	Embung Sungai Sahut	Embung	0,0237	Beroperasi
2	Embung Pinang Merah	Embung	0,0453	Beroperasi
3	Prasarana Air Baku Desa Durian Lencak 1	Bendung	0,07	Beroperasi
4	Prasarana Air Baku Desa Durian Lencak 2	Bendung	0,06	Beroperasi
5	Prasarana Air Baku Desa Tanjung Mudo	Bendung	0,06	Beroperasi
6	Prasarana Air Baku Desa Birun	Bendung	0,06	Beroperasi
7	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	Bendung	0,1	Beroperasi
8	SPAB Tabir Selatan	Jembatan	0,04	Beroperasi
9	SPAB Jangkat	Free Intake	0,02	Beroperasi
10	SPAB Bangko	Jembatan	0,04	Beroperasi
11	SPAB Merangin 1	Free Intake	0,03	Beroperasi
12	SPAB Merangin 2	Free Intake	0,03	Beroperasi
13	SPAB Merangin 3	Free Intake	0,03	Beroperasi
14	SPAB Perentak	Free Intake	0,03	Beroperasi

No	Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Debit (m^3/detik)	Kondisi
15	SPAB Merangin 1	Free Intake	0,015	Beroperasi
16	SPAB Merangin 2	Free Intake	0,015	Beroperasi
17	SPAB Merangin 3	Free Intake	0,02	Beroperasi
18	SPAB Merangin 4	Free Intake	0,02	Beroperasi
19	SPAB Merangin 5	Free Intake	0,017	Beroperasi
20	SPAB Merangin 6	Free Intake	0,015	Beroperasi
21	SPAB Merangin 7	Free Intake	0,02	Beroperasi
22	SPAB Merangin 8	Free Intake	0,015	Beroperasi
IX	**Kabupaten Tebo**		**0,623**	
1	Embung Air Menghilang	Embung	0,001	Beroperasi
2	Embung Kilis	Embung	0,002	Beroperasi
3	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Tebo	Free Intake	0,05	Beroperasi
4	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	Free Intake	0,36	Beroperasi
5	SPAB Sungai Bengkal	Jembatan	0,06	Beroperasi
6	SPAB Tebo	Jembatan	0,15	Beroperasi

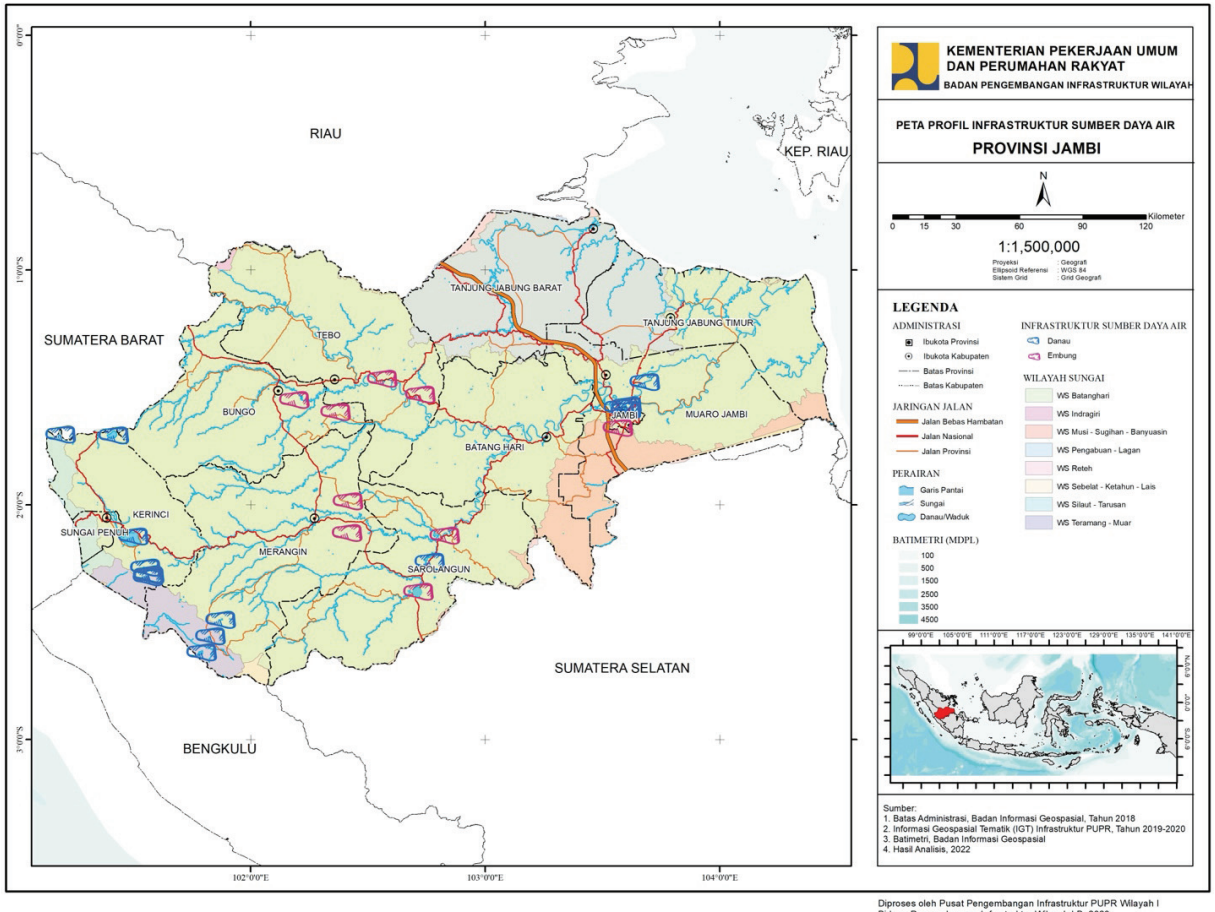
Sumber : Kompilasi Data Pola PSDA WS. Batanghari 2021 dan WRDC BWS Sumatera VI, 2022

Rekap sarana prasarana infrastruktur terpasang yang mensuplai kebutuhan air baku. Debit untuk kapasitas terpasang bendung daerah irigasi eksisting ini diasumsikan sama nilainya dengan kebutuhan air irigasi eksisting yaitu sejumlah 71,67 m^3/dtk.

Tabel 4.11 Sarana Prasarana Infrastruktur SDA Provinsi Jambi

No.	Prasarana Terpasang	Debit
1.	Embung Terpasang	0,0938
2.	Prasarana Air Baku + Intake Sungai +Sumur	8,3395
3.	Bendung Daerah Irigasi (Eksisting)	17,88
Total Kapasitas Terpasang (M^3/Dt)		**22,8355**

Sumber : Kompilasi Data Pola dan Rencana WS. Batanghari 2021 dan BWS Sumatera VI 2022



Gambar 4.1 Peta Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Jambi

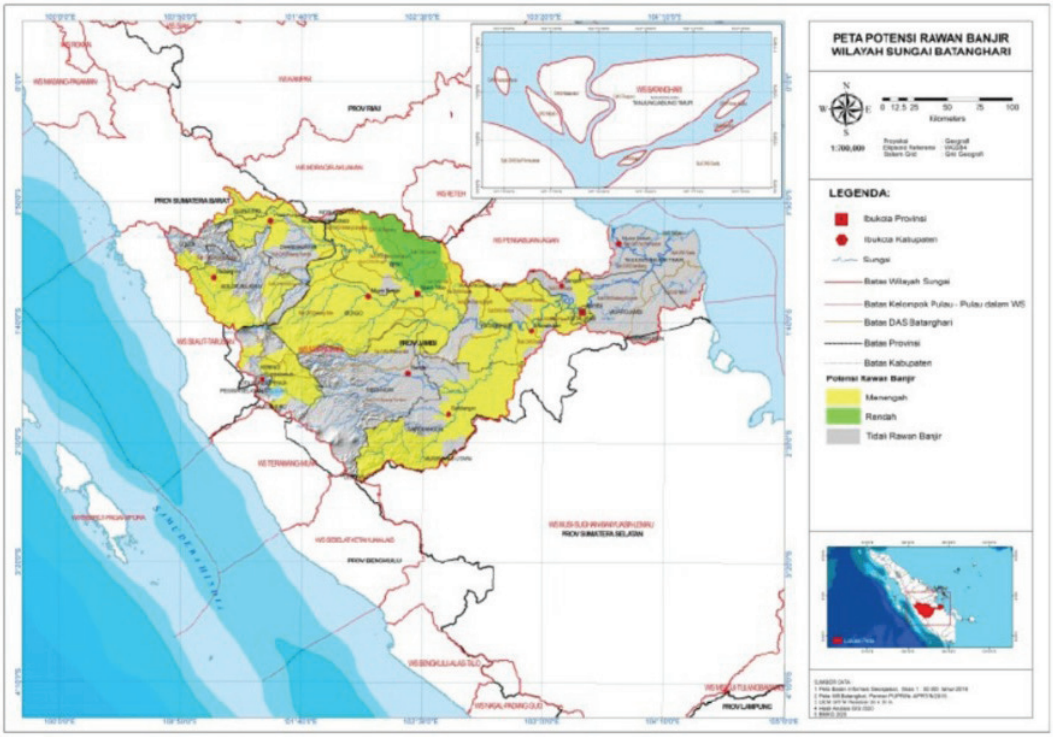
Aspek pengendalian daya rusak air yang terdapat di WS. Batanghari antara lain adalah : kerusakan atau abrasi pantai di Pesisir Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ancaman baha lahar dingin Gunung Kerinci, mitigasi bencana, dan rusaknya sarana/prasarana sumber daya air akibat bencana (banjir, erosi, longsor).

Banjir di WS. Batanghari tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi terutama pada wilayah barat dan tengah. Berikut potensi banjir di WS. Batanghari :

Tabel 4.12 Potensi Banjir Di WS. Batanghari

NO	KABUPATEN	POTENSI		
		RENDAH	MENENGAH	LUAS (HA)
1	Batanghari		328.808,95	328.808,95
2	Bungo		455.689,58	455.689,58
3	Kerinci		145.380,57	145.380,57
4	Kota Jambi		16.737,62	16.737,62
5	Kota Sungai Penuh		85,03	85,03
6	Merangin		69.515,61	69.515,61
7	Muaro Jambi		65.276,91	65.276,91
8	Sarolangun		415.859,19	415.859,19
9	Tanjung Jabung Barat		1.666,99	1.666,99
10	Tanjung Jabung Timur		1.128,72	1.128,72
11	Tebo	191.407,18	411.754,70	603.161,88
Total		**191.407,18**	**1.911.903,87**	**2.103.311,05**

Sumber: Pola PSDA WS Batanghari, 2021



Gambar 4.2 Potensi Rawan Banjir

Sumber : Pola PSDA Wilayah Sungai Batanghari, 2021

Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui bahwa mayoritas kota / kabupaten yang ada di Provinsi Jambi memiliki potensi banjir tingkat menengah. Penyebab banjir di WS Batanghari diantaranya:

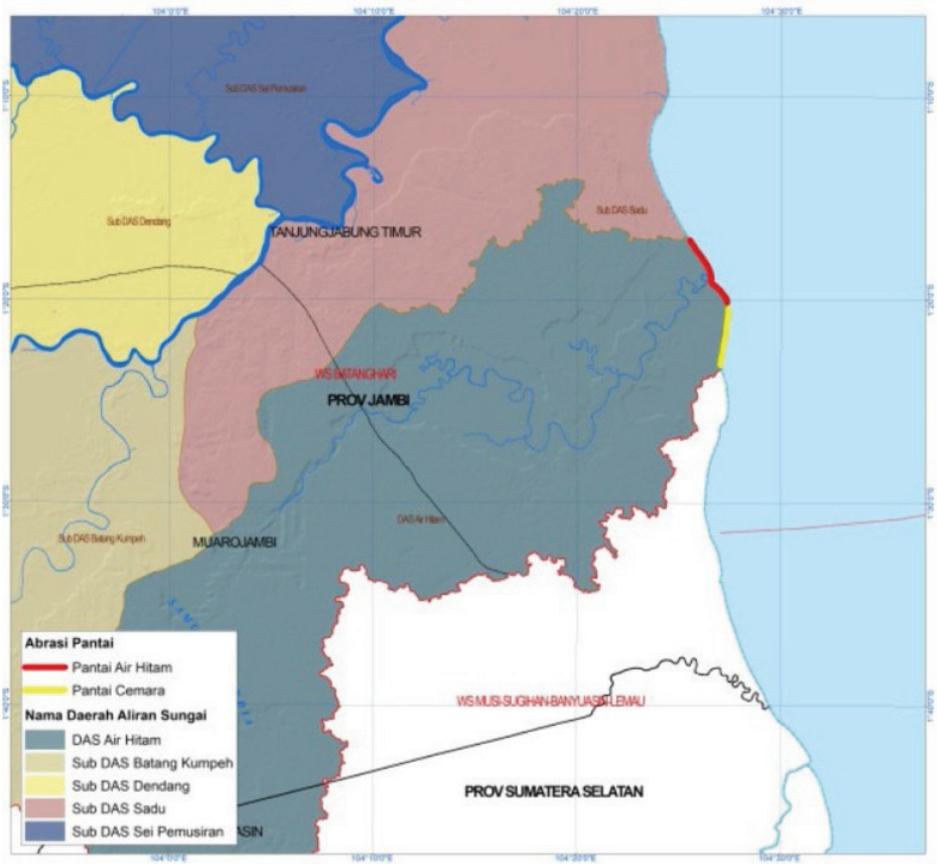
1. Pendangkalan sungai
2. Aktivitas penambangan liar yang menyebabkan perubahan morfologi sungai
3. Perubahan tata guna lahan
4. Sejumlah perencanaan pengendalian banjir terkendala sulitnya pembebasan lahan.

Tabel 4.13 Program Pengendalian Banjir di Provinsi Jambi

No	Kegiatan	Tahun	Output	Satuan	Outcome	Satuan
1	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi (JFC)	2013-2017	9,42	Km	1440,00	Ha
2	Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Batanghari Pasar Angso Duo	2016-2018	0,50	Km	235,20	Ha
3	Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Batang Masumai Kab. Merangin	2018	0,30	Km	4,00	Ha

No	Kegiatan	Tahun	Output	Satuan	Outcome	Satuan
4	Pembangunan Drainase Kota Jambi (lanjutan)	2018	0,90	Km	4,00	Ha
5	Pembangunan Drainase Utama di Kota Muara Tebo	2019-2022	30,42	Km	600,00	Ha
6	Pengaman Muara Sungai Batang Bungo Kabupaten Bungo	2020	0,20	Km	2,00	Ha
7	Normalisasi Kanal Purba Candi Muaro Jambi	2021	10,00	Km	40,00	Ha
8	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Desa Embacang Gedang Kabupaten Tebo	2021	0,25	Km	10,00	Ha
9	Pengaman Muara Sungai Batang Bungo Kabupaten Bungo (Lanjutan)	2022	0,20	Km	2,00	Ha
10	Pembangunan Drainase Muara Tebo Kabupaten Tebo (Lanjutan Tahap II)	2022	0,15	Km	2,50	Ha
11	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Desa Embacang Gedang Kabupaten Tebo (Lanjutan)	2023	0,20	Km	2,00	Ha
12	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Batanghari Desa Puntikalo Kab. Tebo	2023	0,30	Km	2,50	Ha
13	Pengendalian Banjir Kanal Purba Kawasan Candi Muaro Jambi di Kab. Muaro Jambi	2024	15,00	Km	60	Ha
14	Pembangunan Drainase Utama dan Revitalisasi Drainase Utama Kota Jambi (Loan JICA)	2023-2026	17,07	Km	180	Ha

Abrasi Pantai. Permasalahan kerusakan pantai yang terjadi WS. Batanghari dinataranya berupa permasalahan fisik yang terjadi di daerah pesisir pantai diantaranya adanlah adanya bangunan – bangunan permukiman penduduk serta fasilitas umum dan pertokoan yang terlalu dekat dengan garis pantai sehingga saat musiim gelombang bangunan ini terkena limpasan gelombang.



Gambar 4.3 Abrasi Pantai di WS Batanghari
Sumber : Pola PSDA Wilayah Sungai Batanghari, 2021

Tabel 4.14 Abrasi Pantai di Ws. Batanghari

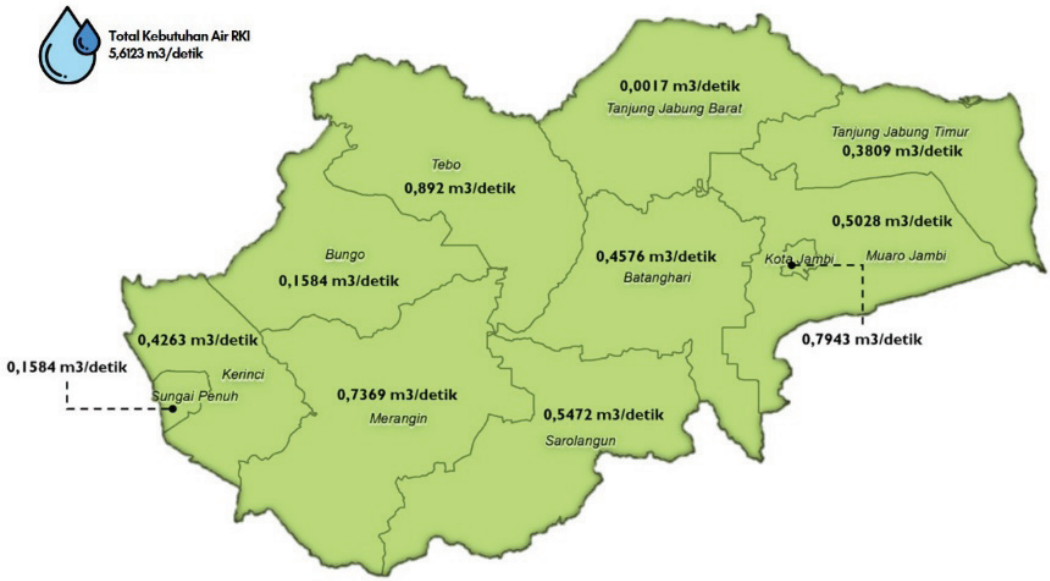
No	Pantai	Kabupaten	Panjang Abrasi (Km)
1	Air Hitam	Tanjung Jabung Timur	7
2	Cemara	Tanjung Jabung TImur	5

Sumber : Pola dan Rencana WS. Batanghari, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa abrasi pantai terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni pada Pantai Air Hitam dan Pantai Cemara. Panjang abrasi di masing masing pantai yakni sepanjang 7 km dan 5 km.

Kebutuhan Air Rumah Tangga, Perkotaan, dan Industri (RKI) yaitu kebutuhan air yang dibutuhkan oleh seseorang untuk aktivitas kesehariannya. Kebutuhan air rumah tangga atau

domestic dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, kebutuhan air perkapita dan proyeksi waktu air akan digunakan.



Gambar 4.4 Total Kebutuhan RKI Provinsi jambi
Sumber : Pola PSDA Wilayah Sungai Batanghari, 2021

Berdasarkan peta di atas, dapat diketahui bahwa kabupaten dengan total kebutuhan air RKI paling tinggi yakni Kabupaten Tebo dengan kebutuhan sebesar 0,892 m^3/detik. Sedangkan kabupaten dengan total kebutuhan air RKI paling rendah yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kebutuhan sebesar 0,0017 m^3/detik. Total kebutuhan air RKI pada Provinsi Jambi sebesar 5,6123 m^3/detik. Pada tahun 2023, terdapat beberapa infrastruktur Sumber Daya Air yang dalam proses pembangunan :

Tabel 4.15 Pembangunan Infrastruktur SDA Provinsi Jambi Tahun 2023

Nama Program (Ro / Paket)	Lokasi	Fungsi Infrastruktur Yang Dibangun	Kawasan	Output	
				Volume	Satuan
Pembangunan Drainase Utama dan Revitalisasi Drainase Utama	Kota Jambi	Pengendalian Banjir	PKN Jambi	0,15	Kilometer

Nama Program (Ro / Paket)	Lokasi	Fungsi Infrastruktur Yang Dibangun	Kawasan	Output	
				Volume	Satuan
Kota Jambi (Loan JICA)					
Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Desa Embacang Gedang Kabupaten Tebo (Lanjutan)	Kab. Tebo	Pengendalian Banjir	-	0,20	Kilometer
Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Batanghari Desa Puntikalo Kab. Tebo	Kab. Tebo	Pengendalian Daya Rusak	-	0,3	Kilometer
Revitalisasi Danau Kenali Kota Jambi; Jambi; Kota Jambi	Kota Jambi	Pengendalian Banjir	PKN Jambi	1	Unit
Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Batang Asai Paket II (Tahap II) Kabupaten Sarolangun	Kab. Sarolangun	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	PKW Sarolangun	0.6	Kilometer
Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Batang Asai Paket III (Tahap II) Kabupaten Sarolangun	Kab. Sarolangun	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	PKW Sarolangun	3	Kilometer
Pembangunan Prasarana Pengambilan Air Tanah untuk Air Baku di Provinsi Jambi	Jambi	Pemenuhan Air Baku	-	1	Unit

Sumber : Emonitoring PUPR, 2023

4.1.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Perkotaan – PKN Jambi

Fokus Perkotaan dengan kawasan prioritas yaitu PKN Jambi. PKN Jambi yang deliniasinya meliputi Kota Jambi memiliki beberapa infrastruktur yang mendukung posisinya sebagai pusat kegiatan nasional. salah satunya sektor Sumber Daya Air. Berikut profil Sumber Daya Air di PKN Jambi :

Tabel 4.16 Prasarana Penyediaan Air Baku di Perkotaan Jambi

No	Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Debit (m^3/detik)	Kondisi
1	Embung Kota Jambi	Embung	0,0086	Beroperasi
2	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Jambi Barat	Free Intake	0,15	Beroperasi
3	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi IKK Jambi Barat	Free Intake	0,15	Beroperasi
4	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sejinjang	Free Intake	0,3	Beroperasi
5	SPAB Kota Jambi	Jembatan	0,6	Beroperasi
6	SPAB Jambi Barat	Free Intake	0,15	Beroperasi
7	SPAB Jaluko	Free Intake	0,1	Beroperasi
8	SPAB Sijenjang	Free Intake	0,3	Beroperasi
9	Intake Pegambilan	Free Intake	0,2	Beroperasi
Total Debit (m^3/detik)			**1,9586**	

Sumber : Kompilasi Data Pola PSDA WS. Batanghari 2021 dan WRDC BWS Sumatera VI, 2022

Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, potensi luasan genangan banjir di Kota Jambi seluas 3.826 Ha dengan rincian genangan banjir 2.626 Ha dan genangan drainase 1.200 Ha. Setelah adanya *Jambi Flood Control* (JFC) dari tahun 2013 – Desember 2017, genangan banjir yang tertangani sebesar 1.440 Ha dengan rincian sebagai berikut :

a. Sungai Asam 1.059 Ha menggunakan pintu air dan pompa kapasitas 15 m3/detik
b. Sungai Tembuku 381 Ha menggunakan pintu air dan pompa kapasitas 5 m3/detik.

Sehingga sisa genangan banjir di Kota Jambi sebesar 2.386 Ha.
Tingginya potensi Sungai Batanghari dan belum optimalnya sistem drainase Kota Jambi merupakan salah satu penyebab banjir. Upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Jambi salah satunya adalahnya meningkatnya sistem drainase Kota Jambi yang menuju Sungai dan anak Sungai.

4.1.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Pariwisata – KSPN Muaro Jambi

Fokus Pariwisata dengan kawasan prioritas yaitu KSPN Muaro Jambi. Berikut profil infrastruktur Sumber Daya Air yang dapat mendukung pengembangan kawasan KSPN Muaro Jambi :

Tabel 4.17 Prasarana Penyediaan Air Baku di Kabupaten Muaro Jambi

No	Infrastruktur	Jenis Infrastruktur	Debit (m^3/detik)	Kondisi
1	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi IKK Jaluko	Free Intake	0,1	Beroperasi
2	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Duren	Free Intake	0,06	Beroperasi
3	SPAB Sungai Duren	Free Intake	0,06	Beroperasi
Total Debit (m^3/detik)			**0,22**	

Sumber : Kompilasi Data Pola PSDA WS. Batanghari 2021 dan WRDC BWS Sumatera VI, 2022

Prasarana penyediaan air baku di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 3 (dua) sumber air baku dengan total debit 0,22 m^3/detik. Ketersediaan air baku tersebut menjadi sumber air baku yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan kawasan KSPN Muaro Jambi. Berdasarkan Pola Rencana Sumber Daya Air WS. Batanghari, potensi banjir di Kabupaten Muaro Jambi dengan luasan 65.276,91 Ha. Alih fungsi lahan di Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu penyebab banjir. Kawasan yang terdampak banjir di Kabupaten Muaro Jambi salah satunya di KSPN Muaro Jambi atau KCBN Muaro Jambi.



Gambar 4.5 Kondisi Banjir di Komplek KSPN Muaro Jambi

Sumber : https://www.antarafoto.com/id/view/679835/wisata-banjir-candi-jambi

Pada tahun 2021 telah dimulai pekerjaan normalisasi Anak Sungai Batanghari yakni Sungai Brembeng Hilir sepanjang 8,6 km dan Sungai Amburanjalo sepanjang 3,2 km. Pekerjaan dilakukan meliputi pembersihan lapangan, galian tanah, perapihan dan pembentukan tanggul serta pemasangan pipa beton berdiameter 100 sentimeter.

Candi Muaro Jambi disebut sebagai kompleks candi karena terdapat beberapa candi dalam kawasan tersebut, di antaranya Candi Gumpung, Candi Kedaton, Candi Koto Mahligai, Candi Astano, Candi Kembar Batu, Candi Gedong Satu, Candi Gedong Dua hingga Candi Telago Rajo Selain itu di KCBN Muaro Jambi juga terdapat kanal kuno dengan dinding bata dan kolam tempat penampungan air serta sumur.

Penanganan pengendalian banjir KCBN Muaro Jambi masih menyisakan pekerjaan Sungai Brembeng Hulu dan Amburanjalo sepanjang 18,16 km, saluran Seno Beno sepanjang 9,3 km, dan saluran Klari sepanjang 5,4 km. Diharapkan dengan selesainya seluruh pekerjaan juga dapat mengembalikan kanal di sekitar KCBN Muaro Jambi sebagai sarana transportasi air serta mempercantik lansekap kawasan pariwisata di sekitar Muaro Jambi.

4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Penetapan ruas jalan nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 menurut fungsinya diklasifikasikan menjadi jalan Arteri Primer (JAP), Jalan Kolektor primer (JKP), Jalan Strategis Nasional (JSN). Provinsi Jambi memiliki 79 ruas jalan dengan panjang keseluruhan 1.318,90 km dengan klasifikasi Jalan Arteri Primer (JAP) sepanjang 806,36 km, Jalan Kolektor Primer Kelas I (JKP-1) sepanjang 262,50 km, dan Jalan Strategis Nasional (JSN) sepanjang 248,04 km. Berikut merupakan penjabaran mengenai penetapan ruas jalan nasional di Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022.

Berdasarkan data nilai *Volume Capacity Ratio* (VCR) pada semester II Tahun 2021, terdapat 12 ruas jalan nasional di Provinsi Jambi yang sudah lebih dari 0,8 atau dengan kelas *Level of Service* (LOS) D

hingga F. Kelas D mendekati arus stabil, kecepatan rendah. Kelas E arus tidak stabil, kecepatan rendah yang berbeda – beda, volume mendekati kapasitas. Kelas F arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, dan banyak berhenti. Untuk kelas F terdapat di ruas jalan Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat, Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo, Jl. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Musem Perjuangan-Sp. Pulai), dan Jln.Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang- Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi).

Tabel 4.18 Ruas Jalan Nasional di Provinsi Jambi

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar Jalan (Meter)	VCR	LOS
KOTA JAMBI								
1	5			Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi	7,17	7,45	0,23	A
2	5	12	K	Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado-Gado)	18,62	7,04	0,98	E
3	5	13	K	Sp. Gado-Gado - Sp. Sijenjang (Lingkar Timur Ii)	4,99	7,19	0,20	A
4	6	11	K	Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi)	3,52	7,67	0,96	E
5	6	12	K	Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah	1,55	11,93	0,85	D
6	6	14	K	Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat - Sp. Kota Baru)	1,81	7	0,85	D
7	6		K	Jln. M. Yamin (Sp.Pulai - Sp. Kawat)	1,71	14,6	0,58	A
8	26			Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat	2,31	8,35	1,53	F
9	26		K	Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/ Sp Rimbo	9,33	8,71	1,17	F
10	27			Bts. Kota Jambi - Talang Duku	4	6,03	0,28	A
11	27	11	K	Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp.Museum Perjuangan - Sp. Pulai)	0,87	12	1,07	F
12	27	12	K	Jln. Sultan Thaha (Jambi) (Sp.3 Jl. Fatmawati - Sp. Museum Perjuangan	1,67	17,29	0,31	A
13	27	13	K	Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp.3 Jl. Fatmawati - Sp. Duren)	1,18	11,04	0,72	C
14	27	14	K	Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang – Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi)	3,37	5,85	1,26	F

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar Jalan (Meter)	VCR	LOS
15	27	15	K	Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata - Sp.Tugu Pers)	1,44	11,81	0,14	A
16	27	16	K	Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Jelutung)	1,09	11,2	0,36	A
17	27	17	K	Jln. Jend. Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung – Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher)	2,26	12,71	0,85	D
18	27	18	K	Jln. Kol. Pol. M. Thaher (Jambi)	0,19	7	0,48	A
19	27	19	K	Jln. Rb. Siagian - Sp. Tanjung Lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi)	2,58	7	0,48	A
20	27	20	K	Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi)	1,33	7	0,48	A
KABUPATEN MUARO JAMBI								
1	3			Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar	35,45	6,71	0,48	A
2	4			Bts. Kota Jambi - Sp. Tuan	28,03	7,19	0,56	A
3	7			Bts. Kota Jambi - Tempino	16,05	6,66	0,65	B
4	8			Tempino - Bts. Prov. Sumsel	15,25	6,72	0,12	A
5	25			Sp. Mandalo Darat - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari	12,69	7,43	0,27	A
6	28	21		Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi / Kab. Tanjabtim	9,92	5,67	0,08	A
7	29	1		Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim - Bts. Kab. Tanjabtim/Kab. Tanjabbar	20,34	5,76	0,06	A
8	33			Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi	4,04	4	0,06	A
9	39	1		Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi	2,26	7,08	0,19	A
10	39	2		Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi	8,58	7	0,06	A
11	39	3		Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Tanjabtim	15,9	7	0,06	A
12	39	4		Bts. Kab Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim - Sp. Zona V	8,88	7	0,06	A
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT								
1	1			Merlung - Bts. Prov. Riau	61,27	6,74	0,10	A
2	2			Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar - Merlung	36,2	6,74	0,51	A
3	30			Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut) - Bts. Kota Kuala Tungkal	34,53	5,23	0,12	A
4	30		K	Jln. Sultan Thaha (Kuala Tungkal) (Sp. 3 Sudirman - Sp. 3 Sultan Thaha)	0,21	9,17	0,09	A
5	30		K	Jln. Sudirman (Kuala Tungkal) (Sp. Sudirman/Sri Sudewi - Sp. Sudirman/Sultan Thaha)	0,62	9,99	0,17	A

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar Jalan (Meter)	VCR	LOS
6	30		K	Jln. Sri Sudewi (Kuala Tungkal) (Bts. Kota Kuala Tungkal – Sp. Sudirman/Sri Sudewi)	4,54	12,91	0,04	A
7	42			Lubuk Kambing - Merlung	34,9	5,27	0,04	A
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR								
1	29	2		Bts. Kab. Tanjabtim / Kab. Tanjabbar - Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut)	16,62	5	0,06	A
2	40			Sp. Zona V - Pel. Muara Sabak	32,71	7,13	0,05	A
KABUPATEN TANJUNG BATANGHARI								
1	15			Muara Tembesi - Bts. Kab.Batanghari/Kab. Sarolangun	38,98	6,07	0,70	C
2	22			Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo	54,64	6,29	0,44	A
3	23			Bts. Kota Muara Bulian - Muara Tembesi	11,1	6,35	0,95	E
4	23		K	Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian)	4,66	10,16	0,66	B
5	24			Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari - Bts. Kota Muara Bulian	32,33	6,59	0,56	A
6	24		K	Jln. Gajah Mada (Muara Bulian)	4,98	10	0,36	A
KABUPATEN BUNGO								
1	9			Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Prov. Sumbar	54,37	6,83	0,67	B
2	9		K	Jln. Lintas Sumatera II Muara Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muara Bungo	4,13	7,41	0,93	E
3	10			Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin	34,05	6,6	0,37	A
4	10		K	Jln. Lintas Sumatera I Muara Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muara Bungo	5,94	15,07	0,34	A
5	18			Bts. Kab.Tebo/Kab. Bungo - Bts. Kota Muara Bungo	21,88	5,88	0,12	A
6	18		K	Jln. Pattimura Muara Bungo (Bts. Kota Muara Bungo – Sp. Jambi	3,03	5,63	0,70	C
KABUPATEN KERINCI								
1	36			Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci - Sanggaran Agung	57,39	4,93	0,05	A
2	38			Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan)	36,34	5	0,04	A
3	44			Siulak Deras/Letter W - Bts. Sumbar	35,51	**4,95**	**0,82**	**D**
KABUPATEN MERANGIN								
1	11			Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko	33,71	6,18	0,14	A

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar Jalan (Meter)	VCR	LOS
2	11		K	Jln. Lintas Sumatera Ii Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko)	5,73	7,27	0,17	A
3	12			Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko	35,48	5,79	0,12	A
4	12		K	Jln. Lintas Sumatera I Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko)	4,94	11,37	0,08	A
5	34			Bts. Kota Bangko - Sei Manau	38,47	5,84	0,05	A
6	34		K	Jln. Makalam (Bangko) (Sp. Bukit Indah Bangko - Sp. Pasar Bawah)	0,76	8,81	0,16	A
7	34		K	Jln. M. Yamin (Bangko) (Sp. Pasar Bawah - Bts. Kota Bangko)	5,47	6,93	0,18	A
8	35			Sei Manau - Bts Kab. Merangin/Kab. Kerinci	28,51	6,07	0,04	A
KABUPATEN SAROLANGUN								
1	13			Sarolangun - Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin	34,21	7,13	0,14	A
2	14			Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel	30,43	6,65	0,68	B
3	16			Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauh	40,09	5,92	0,10	A
4	17			Pauh - Sarolangun	23,46	5,86	0,15	A
KABUPATEN TEBO								
1	19			Muara Tebo - Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo	19,78	11,15	0,08	A
2	20			Sei Bengkal - Muara Tebo	52,97	6,03	0,12	A
3	21			Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo - Sei Bengkal	15,76	6,24	0,06	A
4	41	1		Sp. Niam - Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar	26,98	6,46	0,02	A
5	41	2		Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar - Lubuk Kambing	11,33	7	0,04	A
KOTA SUNGAI PENUH								
1	37			Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata)	17,45	5,42	0,10	A
2	37		K	Jln. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu Pkk - Sp. Ahmad Yani	0,26	12,43	0,05	A
3	37		K	Jln. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata – Sp. Tugu Pkk)	0,7	6,63	0,21	A
4	38		K	Jln. A. Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani – Bundaran Sungai Penuh	0,55	9,32	0,04	A
5	38		K	Jln. Soekarno-Hatta (Sungai Penuh) (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh)	0,91	8	0,06	A

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar Jalan (Meter)	VCR	LOS
6	43			Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W	21,7	**6,66**	**0,67**	**B**

Sumber : Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022

Berdasarkan survei jalan nasional pada tahun 2022, kondisi jalan pada Provinsi Jambi diklasifikasikan menjadi jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Dari seluruh klasifikasi tersebut terdapat 44,22% dalam kondisi baik, 49,23% dalam kondisi sedang, 3,18% dalam kondisi rusak, dan 3,37% dalam kondisi rusak berat. Sementara itu, kondisi kemantapan jalan pada Provinsi Jambi dinilai bahwa sebanyak 93,45% telah mencapai kondisi mantap dan 6,55% tidak mantap. Berikut merupakan penjabaran mengenai data kondisi dan kemantapan permukaan jalan nasional Provinsi Jambi Tahun 2022.

Tabel 4.19 Data Kondisi dan Kemantapan Permukaan Jalan Nasional Provinsi Jambi Tahun 2022

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
	PROVINSI JAMBI	**1313,42**	**530,63**	**40,40**	**611,99**	**46,60**	**128,36**	**9,77**	**42,43**	**3,23**	**1142,62**	**87,00**	**170,80**	**13,00**
LINTAS TIMUR		**213,76**	**118,53**	**55,45**	**86,69**	**40,55**	**8,04**	**3,76**	**0,50**	**0,23**	**205,22**	**96,00**	**8,54**	**4,00**
1100100	BTS. PROV. RIAU - MERLUNG	60,99	33,80	55,42	26,30	43,12	0,89	1,46	0,00	0,00	60,10	98,54	0,89	1,46
1100200	MERLUNG - BTS. KAB. TANJAB	35,962	22,66	63,02	13,00	36,15	0,30	0,83	0,00	0,00	35,66	99,17	0,30	0,83
1100300	BTS. KAB. TANJAB - SP. TUAN	35,148	21,35	60,74	12,70	36,13	0,90	2,56	0,20	0,57	34,05	96,87	1,10	3,13
1100400	SP. TUAN - BTS. KOTA JAMBI	28,027	21,90	78,14	6,03	21,50	0,10	0,36	0,00	0,00	27,93	99,64	0,10	0,36
1100500	BTS. KOTA JAMBI KM - MENDALO DARAT (SP. TIGA)	2,46	2,06	83,74	0,40	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	100,00	0,00	0,00
1100511	JLN. LINGKAR BARAT V (JAMBI)	4,714	2,91	61,82	1,80	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	100,00	0,00	0,00
1100611	JLN. SURYA DARMA (JAMBI)	3,519	1,80	51,15	1,72	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	100,00	0,00	0,00
1100700	BTS. KOTA JAMBI - TEMPINO	16,053	4,40	27,41	9,10	56,69	2,35	14,66	0,20	1,25	13,50	84,10	2,55	15,90
1100800	TEMPINO - BTS.PROV SUMSEL	15,247	4,35	28,51	9,20	60,34	1,60	10,49	0,10	0,66	13,55	88,85	1,70	11,15
1102600	SP. MANDALO DARAT - BTS. KOTA JAMBI / SP. RIMBO	2,309	0,80	34,65	1,51	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	0,00	0,00
1102611	BTS. KOTA JAMBI / SP. RIMBO - SP. PAL SEPULUH (JAMBI)	9,331	2,50	26,79	4,93	52,85	1,90	20,36	0,00	0,00	7,43	79,64	1,90	20,36
LINTAS TENGAH		**242,60**	**119,95**	**49,44**	**105,97**	**43,68**	**16,48**	**6,79**	**0,20**	**0,08**	**225,92**	**93,12**	**16,68**	**6,88**
1101400	SAROLANGUN - BTS. PROV. SUMSEL	30,427	19,20	63,10	10,63	34,93	0,60	1,97	0,00	0,00	29,83	98,03	0,60	1,97
1101100	BTS. KAB. BUNGO/KAB. MERANGIN - BTS. KOTA BANGKO	33,709	15,20	45,09	16,51	48,98	2,00	5,93	0,00	0,00	31,71	94,07	2,00	5,93

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1101111	JLN LINTAS SUMATERA II (BANGKO)	5,725	1,10	19,21	4,33	75,55	0,30	5,24	0,00	0,00	5,43	94,76	0,30	5,24
1101200	BTS. KOTA BANGKO - BTS. KAB. SAROLANGUN/KAB. MERANGIN	35,388	19,59	55,35	14,30	40,41	1,50	4,24	0,00	0,00	33,89	95,76	1,50	4,24
1101211	JLN. LINTAS SUMATERA I (BANGKO)	4,942	2,20	44,52	2,64	53,46	0,10	2,02	0,00	0,00	4,84	97,98	0,10	2,02
1101300	BTS. KAB. SAROLANGUN/KAB. MERANGIN - SAROLANGUN	34,136	17,34	50,79	16,50	48,34	0,30	0,88	0,00	0,00	33,84	99,12	0,30	0,88
1100900	BTS. PROV. SUMBAR - BTS. KOT MUARA BUNGO	54,23	34,80	64,17	17,23	31,77	2,20	4,06	0,00	0,00	52,03	95,94	2,20	4,06
1100911	JLN. LINTAS SUMATERA II (MUARA BUNGO)	4,127	4,03	97,58	0,10	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	100,00	0,00	0,00
1101000	BTS. KOTA MUARA BUNGO - BTS. KAB. BUNGO/KAB. MERANGIN	33,982	5,40	15,89	19,20	56,50	9,18	27,02	0,20	0,59	24,60	72,39	9,38	27,61
1101011	JLN. LINTAS SUMATERA I (MUARA BUNGO)	5,938	1,10	18,52	4,54	76,42	0,30	5,05	0,00	0,00	5,64	94,95	0,30	5,05
LINTAS PENGHUBUNG I		**233,61**	**69,80**	**29,88**	**113,35**	**48,52**	**45,93**	**19,66**	**4,53**	**1,94**	**183,15**	**78,40**	**50,46**	**21,60**
1102200	BTS. KAB. BATANGHARI/KAB. TEBO - MUARA TEMBESI	54,513	17,30	31,74	24,71	45,33	11,60	21,28	0,90	1,65	42,01	77,07	12,50	22,93
1102300	MUARA TEMBESI - BTS. KOTA MUARA BULIAN	11,101	0,60	5,40	4,90	44,15	4,80	43,24	0,80	7,21	5,50	49,55	5,60	50,45
1102311	JLN. MUARA TEMBESI (MUARA BULIAN)	4,662	0,00	0,00	3,80	81,51	0,86	18,49	0,00	0,00	3,80	81,51	0,86	18,49

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1102400	BTS. KOTA MA. BULIAN - BTS. KAB. MUARO JAMBI/KAB. BATANGHARI	32,327	16,70	51,66	13,43	41,53	2,20	6,81	0,00	0,00	30,13	93,19	2,20	6,81
1102411	JLN. GAJAH MADA (MUARA BULIAN)	4,978	0,90	18,08	3,20	64,28	0,88	17,64	0,00	0,00	4,10	82,36	0,88	17,64
1102500	BTS. KAB. MUARO JAMBI/KAB. BATANGHARI - SP. MANDALO DARAT	12,689	2,60	20,49	7,09	55,87	2,30	18,13	0,70	5,52	9,69	76,36	3,00	23,64
1102000	MUARA TEBO - SEI BENGKAL	52,886	7,00	13,24	32,10	60,70	12,09	22,85	1,70	3,21	39,10	73,93	13,79	26,07
1102100	SEI BENGKAL - BTS. KAB. BATANGHARI/KAB. TEBO	15,764	2,50	15,86	7,66	48,62	5,20	32,99	0,40	2,54	10,16	64,48	5,60	35,52
1101800	BTS. KOTA MUARA BUNGO - BTS. KAB.TEBO/KAB. BUNGO	21,877	11,30	51,65	8,28	37,83	2,30	10,51	0,00	0,00	19,58	89,49	2,30	10,51
1101811	JLN. ARAH KE MUARA TEBO / PATTIMURA (MUARA BUNGO)	3,034	2,40	79,10	0,50	16,48	0,10	3,30	0,03	1,12	2,90	95,58	0,13	4,42
1101900	BTS. KAB. TEBO/KAB. BUNGO - MUARA TEBO	19,781	8,50	42,97	7,68	38,83	3,60	18,20	0,00	0,00	16,18	81,80	3,60	18,20
LINTAS PENGHUBUNG II		**102,26**	**33,30**	**32,57**	**57,16**	**55,90**	**11,40**	**11,15**	**0,40**	**0,39**	**90,46**	**88,46**	**11,80**	**11,54**
1101500	MUARA TEMBESI - BTS. KAB. BATANGHARI/KAB. SAROLANGUN	38,829	12,50	32,19	18,83	48,49	7,10	18,29	0,40	1,03	31,33	80,68	7,50	19,32
1101600	BTS. KAB. BATANGHARI//KAB. SAROLANGUN - PAUH	39,967	13,90	34,78	23,97	59,97	2,10	5,25	0,00	0,00	37,87	94,75	2,10	5,25
1101700	PAUH - SAROLANGUN	23,46	6,90	29,41	14,36	61,21	2,20	9,38	0,00	0,00	21,26	90,62	2,20	9,38

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
LINTAS PENGHUBUNG III		**72,95**	**6,40**	**8,77**	**21,64**	**29,67**	**12,31**	**16,87**	**32,60**	**44,69**	**28,04**	**38,44**	**44,91**	**61,56**
1104100	SIMPANG NIAM - LUBUK KAMBING	38,31	2,20	5,74	5,30	13,83	2,41	6,29	28,40	74,13	7,50	19,58	30,81	80,42
1104200	LUBUK KAMBING - MERLUNG	34,641	4,20	12,12	16,34	47,17	9,90	28,58	4,20	12,12	20,54	59,30	14,10	40,70
NON LINTAS		**448,23**	**182,65**	**40,75**	**227,19**	**50,69**	**34,20**	**7,63**	**4,20**	**0,94**	**409,83**	**91,43**	**38,40**	**8,57**
1100612	JLN. PANGERAN HIDAYAT & JLN. MAYOR MARZUKI (JAMBI)	3,36	1,30	38,69	2,06	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	100,00	0,00	0,00
1100613	JLN. M. YAMIN (JAMBI)	1,712	1,40	81,78	0,31	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	100,00	0,00	0,00
1102711	JLN. SULTAN AGUNG (JAMBI)	0,869	0,10	11,51	0,77	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	100,00	0,00	0,00
1102712	JLN. SULTAN THAHA (JAMBI)	1,668	0,40	23,98	1,27	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	100,00	0,00	0,00
1102713	JLN. R. PAMUK (JAMBI)	1,183	0,00	0,00	0,98	83,09	0,20	16,91	0,00	0,00	0,98	83,09	0,20	16,91
1102714	JLN. YOS SUDARSO (JAMBI)	3,365	1,30	38,63	2,07	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	100,00	0,00	0,00
1102715	JLN. HUSNI THAMRIN (JAMBI)	1,44	0,20	13,89	1,24	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	100,00	0,00	0,00
1102716	JLN. GATOT SUBROTO (JAMBI)	1,088	0,20	18,38	0,89	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	100,00	0,00	0,00
1102717	JLN. JEND. SUDIRMAN (JAMBI)	2,258	1,56	69,00	0,70	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	100,00	0,00	0,00
1102718	JLN. SOEKARNO HATTA (JAMBI)	1,955	1,56	79,54	0,40	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	100,00	0,00	0,00
1102800	SP. TUAN - BTS. KAB. MUARO JAMBI / KAB. TANJABTIM	9,921	3,52	35,49	5,20	52,41	1,20	12,10	0,00	0,00	8,72	87,90	1,20	12,10
1102901	BTS. KAB. MUARO JAMBI/KAB. TANJABTIM - BTS. KAB. TANJABTIM / KAB. TANJABBAR	20,21	16,91	83,67	3,20	15,83	0,10	0,49	0,00	0,00	20,11	99,51	0,10	0,49
1102902	BTS. KAB. TANJABTIM / KAB.	16,622	13,80	83,02	2,52	15,17	0,30	1,80	0,00	0,00	16,32	98,20	0,30	1,80

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
	TANJABBAR - SP. TIGA BATARA GAS PLANT (P. LUMUT)													
1103000	SP. TIGA BATARA GAS PLANT (P. LUMUT) - BTS. KOTA KUALA TUNGKAL	34,527	8,40	24,33	16,33	47,29	8,20	23,75	1,60	4,63	24,73	71,62	9,80	28,38
1103011	JLN. SULTAN THAHA (KUALA TUNGKAL)	0,209	0,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00	0,00	0,00
1103012	JLN. SUDIRMAN (KUALA TUNGKAL)	0,616	0,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	0,00	0,00
1103013	JLN. SRI SUDEWI (KUALA TUNGKAL)	4,538	0,00	0,00	4,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	100,00	0,00	0,00
1100512	SP. PAL SEPULUH - SP. PAL MERAH - LINGKAR TIMUR I	18,621	5,50	29,54	12,42	66,70	0,60	3,22	0,10	0,54	17,92	96,24	0,70	3,76
1100513	LINGKAR TIMUR I - LINGKAR TIMUR II - SIJENJANG	4,993	1,40	28,04	2,69	53,94	0,90	18,03	0,00	0,00	4,09	81,97	0,90	18,03
1102700	BTS. KOTA JAMBI - TALANG DUKU	3,997	0,60	15,01	3,20	79,98	0,20	5,00	0,00	0,00	3,80	95,00	0,20	5,00
1103300	SP. CANDI MUARO JAMBI / DS. BARU - CANDI MUARO JAMBI	4,043	2,34	57,95	1,70	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	100,00	0,00	0,00
1103900	JLN. BATANGHARI II - ZONA LIMA (SP. PEL)	35,615	25,10	70,48	10,52	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	100,00	0,00	0,00
1104000	SP. ZONA LIMA - MUARA SABAK	29,93	21,63	72,27	8,30	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	100,00	0,00	0,00
1103400	BANGKO - SEI MANAU	41,174	13,40	32,54	25,17	61,14	2,60	6,31	0,00	0,00	38,57	93,69	2,60	6,31
1103411	JLN. MAKALAM (BANGKO)	0,756	0,20	26,46	0,56	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	100,00	0,00	0,00
1103412	JLN. M. YAMIN (BANGKO)	2,565	1,47	57,12	1,10	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	100,00	0,00	0,00
1103500	SEI MANAU - BTS KERINCI	28,512	10,60	37,18	17,11	60,02	0,70	2,46	0,10	0,35	27,71	97,19	0,80	2,81

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1103600	BTS. KERINCI - SANGGARAN AGUNG	56,881	11,70	20,57	35,28	62,03	8,60	15,12	1,30	2,29	46,98	82,60	9,90	17,40
1103700	SANGGARAN AGUNG - SEI PENUH	16,18	3,18	19,65	10,00	61,80	2,60	16,07	0,40	2,47	13,18	81,46	3,00	18,54
1103711	JLN. DIPONEGORO (SUNGAI PENUH)	0,258	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00
1103712	JLN. COKROAMINOTO (SUNGAI PENUH)	0,264	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00	0,00
1103713	JLN. M. YAMIN (SUNGAI PENUH)	0,585	0,00	0,00	0,39	65,81	0,20	34,19	0,00	0,00	0,39	65,81	0,20	34,19
1103714	JLN. MARTADINATA (SUNGAI PENUH)	1,968	0,50	25,41	1,47	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	100,00	0,00	0,00
1103715	JLN SULTAN THAHA (SUNGAI PENUH)	1,704	0,00	0,00	0,80	47,18	0,90	52,82	0,00	0,00	0,80	47,18	0,90	52,82
1103800	SUNGAI PENUH - BTS. PROV. SUMBAR	36,338	7,10	19,54	27,14	74,68	2,00	5,50	0,10	0,28	34,24	94,22	2,10	5,78
1103811	JLN. A. YANI (SUNGAI PENUH)	0,547	0,00	0,00	0,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00	0,00	0,00
1103812	JLN. SOEKARNO-HATTA (SUNGAI PENUH)	0,912	0,10	10,96	0,81	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	100,00	0,00	0,00
1104300	SUNGAI PENUH - SIULAK DERAS/LETTER W	21,575	14,20	65,82	6,88	31,87	0,50	2,32	0,00	0,00	21,08	97,68	0,50	2,32
1104400	SIULAK DERAS/LETTER W - BTS. SUMBAR	35,273	11,90	33,74	18,37	52,09	4,40	12,47	0,60	1,70	30,27	85,82	5,00	14,18

Sumber : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi, 2022

Keberadaan jalan tol menjadi penunjang konektivitas antar wilayah dan menunjang mobilitas manusia dan barang. Terdapat dua perencanaan pembangunan jalan tol pada wilayah Provinsi Jambi, diantaranya yaitu:

1. Tol Betung-Tempino-Jambi
2. Tol Jambi-Rengat

Rencana pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Provinsi Jambi direncanakan sepanjang 33 km pada rencana pembangunan jalan tol Betung-Tempino-Jambi dan sepanjang 117 km pada jalan tol Jambi-Rengat. Sesuai dengan data dari BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan e-monitoring Kementerian PUPR, kedua rencana jalan tol ini berada pada tahap pembangunan awal untuk ruas Betung-Tempino-Jambi (Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 3). Jalan tol Betung – Tempino – Jambi dibangun dengan dua skema pembiayaan konstruksi yaitu melalui kerjsama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sepanjang 136,3 km dan dukungan konstruksi pemerintah sepanjang 33,63 km.

Tabel 4.20 Daftar Ruas Tol di Wilayah Provinsi Jambi

No.	Ruas Tol	Panjang di Provinsi Jambi (km)	Status	Total Investasi (Triliun)	Keterangan
1	Betung-Tempino-Jambi	33	Perencanaan	25,12	Tahap awal pembangunan
2	Jambi-Rengat	117	Perencanaan	34,03	Pengadaan Tanah

Sumber: BPJT Kementerian PUPR dan emonitoring PUPR, 2023

Jembatan berperan sebagai penghubung antar daerah dan menjadi aspek penting dalam mempercepat aktivitas dan pembangunan masyarakat di wilayahnya. Pada Provinsi Jambi terdapat sembilan jembatan gantung sebagai penghubung konektivitas antar wilayah. Keberadaan jembatan gantung pada Provinsi Jambi tersebar di tiga kabupaten diantaranya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Merangin. Berikut merupakan penjabaran mengenai data jembatan gantung di Provinsi Jambi pada tahun 2019.

Tabel 4.21 Data Jembatan Gantung Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Nama Jembatan	Panjang (m)	Lokasi		Bangunan Bawah	Tahun Mulai Pembagunan	Tanggal PHO
			Desa	Kabupaen			
1	Jembatan Gantung Desa Kuala Simbur	120	Kuala Simbur	Tanjung Jabung Timur	Konstruksi Beton Bertulang dengan tiang pancang baja	2018	30 Maret 2020
2	Jembatan Gantung Desa Simbur Naik	84	Simbur Naik	Tanjung Jabung Timur	Konstruksi Beton Bertulang dengan tiang pancang baja	2019	
3	Jembatan Gantung Desa Sei. Ular	42	Sungai Ular	Tanjung Jabung Timur	Konstruksi Beton Bertulang dengan tiang pancang baja	2019	
4	Jembatan Gantung Sepakat Bersatu	96	Sepakat Bersatu	Tebo	Pondasi Bore Pile dengan kedalaman 8 m	2018	
5	Jembatan Gantung Tanah Garo	84	Tanah Garo	Tebo	Pondasi Bore Pile dengan kedalaman 8 m	2019	
6	Jembatan Gantung Olak Kemang	120	Olak Kemang	Tebo	Pondasi Bore Pile dengan kedalaman 10-11 m	2019	
7	Jembatan Gantung Embacang Gedang	120	Embacang Gedang	Tebo	Pondasi Bore Pile dengan kedalaman 12-13 m	2018	
8	Jembatan Gantung Sei Tabir Kepala Bedah	72	Sei. Tabir	Merangin	Sumuran Pilon: 7 m Sumuran Angkur: 5 m	2019	20 Februari 2020
9	Jembatan Gantung Sei Tabir	72	Dusun Baru	Merangin	Sumuran Pilon: 6,5 m	2019	

No	Nama Jembatan	Panjang (m)	Lokasi		Bangunan Bawah	Tahun Mulai Pembagunan	Tanggal PHO
			Desa	Kabupaen			
	Dusun Baru				Sumuran Angkur: 6,9 m		

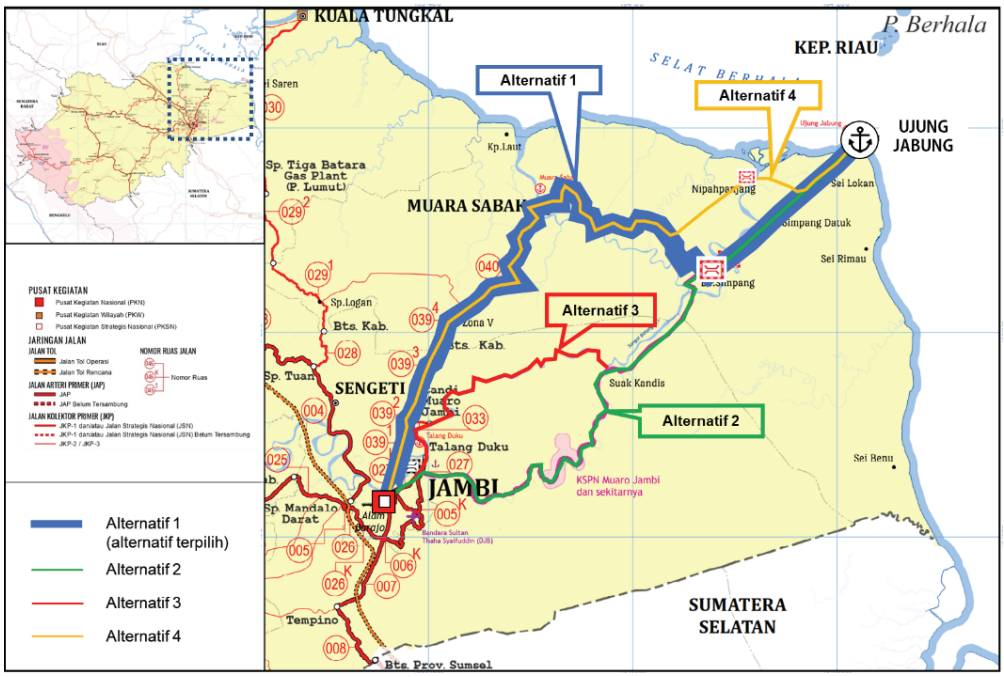
Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi, 2020

Saat ini, terdapat isu terkait pembangunan Jembatan Sei Rambut. Jembatan Sei Rambut adalah sebagai bagian konektivitas dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jambi ke lokasi Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Konektivitas antara PKN Jambi dan lokasi Pelabuhan Ujung Jabung dapat diakses melalui 4 (empat) alternatif rute. Berdasarkan hasil telaah Direktorat Jenderal Bina Marga ditentukan trase terpilih untuk rencana pembangunan Jembatan Sei Rambut. Berikut trase untuk pembangunan Jembatan Sei Rambut : Jambi – Muara Sabak – Simpang – Ujung Jabung dengan total panjang 157,62 km.

Tabel 4.22 Alternatif Terpilih Trase Pembangunan Jembatan Sei Rambut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

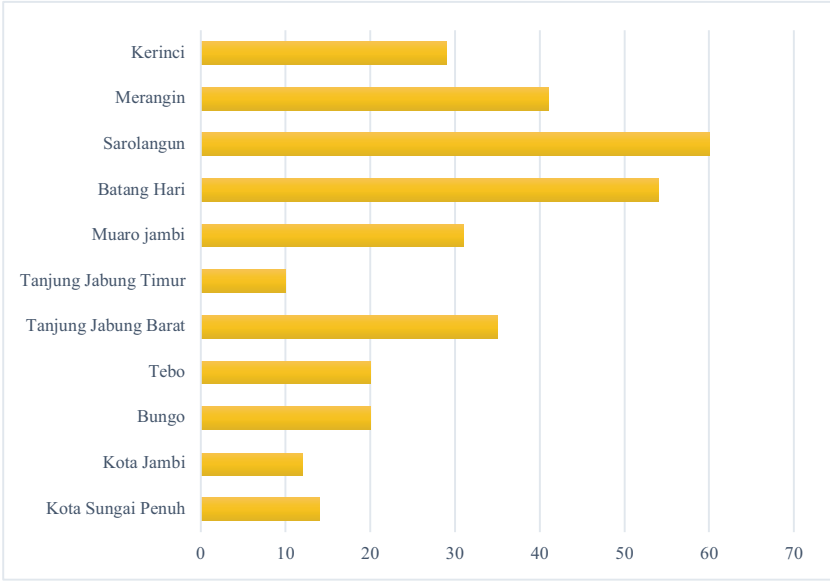
No	Ruas	Status	Panjang (Km)	Lebar		Kondisi			
				<7 m	7 m	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Jambi – Muara Sabak	Nasional	68,92	3,37	65,55	45,23 Km (65,631%)	20,79 Km (30,17%)	2,80 Km (4,06%)	0,10 Km (0,15%)
2	Muara Sabak - Simpang	Kabupten	48,4	-	48,40	15,04 Km (31,11%)	4,04 Km (8,32%)	2,84 Km (5,86%)	26,48 Km (54,71%)
3	Simpang – Ujung Jabung	Non Status	40,30	Belum ada jalan		-	-	-	-

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 2022



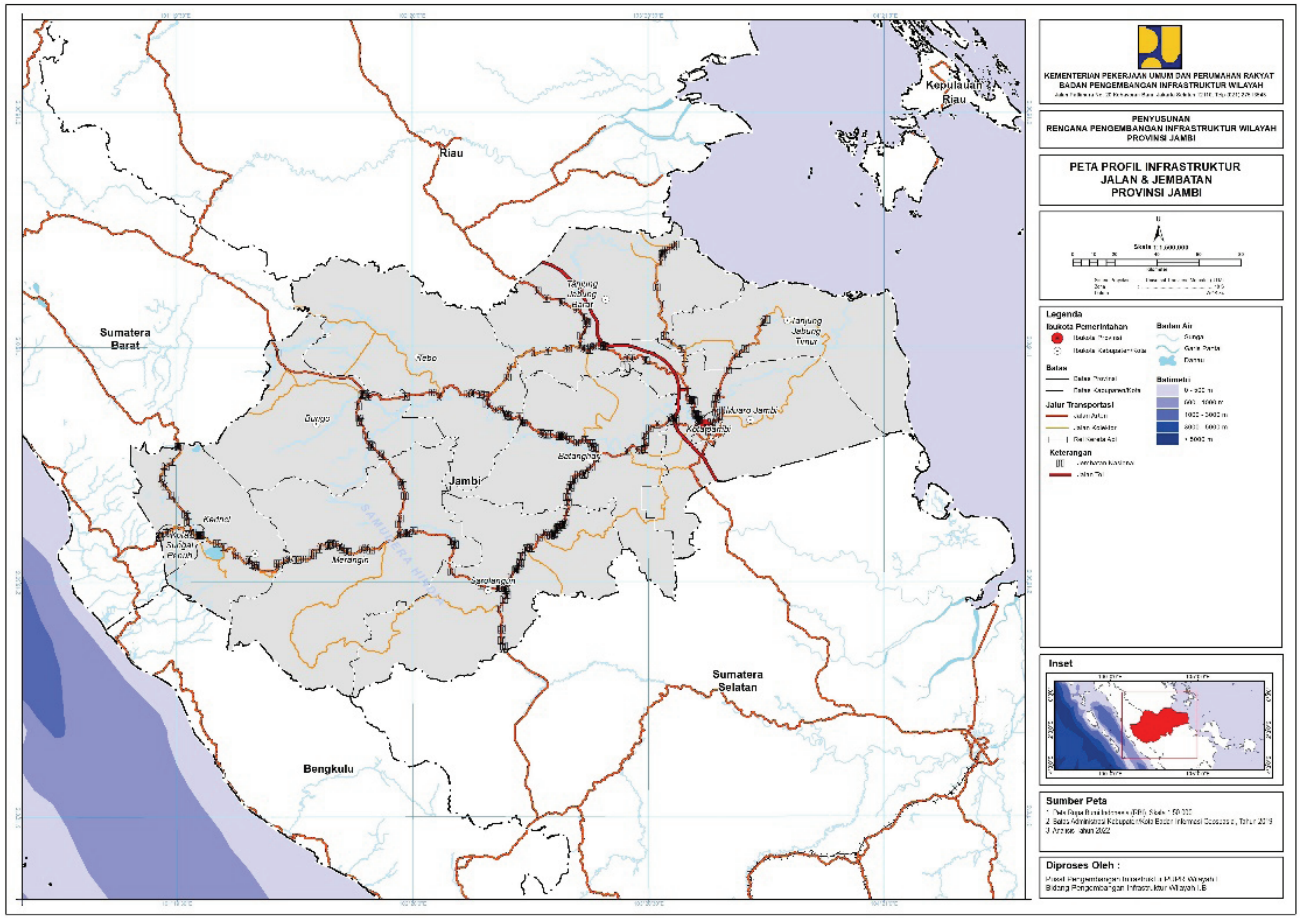
Gambar 4.6 Alternatif Trase dari PKN Jambi ke Pelabuhan Ujung Jabung

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 2022



Gambar 4.7 Diagram Jumlah Jembatan di Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Sumber : PUPR Jembatan nasional, 2019



Gambar 4.8 Peta Infrastruktur Bina Marga Provinsi Jambi

Tabel 4.23 Pembangunan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2023 di Provinsi Jambi

Nama Program (Ro / Paket)	Lokasi	Fungsi Infrastruktur Yang Dibangun	Kawasan	Output	
				Volume	Satuan
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sungai Dualap	Jambi	Konektivitas	-	96	Meter
Pembangunan Jembatan Gantung II Jambi	Jambi	Konektivitas	-	40	Meter
Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 3	Jambi	Konektivitas	PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal	15,47	Kilometer
Pembangunan Jalan Tol Jambi - Rengat	Jambi	Konektivitas	PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal	0.0001	Kilometer
Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 3	Jambi	Konektivitas	PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal	8,5	Kilometer

Sumber : Emonitoring PUPR, 2023

4.2.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Perkotaan – PKN Jambi

Kawasan PKN Jambi dilayani oleh 20 Ruas Jalan Nasional dengan Total Panjang Jalan 188,87 Kilometer. Dari total 20 ruas jalan, terdapat 9 ruas yang memiliki nilai VCR di atas 0,8 dengan LOS D-F dan terdapat 4 ruas jalan memiliki tingkat pelayanan F. Tingkat pelayanan/LOS D menunjukkan arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda – beda, volume mendekati kapasitas dan untuk LOS F menujukkan arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sering terjadi kemacetan diwaktu yang lama.

Tabel 4.24 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan PKN Jambi

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar Jalan (Meter)	VCR	LOS	Kemantapan Jalan
1	5			Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi	7,17	7,45	0,23	A	100%
2	5	12	K	Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado-Gado)	18,62	7,04	0,98	E	96,24%
3	5	13	K	Sp. Gado-Gado - Sp. Sijenjang (Lingkar Timur Ii)	4,99	7,19	0,20	A	81,97%
4	6	11	K	Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi)	3,52	7,67	0,96	E	100%
5	6	12	K	Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah	1,55	11,93	0,85	D	100%
6	6	14	K	Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat - Sp. Kota Baru)	1,81	7	0,85	D	100%
7	6		K	Jln. M. Yamin (Sp.Pulai - Sp. Kawat)	1,71	14,6	0,58	A	100%
8	26			Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat	2,31	8,35	1,53	F	100%
9	26		K	Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/ Sp Rimbo	9,33	8,71	1,17	F	79,64%
10	27			Bts. Kota Jambi - Talang Duku	4	6,03	0,28	A	100%
11	27	11	K	Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp.Museum Perjuangan - Sp. Pulai)	0,87	12	1,07	F	100%
12	27	12	K	Jln. Sultan Thaha (Jambi) (Sp.3 Jl. Fatmawati - Sp. Museum Perjuangan	1,67	17,29	0,31	A	100%
13	27	13	K	Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp.3 Jl. Fatmawati - Sp. Duren)	1,18	11,04	0,72	C	100%
14	27	14	K	Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang – Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi)	3,37	5,85	1,26	F	100%
15	27	15	K	Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata - Sp.Tugu Pers)	1,44	11,81	0,14	A	100%
16	27	16	K	Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Jelutung)	1,09	11,2	0,36	A	100%
17	27	17	K	Jln. Jend. Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung –	2,26	12,71	0,85	D	100%

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar Jalan (Meter)	VCR	LOS	Kemantapan Jalan
				Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher)					
18	27	18	K	Jln. Kol. Pol. M. Thaher (Jambi)	0,19	7	0,48	A	100%
19	27	19	K	Jln. Rb. Siagian - Sp. Tanjung Lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi)	2,58	7	0,48	A	100%
20	27	20	K	Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi)	1,33	7	0,48	A	100%

Sumber : Olahan Data BPJN Jambi, 2022

Jika dilihat dari kemantapan jalan, rata – rata kondisi jalan nasional di Kota Jambi sebagian besar sudah sangat baik mencapai 100% mantap. Kemantapan jalan paling rendah di Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/ Sp Rimbo hanya 79,64%.

4.2.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Pariwisata – KSPN Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi dilayani oleh 12 ruas jalan nasional, dan untuk kawasan KSPN Muaro Jambi dilayani oleh 5 ruas jalan nasional dengan kondisi kemantapan jalan 100% dan pelayanan jalan A.

Tabel 4.25 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan di Kawasan KSPN Muaro Jambi

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar Jalan (Meter)	VCR	LOS	Kemantapan Jalan
1	33			Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi	4,04	4	0,06	A	100%
2	39	1		Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi	2,26	7,08	0,19	A	100%
3	39	2		Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi	8,58	7	0,06	A	100%
4	39	3		Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Tanjabtim	15,9	7	0,06	A	100%
5	39	4		Bts. Kab Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim - Sp. Zona V	8,88	7	0,06	A	100%

Sumber : Olahan Data BPJN Jambi, 2022

4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Dalam rangka **penyediaan air minum** yang layak, pemerintah telah mengembangkan sistem penyediaan air minum hingga tingkat distrik dan desa pada kabupaten di Provinsi Jambi. Berdasarkan pada data infrastruktur terbangun status Desember 2020, kondisi air minum berdasarkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dapat dijabarkan sebagai berikut, dari total 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki PDAM yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengelolaan air minum di kabupaten tersebut melalui UPTD Parit Culum. Berdasarkan buku kinerja PDAM tahun 2022, diperoleh informasi 7 PDAM memiliki status sehat, 2 PDAM kurang sehat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Bungo, PDAM Status Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

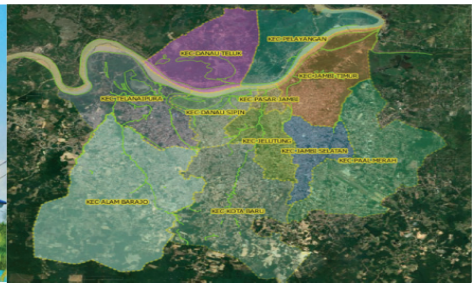
Tabel 4.26 PDAM di Provinsi Jambi

No	Wilayah	Nama BUMD	Status PDAM	Kapasitas (Liter/Detik)				
				Terpasang	Produksi	Distribusi	Air Terjual	Belum Terpakai
1	Kerinci	Perumdam Tirta Sakti	Sehat	421	313,3	300,58	165,3	72,7
2	Merangin	Perumdam Tirta Merangin	Sehat	325	223	209	136,25	102
3	Sarolangun	Perumdam Tirta Sako Batuah	Sehat	275	180,5	179,5	144,26	95
4	Batanghari	Perumdam Tirta Batanghari	Sehat	287,5	237,5	237,455	123,7	50
5	Muaro Jambi	Perumdam Tirta Muaro Jambi	Kurang Sehat	290	235	136,85	92,32	55
6	Tanjung Jabung Timur	UPTD Parit Culu	-	245	168,5	158,5	96,02	76,5
7	Tanjung Jabung Barat	Perumdam Tirta Pengabuan	Sakit	380	193,6	81,8	47,5	76,4
8	Tebo	Perumdam Tirta Muaro	Sehat	262,5	232,5	187,5	148,22	99,28
9	Bungo	Perumdam Pancuran Talago	Kurang Sehat	210	190	177	132	20
10	Kota Jambi	Perumdam Tirta Mayang	Sehat	1.530	1019	990	634	108
11	Kota Sungai Penuh	Perumdam Tirta Khayangan	Sehat	170	145	135,5	100,41	25

Sumber : Draft Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari, 2021



PDAM Tirta Mayang



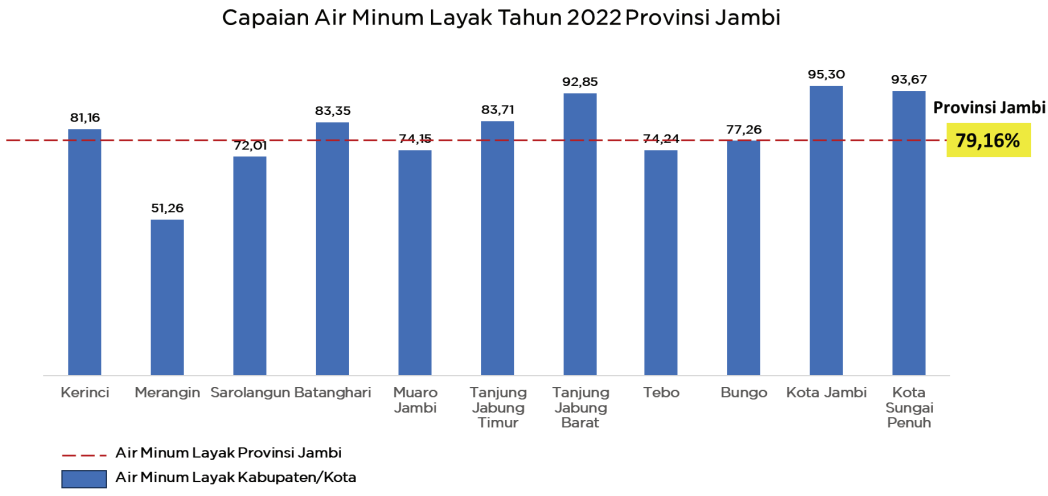
Area Pelayanan PDAM Tirta Mayang

Gambar 4.9 PDAM Tirta Mayang dan Area Pelayanannya





Gambar 4.10 PDAM Tirta Muaro



Gambar 4.11 Grafik Capaian Air Minum Layak di Provinsi Jambi Tahun 2022

Sumber : Olahan Data BPS Provinsi Jambi Tahun, 2022

Capaian air minum layak di Provinsi Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,16% dengan rincian Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh memiliki capaian air minum layak tertinggi yaitu 95,30% dan 93,67% sedangkan Kabupaten Merangin berada pada capaian air minum terendah 51,26%. Akses yang layak tersebut didapatkan dari beberapa sumber air minum yang terdapat pada tabel 4.27.

Tabel 4.27 Sumber Air Minum Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sumur Bor / Pompa	Sumur Terlindung	Mata Air Terlindung / Tak Terlindung
1	Kerinci	239.606	4,67	5,39	16,00
2	Merangin	394.174	8,26	39,06	3,58
3	Sarolangun	307.585	11,96	44,84	2,66
4	Batanghari	275.504	5,41	45,09	1,84
5	Muaro Jambi	454.524	16,83	39,33	1,10
6	Tanjung Jabung Timur	221.619	4,97	3,35	0,19
7	Tanjung Jabung Barat	339.286	11,45	8,20	0,24
8	Tebo	360.193	5,48	41,68	3,01
9	Bungo	382.311	8,97	39,90	2,24
10	Kota Jambi	611.353	6,33	14,43	0,49
11	Kota Sungai Penuh	91.739	6,17	6,90	2,14
Total		**3.677.894**			

Sumber : BPPW Provinsi Jambi, 2021

Dapat dilihat pada tabel bahwa dengan total jumlah penduduk Provinsi Jambi sebesar 3.677.894 jiwa akses air minum dapat terpenuhi oleh tiga sumber air minum yang terdiri dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung/tak terlindung.

Tabel 4.28 Penduduk Terlayani Air Minum Provinsi Jambi 2020

No	Wilayah	Kapasitas (hanya PDAM Saja) (Liter/Detik)					Target Penerima Manfaat		Belum Terlayani	
		Terpasang	Produksi	Distribusi	Air Terjual	Belum Terpakai	SR	Jiwa	SR	Jiwa
1	Kerinci	421	313,3	300,58	165,3	72,7	33.859	110.096	511	1.549
2	Merangin	325	223	209	136,25	102	31.452	135.290	14.911	52.644
3	Sarolangun	275	180,5	179,5	144,26	95	16.400	65.600	6.839	27.356
4	Batang Hari	287,5	237,5	237,46	123,7	50	20.295	81.180	(6.413)	(45.337)
5	Muaro Jambi	290	235	136,85	92,32	55	22.000	88.000	4.791	19.164
6	Tanjung Jabung Timur	245	168,5	158,5	96,02	76,5	6.126	24.504	(531)	(66.236)
7	Tanjung Jabung Barat	380	193,6	81,8	47,5	76,4	10.911	39.280	59.672	214.817
8	Tebo	262,5	232,5	187,5	148,22	99,28	22.390	86.250	6.697	26.788
9	Bungo	210	190	177,	132	20	16.800	76.000	4.883	7.030
10	Kota Jambi	1.530	1.019	990	634	108	106.940	588.320	10.638	53.190
11	Kota Sungai Penuh	170	145	135,5	100,41	25	14.146	56.584	12.705	50.819
PROVINSI JAMBI		**4.396**	**3.137,9**	**2.793,69**	**1.819,98**	**779,88**	**301.319**	**1.351.104**	**114.702**	**341.784**

Sumber : BPPW Provinsi , 2020

Akses sanitasi yang layak di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahunnya. Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2022, rata-rata akses sanitasi layak di Provinsi Jambi tergolong tinggi yaitu sebesar 79,54%. Namun, persentase tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMN 2020 – 2024 sebesar 90% dan masih terdapat wilayah dengan akses sanitasi layak terendah yaitu pada Kabupaten Kerinci dengan persentase akses sanitasi layak sebesar 68,1% dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 69,75% Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan kelayakannya untuk mendorong tercapainya target akses sanitasi layak yang telah ditetapkan.



Gambar 4.12 Diagram Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022

Sumber : Olahan Data BPS Provinsi Jambi Tahun, 2022

Tabel 4.29 Prasarana IPAL/IPLT di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/ Kota	Nama IPAL/IPAL	Tahun	Kapasitas Terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Status Keberfungsian	Kualitas
1	Kabupaten Batanghari	IPLT Muara Bulian	2016	41	2	Berfungsi	Baik
2	Kabupaten Bungo	IPLT Kab. Bungo	2017	6	4	Berfungsi	Baik
3	Kabupaten Merangin	IPLT Langling	2015	30	12	Berfungsi	Baik
4	Kabupaten Sarolangun	IPLT Tembok Cino	2016	30	3	Berfungsi	Baik
5	Kabupaten Tebo	IPLT Kab. Tebo	2019	8		Berfungsi	Baik
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	2019			Berfungsi	Baik
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	2021			Berfungsi	Baik

No	Kabupaten/ Kota	Nama IPAL/IPAL	Tahun	Kapasitas Terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Status Keberfungsian	Kualitas
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IPLT Parit Culum	2017	6	0	Berfungsi	Baik
9	Kota Jambi	IPLT Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah	2011	0,925926 liter/detik		Berfungsi	Baik
10	Kota Jambi	IPAL Komunal Ponpes Saadaturaden Kecamatan Pelayangan	2011			Berfungsi	Baik
11	Kota Jambi	IPAL Komunal Pasar Keluarga, Kecamatan Telanaipura	2011	24 liter/detik		Berfungsi	Baik
12	Kota Jambi	IPAL Terpusat Skala Kota Jambi	2020-2023	88,16		Berfungsi	Baik
13	Kota Jambi	IPAL Desa Aur Duri		3 liter/detik		Berfungsi	Baik
14	Kota Sungai Penuh	IPAL Desa Aur Duri Pondok Tinggi	2015	120	120	Berfungsi	Baik
15	Kota Sungai Penuh	IPAL Desa Koto Renah	2016	120	92	Berfungsi	Baik
16	Kota Sungai Penuh	IPAL Kawasan dan Jaringan Sistem Air Limbah Desa Mekar Jaya Kec. Tanah Kampung	2018	120	25	Berfungsi	Baik
17	Kota Sungai Penuh	IPAL Sandaran Galeh	2022	200	3,84	Berfungsi	Baik
18	Kota Sungai Penuh	IPAL Koto Tengah	2019	120	2,4	Berfungsi	Baik

Sumber : BPPW Jambi, 2023

Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk mewujudkan lingkungan yanag bersih dan sehat. Secara teknis, pengelolaan sampah ini berkaitan dengan adanya fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pada Provinsi Jambi, terdapat 9 unit TPA yang tersebar tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan sistem pengolahan sampah yang beragam yaitu *Control landfill,* dan *Sanitary Landfill*. Terdapat 2 kabupaten yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Infrastruktur persampahan terbesar di Provinsi Jambi adalah TPA Talang Gulo dengan luas 21,3 Ha yang memiliki kapasitas untuk menampung sampah sebesar 350 ton/hari dengan kapasitas TPA 350 m^3/hari.

Tabel 4.30 Prasarana TPA di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Nama TPA	Tahun Mulai Operasi	Luas TPA (Ha)	Kapasitas TPA (m3/hari)	Status Keberfungsian	Kualitas	Sistem Pengolahan
1	Kabupaten Batanghari	TPA AMD	2016	12	39.748	Berfungsi	Baik	*Controlled Landfill*
2	Kabupaten Bungo	TPA Gamut Bungo	2017	13,68	4.546.128	Berfungsi	Baik	*Sanitary Landfill*
3	Kabupaten Merangin	TPA Langling	2014	15,47	73.500	Berfungsi	Baik	*Sanitary Landfill*
4	Kabupaten Muaro Jambi	TPA Bukit Baling	2014	10	73.500	Berfungsi	Baik	*Sanitary Landfill*
5	Kabupaten Sarolangun	TPA Bukit Baru	2022	4,3	30	Berfungsi	Sangat Baik	*Sanitary Landfill*
6	Kabupaten Tebo	TPA Kab. Tebo	2018	7,7	80.430	Berfungsi	Sangat Baik	*Sanitary Landfill*
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	TPA Lubuk Terentang	2019	9,8	36.000	Berfungsi	Sangat Baik	*Sanitary Landfill*
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	TPA Parit Culum	2016	8,1	176	Berfungsi	Sangat Baik	*Sanitary Landfill*
9	Kota Jambi	TPA Talang Gulo	2021	21,3	350	Berfungsi	Sangat Baik	*Sanitary Landfill*

Sumber: BPPW Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2021, timbulan sampah yang dihasilkan oleh Provinsi Jambi mencapai 526.360,11 ton/tahun. Kota Jambi menjadi penghasil sampah terbanyak dengan total 156.103,35 ton/tahun, hal ini menandakan bahwa wilayah perkotaan di Provinsi Jambi menghasilkan timbulan sampah yang besar. Adapun komposisi sampah di TPA masih didominasi oleh sisa makanan (25%) dan plastik (38%).

Tabel 4.31 Capaian Akses Persampahan di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	Pengurangan Sampah		Penanganan Sampah		Sampah Tidak Terkelola		Capaian Akses Layanan Persampahan
		KK	KK	%	KK	%	KK	%	
1	Kerinci	63.466	6,3	0,010%	3.954	6,23%	59.499	93,75%	6,2%
2	Merangin	104.350	626	0,600%	76.802	73,60%	19.305	18,50%	74,2%
3	Sarolangun	74.525	7	0,010%	9.286	12,46%	65.232	87,53%	12,5%
4	Batang Hari	78.300	39	0,050%	8.621	11,01%	69.640	88,94%	11,1%
5	Muaro Jambi	96.971	4.907	5,06%	31.166	32,14%	60.907	62,81%	37,2%
6	Tanjung Jabung Timur	57.875	-	0,00%	34.204	59,10%	23.677	40,91%	59,1%
7	Tanjung Jabung Barat	80.538	-	0,00%	3.149	3,91%	72.065	89,48%	3,9%
8	Tebo	86.200	-	0,00%	7.060	8,19%	78.623	91,21%	8,2%
9	Bungo	93.336	8.167	8,75%	3.995	4,28%	81.174	86,97%	13,0%
10	Kota Jambi	154.535	20.630	13,35%	98.130	63,50%	35.852	23,20%	76,9%
11	Sungai Penuh	26.924	215	0,80%	1.723	6,40%	24.959	92,70%	7,2%

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	Pengurangan Sampah		Penanganan Sampah		Sampah Tidak Terkelola		Capaian Akses Layanan Persampahan
		KK	KK	%	KK	%	KK	%	
Jumlah		917.020	34.598	2,60%	278.089	25,5%	590.933	70,5%	28,1%

Sumber: BPPW Provinsi Jambi, 2022

Pembangunan TPA di setiap kabupaten/kota belum secara optimal dimanfaatkan untuk melayani pengelolaan persampahan untuk mengurangi volume sampah. Hal tersebut terlihat dari capaian akses layanan persampahan yang masih rendah, capaian rata – rata di Provinsi Jambi 28,1% dengan pelayanan tertinggi di Kota Jambi 76,9% dan Kabupaten Merangin 74,25%. Untuk capaian terendah ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3,9%.

Kawasan permukiman kumuh yang terdapat pada Provinsi Jambi memiliki total luasan 3.299,18 Ha dengan sebagian besar terdapat pada sekitar pusat kota yang memiliki karakteristik penghuninya adalah pendatang. Penanganan kawasan kumuh merupakan target prioritas pemerintah dalam pembangunan jangka menengah hingga 2019, sehingga pada akhir tahun diharapkan jumlah kawasan kumuh menjadi nol hektar. Hingga saat ini kawasan kumuh yang telah mendapatkan penanganan memiliki toal luasan 2.483,85 Ha, dengan kawasan yang belum tertangani adalah seluas 722,97 Ha untuk toal luasan kumuh > 15 Ha dan 49,03 Ha untuk toal luasan kumuh < 15 Ha.

Upaya penanganan kawasan kumuh membutuhkan satu upaya yang melibatkan para pihak terkait baik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya penanganan kawasan kumuh harus dimulai dengan upaya edukasi terhadap masyarakat yang tinggal pada kawasan kumuh tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Terkait dengan kebutuhan penanganan kawasan kumuh di Provinsi Jambi, tentu akan efektif apabila pemerintah memberikan peran lebih besar dalam proses penanganan kawasan kepada non pemerintah. Peran ini dapat diawali dengan inisiasi penyusunan rencana program penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, melakukan inisiasi untuk melibatkan peran serta swasta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan di masing-masing kabupaten/kota, melakukan sinergi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar sektor terkait dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis kawasan.

Tabel 4.32 Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Jambi

No	Nama Kab/Kota	Nama Kel/Kws	SK Kumuh		Kumuh Selesai				Penanganan Sisa Kumuh		
			Tahun SK		Kel/Kws	Luas Penanganan	Kotaku	Total	Kel/Kawasan	APBN	APBD
1	Kerinci	Permukiman Batang Sangir	SK Bupati Kerinci NO. 050/KEP.437.A/2014	105,68	Permukiman Batang Sangir	105,68					
		Siulak		12,19	Siulak	20					
TOTAL				**117,87**		**125,68**				-	-
2	Merangin	Pematang Kandis	Keputusan Bupati Merangin Nomor 49 Tahun 2020	186,08	Pasar Bangko	41,82			Pematang Kandis	186,08	
		Pasar Bangko		41,82					Pasar Atas Bangko	93,68	
		Pasar Atas Bangko		93,68							
TOTAL				**321,58**		**41,82**				279,76	0
3	Sarolangun	Pasar Bawah dan Dusun Sarolangun	SK Bupati Sarolagun NO. 416/Bappeda/2014	28,5	Pasar Bawah dan Dusun Sarolangun	28,5			Pasar Lama Pauh		10
		Pelayang		76,54	Pasar Singkut	11,12			Pelayang	76,54	
		Pasar Singkut		11,12	Pasar Lama Pauh	0,48125					
		Pasar Lama Pauh		10,93							
TOTAL				**127,09**		**40,10125**				76,54	10
4	Batanghari	Kelurahan Muara Bulian	SK Bupati Batang Hari Nomor 110 Tahun 2019	11,07	Kelurahan Pasar Muara Tembesi	32,31			Kelurahan Muara Bulian		11,07
		Kelurahan Pasar Baru		2,61					Kelurahan Pasar Baru		2,61
		Kelurahan Rengas Condong		17,83					Kelurahan Rengas Condong	17,83	
		Kelurahan Teratai		7					Kelurahan Teratai		7
		Kelurahan Kampung Baru		10,51					Kelurahan Kampung Baru		10,51

No	Nama Kab/Kota	Nama Kel/Kws	SK Kumuh		Kumuh Selesai				Penanganan Sisa Kumuh		
			Tahun SK		Kel/Kws	Luas Penanganan	Kotaku	Total	Kel/Kawasan	APBN	APBD
		Kelurahan Pasar Muara Tembesi		32,31							
TOTAL				**81,33**		**32,31**				18	31
5	**Muaro Jambi**	Desa Pijoan	SK Bupati Muaro Jambi NO. 641/KEP.BUP/BAPPEDA/2019	26,96	Desa Pijoan	26,96	5,95	32,91			
		Desa Pudak		97,94	Desa Pudak	97,94					
		Desa Muaro Kumpeh		73,77	Desa Muaro Kumpeh	73,77					
		Kelurahan Sengeti		17,47	Kelurahan Sengeti	17,47					
TOTAL				**216,14**		**216,14**				-	-
6	**Tanjung Jabung Timur**	Nipah Panjang II	SK Bupati Tanjung Jabung Timur NO. 472 TAHUN 2014	41,51	Nipah Panjang II	41,51					
		Mendahara Ilir		31,35	Mendahara Ilir	31,35					
		Pandan Jaya		10,93	Pandan Jaya	10,93					
		Muara Sabak Ilir dan Muara Sabak Ulu		41,3	Muara Sabak Timur	41,3					
		Kampung Laut dan Tanjung Solok		31,87	Kampung Laut	31,87					
TOTAL				**156,96**		**156,96**				-	-
7	**Tanjung Jabung Barat**	Tungkal Ilir	SK Bupati Tanjung Jabung Barat NO. 428/KEP.BUP/BAPPEDA/2017	122,9	Tungkal Ilir	122,9					
		Tungkal II - Tungkal III		77,3	Tungkal II - Tungkal III	77,3	77,3				
		Kampung Nelayan		35,1	Kampung Nelayan	35,1					
		Sungai Nibung		9,85	Sungai Nibung	9,85	9,85				
		Bram Itam Kiri		10,05	Bram Itam Kiri	10,05	10,05				
TOTAL				**255,2**		**255,2**				-	-
8	**Tebo**	Sungai Bengkal	No. 86 Tahun 2019	14,29	Sungai Bengkal	14,29					

No	Nama Kab/Kota	Nama Kel/Kws	SK Kumuh		Kumuh Selesai				Penanganan Sisa Kumuh		
			Tahun SK		Kel/Kws	Luas Penanganan	Kotaku	Total	Kel/Kawasan	APBN	APBD
		Pintas Tuo		2,68	Pintas Tuo	2,68					
		Pulau Temiang		13,5	Pulau Temiang	13,5					
		Tebing Tinggi		148,39	Tebing Tinggi	148,39					
		MuaraTebo		98,38	MuaraTebo	98,38					
		Teluk Singkawang		24,27	Teluk Singkawang	24,27					
		Wirotho Agung		22,04	Wirotho Agung	22,04					
		Balai Rajo		33,59	Balai Rajo	33,59					
		Sungai Abang		19,58	Sungai Abang	19,58					
		Sekutur Jaya		1,95	Sekutur Jaya	1,95					
		Karang Dadi		181,41	Karang Dadi	181,41					
		Mangupeh		3,53	Mangupeh	3,53					
		Suka Damai		3,74	Suka Damai	3,74					
TOTAL				**567,35**		**567,35**				-	-
9	**Bungo**	Jaya Setia	SK Bupati Bungo NO. 394/BAPPEDA TAHUN 2016	42,44	Jaya Setia	`	35,05		Jaya Setia		7,39
		Tanjung Gedang		22,4	Tanjung Gedang	22,4					
		Sungai Pinang		52,34	Sungai Pinang	13,33			Sungai Pinang	39,01	
		Bungo Taman Agung		20	Bungo Taman Agung	4,18			Bungo Taman Agung	15,82	
TOTAL				**137,18**		**39,91**				55	7
10	**Kota Jambi**	Orang Kayo HItam	SK Walikota Jambi NO.166 TAHUN 2016	10,06	Orang Kayo Hitam	10,06					
		Beringin		23,02	Beringin	20,57					
		Cempaka Putih - Sei Asam		45,41	Cempaka Putih - Sei Asam	45,41					
		Lebak Bandung		3,71	Lebak Bandung	3,71					

No	Nama Kab/Kota	Nama Kel/Kws	SK Kumuh		Kumuh Selesai				Penanganan Sisa Kumuh		
			Tahun SK		Kel/Kws	Luas Penanganan	Kotaku	Total	Kel/Kawasan	APBN	APBD
		Talang Jauh		18,01	Talang Jauh	18,01					
		Pakuan Baru		13,93	Pakuan Baru	13,93					
		Payo Lebar		3,41	Payo Lebar	3,41					
		Jelutung		27,03	Jelutung	27,03					
		Kebun Handil		9,89	Kebun Handil	9,89					
		Handil Jaya		4,12	Handil Jaya	4,12					
		Suka Karya		3,41	Suka Karya	3,41					
		Kenali Asam Atas		2,6	Kenali Asam Atas	2,6					
		Legok		147,34	Legok	52,32			Legok	95,02	
		Murni		14,04	Murni	14,04					
		Solok Sipin		1,61	Solok Sipin	1,61					
		Sejinjang		64,19	Sejinjang	64,19					
		Kasang		36,28	Kasang	36,28					
		Rajawali		29,41	Rajawali	29,41					
		Kasang Jaya		9,97	Kasang Jaya	9,97					
		Tanjung Sari		51,72	Tanjung Sari	51,72					
		Tanjung Pinang		53,98	Tanjung Pinang	53,98					
		Sulanjana - Budiman		55,13	Sulanjana - Budiman	55,13					
		Payo Selincah		8,79	Payo Selincah	8,79					
		Penyengat Rendah		41,13	Penyengat Rendah	41,13					
		Teluk Kenali		14,16	Teluk Kenali	14,16					
		Buluran Kenali		18,09	Buluran Kenali	18,09					
		Pematang Sulur		36,16	Pematang Sulur	36,16					
		Telanaipura		2,55	Telanaipura	2,55					

No	Nama Kab/Kota	Nama Kel/Kws	SK Kumuh		Kumuh Selesai				Penanganan Sisa Kumuh		
			Tahun SK		Kel/Kws	Luas Penanganan	Kotaku	Total	Kel/Kawasan	APBN	APBD
		Rawasari		7,29	Rawasari	7,29					
		Kenali Besar		13,64	Kenali Besar	13,64					
		Bagan Pete		6,97	Bagan Pete	6,97					
		Jelmu		12,14	Jelmu	12,14					
		Mudung Laut		31,1	Mudung Laut	31,1					
		Tengah		14,26	Tengah	14,26					
		Tanjung Johor		2,8	Tanjung Johor	2,8					
		Tanjung Pasir - Tanjung Raden - Pasir Panjang		70,54	Tanjung Pasir - Tanjung Raden - Pasir Panjang	70,54					
		Arab Melayu		23,91	Arab Melayu	23,91					
		Ulu Gedong - Olak Kemang		54,78	Ulu Gedong - Olak Kemang	54,78					
TOTAL				**986,58**		**875,47**				95,02	-
11	**Kota Sungai Penuh**	Pusat Kota	SK Walikota Sungai Penuh NO. 051/KEP.447/2016	155,61	Pusat Kota	107,096			Pusat Kota	48,514	
		Permukiman Pinggir S. Batang Merao		80,9	Pusat Permukiman	25,81			Permukiman Pinggir S. Batang Merao	80,9	
		Permukiman Pinggir Batang Sangir		69,58					Permukiman Pinggir Batang Sangir	69,58	
		Pusat Permukiman		25,81							
TOTAL				**331,9**		**132,906**				**199**	**-**
TOTAL PROVINSI						**2484,35 Ha**				**722,97**	**49,03**

Penanganan luasan kumuh oleh pemerintah pusat harus memiliki luasan minimal di atas 15 hektar. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa penanganan permukiman kumuh di Provinsi Jambi hingga tahun 2022, luasan 0 kumuh ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Kerinci. Penanganan kawasan permukiman kumuh menyisakan luasan kumuh 765 hektar.

Tabel 4.33 Pembangunan Infrastruktur CK Tahun 2023 di Provinsi Jambi

Nama Program (Ro / Paket)	Lokasi	Fungsi Infrastruktur Yang Dibangun	Kawasan	Output	
				Volume	Satuan
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah Jambi 1	Jambi			16	Unit
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah Jambi 2	Jambi			11	Unit
Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah Jambi 1	Jambi			7	Unit
Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi Jambi	Jambi			4	Unit
Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Jambi Area Barat (Paket-C)	Jambi	Sanitasi Layak	PKN Jambi	1	Kepala Keluarga
Construction of Wastewater Treatment Plant in Jambi (Jambi B1)	Jambi	Sanitasi Layak	PKN Jambi	1	Kepala Keluarga
Construction of sewerage and wastewater collection system including pumping station - East Catchment (Jambi B2)	Jambi	Sanitasi Layak	PKN Jambi	1	Kepala Keluarga
Pembangunan Bangunan Pendukung SPAM Kantor Induk Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah KabupatenTebo	Kab. Tebo			-	Sambungan Rumah

Optimalisasi SPAM Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat (NUWSP)	Kab. Tanjung Jabung Barat		PKW Kuala Tungkal	-	Sambungan Rumah

Sumber : Emonitoring PUPR, 2023

4.3.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Perkotaan – PKN Jambi

Profil dan kinerja infrastruktur permukiman untuk fokus perkotaan kawasan PKN Jambi sebagai berikut :

a. Penyediaan air minum di Perkotaan Jambi dikelola oleh PDAM Tirta Mayang dengan jumlah kapasitas terpasang 1.530 liter/detik dengan tingkat kehilangan air rata – rata 31,6% (Tabel 4.3) . Capaian pelayanan air minum di Perkotaan Jambi sudah mencapai 95,30%. Berdasarkan Buku Kinerja PDAM Tahun 2022, PDAM Tirta Mayang termasuk kelas PDAM Sehat. Jumlah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di PDAM Tirta Mayang terdapat 11 unit, 10 IPA masih berfungsi dengan baik namun 1 unit IPA Bentang sudah tidak berfungsi dikarenakan rusak.



Gambar 4.13 PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

Sumber : Dokumentasi BPIW, 2022

Tabel 4.34 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Kota Jambi

No	NAMA	STATUS	Kapasitas (Liter/Detik)					Kehilangan Air (%)	Tahun Berdiri	Sumber Air Baku		
			Terpasang	Produksi	Distribusi	Air Terjual	Belum Terpakai			Air Baku 1	Kapasitas Terpasang (liter/Detik)	Kapasitas Terpakai (Liter/Detik)
1	IPA Aurduri 1	Berfungsi	100	40	38	26	0	31,6%	1998	Intake Aurduri	400	40
2	IPA Aurduri 2	Berfungsi	100	92	90	62	10	31,1%	2014	Intake Aurduri	400	110
3	IPA Aurduri 3	Berfungsi	100	100	97	36	5	62,9%	2021	Intake Aurduri	400	95
4	IPA Broni 1	Berfungsi	350	191	186	161	50	13,4%	1982	Intake Broni 1	600	250
5	IPA Pasir Panjang	Berfungsi	40	40	37	21	0	43,2%	1992	Intake Pasir Panjang	50	40
6	IPA Perumnas Aur Duri	Berfungsi	20	19	18	12	0	33,3%	2011	Intake Aurduri	400	19
7	IPA Tanjung Johor	Berfungsi	20	12	11	9	8	18,2%	2015	Intake Tanjung Johor	20	12
8	IPA Tanjung Sari 1	Berfungsi	100	55	52	44	20	15,4%	2017	Intake Sijenjang	200	65
9	IPA Tanjung Sari 2	Berfungsi	100	60	57	45	15	21,1%	2017	Intake Sijenjang	200	65
10	Spam Kota Jambi (Ipa Broni 2 - Scada)	Berfungsi	600	410	404	218	0	46,0%	2016	Intake Broni 2	1.200	600
11	Ipa Benteng	Tidak Berfungsi							1923			
Jumlah			**1.530**	**1.019**	**990**	**634**	**108**	**31,6%**			**3.870**	**1.296**

Sumber : Olahan Data SIMSPAM, 2023

b. Pengelolaan Persampahan di Perkotaan Jambi.
Kota Jambi memiliki TPA Talang Gulo yang sudah dibangunn sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2021 membangun kembali TPA Talang Gulo dengan luas 21,3 Ha dengan kapasitas TPA 350 m^3/hari yang lokasinya bersebalahan dengan TPA lama. Sistem pengelolaan persampahan di Talang Gulo menggunakan *sanitary landfill*. Capaian sanitasi layak di Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 92,82% dengan capaian pelayanan persampahan 76,9%.



Gambar 4.14 TPA Talang Gulo Kota Jambi
Sumber : Dokumentasi BPIW, 2021

c. Sanitasi Air Limbah
Penyediaan infrastruktur sanitasi air limbah untuk Kota Jambi dapat dijabarkan sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 4.35 Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kota Jambi

No	AIR LIMBAH	Tahun	Status	Luas Area	Kapasitas Pengolahan	
					(m3/hari)	(liter/detik)
I	**KOTA JAMBI**					**113,1**
1	IPLT Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah	2011	Berfungsi	5 Ha	80	0,925926
2	IPAL Komunal Pasar Keluarga, Kecamatan Telanaipura	2011	Berfungsi		2.073,60	24
3	IPAL Terpusat Skala Kota Jambi	2020-2023	(Proses Penyelesaian Pembangunan)	10.300 SR	7600	88,16
4	IPAL Desa Aur Duri	-	Berfungsi	-	259,20	3

Sumber : Olahan Data BPPW, 2022

Pada tahun 2020 – 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat di Perkotaan Jambi melalui *Program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project (MSMIP)* yang dapat melayani 10.300 SR dengan kapasitas 7.600 m^3/hari.

d. Kawasan Permukiman Kumuh
Berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor.166 Tahun 2016, total luasan kumuh di Perkotaan Jambi mencapai 986,58 Ha, dan sudah ada penataan kumuh hingga tahun 2022 seluas 875,47 Hektar dan tersisa 95,02 Hektar di Kelurahan Legok yang ditangani.

4.3.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Pariwisata – KSPN Muaro Jambi

Profil dan kinerja infrastruktur permukiman untuk fokus pariwisata kawasan KSPN Muaro Jambi sebagai berikut :

a. Penyediaan air minum di Kabupaten Muaro Jambi dikelola oleh PDAM Tirta Muaro Jambi termasuk keperluan sumber air minum kawasan KSPN Muaro Jambi. Jumlah kapasitas terpasang 290 liter/detik dengan tingkat kehilangan air rata – rata 47% (Tabel 4.3). Capaian pelayanan air minum di Perkotaan Jambi sudah mencapai 74,16%. Berdasarkan Buku Kinerja PDAM Tahun 2022, PDAM Tirta Muaro Jambi termasuk kelas PDAM Kurang Sehat. Jumlah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di PDAM Tirta Muaro Bungo terdapat 9 unit, 8 IPA masih berfungsi dengan baik namun 1 unit IPA Tangkit sudah tidak berfungsi dikarenakan rusak. Jika melihat delineasi KSPN Muaro Jambi, kebutuhan air minum eksisting sudah melayani wilayah delineasi kawasan tersebut.
b. Pada tahun 2018, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi sudah melakukan penataan kawasan KSPN Muaro Jambi melalui penataan dan pembangunan parkir untuk para pengunjung.

Tabel 4.36 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Kabupaten Muaro Jambi

No	NAMA	STATUS	Kapasitas (Liter/Detik)					Kehilangan Air (%)	Tahun Berdiri	Sumber Air Baku		
			Terpasang	Produksi	Distribusi	Air Terjual	Belum Terpakai			Air Baku 1	Kapasitas Terpasang (liter/Detik)	Kapasitas Terpakai (Liter/Detik)
1	SPAM Sekernan	Berfungsi	30	20	13,02	5,49	10	58	1997	Sungai Batanghari (SPAM Sekernan)	30	
2	SPAM Candi	Berfungsi	5	8	2,93	1,13	-3	61	2005	Sungai Batanghari (SPAM CANDI)	5	
3	SPAM Tanjung	Berfungsi	7,5	6	1,51	0,12	1,5	92	1991	Sungai Batanghari (SPAM TANJUNG)	8	
4	SPAM Nyogan	Berfungsi	20	22	3,76	1,47	-2	61	2015	Sungai Nyogan (SPAM NYOGAN)	20	20
5	SPAM Kunangan	Berfungsi	40	20	19,94	8,51	20	57	1992	Sungai Batanghari (SPAM KUNANGAN)	40	
6	SPAM Sungai Duren	Berfungsi	50	20	18,97	17,69	30	7	1996	Air Permukaan	-	-
7	SPAM Sengeti	Berfungsi	37,5	19	14,5	3,45	18,5	76	1984	Sungai Batanghari (SPAM SENGETI)	38	
8	SPAM Mendalo	Berfungsi	100	120	62,22	54,46	-20	12	2012	Sungai Batanghari (SPAM MENDALO)	100	100
9	SPAM Tangkit	Tidak Berfungsi							2002			
Jumlah			**290**	**235**	**137**	**92**	**55**	**53,12**				

Sumber : Olahan Data SIMSPAM, 2023

c. Pengelolaan Persampahan di KSPN Muaro Jambi.
Kabupaten Muaro Jambi memiliki TPA Bukit Baling yang sudah beroperasi sejak tahun 2014, dengan luas 10 Ha dengan kapasitas TPA 73.500 m^3/hari. Sistem pengelolaan persampahan di Bukit Baling menggunakan *sanitary landfill*. Capaian sanitasi layak di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2022 sebesar 83,36% dengan capaian pelayanan persampahan 37,2%. TPA Bukit Baling dapat dimanfaatkan untuk tempat pemrosesan akhir sampah dari kawasan KSPN Muaro Jambi.



Gambar 4.15 TPA Bukit Baling
Sumber : Dokumentasi BPIW, 2021

d. Sanitasi Air Limbah
Penyediaan air limbah di Kabupaten Muaro Jambi menggunakan SPALD-S (Sistem Pengolahan Air LImbah Domestik-Setempat

Gambar 4.16 Sistem SPALD-S
Sumber : www.nawasis.org

Tabel 4.37 SPALD-S di Kabupaten Muaro Jambi

Jenis Kegiatan	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Lokasi	Pagu	Tahun	Sumber Dana	Keberfungsian	Kualitas Keberfungsian
Sanimas SPALD-S	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	Desa Kasang Pudak	500.000.000	2021	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Kumpeh Ulu	Kasang Lopak Alai	Desa Kasang Lopak Alai Jaya	500.000.000	2021	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Taman Rajo	Kunangan	Desa Kunangan,	500.000.000	2021	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Taman Rajo	Talang Duku	Desa Talang Duku	500.000.000	2021	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Mestong	Nyogan	Desa Nyogan	500.000.000	2022	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Mestong	Sungai Landai	Desa Sungai Landai	500.000.000	2022	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Bahar Utara	Talang Bukit	Desa Talang Bukit	500.000.000	2022	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Sungai Gelam	Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya	500.000.000	2022	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Bahar Utara	Talang Datar	Desa Talang Datar	500.000.000	2022	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Jambi Luar Kota	Sungai Duren	Desa Sungai Duren	500.000.000	2022	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Bahar Utara	Pinang Tinggi	Desa Pinang Tinggi	500.000.000	2022	APBN	Berfungsi	Baik
Sanimas SPALD-S	Bahar Utara	Markanding	Desa Markanding	500.000.000	2022	APBN	Berfungsi	Baik

Sumber : Olahan Data BPPW, 2022

e. Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi Nomor 641 Tahun 2019, total luasan kumuh di Kabupaten Muaro Jambi 216,14 Ha dan hingga tahun 2022 sudah tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Muaro Jambi.

4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertempat tinggal dan berlindung dari panas, hujan dan bahaya lainnya. Kebutuhan akan rumah yang layak huni dijamin oleh negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peningkatan terhadap jumlah populasi penduduk berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan akan perumahan. Dengan jumlsh populasi yang semakin banyak timbul permasalahan di lingkup masyarakat berupa kemiskinan. Kondisi kemiskinan menjadi penyebab tingginya angka *backlog* pada infrastruktur perumahan karena masyarakat berpenghasilan rendah terbatas dalam memiliki rumah layak huni. Permasalahan berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni di Pulau Sumatera dihadapkan pada kondisi kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang sangat dalam menyebabkan akses akan rumah layak huni menjadi sangat terbatas. Terbatasnya akses masyarakat di Pulau Sumatera akan rumah layak huni tercermin dari kondisi rumah tidak layak huni yang cukup besar proporsinya pada masing-masing kabupaten.

Rumah tidak layak huni berdasarkan data P3KE tahun 2023 di Provinsi Jambi mencapai angka 182.435 unit, dengan jumlah terbanyak berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 38.477 unit dan terendah di Kota Sungai Penuh sebanyak 1.057 unit. Tingginya angka RTLH pada Provinsi Jambi dapat dijadikan sebagai komitmen untuk menargetkan peningkatan terhadap akses rumah layak huni di Provinsi Jambi. Penjabaran mengenai data perumahan di Provinsi Jambi beserta data *backlog* dan rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut.

Tabel 4.38 Kondisi Infrastruktur Perumahan Provinsi jambi

Kabupaten / Kota	Jumlah RTLH	Backlog Kepemilikan Rumah	Backlog Kepenghunian Rumah
Kerinci	8.470	12.431	10.876
Merangin	21.832	10.547	9.284
Sarolangun	12.589	10.408	6.966
Batang Hari	18.255	9.845	7.921
Muaro Jambi	17.963	9.956	7.587
TanjabTimur	38.341	4.648	3.332
Tanjab Barat	22.495	14.227	9.434

Kabupaten / Kota	Jumlah RTLH	Backlog Kepemilikan Rumah	Backlog Kepenghunian Rumah
Tebo	13.947	7.832	5.727
Bungo	12.564	12.338	9.107
Kota Jambi	14.922	45.777	14.387
Kota Sungai Penuh	1.057	5.758	3.447
Total	**182.435**	**143.767**	**88.066**

Sumber : BP2P Sumatera IV 2022 dan Data P3KE 2023

Tabel 4.39 Total Penanganan RTLH di Provinsi Jambi 2016 -2022

NO	Kabupaten/Kota	Tahun						Total Penanganan 2016-2022
		2016	2017	2018	2020	2021	2022	
	Provinsi Jambi	**1.829**	**2.500**	**4.280**	**5.100**	**2.963**	**1.300**	**22.472**
1	Kota Jambi	300	232	565	555	263	36	2.251
2	Muaro Jambi	250	238	330	1.035	606	263	3.687
3	Batanghari	-	251	488	630	377	176	2.232
4	Sarolangun	-	267	275	365	332	44	1.383
5	Merangin	80	-	302	245	253	35	1.080
6	Kerinci	400	233	212	100	287	30	1.482
7	Kota Sungai Penuh	-	214	630	450	-	-	1.504
8	Tebo	-	330	327	450	239	190	2.596
9	Bungo	250	262	564	470	278	123	2.337
10	Tanjung Jabung Barat	249	223	587	610	268	257	2.539
11	Tanjung Jabung Timur	300	250	-	190	60	146	1.381

Sumber : BP2P Sumatera IV, 2022

Total peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Jambi hingga tahun 2022 sudah mencapai 22.472 unit sehingga jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jambi tersisa 72.404 unit. Jumlah bantuan terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi dengan total 3.687 unit. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 sudah terdapat 14 Rumah Susun (Rusun) di Provinsi Jambi. Penyediaan rumah susun diperuntukkan untuk ASN/TNI/POLRI, mahasiswa, dan pondok pesantren.

Tabel 4.40 Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Jambi

NO	Kabupaten/Kota	Nama Rusun	Tahun Anggaran	Tipe	Tower	Jumlah Unit	Proses Serah Terima Aset
1	Kota Jambi	Rusun Pemkot Jambi RSUD Abdul Manaf	2017	36/ 5 lantai	1	70	Telah diterbitkan SK Penghapusan dan BAST

NO	Kabupaten/Kota	Nama Rusun	Tahun Anggaran	Tipe	Tower	Jumlah Unit	Proses Serah Terima Aset
2	Muaro Jambi	Rusun Ponpes AS - Nur Tangkit	2016	Barak/3 Lantai	1	12	Telah diterbitkan SK Penghapusan dan BAST
3	Muaro Jambi	Rusun Ponpes Sirojul Mukhlasin	2021	Barak Mini	1	21	Belum bisa diproses serah terima aset
4	Muaro Jambi	Rusun Universitas Muhammadiyah	2021	24/3 lantai	1	43	Belum bisa diproses serah terima aset
5	Muaro Jambi	Rusun BPJN IV Jambi	2021	45/ 4 lantai	1	44	Belum bisa diproses serah terima aset
6	Merangin	Rusun Dinas Perumahan, Perkotaan, dan Kebersihan	2017	36/5 lantai	1	70	Telah diterbitkan SK Penghapusan dan BAST
7	Sarolangun	Rusun STAI Maarif	2018	SKCL/ 3 Lantai	1	37	Telah diterbitkan SK Penghapusan dan BAST
8	Sarolangun	Rusun Pemkab Sarolangun	2020-2021 (MYC)	36 / 3 Lantai	1	44	Belum bisa diproses serah terima aset
9	Tanjung Jabung Barat	Rusun Ponpes Al Baqiyatush Shalihat	2018	SKCL /3 Lantai	1	24	Telah diterbitkan SK Penghapusan dan BAST
10	Tebo	Rusun Pemkab Tebo	2018	36 / 3 Lantai	1	42	Telah diterbitkan SK Penghapusan dan BAST
11	Tebo	Rusun Ponpes Darul Hakim	2019	36 / 3 Lantai	1	42	Proses penandatanganan BAST dan Naskah Hibah
12	Bungo	Rusun Pemkab Bungo (RSUD Hanafie Muaro Bungo)	2018	36 / 3 Lantai	1	42	Telah diterbitkan SK Penghapusan dan BAST
13	Tanjung Jabung Timur	Rusun Pemkab Tanjung Jabung Timur	2018	36 / 3 Lantai	1	42	Proses penandatanganan BAST dan Naskah Hibah
14	Tanjung Jabung Timur	Ponpes Bustanul Uum	2019	Barak/ 2 Lantai	1	14	Telah diterbitkan SK Penghapusan dan BAST

Sumber : BP2P Sumatera IV, 2022

Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat tidak hanya melalui program BSPS atau Rusun saja, tetapi juga terdapat program Pembangunan Rumah Khusus. Pembangunan rusus biasanya ditujukan untuk daerah pesisir atau relokas bencana. Adapun pembangunan rumah khusus yang dilaksanakan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 4.41 Pembangunan Rumah Khusus di Provinsi Jambi

NO	Kabupaten/Kota	Tahun	Penerima Manfaat	Tipe Unit	Kecamatan	Desa
1	Merangin	2016	POLRI	36/Koppel	Merangin	Salambuku

NO	Kabupaten/Kota	Tahun	Penerima Manfaat	Tipe Unit	Kecamatan	Desa
2	Tebo	2016	POLRI		Rimbo Ulu	Suka Damai
3	Tebo	2016	POLRI		Tebo Ilir	Sungai Bengkal
4	Tanjung Jabung Barat	2017	Nelayan	36	Tungkal Ilir	Tungkal II
5	Tanjung Jabung Timur	2017	Nelayan	36	Nipah Panjang	Nipah Panjang II
6	Sarolangun	2017	Suku Anak Dalam	36	Cermin Nan Gadang	Sekamis
7	Merangin	2017	Suku Anak Dalam	36	Pamenang	Sialang
8	Merangin	2018	Suku Anak Dalam	28	Renah Pamenang	Lantak Seribu
9	Sarolangung	2018	Suku Anak Dalam	28	Air Hitam	Lubuk Jering
10	Tanjung Jabung Timur	2018	Nelayan	28	Mendahara	Mendahara Ilir
11	Tanjung Jabung Timur	2019	Muara Sabak Timur	28	Muara Sabak	Kuala Simbur
12	Kota Jambi	2019	Nelayan	36	Telanaipura	Buluran Kenali
13	Muaro Jambi	2019	Rumah Atlet	36	Kumpeh Ulu	Desa Tarikan
14	Kota Jambi	2019	Rumah Atlet	36	Danau Sipin	Legok
15	Kota Jambi	2019	Rumah Atlet	36	Danau Sipin	Legok
16	Kota Jambi	2019	Rumah Atlet	36	Danau Sipin	Legok
17	Kota Jambi	2020	Rumah Atlet	36	Kota Baru	Rawa Sari
18	Kota Jambi	2020	Rumah Atlet	36	Kota Baru	Paal Lima
19	Muaro Jambi	2020	Rumah Atlet	36	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah
20	Batanghari	2021	Masyarakat Relokasi Sempadan Sungai Batanghari	36	Muara Bulian	Rengas Condong

Sumber : BP2P Sumatera IV, 2022

Tabel 4.42 Pembangunan Infrastruktur Perumahan Tahun 2023 di Provinsi Jambi

Nama Program (Ro / Paket)	Lokasi	Fungsi Infrastruktur Yang Dibangun	Kawasan	Output	
				Volume	Satuan
Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Kampung Tahfidz Al-Kautsar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (PSU23-JAMBI-MUAROJAMBI-01)	Kab. Muaro Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni	Non Kawasan	50	Unit
Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Aura Residence 2, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (PSU23-JAMBI-MUAROJAMBI-02)	Kab. Muaro Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni	Non Kawasan	67	Unit
Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Permata Residence, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (PSU23-JAMBI-TEBO-03)	Kab. Tebo	Penyediaan Rumah Layak Huni	Non Kawasan	54	Unit
Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Aziziyah Residence, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi (PSU23-JAMBI-BUNGO-04)	Kab. Bungo	Penyediaan Rumah Layak Huni	Non Kawasan	50	Unit
Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Al-Kautsar 6, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi (PSU23-JAMBI-BUNGO-05)	Kab. Bungo	Penyediaan Rumah Layak Huni	PKN Jambi	72	Unit
Pembangunan PSU Rumah Umum MBR 6	Jambi	Penyediaan PSU Layak		1	Paket
Pembangunan PSU Rumah Umum MBR 7	Jambi	Penyediaan PSU Layak		1	Paket
Pembangunan PSU Rumah Umum MBR 8	Jambi	Penyediaan PSU Layak		1	Paket
Pembangunan Jalan Akses PSU Perumahan Skala Besar Di Kota Jambi, Provinsi Jambi (PSU23-JAMBI-KOTAJAMBI-06)	Jambi	Penyediaan PSU Layak		1	Paket
Pembangunan Jalan Penghubung PSU Perumahan Skala Besar Di Kota Jambi, Provinsi Jambi (PSU23-JAMBI-KOTAJAMBI-07)	Jambi	Penyediaan PSU Layak		1	Paket
MYC Pembangunan Rumah Susun RSUD Raden Mattaher	Kota Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni		1	Paket

Nama Program (Ro / Paket)	Lokasi	Fungsi Infrastruktur Yang Dibangun	Kawasan	Output	
				Volume	Satuan
MYC Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Jambi	Kota Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni		1	Paket
Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni		4250	Unit

Sumber : Emonitoring PUPR, 2023

4.4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus Perkotaan – PKN Jambi

Berdasarkan data dari P3KE Tahun 2023 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Jambi hingga tahun 2023 mencapai 14.922 unit dengan total penanganan sebanyak 2.251 unit atau berkisar 15% RTLH yang sudah ditangani. Untuk penyediaan rumah susun terdapat 1 unit Rusun Pemerintah Kota Jambi RSUD Abdul Manaf yang diperuntukkan untuk pegawai Rumah Sakit Abdul Manaf dan tahun 2022-2023 dalam Pembangunan Rumah Susun RSUD Raden Mattaher dan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi. Selan itu, terdapat pembangunan rusus untuk atlet tahun 2019 – 2020



Gambar 4.17 Rusun RSUD Abdul Manaf Kota Jambi

Sumber : Dokumentasi BPIW, 2023

4.4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus Pariwisata – KSPN Muaro Jambi

Berdasarkan data dari P3KE Tahun 2023 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Muaro Jambi hingga tahun 2022 mencapai 17.963 unit dengan total penanganan sebanyak 3.687 unit atau berkisar 21% RTLH yang sudah ditangani. Dalam Kawasan KSPN Muaro Jambi terdapat permukiman penduduk yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), namun belum dilakukan

pendataan oleh pemerintah daerah untuk nantinya diajukan sebagai calon bantuan program bantuan BSPS atau program Sarhunta.

4.5 Profil Infrastruktur Non PUPR

Pembangunan infrastruktur perhubungan menjadi aspek dalam mendukung konektivitas antar wilayah, baik mobilitas manusia maupun dalam distribusi barang guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh berbagai infrastruktur yang berkembang meliputi terminal, pelabuhan, dan bandara. Menurut RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 infrastruktur perhubungan pada Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.43 Daftar Infrastruktur Perhubungan Provinsi Jambi

No	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan	Bandara	Terminal
1	Ujung Jabung (Rencana), Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Sultan Thaha, Kota Jambi	Terminal Alambarajo Tipe A di Kota Jambi
2	Kuala Tungkal (Eksisting), Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pelabuhan Regional (PR)	Bandara Muaro Bungo, Kabupaten Bungo	
3	Muara Sabak (Eksisting), Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Depati Parbo Kerinci, Kabupaten Kerinci	
4	Talang Duku (Eksisting), Kota Jambi	Pelabuhan Pengumpul (PP)		Terminal Sribulan Tipe A, Kabupaten Sarolangun
5	Kuala Mendahara (Eksisting), Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelabuhan Regional (PR)		
6	Nipah Panjang (Eksisting), Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelabuhan Regional (PR)		

Sumber: RTRW Provinsi Jambi, 2013-2033

Kementerian Perhubungan melalui surat nomor PR.003/2/15 PHB 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Jambi, menyatakan bahwa mengingat keterbasan fiskal APBN maka pembangunan fasilitas Pelabuhan Ujung Jabung disarankan melalui skema kerjasama dengan pihak swasta. Kementerian Perhubungan menunggu hasil kajian lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait skema kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas Pelabuhan Ujung Jabung oleh swasta. Rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur berkaitan dengan dukungan konektivitas yaitu pembangunan Jembatan Sei Rambut (Sungai Rambut) dan jalan akses ke kawasan Pelabuhan yang masih non status.

Infrastruktur kelistrikan merupakan hal yang penting sebagai sumber penerangan dan penunjang kebutuhan aktivitas rumah tangga. Dalam memenuhi kebutuhan listrik penduduk, terdapat beberapa Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) di Provinsi Jambi, antara lain: Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) Batanghari, PTL Merangin, PTL Muaro Jambi, PTL Tanjung Jabung Timur, PTL Kota Jambi, PTL Sarolangun, dan PTL Kerinci. Provinsi Jambi telah terlayani oleh listrik dengan jumlah keseluruhan pelanggan listrik yaitu sebanyak 1.067.190 unit. Jumlah pelanggan listrik terbesar yaitu pada UP3 Jambi dengan jumlah total 596.809 unit, sedangkan jumlah pelanggan listrik terkecil yaitu ULP Kersik Tuo dengan jumlah 20704 unit. Berikut merupakan penjabaran dari jumlah pelanggan listrik Provinsi Jambi Tahun 2021.

Tabel 4.44 Jumlah Pelanggan Listrik Provinsi Jambi Tahun 2021

Unit	Pelanggan	Unit	Pelanggan
ULP Telanai Pura	135.611	ULP Bangko	103.805
ULP Kotabaru	183.027	ULP Sarolangun	75.315
ULP Seberang Kota	31.580	ULP Muara Tebo	50.728
ULP Muara Bulian	97.143	ULP Rimbo Bujang	88.733
ULP Kuala Tungkal	84.373	ULP Kersik Tuo	20.704
ULP Muara Sabak	65.075	ULP Sungai Penuh	77.541
UP3 Jambi	596.809	UP3 Muara Bungo	470.381
ULP Bungo Kota	53.555		
Jumlah	**1.067.190**		

Sumber : RUPTL, 2021

Sektor energi terdiri atas kelistrikan. Provinsi Jambi sudah teraliri oleh listrik cukup merata. Berdasarkan tabel 4.44, untuk keseluruhan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jambi telah terlayani oleh listrik dengan jumlah keseluruhan pelanggan listrik yaitu sebanyak 1.067.190 unit. Jumlah pelanggan listrik terbesar yaitu UP3 Jambi dengan jumlah total 596.809 unit, sedangkan jumlah pelanggan listrik terkecil yaitu ULP Kersik Tuo dengan jumlah 20.704 unit



BAB 5
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang potensi dan tantangan pengembangan wilayah Jambi yang dirumuskan menjadi isu strategis berdasarkan Bab 5 Permasalahan dan Isu strategis merumuskan potensi dan kendala yang harus ditangani serta peluang dan tantang yang dapat memberikan pengaruh terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR dan Non PUPR. Bab ini menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah

5.1. Isu Strategis Provinsi

1. Tingginya kerawanan bencana yang mengancam kawasan permukiman terutama banjir;
2. Perlunya pemenuhan prasarana permukiman seperti air minum, infrastruktur persampahan dan pengolahan limbah serta pemenuhan backlog perumahan layak huni
3. Peningkatan konektivitas antar kawasan dalam mendukung hilirisasi komoditas unggulan dan mendukung pengembangan kawasan pariwisata.

5.1 Isu Strategis Fokus Pariwisata

KSPN Muaro Jambi atau Kawasan Cagar Budaya Muarajambi memiliki nilai penting dalam sejarah perkembangan peradaban dan kebudayaan Indonesia. Muarajambi merupakan situs purbakala dan peninggalan dari Kerajaan Melayu Kuno dan Sriwijaya berkembang dari abad VII-XII. Selain itu, Muarajambi menjadi pusat Pendidikan Agama Budha di Sumatera selama lebih dari 500 tahun. Ditemukan kanal buatan yang terhubung dengan Sungai Batanghari. Kanal purba ini yang melewati kompleks percandian dan berfungsi sebagai penampungan air dengan menggunakan kanal sebagai sarana transportasi. Kawasan pariwisata Provinsi Jambi sudah didukung oleh konektivitas jalan nasional dan Jalan Tol Trans Sumatera Koridor III, serta simpul transportasi. Bandar Udara Sultan Thaha dapat melayani wisatawan ke KSPN Muaro Jambi.

Dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Jambi memiliki permasalahan dan kendala yang menjadi penghambat dalam pengembangannya : limitasi pengembangan pariwisata

karena merupakan kawasan konservasi dan cagar budaya, pemerintah daerah Jambi masih belum optimal dalam hal promosi ditingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Kawasan KSPN Muaro Jambi berada di kawasan banjir di Kabupaten Muaro Jambi. Tahun 2021, telah dilakukan Normalisasi Kanal Purba sepanjang 10 km dari total 43 km sebagai upaya pengendalian banjir. Permasalahan lainnya terkait, rumah tidak layak huni yang tersebar di dalam Kawasan KSPN Muaro Jambi di Provinsi Jambi dan belum adanya angkutan bus wisata yang terkoneksi dengan simpul transportasi. Berdasarkan beberapa hal tersebut, **isu strategis fokus pariwisata yaitu Kawasan Pariwisata Provinsi Jambi menjadi pusat budaya dan ilmu pegetahuan bertaraf nasional dan internasional namun dukungan infrastruktur belum optimal (Tabel 5.1.)**

5.2 Isu Strategis Fokus Perkotaan

Pelayanan Dasar Perkotaan di Jambi rata – rata masih belum memenuhi target nasional dan merata ke seluruh wilayah. Target Nasional untuk air minum layak 100% dengan 30% jaringan perpipaan, 90% akses sanitasi layak, dan 0 Ha Kumuh serta untuk kemantapan jalan 99%. Capaian air minum layak di Provinsi Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,19% dan Kabupaten Merangin memiliki capaian air minum layak terendah sebesar 51,26%. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi hanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum memiliki perusahaan umum air minum daerah (PDAM) untuk pengelolaan air minum. PDAM Tirta Pangabuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyandang status PDAM Sakit.

Untuk Sanitasi, capaian sanitasi layak 79,54% yang terdiri dari Instalasi pengolahan air limbah tertinggi di Kota Jambi sudah mencapai 92,82% dan terendah di Kabupaten Kerinci 68,1%. Untuk capaian layanan persampahan, hanya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu terdapat luasan kawasan kumuh kewenangan pusat (luas >15 Ha) yang belum optimal diselesaikan. Jumlah backlog perumahan di Provins Jambi hingga tahun 2021 mencapai 189.033 unit yang terdiri dari 65.290 unit backlog kepemilikan dan

123.743 unit backlog kepenghunian, serta RTLH 98.846 unit. PKN Jambi memiliki angka backlog terbanyak yaitu 36.629 unit yang terdiri dari 20.913 backlog kepemilikan dan 15.716 backlog kepenghunian, dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 6.605 unit

Sektor Sumber Daya Air, Provinsi Jambi berada di Wilayah Sungai Batanghari (WS. Lintas Provinsi Jambi dan Sumatera Barat) yang memiliki debit rata – rata 1.935,97 m3/detik yang merupakan potensi sumber air baku permukaan bagi Provinsi Jambi. Sumber air permukaan ini dapat menjadi sumber air baku untuk penyediaan air bersih untuk seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Terkait bencana sumber daya air, terjadi bencana banjir terjadi diseluruh kabupaten/kota, namun tertinggi di PKN Jambi dengan luasan genangan banjir 3.826 Ha.

Sektor Jalan, Provinsi Jambi dilayani oleh 79 ruas jalan nasional yang menghubungkan ke pusat - pusat perkotaan baik PKN maupun PKW. Secara umum, kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi berada pada kondisi mantap 92,36% pada tahun 2020 dan mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 86,99% kondisi ini diperburuk oleh adanya pengangkutan distribusi batubara menggunakan jalan nasional dari wilayah hulu hingga simpul transportasi di Pelabuhan Talang Duku, Kota Jambi. Berdasarkan beberapa hal yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan **isu strategis fokus perkotaan yaitu Infrastruktur dasar perkotaan belum optimal mendukung pemerataan pembangunan, kota berketahanan bencana, dan berkelanjutan (Tabel 5.1)**

Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Kawasan Pariwisata

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pariwisata	Makro : Nasional dan Internasional	Destinasi Pariwisata Skala Internasional Berbasis Alam, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan	KSPN Muaro Jambi merupakan pusat peribadatan dan pendidikan agama Budha tertua dan terluas di Asia Tenggara *(World Heritage Tourism)*	1. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, KSPN Muaro Jambi masuk kedalam 88 kawasan pariwisata prioritas; 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 259 Tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Muarajambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional	KSPN Candi Muaro Jambi;	KSPN Muaro Jambi menjadi pusat pendidikan ajaran agama Budha dan pariwisata berbasis budaya berskala internasional	Belum adanya legalisasi terkait masterplan pengembangan KSPN Muaro Jambi yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Peraturan Presiden RI tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Cagar Budaya Muarajambi. Belum optimalnya peran sektor lainnya dalam pengembangan KSPN Muaro Jambi	**Dukungan Infrastruktur dan Sektor Lainnya Dalam Mendukung Pariwisata Provinsi Jambi Belum Optimal**

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Jambi selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2020 - 2022, jumlah wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi berjumlah 3,8 juta pengunjung dan wisatawan mancanegara berjumlah 3.633 jiwa.	Sesuai dengan dokumen perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 dan RPJMD Provinsi Jambi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Pariwisata Provinsi Jambi		Tingkat pertumbuhan wisatawan di Provinsi Jambi stabil bertambah setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi	Kurangnya intensitas promosi wisata Candi Muaro Jambi di tingkat nasional sehingga tingkat brand awarness terhadap wisata Candi Muaro Jambi rendah	
	Meso Interaksi Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya secara regional	**Konektivitas Terhadap Destinasi Wisata**	Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Koridor 3 menjadi dukungan konektivitas wisatawan	Arahan RPJMN 2020 - 2024 terkait *major project* Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera		Terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera sebagai konektivitas dari luar Provinsi Jambi menuju kawasan	Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Koridor III masih dalam proses pengadaan tanah dan proses awal pembangunan	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(Wilayah Sumbagsel)		dari luar Provinsi Jambi untuk mengunjungi KSPN Muaro Jambi			KSPN Muaro Jambi maupun pariwisata lainnya di Provinsi Jambi	untuk ruas Betung - Tempino - Jambi	
			Dukungan simpul transportasi Bandar Udara Sultan Thaha dalam pengembangan KSPN Muaro Jambi. Waktu tempuh dari Bandara ke KSPN Muaro Jambi hanya memakan waktu 30 menit.	Peraturan terkait kebandarudaraan		Bandar Udara Sultan Thaha menjadi simpul transportasi kelas penerbangan domestik tetapi juga internasional.	Belum dibukanya jalur penerbangan internasional ke Jambi. Belum adanya transportasi publik yang terintegrasi dari Bandar Udara ke Kawasan KSPN Muaro Jambi	
	Mikro : Kawasan Pariwisata Provinsi Jambi	**Dukungan infrastruktur yang berketahanan bencana dalam mendukung pengembanga**	Terjadinya banjir di Kawasan KSPN Muaro Jambi berada di kawasan banjir di Kabupaten	Renstra PUPR dan Visum PUPR 2030		Kawasan KSPN Muaro Jambi dan TNKS terbebas dari genangan banjir	FS dan DED dalam proses penyusunan	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		n Pariwisata Provinsi Jambi	Muaro Jambi. Tahun 2021, telah dilakukan Normalisasi Kanal Purba sepanjang ±10 km dari total 43 km sebagai upaya pengendalian banjir					
			Terdapat permukiman penduduk di dalam kawasan KSPN Muaro Jambi dengan kondisi rumah tidak layak huni			Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat di kawasan KSPN Muaro Jambi	Proses Pendataan rumah tidak layak huni masih berjalan	
			Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam proses penyusunan masterplan pengembang	1. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, KSPN Muaro Jambi masuk kedalam 88 kawasan		Tersusunnya masterplan pengembangan kawasan KSPN Muaro Jambi dan pembagian peran antar	Masterplan masih dalam proses penandatanganan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			an KSPN Muaro Jambi	pariwisata prioritas; 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 259 Tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Muarajambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional		Stakeholder terkait		

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan	Makro : Kawasan Perkotaan Jambi memiliki daya saing secara nasiona - Internasionall	Kawasan Perkotaan sebagai penggerak utama kegiatan nasional/internasional di Provinsi Jambi	1. Nilai ekspor menurut pelabuhan, Pelabuhan Talang Duku (Pelabuhan Pengumpul berbasis sungai) tahun 2022 mencapai nilai US$ 1,9 miliar dan nilai impor US$ 19 juta. Komoditas ekspor bahan bakar mineral, bahan nabati, dan buah - buahan. 2. Pelabuhan Talang Duku menjadi simpul transportasi utama (73,74%) di Provinsi Jambi. Adapun negara tujuan ekspor antara lain China, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.	Arahan RPJMN Tahun 2020 -2024 terkait pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Jambi	1. PKN Jambi;	1. PKN Jambi diarahkan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional di Provinsi Jambi 2. Terbangunnya Pelabuhan Ujung Jabung yang merupakan pelabuhan laut sebagai pelabuhan utama	Tingginya tingkat sedimentasi yang terjadi di Pelabuhan Talang Duku sehingga menyulitkan Kapal Besar untuk bersandar .	**Dukungan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Prasarana Mitigasi Bencana yang Memadai Untuk Mendukung Perkembangan Wilayah yang Berkelanjutan**
			Berdasarkan hasil proyeksi yang dilaksanakan oleh BPS, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2030 berada di posisi 2 besar untuk wilayah Sumatera dan 6 besar di wilayah nasional dengan angka 70,1%. Kondisi tersebut menjadi modal sosial dalam pengembangan kawasan perkotaan yang berdaya saing	Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2023 Badan Pusat Statistik terkait proporsi Usia produktif		SDM Usia Produktif di Provinsi Jambi memiliki soft skill sebagai modal bersaing ditingkat nasional maupun internasional	Belum meratanya pelatihan SDM yang dilakukan oleh pemerintah	
	Meso : Interaksi Provinsi Jambi dengan provinsi lain di Pulau Sumatera	**Penguatan fungsi ekonomi perkotaan, dan perdagangan dan jasa** (Potensi kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan wilayah sekitar)	Kontribusi PDRB setiap kabupaten/kota yang terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi antara lain PKN Jambi 12,74%, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (PKW Muara Sabak) 11,64%.	Pemerataan pembangunan wilayah Provinsi Jambi berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2020 - 2024		Peningkatan kontribusi PDRB Provinsi Jambi terhadap nasional serta terwujudnya pemerataan kontribusi PDRB masing-masing kabupaten di Provinsi Jambi	Tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi termasuk yang tertinggi di Pulau Sumatera	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Provinsi Jambi memiliki major project yaitu pembangunan jalan tol Trans Sumatera Koridor 3 dengan Ruas Betung - Tempino - Jambi dan Jambi - Rengat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau	Major Project RPJMN Tahun 2020 - 2024 dan PSN			Masih dalam proses pengadaan tanah	
			Di Perkotaan Jambi terdapat program Metropolitan Sanitation Management Investment Project. Program tersebut membangunan pengelolaan air limbah terpadu baik grey water dan black water dari sektor domestik dan komersial. air limbah diolah sehingga akan menghasilkan air yang dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan penyiraman tanaman atau pemadam kebakaran. Program ini hanya dibangun di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan	Mewujudkan Pelayanan Sanitasi Layak 100% sesuai dengan visium PUPR 2030 dan RPJMN 2020-2024		Peningkatan sanitasi layak di Kawasan Perkotaan Jambi 100% layak	Keterbatasan alat dan teknologi karena harus menunggu dari Provinsi Sumatera Selatan.	
	Miro : Kawasan Perkotaan Jambi, Muara Sabak, dan Muaro Bungo	Standar Pelayanan Mininum Perkotaan dan Keberlanjutan dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi perkotaan	1. Provinsi Jambi berada di Wilayah Sungai Batanghari (WS. Lintas Provinsi Jambi dan Sumatera Barat) yang memiliki debit rata – rata 1.935,97 m3/detik yang merupakan potensi sumber air baku permukaan bagi Provinsi Jambi. PKN Jambi memiliki 1 embung dengan debit 0,0086 m3/detik. 2. Terjadinya bencana banjir di wilayah perkotaan seperti PKN Jambi, Kota Sungai Penuh, dan PKW Muaro Bungo; 3. Terjadinya abrasi pantai air	Pola dan Rencana WS. Batanghari Tahun 2021 terkait Pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di Provinsi Jambi		Kebutuhan penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air dapat menyediakan air baku untuk kebutuhan air bersih, serta mewujudkan Perkotaan di Provinsi Jambi yang berketahanan bencana.	Layanan infrastruktur dasar, penyediaan air minum, pengolahan sampah, dan sanitasi terutama di kawasan perkotaan masih perlu peningkatan untuk dapat memenuhi kebutuhan kegiatan masyarakat terutama dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			hitam dan cemara PKW Muara Sabak					
			1. Provinsi Jambi dilayani oleh 79 ruas jalan nasional yang menghubungkan ke pusat - pusat perkotaan baik PKN maupun PKW. 2. Secara umum, kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi berada pada kondisi mantap 92,36% pada tahun 2020 dan mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 86,99%.	Pemanfaatan jalan umum untuk mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi barang sesuai dengan peruntukkannya		Kemantapan Jalan Nasional mencapai 100% sehingga dapat mempersingkat waktu tempuh dalam aktivitas manusia, barang, dan jasa.	1. Penggunanaan jalan nasional untuk distribusi batubara sehingga kemantapan jalan mengalami penurunan pada tahun 2022; 2. Beberapa ruas jalan belum memenuhi lebar jalan nasional. kondisi tersebut dikarenakan padatnya permukiman penduduk disepanjang jalan nasional.	
			1. Capaian Air minum layak di Provinsi Jambi pada tahun 2021 sebesar 78,86% dengan capaian tertinggi di PKN Jambi 97,09%. Untuk PKW Muaro Bungo sebesar 71,79% dengan status PDAM Kurang Sehat; 2. Rata – Rata Capaian Sanitasi Layak di Provinsi Jambi Tahun 2021 yaitu 77,82%. Untuk Sektor Instalasi Pengoalahan Limbah tertinggi di Kota Jambi mencapai 100% dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 79,88%.	Mewujudkan Air minum layak 100% dan Pelayanan Sanitasi Layak 100%		Pemerataan penyediaan air minum layak 100% dan Sanitasi Layak 100% di Provinsi Jambi sehingga dapat berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat.	Terbatasnya pendanaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhanan infrastruktur dasar kawasan perkotaan	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1. Jumlah backlog perumahan di Provins Jambi hingga tahun 2021 mencapai 189.033 unit yang terdiri dari 65.290 unit backlog kepemilikan dan 123.743 unit backlog kepenghunian, serta RTLH 98.846 unit; 2. PKN Jambi memiliki angka backlog terbanyak yaitu 36.629 unit yang terdiri dari 20.913 backlog kepemilikan dan 15.716 backlog kepenghunian, dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 6.605 unit	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ASN//TNI/POLRI		Penyediaan rumah yang layak huni guna meningkatkan kenyamanan dan tingkat kesehatan masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas.	Terbatasnya pendanaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhanan infrastruktur dasar kawasan perkotaan dalam pemeliharaan aset rumah yang telah dibangun	
			Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 tertinggi di Provinsi Jambi yaitu 10,91%	RPJMN Tahun 2020 - 2024 terkait target capaian tingkat kemiksinan di Provinsi Jambi		Menurunnya tingkat kemiskinan Provinsi Jambi sesuai dengan target nasional	Belum optimalnya peran industri besar terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki akses darat	
			Penggunaan jalan nasional sebagai jalur pengangkutan batu bara sehingga menimbulkan kerusakan jalan dan kemacetan	Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan		Terbangunnya Jalan Khusus pengangkutan baru bara	Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Usaha dalam proses koordinasi untuk pembahasan jalan khusus batubara	

Sumber : Analisis BPIW, 2022



BAB 6

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Pada bab ini memuat rumusan terkait proyeksi pertumbuhan, visi, dan strategi, serta scenario pengembangan (prioritasi dan tahapan). Tujuan penyusunan scenario pengembangan wilayah yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah (Bab 7).

6.1 Proyeksi Pertumbuhan

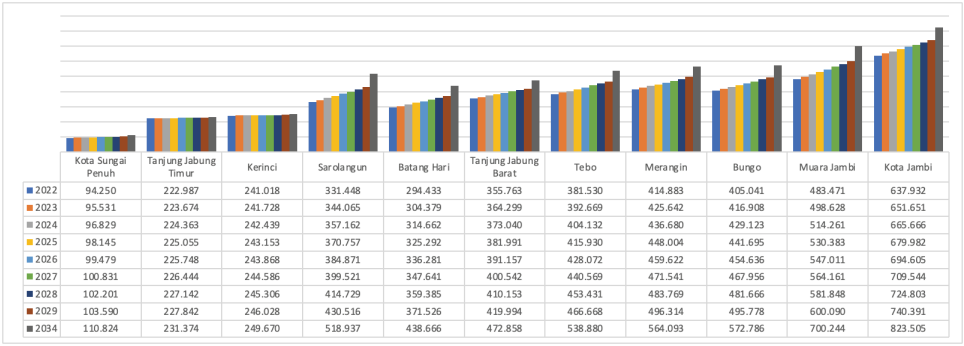
6.1.1 Proyeksi Penduduk

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi diproyeksikan hingga 10 tahun mendatang dengan menggunakan metode *least square* yang memanfaatkan data deret berkala, yang mana dibutuhkan data dimasa lampau untuk diproyeksikan hasilnya pada masa mendatang. Proyeksi penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jambi menggunakan data dasar tahun 2021. Pada tahun 2032, diketahui hasil proyeksi penduduk Provinsi Jambi mencapai 4,2 juta penduduk dengan jumlah penduduk terbesar pada Kota Jambi yaitu mencapai 693.405 jiwa penduduk. Berikut merupakan penjabaran proyeksi penduduk Provinsi Jambi.

Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (Jiwa/ r)	2021 (Po)	2022	2026	2029	2034
Kota Sungai Penuh	0,014	97.800	99.196	104.984	109.545	110.824
Tanjung Jabung Timur	0,01	231.800	234.115	243.609	250.982	231.374
Kerinci	0,003	251.900	252.641	255.629	257.892	249.670
Sarolangun	0,038	293.600	304.776	353.900	395.873	518.937
Batang Hari	0,034	306.700	317.061	362.125	400.079	438.666
Tanjung Jabung Barat	0,012	320.600	324.293	339.497	351.366	472.858
Tebo	0,011	340.900	344.689	360.270	372.417	538.880
Merangin	0,006	355.700	357.675	365.685	371.811	564.093
Bungo	0,016	367.200	373.000	397.131	416.249	572.786
Muara Jambi	0,015	406.800	412.709	437.214	456.542	700.244
Kota Jambi	0,011	612.200	619.171	647.860	670.246	823.505
Provinsi Jambi	**0,015**	**3.585.200**	**3.639.327**	**3.867.905**	**4.053.002**	**5.221.836**

Sumber: Hasil Analisis, 2022

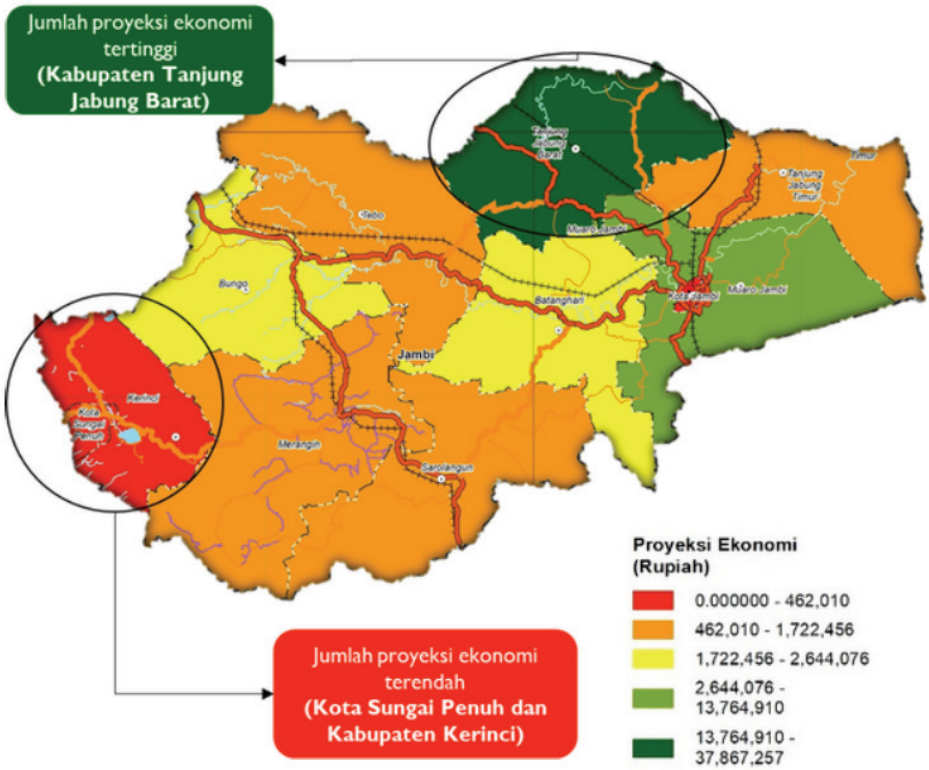


	Kota Sungai Penuh	Tanjung Jabung Timur	Kerinci	Sarolangun	Batang Hari	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Merangin	Bungo	Muara Jambi	Kota Jambi
2022	94.250	222.987	241.018	331.448	294.433	355.763	381.530	414.883	405.041	483.471	637.932
2023	95.531	223.674	241.728	344.065	304.379	364.299	392.669	425.642	416.908	498.628	651.651
2024	96.829	224.363	242.439	357.162	314.662	373.040	404.132	436.680	429.123	514.261	665.666
2025	98.145	225.055	243.153	370.757	325.292	381.991	415.930	448.004	441.695	530.383	679.982
2026	99.479	225.748	243.868	384.871	336.281	391.157	428.072	459.622	454.636	547.011	694.605
2027	100.831	226.444	244.586	399.521	347.641	400.542	440.569	471.541	467.956	564.161	709.544
2028	102.201	227.142	245.306	414.729	359.385	410.153	453.431	483.769	481.666	581.848	724.803
2029	103.590	227.842	246.028	430.516	371.526	419.994	466.668	496.314	495.778	600.090	740.391
2034	110.824	231.374	249.670	518.937	438.666	472.858	538.880	564.093	572.786	700.244	823.505

Gambar 6.1 Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi Jambi
Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.1.2 Proyeksi Ekonomi

Sektor ekonomi menjadi penopang keberlangsungan kehidupan dalam suatu wilayah, termasuk pada Provinsi Jambi. Lokasi yang strategis berada dijalur Lintas Timur Sumatera, Provinsi Jambi berkontribusi untuk memberi peluang kepada para investor untuk menanamkan modal di Provinsi Jambi sehingga berdampak pada meningkatnya investasi yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Proyeksi PDRB pada Provinsi Jambi diketahui memiliki hasil proyeksi terbesar pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. Berikut pada Tabel 6.2 penjabaran mengenai proyeksi PDRB Provinsi Jambi dari masing-masing kabupaten/kota.



Gambar 6.2 Proyeksi Ambang Batas Pengembangan Lahan di Provinsi Jambi

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 6.2 Proyeksi PDRB Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Wilayah	PROYEKSI PDRB ADHK TAHUN 2010 DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2022-2029 (Miliar Rupiah)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Provinsi Jambi	161.717,68	170.013,80	178.735,50	187.904,64	197.544,14	207.678,16	218.332,05	229.532,48	298.719,73
Kerinci	11.291,291	11.291,291	11.291,291	11.291,291	11.291,291	11.291,291	11.291,291	11.291,291	14.410,87
Merangin	18.909,884	19.991,530	21.135,045	22.343,970	23.622,045	24.973,226	26.401,694	27.911,871	36.325,26
Sarolangun	12.163,661	12.981,059	13.853,386	14.784,334	15.777,841	16.838,112	17.969,633	19.177,192	24.957,71
Batanghari	13.720,733	15.404,267	17.294,371	19.416,390	21.798,781	24.473,492	27.476,389	30.847,742	40.146,08
Muaro Jambi	18.189,720	19.639,441	21.204,704	22.894,719	24.719,428	26.689,567	28.816,725	31.113,418	40.491,84
Tanjung Jabung Timur	17.383,450	17.482,535	17.582,186	17.682,404	17.783,194	17.884,558	17.986,500	18.089,023	23.541,54
Tanjung Jabung Barat	43.107,298	44.202,224	45.324,960	46.476,214	47.656,710	48.867,190	50.108,417	51.381,171	66.868,83
Tebo	11.265,135	11.974,839	12.729,254	13.531,197	14.383,662	15.289,833	16.253,092	17.277,037	22.484,80
Bungo	13.754,738	14.405,338	15.086,710	15.800,311	16.547,666	17.330,371	18.150,097	19.008,597	24.738,30
Kota Jambi	20.561,517	21.663,614	22.824,784	24.048,192	25.337,175	26.695,248	28.126,113	29.633,673	38.566,06
Kota Sungai Penuh	4.981,053	5.202,710	5.434,231	5.676,054	5.928,639	6.192,463	6.468,028	6.755,855	8.792,25

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.2 Visi dan Strategi

Perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah Provinsi Jambi dilakukan dengan menelaah kebijakan, profil wilayah dan infrastruktur, dan isu permasalahan. Telaah terhadap kebijakan dilakukan dengan mencari kata-kata kunci berupa tema pengembangan wilayah di Provinsi Jambi dalam kebijakan yang telah dibahas pada bab arahan kebijakan. Selain itu juga disesuaikan dengan fokus – fokus kawasan prioritas sesuai dengan sintesa dari penyusun dan karakteristik wilayah Provinsi Jambi.

Pada Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Jambi dirumuskan Visi pengembangan wilayah yaitu **"Mewujudkan keterpaduan infrastruktur Provinsi Jambi dalam pengembangan pariwisata berwawasan alam dan ilmu pengetahuan dan pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan".**

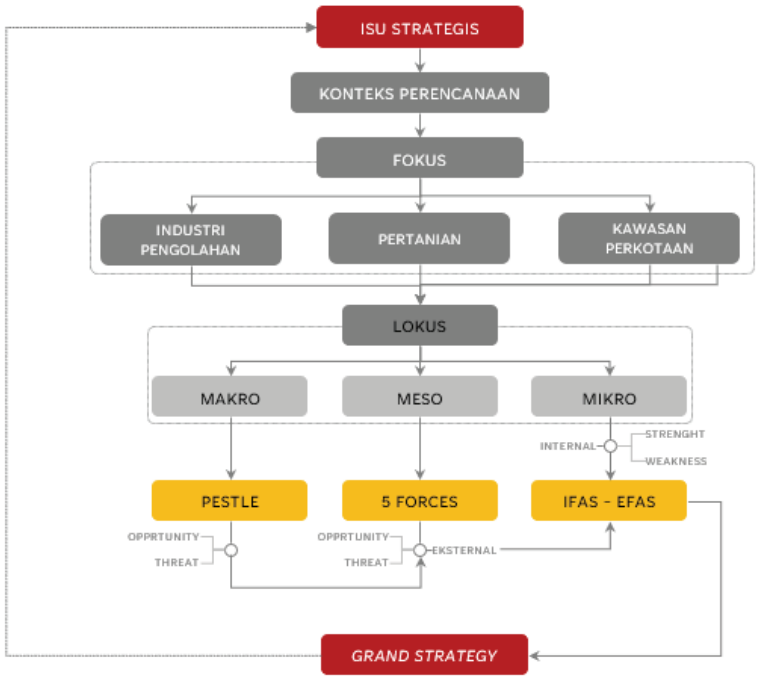
Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 2 strategi yang akan dilakukan. 2 (dua) strategi tersebut sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan Wilayah Provinsi Jambi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi infrastruktur pendukung pariwisata sehingga dapat mendorong wisata Provinsi Jambi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
2. Pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan dan prasarana mitigasi bencana yang memadai untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perkotaan secara berkelanjutan;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

6.3 Skenario Pengembangan

Sub bab ini menjelaskan terkait dengan strategi pengembangan wilayah berdasarkan pada visi dan misi, isu strategis, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan di Provinsi Jambi pada masing-masing fokus perencanaan. Dalam rangka mencapai visi dan misi

tersebut, diperlukan langkah – langkah strategis yang komprehensif. Langkah strategis disusun mengikuti alur pada gambar berikut.



Gambar 6.3 Langkah Penyusunan *Grand Strategy*
Sumber : Analisis BPIW, 2023

Analisis *PESTLE* **(makro)**

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Jambi didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Analisis *5 FORCES* **(MESO)**

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Jambi, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *rivalry among existing competitor* (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting) yang terdiri dari sub parameter: konversi *threat* menjadi *opportunity*, kualitas yang diinginkan, dan inovasi; *bargaining power of customers* (Daya

Tawar Pelanggan) yang terdiri dari sub parameter sensitivitas target, *trend* eksisting, penciptaan nilai; *bargaining power of suppliers* (Daya Tawar Pemasok) yang terdiri dari sub parameter ketergantungan saat ini, kualifikasi yang dibutuhkan, daya dukung eksisting; *threat of new entrants* (Ancaman Pendatang Baru) yang terdiri dari sub parameter tantangan yang dihadapi strategi untuk memenangkan kompetisi & ancaman terhadap *legacy*; dan *threat of substitutes* (Ancaman Produk Pengganti) yang terdiri dari sub parameter *trend analisis PESTLE* & peralihan *cost.*

Analisis Penyusunan Strategi menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing *grand strategy*. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan *(strengths)*, kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) pada setiap fokus pengembangan di Provinsi Jambi. Identifikasi faktor internal diperoleh melalui *baseline* pada lokus mikro. Kemudian pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dari skala 1-5 dan *rating* yang merupakan tingkat harapan dari masing-masing variabel/faktor. Kemudian tingkat dan rating dikali menghasilkan skor faktor internal tiap fokus. Identifikasi faktor eksternal diperoleh melalui analisis 5 Forces yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dari skala 1-5 dan *rating* yang merupakan tingkat harapan dari masing-masing variabel/faktor. Kemudian tingkat dan rating dikali menghasilkan skor faktor eksternal tiap fokus.

6.3.1 Strategi Pengembangan Wilayah Fokus Perkotaan

Berdasarkan analisis **PESTLE** untuk fokus perkotaan, bobot rating tertinggi di parameter *Economic*. Hal tersebut dikarenakan Kawasan Perkotaan berfungsi sebagai simpul utama ekspor impor atau hub internasional pergerakan barang dan orang, Namun dalam pengembangannya terdapat ancaman terkait Fokus investasi dan pembangunan infrastruktur hanya terfokus pada kawasan perkotaan Jambi menyebabkan semakin tingginya disparitas dengan hinterlandnya

Tabel 6.3 PESTLE Fokus Kawasan Perkotaan

Infrastruktur Dasar Perkotaan Belum Optimal Mendukung Pemerataan Pembangunan, Kota Berketahanan Bencana, Dan Berkelanjutan				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	PKN Jambi diarahkan menjadi kota metropolitan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional di Provinsi Jambi yang didukung simpul transportasi di PKW Muara Sabak dan PKW Muara Bungo dengan sektor unggulan pariwisata berbasis alam dan budaya, pertanian dan pertambangan	Belum adanya masterplan pengembangan wilayah perkotaan metropolitan secara terintegrasi antar pusat kegiatan ekonomi dan simpul transportasi sehingga terjadinya ketimpangan wilayah	3	25%
ECONOMIC	Kawasan Perkotaan di Jambi berfungsi sebagai simpul utama ekspor impor atau hub internasional pergerakan barang dan orang	Fokus investasi dan pembangunan infrastruktur hanya terfokus pada PKN Jambi menyebabkan semakin tingginya disparitas dengan hinterlandnya	5	25%
SOCIOLOGICAL	Berdasarkan hasil proyeksi yang dilaksanakan oleh BPS, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2030 berada di posisi 2 besar untuk wilayah Sumatera dan 6 besar di wilayah nasional dengan angka 70,1%.	Struktur angkatan kerja di Provinsi Jambi didominasi oleh angkatan kerja yang tidak/belum bekerja pada tahun 2022 sebesar 5,4%. Kondisi tersebut masih di atas target nasional 3,4%	4	20%
TECHNOLOGICAL	Pembangunan infrastruktur modern untuk mendukung perkotaan yaitu sistem pengelolaan air limbah terpadu	keterbatasan alat teknologi membangun infrastruktur pengelolaan air limbah terpadu	2	10%
LEGAL	Arahan pengembangan PKN Jambi sudah tercantum secara rinci dalam RTRWN, RTR Pulau Sumatera, dan RTRW Provinsi Jambi sebagai kota	Belum adanya masterplan pengembangan wilayah perkotaan secara terintegrasi antar pusat kegiatan ekonomi dan simpul	1	5%

Infrastruktur Dasar Perkotaan Belum Optimal Mendukung Pemerataan Pembangunan, Kota Berketahanan Bencana, Dan Berkelanjutan				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
	metropolitan, dan pusat perdagangan barang dan jasa internasional	transportasi sehingga terjadinya ketimpangan wilayah		
ENVIRONMENT	Provinsi Jambi memiliki keuntungan posisi secara geografis karena berdekatan dengan jalur pelayaran internasional	Keterbatasan Daya dukung dan daya tampung lahan yang berpengaruh pada perkembangan kawasan perkotaan di Provinsi Jambi	3	15%

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Analisis *5 Forces* **(meso) Fokus Perkotaan**

Berdasarkan hasil analisis *5 FORCES* (MESO) fokus perkotaan diketahui bahwa signifikansi sub parameter terbesar dari: *Rivalry Among Existing Competitor* **yaitu Inovasi** Pengembangan PKN Jambi sebagai kawasan perkotaan metropolitas yang didukung oleh sektor unggulan pariwisata berbasis alam dan budaya, pertanian dan pertambangan serta simpul transportasi yang terintegrasi, *Bargaining Power of Customers* **yaitu Trend Eksisting** Lokasi PKN Jambi yang berdekatan dengan KI Kemingking memudahkan untuk mewujudkan integrasi kawasan industri dengan kawasan perkotaan, *Bargaining Power Of Suppliers* **yaitu Kualifikasi yang Dibutuhkan** Ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan yang menjangkau seluruh kawasan serta dapat meningkatkan aksesibilitas kawasan perkotaan Jambi terhadap wilayah lain di dalam dan luar Provinsi Jambi, *Threat Of New Entrants* **yaitu Tantang yang Dihadapi** berupa Rencana pengembangan KI Kemingking yang menarik banyak investasi akan membantu mempercepat pembangunan perkotaan PKN Jambi serta *Threat Of Substitutes* **yaitu** *Trend Analisis Pestle* PKN Jambi diarahkan menjadi kota metropolitan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional di Provinsi Jambi.

Tabel 6.4 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Yang Berketahanan Bencana Dan Berkelanjutan			
PARAMETER	BOBOT	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Inovasi	50%	Pengembangan PKN Jambi sebagai kawasan perkotaan metropolitas yang didukung oleh sektor unggulan pariwisata berbasis alam dan budaya, pertanian dan pertambangan serta simpul transportasi yang terintegrasi	Terpusatnya aktivitas ekonomi, pemerintahahan, dan perdagangan jasa di Perkotaan Jambi berimplikasi perubahan penggunaan lahan dari daerah resapan air menjadi kawasan terbangun yang menyebabkan banjir. Selain itu, meningkatkan mobilitas ke Perktoaan Jambi menyebabkan kemacatan dan menurunnya layanan infrastruktur jalan.
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Trend Eksisting	56%	Lokasi PKN Jambi yang berdekatan dengan KI Kemingking memudahkan untuk mewujudkan integrasi kawasan industri dengan kawasan perkotaan	Berkembangnya tambang dan industri batu bara di Provinsi Jambi berpengaruh pada kelancaran mobilitas warga PKN Jambi
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Kualifikasi yang Dibutuhkan	50%	Ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan yang menjangkau seluruh kawasan serta dapat meningkatkan aksesibilitas kawasan perkotaan Jambi terhadap wilayah lain di dalam dan luar Provinsi Jambi	Penyediaan dan pemeliharaan aset infrastruktur dasar perkotaan tidak menjadi prioritas
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan Yang Dihadapi	42%	Rencana pengembangan KI Kemingking yang menarik banyak investasi akan membantu mempercepat pembangunan perkotaan PKN Jambi	Peningkatan investasi terutama pada industri hilir bahan mineral berdampak langsung pada kualitas lingkungan dan infrastruktur perkotaan
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	71%	PKN Jambi diarahkan menjadi kota metropolitan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional di Provinsi Jambi.	Perubahan Kepala Daerah berdampak pada perubahan arahan kebijakan Provinsi Jambi.

Sumber: Analisis BPIW, 2023

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan **Analisis SWOT Fokus Perkotaan** ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6.5 Identifikasi SWOT Fokus Perkotaan

Kawasan Perkotaan			
S (STRENGTH) – KEKUATAN		**W (WEAKNESS) – KELEMAHAN**	
1	Kawasan perkotaan PKN Jambi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam Kota	1	Dukungan dan pemanfaatan infrastruktur jalan di Perkotaan Jambi belum optimal
2	Kawasan Perkotaan di Provinsi Jambi sudah didukung oleh simpul transportasi 3 Bandar Udara maupun 2 Pelabuhan Pengumpul	2	Infrastruktur dasar permukiman Perkotaan Jambi belum terlayani dengan baik
3	Provinsi Jambi dilalui Wilayah Sungai Batanghari yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih Kawasan Perkotaan	3	Perubahan fungsi lahan mengakibatkan bencana banjir di Perkotaan Jambi

Kawasan Perkotaan			
S (STRENGTH) – KEKUATAN		**W (WEAKNESS) – KELEMAHAN**	
4	Kondisi jalan di Perkotaan sudah memiliki kemantapan rata - rata di 90%	4	Kawasan permukiman kumuh di PKN Jambi pada tahun 2022 belum tuntas ditangani seluas 95 Ha
5	Pemerataan penyediaan air minum layak 100% dan Sanitasi Layak 100% di Provinsi Jambi sehingga dapat berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat.		
6	Berdasarkan hasil proyeksi yang dilaksanakan oleh BPS, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2030 berada di posisi 2 besar untuk wilayah Sumatera dan 6 besar di wilayah nasional dengan angka 70,1%. Kondisi tersebut menjadi modal sosial dalam pengembangan kawasan perkotaan yang berdaya saing		
O (OPPORTUNITY) – PELUANG		**T (THREAT) – ANCAMAN**	
1	Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung (pelabuhan laut) di Kabupaten Tanjung Jabung TImur sebagai simpul transportasi baru namun memerhatikan diversifikasi dan perencanaan investasi Provinsi Jambi kedepan	1	Perkembangan Kota secara dinamis memberikan implikasi pada degradasi lingkungan seperti banjir, longsor sehingga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	PKN Jambi diarahkan menjadi kota metropolitan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional di Provinsi Jambi.	2	Keberadaan Pelabuhan Talang Duku di Perkotaan Jambi sebagai pusat simpul distribusi komoditas menyebabkan tingginya tingkat kemacetan dan kerusakan jalan
3	Rencana pengembangan KI Kemingking yang menarik banyak investasi akan membantu mempercepat pembangunan perkotaan PKN Jambi	3	Beberapa ruas jalan belum memenuhi lebar jalan nasional. kondisi tersebut dikarenakan padatnya permukiman penduduk disepanjang jalan nasional
4	Mobilitas dan aktivitas PKN Jambi dapat meningkat dengan adanya Tol Trans Sumatera yang menghubungkan PKN Jambi dengan Rengat dan Betung - Tempino - Jambi	4	Perubahan kepala daerah berpengaruh kepada kebijakan dalam pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Jambi. Selain itu, rendanhnya APBD dalam pembangunan dan pengelolaan aset infrastruktur
5	Banyaknya dukungan investasi pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan di Provinsi Jambi seperti pengendalian banjir, pengelolaan air limbah, persampahan, dan daerah irigasi		

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor

Tabel 6.6 Analisis Faktor Internal Fokus Perkotaan

FAKTOR INTERNAL

	No	Variabel/ Faktor	Tingkat	Bobot	Rating	Skor
STRENGTH	1	Kawasan perkotaan PKN Jambi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam Kota	4,00	22,22%	3,00	0,67
	2	Kawasan Perkotaan di Provinsi Jambi sudah didukung oleh simpul transportasi 3 Bandar Udara maupun 2 Pelabuhan Pengumpul	3,00	16,67%	2,00	0,33
	3	Provinsi Jambi dilalui Wilayah Sungai Batanghari yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih Kawasan Perkotaan	3,00	16,67%	2,00	0,33
	4	Kondisi jalan di Perkotaan sudah memiliki kemantapan rata - rata di 90%	3,00	16,67%	2,00	0,33
	5	Pemerataan penyediaan air minum layak 100% dan Sanitasi Layak 100% di Provinsi Jambi sehingga dapat berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat.	3,00	16,67%	1,00	0,17
	6	Berdasarkan hasil proyeksi yang dilaksanakan oleh BPS, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2030 berada di posisi 2 besar untuk wilayah Sumatera dan 6 besar di wilayah nasional dengan angka	2,00	11,11%	2,00	0,22

		70,1%. Kondisi tersebut menjadi modal sosial dalam pengembangan kawasan perkotaan yang berdaya saing				
		SUB TOTAL	**18,00**	**100,00%**		**2,06**
	No	**Variabel/ Faktor**	**Tingkat**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
WEAKNESS	1	Dukungan dan pemanfaatan infrastruktur jalan di Perkotaan Jambi belum optimal	4,00	30,77%	-3,00	-0,92
	2	Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman Perkotaan Jambi belum merata dan terlayani dengan baik	3,00	23,08%	-2,00	-0,46
	3	Perubahan fungsi lahan mengakibatkan bencana banjir di Perkotaan Jambi	3,00	23,08%	-2,00	-0,46
	4	Kawasan permukiman kumuh di PKN Jambi pada tahun 2022 belum tuntas ditangani seluas 95 Ha	3,00	23,08%	-2,00	-0,46
		SUB TOTAL	**13,00**	**100,00%**		**-2,31**
		TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL				**-0,25**

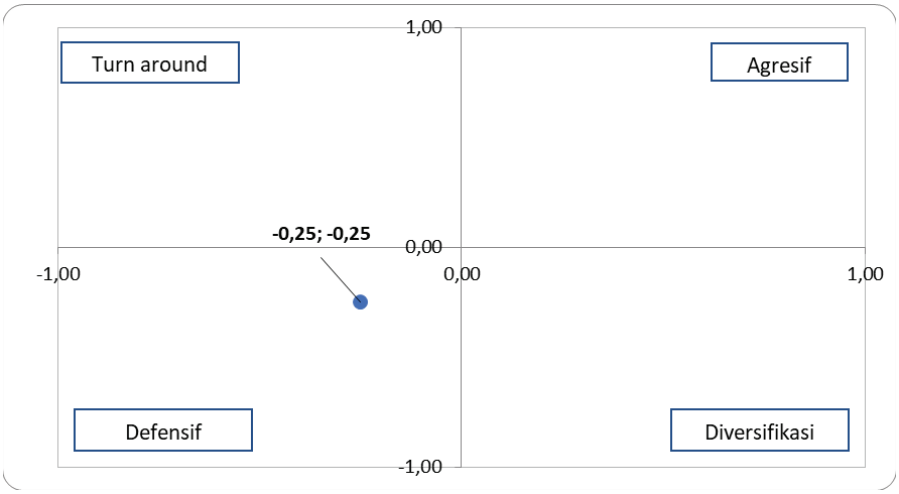
Sumber : Analisis BPIW, 2023

Tabel 6.7 Analisis Faktor Eksternal Fokus Perkotaan

FAKTOR EKSTERNAL

	No	**Variabel/ Faktor**	**Tingkat**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
OPPORTUNITY	1	Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung (pelabuhan laut) di Kabupaten Tanjung Jabung TImur sebagai simpul transportasi baru namun memerhatikan diversifikasi dan perencanaan investasi Provinsi Jambi kedepan	3,00	25,00%	3,00	0,75
	2	PKN Jambi diarahkan menjadi kota metropolitan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional di Provinsi Jambi.	1,00	8,33%	2,00	0,17
	3	Rencana pengembangan KI Kemingking yang menarik banyak investasi akan membantu mempercepat pembangunan perkotaan PKN Jambi	2,00	16,67%	2,00	0,33
	4	Mobilitas dan aktivitas PKN Jambi dapat meningkat dengan adanya Tol Trans Sumatera yang menghubungkan PKN Jambi dengan Rengat dan Betung - Tempino - Jambi	3,00	25,00%	3,00	0,75
		Banyaknya dukungan investasi pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan di Provinsi Jambi seperti pengendalian banjir, pengelolaan air limbah, persampahan, dan daerah irigasi	3,00	25,00%	3,00	0,75
		SUB TOTAL	**12,00**	**100,00%**		**2,75**
	No	**Variabel/ Faktor**	**Tingkat**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
THREAT	1	Perkembangan Kota secara dinamis memberikan implikasi pada degradasi lingkungan seperti banjir, longsor sehingga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3,00	23,08%	-3,00	-0,69
	2	Keberadaan Pelabuhan Talang Duku di Perkotaan Jambi sebagai pusat simpul distribusi komoditas menyebabkan tingginya tingkat kemacetan dan kerusakan jalan	4,00	30,77%	-3,00	-0,92
	3	Beberapa ruas jalan belum memenuhi lebar jalan nasional. kondisi tersebut dikarenakan padatnya permukiman penduduk disepanjang jalan nasional	3,00	23,08%	-3,00	-0,69
	4	Perubahan kepala daerah berpengaruh kepada kebijakan dalam pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Jambi. Selain itu, rendanhnya APBD dalam pembangunan dan pengelolaan aset infrastruktur	3,00	23,08%	-3,00	-0,69
		SUB TOTAL	**13,00**	**100,00%**		**-3,00**
		TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL				**-0,25**

Sumber : Analisis BPIW, 2023



Gambar 6.4 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Perkotaan

Sumber: Analisis BPIW, 2023

Dari hasil pembobotan *strengths weakenesses, opportunities* dan *threats*, fokus Perkotaan di Provinsi Jambi berada di kuadran **Defensif yang menggambarkan kondisi internal yaitu** belum tuntasnya penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotan, perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan banjir di perkotaan, belum meratanya infrastruktur dasar. Selain itu adanya ancaman Keberadaan Pelabuhan Talang Duku di Perkotaan Jambi sebagai pusat simpul distribusi komoditas menyebabkan tingginya tingkat kemacetan dan kerusakan jalan dan Perubahan kepala daerah berpengaruh kepada kebijakan dalam pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Jambi. Selain itu, rendanhnya APBD dalam pembangunan dan pengelolaan aset infrastruktur. Oleh karena itu, adapun **strategi** disusun untuk pengembangan Kawasan Perkotaan PKN Jambi, antara lain

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam memenuhi SPM dengan dukungan fiskal daerah
2. Peningkatan konektivitas perkotaan dengan pusat pertumbuhan baru
3. Pengembangan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan.

6.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Fokus Pariwisata

Berdasarkan analisis **PESTLE** untuk fokus pariwisata, bobot rating tertinggi di parameter *Economic*. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Jambi selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2020 - 2022, jumlah wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi berjumlah 3,8 juta pengunjung dan wisatawan mancanegara berjumlah 3.633 pengunjung, Namun dalam pengembangannya terdapat Dana operasional dan pemeliharaan kawasan dan destinasi wisata masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat.

Tabel 6.8 PESTLE Fokus Pariwisata

Kawasan pariwisata provinsi jambi menjadi pusat budaya dan ilmu pegetahuan bertaraf nasional dan internasional namun dukungan infrastruktur belum optimal				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	KSPN Muaro Jambi merupakan pusat peribadatan dan pendidikan agama Budha tertua dan terluas di Asia Tenggara	Ancaman Pengembangan Kawasan Industri Nasional disekitar kawasan KSPN Muaro Jambi	3	17%
ECONOMIC	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Jambi selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2020 - 2022, jumlah wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi berjumlah 3,8 juta pengunjung dan wisatawan mancanegara berjumlah 3.633 pengunjung	Dana operasional dan pemeliharaan kawasan dan destinasi wisata masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat	5	28%
SOCIOLOGICAL	Sudah ada modal sosial komunitas rumah Menapo dalam pengembangan wisata KSPN Muaro Jambi, Geopark Merangin, dan Taman Nasional Kerinci Seblat	Belum sinerginya dukungan pemerintah dengan komunitas Rumah Menapo dalam mengembangkan wisata KSPN Muaro Jambi.	2	11%
TECHNOLOGICAL	Tersedianya Simpul transportasi Bandara Sultan Thaha di PKN Jambi untuk melayani KSPN Muaro Jambi dan Bandar Udara Muara Bungo untuk melayani Wilayah Barat Taman Nasional Kerinci Seblat dan Geopark Merangin	Belum tersedianya transportasi publik yang terintegrasi menghubungkan dengan wilayah luar Provinsi Jambi menghambat kunjungan wisatawan dari luar wilayah termasuk wisatawan mancanegara.	3	17%
LEGAL	1. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010 - 2025 KSPN Muaro Jambi dan Kerinci Seblat	Belum disahkannya Perpres RTR KSN Cagar Budaya Muaro Jambi dan RTR Taman Nasional Kerinci Seblat	4	22%

Kawasan pariwisata provinsi jambi menjadi pusat budaya dan ilmu pegetahuan bertaraf nasional dan internasional namun dukungan infrastruktur belum optimal				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
	masuk kedalam 88 kawasan prioritas nasional; 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 259 Tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis MuaraJambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional			
ENVIRONMENT	KSPN Muaro Jambi memiliki kanal - kanal purba yang merupakan jalur transportasi dan dapat menjadi atraksi wisata, Gunung Kerinci sebagai tertinggi kedua di Indonesia dan Tertinggi kedua di Pulau Sumatera	Adanya bencana alam banjir disekitar kawasan candi yang dapat merusak candi yang merupakan ke situs-situs warisan atau pusaka, banjir di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merugikan masyarakat terutama di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Selain itu, terjadinya bencana longsor di badan jalan nasional di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	1	6%

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Analisis *5 Forces* **(meso) Fokus Pariwisata**

Berdasarkan hasil analisis *5 FORCES* (MESO) fokus pariwisata diketahui bahwa signifikansi sub parameter terbesar dari: *Rivalry Among Existing Competitor* **yaitu Inovasi** Pengembangan amenitas dan atraksi baru dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. sebagai contoh KSPN Muaro Jambi memiliki kanal - kanal purba yang mengelilingi kawasan candi, kondisi ini dapat menjadi salah satu atraksi wisata., *Bargaining Power of Customers* **yaitu Trend Eksisting** Lokasi wisata Kawasan Candi Muaro Jambi dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dari Kota Jambi. Selain itu, harga tiket masuk wisata di Provinsi Jambi tergolong terjangkau menjadi pertimbangan wisawatan untuk berwisata., *Bargaining Power Of Suppliers* **yaitu Ketergantungan Saat Ini** Wisata di Provinsi Jambi merupakan warisan budaya dan alam Unesco yang memiliki atraksi wisata yang beragam dan didukung oleh simpul transportasi dan konektivitas jalan nasional, *Threat Of New Entrants* **yaitu Ancaman Terhadap Legacy** Peningkatan investasi dari luar Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pariwisata melalui kolaborasi antar sektor serta *Threat Of Substitutes* **yaitu** *Trend Analisis Pestle* Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Jambi selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2020 -

2022, jumlah wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi berjumlah 3,8 juta pengunjung dan wisatawan mancanegara berjumlah 3.633 pengunjung..

Tabel 6.9 Analisis 5 Forces (meso) Fokus Pariwisata

Belum optimalnya pemanfaatan dukungan Infrastruktur dalam mendukung pariwisata dan peningkatan promosi wisata dalam mewujudkan pariwisata berskala internasional berbasis alam dan budaya			
PARAMETER	BOBOT	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Inovasi	50%	Pengembangan amenitas dan atraksi baru dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. sebagai contoh KSPN Muaro Jambi memiliki kanal - kanal purba yang mengelilingi kawasan candi, kondisi ini dapat menjadi salah satu atraksi wisata.	Pengembangan KSPN Muaro Jambi berpotensi terkena dampak dari pembangunan KI Kemingking. Selain itu, tingginya tingkat sedimentasi di kanal - kanal purba baik di dalam kawasan Candi Muaro Jambi maupun sungai disekitar kawasan.
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Trend Eksisting	56%	Lokasi wisata Kawasan Candi Muaro Jambi dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dari Kota Jambi. Selain itu, harga tiket masuk wisata di Provinsi Jambi tergolong terjangkau menjadi pertimbangan wisawatan untuk berwisata.	Retribusi hasil pembelian tiket belum digunakan untuk pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	63%	Wisata di Provinsi Jambi merupakan warisan budaya dan alam Unesco yang memiliki atraksi wisata yang beragam dan didukung oleh simpul transportasi dan konektivitas jalan nasional	Belum optimalnya simpul transportasi wisata jambi untuk wilayah barat dan belum terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Ancaman Terhadap Legacy	42%	Peningkatan investasi dari luar Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pariwisata melalui kolaborasi antar sektor	UMKM dan masyarakat sekitar dapat kalah berkompetisi dengan investor wilayah sekitarnya
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	71%	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Jambi selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2020 - 2022, jumlah wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi berjumlah 3,8 juta pengunjung dan wisatawan mancanegara berjumlah 3.633 pengunjung	Dana operasional dan pemeliharaan kawasan dan destinasi wisata masih bergantung pada pemerintah pusat.

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan **Analisis SWOT Fokus Pariwisata** ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.10 Identifikasi SWOT Fokus Pariwisata

Pariwisata			
S (STRENGTH) – KEKUATAN		**W (WEAKNESS) – KELEMAHAN**	
1	Potensi destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan ilmu pengetahuan di Provinsi Jambi bertaraf nasional dan internasional seperti KSPN Muaro Jambi (Candi Muaro Jambi), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) (Gunung Kerinci, Rawa Bento, Danau), dan Geopark Merangin yang memiliki beragam atraksi wisata yang dapat dikunjungi.	1	Tinggi angka deforestasi di Taman Nasional Kerinci Seblat menyebabkan tingginya bencana longsor di sekitar kawasan
2	Kawasan pariwisata sudah didukung oleh simpul transportasi	2	Limitasi daya dukung lingkungan dalam pengembangan kawasan pairiwsata di Provinsi Jambi
3	Kelompok masyarakat pengelola atraksi wisata berperan dalam pengelolaan objek wisata seperti pengelolaan objek wisata Rawa Bento di Kerinci, pengelola wisata arung jeram di Geopark Merangin.	3	Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memiliki kemampuan/*soft skill* dalam sektor pariwisata
4	Festival Budaya rutin dilaksanakan setiap tahun pada kawasan pariwisata rutin diselenggarakan di kawasan pariwisata Provinsi Jambi sebagai bentuk atraksi wisata seperti Festival Budaya Kerinci, Festival Budaya Candi Muaro Jambi perayaan waisak dan perayaan budaya lainnya	4	Fasilitas dan sarana prasarana pendukung pariwisata masih terbatas di Provinsi Jambi
5	Kawasan Pariwisata di Provinsi Jambi sudah dukung oleh kondisi konektivitas jalan nasional dan penginapan eksisting	5	Belum optimalnya promosi terpadu pariwisata di Provinsi Jambi
O (OPPORTUNITY) – PELUANG		**T (THREAT) – ANCAMAN**	
1	KSPN Muaro Jambi sudah mendapatkan direktif Presiden RI dan Menteri PUPR terhadap dukungan pengembangan pariwisata. Selain itu, disusunnya Rencata Tata Ruang KSPN Muaro Jambi dan TNKS oleh Kementerian ATR/BPN	1	Limitasi daya dukung lingkungan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi
2	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Jambi selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2020 - 2022, jumlah wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi berjumlah 3,8 juta pengunjung dan wisatawan mancanegara berjumlah 3.633 jiwa.	2	Kebijakan Kementerian Perhubungan yang belum mengaktifkan kembali simpul transportasi terutama Bandara Depati Parbo di kabupaten Kerinci sebagai simpul transportasi menuju kawasan pariwisata Taman Nasional Kerinci Seblat
3	Masuknya Investor Swasta dari wilayah sekitar yang dapat mengembangkan infrastruktur sektor pariwisata di Provinsi Jambi	3	Dana operasional dan pemeliharaan kawasan dan destinasi wisata masih bergantung dari pemerintah pusat
4	Didukung oleh Simpul Transportasi seperti bandara dan pelabuhan	4	Kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah belum terintegrasi terkait pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi

Sumber : Analisis Tim BPIW, 2023

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor

Tabel 6.11 Analisis Faktor Internal Fokus Pariwisata

FAKTOR INTERNAL

	No	Variabel/ Faktor	Tingkat	Bobot	Rating	Skor
STRENGTH	1	Potensi destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan ilmu pengetahuan di Provinsi Jambi bertaraf nasional dan internasional seperti KSPN Muaro Jambi (Candi Muaro Jambi), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) (Gunung Kerinci, Rawa Bento, Danau), dan Geopark Merangin yang memiliki beragam atraksi wisata yang dapat dikunjungi.	4,00	23,53%	3,00	0,71
	2	Kawasan pariwisata sudah didukung oleh simpul transportasi	3,00	17,65%	2,00	0,35

	3	Kelompok masyarakat pengelola atraksi wisata berperan dalam pengelolaan objek wisata seperti pengelolaan objek wisata Rawa Bento di Kerinci, pengelola wisata arung jeram di Geopark Merangin.	3,00	17,65%	2,00	0,35
	4	Festival Budaya rutin dilaksanakan setiap tahun pada kawasan pariwisata rutin diselenggarakan di kawasan pariwisata Provinsi Jambi sebagai bentuk atraksi wisata seperti Festival Budaya Kerinci, Festival Budaya Candi Muaro Jambi perayaan waisak dan perayaan budaya lainnya	3,00	17,65%	2,00	0,35
	5	Kawasan Pariwisata di Provinsi Jambi sudah dukung oleh kondisi konektivitas jalan nasional dan penginapan eksisting	4,00	23,53%	3,00	0,71
	SUB TOTAL		**17,00**	**100,00%**		2,47
WEAKNESS	**No**	**Variabel/ Faktor**	**Tingkat**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
	1	Tinggi angka deforestasi di Taman Nasional Kerinci Seblat menyebabkan tingginya bencana longsor di sekitar kawasan	3,00	27,27%	-2,00	-0,55
	2	Limitasi daya dukung lingkungan dalam pengembangan kawasan pairiwsata di Provinsi Jambi	4,00	36,36%	-3,00	-1,09
	3	Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memiliki kemampuan/*soft skill* dalam sektor pariwisata	2,00	18,18%	-2,00	-0,36
	4	Fasilitas dan sarana prasarana pendukung pariwisata masih terbatas di Provinsi Jambi	2,00	18,18%	-1,00	-0,18
	5	Belum optimalnya promosi terpadu pariwisata di Provinsi Jambi	3,00	27,27%	-2,00	-0,55
	SUB TOTAL		**11,00**	**100,00%**		**-2,18**
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL						**0,29**

Sumber : Analisis BPIW, 2023

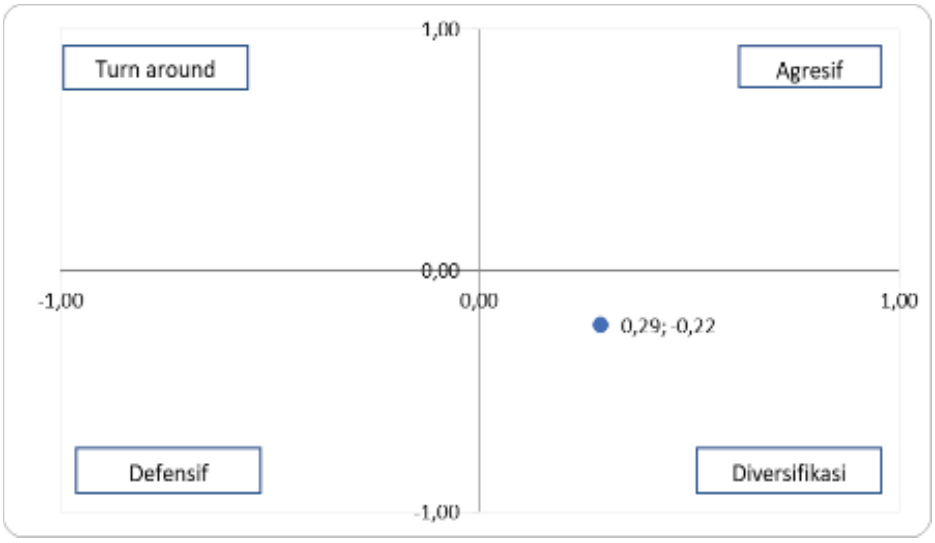
Tabel 6.12 Analisis Faktor Eksternal Fokus Pariwisata

FAKTOR EKSTERNAL

	No	**Variabel/ Faktor**	**Tingkat**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
OPPORTUNITY	1	KSPN Muaro Jambi sudah mendapatkan direktif Presiden RI dan Menteri PUPR terhadap dukungan pengembangan pariwisata. Selain itu, disusunnya Rencata Tata Ruang KSPN Muaro Jambi dan TNKS oleh Kementerian ATR/BPN	4,00	36,36%	3,00	1,09
	2	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Jambi selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2020 - 2022, jumlah wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi berjumlah 3,8 juta pengunjung dan wisatawan mancanegara berjumlah 3.633 jiwa.	3,00	27,27%	2,00	0,55
	3	Masuknya Investor Swasta dari wilayah sekitar yang dapat mengembangkan infrastruktur sektor pariwisata di Provinsi Jambi	2,00	18,18%	3,00	0,55
	4	Didukung oleh Simpul Transportasi seperti bandara dan pelabuhan	2,00	18,18%	2,00	0,36
	SUB TOTAL		**17,00**	**100,00%**	**11,00**	**100,00 %**
THREAT	**No**	**Variabel/ Faktor**	**Tingkat**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
	1	Limitasi daya dukung lingkungan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi	4,00	30,77%	-3,00	-0,92
	2	Kebijakan Kementerian Perhubungan yang belum mengaktifkan kembali simpul transportasi terutama Bandara Depati Parbo di kabupaten Kerinci sebagai simpul	3,00	23,08%	-3,00	-0,69

		transportasi menuju kawasan pariwisata Taman Nasional Kerinci Seblat				
	3	Dana operasional dan pemeliharaan kawasan dan destinasi wisata masih bergantung dari pemerintah pusat	3,00	23,08%	-3,00	-0,69
	4	Kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah belum terintegrasi terkait pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi	3,00	23,08%	-2,00	-0,46
		SUB TOTAL	**13,00**	**100,00%**		**-2,77**
		TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL				**-0,22**

Sumber : Analisis BPIW, 2023



Gambar 6.5 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pariwisata

Sumber: Hasil analisis Tim BPIW, 2023

Dari hasil pembobotan *strengths weakenesses, opportunities* dan *threats*, fokus Pariwisata di Provinsi Jambi dikembangkan dengan strategi **Diversifikasi**, yakni strategi:

1. P**engembangan potensi atraksi baru** pariwisata sebagai daya tarik
2. **Pengembangan jaringan dan simpul transportasi** dalam mendukung aksesibilitas pariwisata
3. Penyediaan amenitas dan pemenuhan infrastruktur dasar bagi kawasan pariwisata.

.



BAB 7

ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Provinsi Jambi

Bab 7 Analisis kebutuhan infrastruktur mendeskripsikan analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur di fokus kawasan prioritas. Analisis kebutuhan infrastruktur menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi pembangunan infrastruktur

Infrastruktur Sumber Daya Air dengan segala manfaatnya menjadi komponen yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan air terpadu oleh infrastruktur sumber daya air berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Permasalahan pengelolaan sumber daya air dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan jika tidak dilakukan penanganan dengan baik.

Kondisi Infrastruktur layanan air baku pada Provinsi Jambi diketahui memiliki intake air baku sebanyak 68 unit dengan total debit intake air baku mencapai 3.397 liter/detik. Berikut Tabel 7.1 merupakan kondisi dari infrastruktur air baku eksisting di Provinsi Jambi.

Tabel 7.1 Kondisi Infrastruktur Air Baku Eksisting di Provinsi Jambi

No.	Prasarana Terpasang	Debit (m3/detik)
1.	Embung Terpasang	0,0938
2.	Prasarana Air Baku + Intake Sungai +Sumur	8,3395
3.	Bendung Daerah Irigasi (Eksisting)	17,88
Total Kapasitas Terpasang (M^3/Dt)		**22,8355**

Sumber: Pola PSDA WS. Batanghari, 2021

Kebutuhan infrastruktur layanan air baku, total kapasitas air baku eksisting di Provinsi Jambi yaitu 8,3395 m^3/detik dan embung terpasang 0,00938 m^3/detik. WS. Batanghari melewati 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi terkecuali Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah Sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan air baku yang dibangun BWS Sumatera VI melalui sumur dalam.

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air baku RKI Provinsi Jambi pada Pola Rencana SDA WS. Batanghari hingga tahun 2029 diperoleh kebutuhan 5,8237 m^3/detik. Dari hasil proyeksi tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat gap negatif kebutuhan air baku di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo (Tabel 7.2)

Tabel 7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2034

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan	Kondisi Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI (m3/detik)								
				2022		2023		2024		2025		
				Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	
1	Batanghari	PKW Muara Bulian	0,24	0,4613	-0,2213	0,4631	-0,2231	0,4650	-0,2250	0,4668	-0,2268	
2	Bungo	PKW Muaro Bungo	1,554	0,7290	0,8250	0,7318	0,8222	0,7347	0,8193	0,7376	0,8164	
3	Kerinci	KSPN Kerinci Seblat	1,285	0,4297	0,8553	0,4315	0,8535	0,4332	0,8518	0,4349	0,8501	
4	Kota Jambi	PKN Jambi	1,9586	0,7943	1,1643	0,7975	1,1611	0,8007	1,1579	0,8102	1,1484	
5	Kota Sungai Penuh	KSPN Kerinci Seblat	0,26	0,1596	0,1004	0,1603	0,0997	0,1609	0,0991	0,1615	0,0985	
6	Merangin	Geopark Merangin	0,776	0,7428	0,0332	0,7458	0,0302	0,7487	0,0273	0,7517	0,0243	
7	Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi dan KI Kemingking	0,22	0,5068	-0,2868	0,5088	-0,2888	0,5108	-0,2908	0,5128	-0,2928	
8	Sarolangun	PKW Sarolangun	2,9867	0,5516	2,4351	0,5538	2,4329	0,5560	2,4307	0,5582	2,4285	
9	Tanjung Jabung Barat	PKW Kuala Tungkal	0,015	0,0017	0,0133	0,0017	0,0133	0,00170	0,0133	0,001700	0,0133	
10	Tanjung Jabung Timur	PKW Muara Sabak	0,225	0,3840	-0,1590	0,3855	-0,1605	0,3871	-0,1621	0,3886	-0,1636	
11	Tebo	-	0,623	0,8991	-0,2761	0,9027	-0,2797	0,9062	-0,2832	0,9098	-0,2868	
TOTAL			3,4908	5,6599	-2,1691	5,6824	-2,1916	5,7049	-2,2141	5,7049	-2,2141	

NO	Kabupaten/ Kota	Kawasan	Kondisi Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI (m3/detik)									
				2026		2027		2028		2029		2034	
				Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP
1	Batanghari	PKW Muara Bulian	0,24	0,4683	-0,2283	0,4697	-0,2297	0,4711	-0,2312	0,4740	-0,2341	0,4886	-0,2486
2	Bungo	PKW Muaro Bungo	1,554	0,7399	0,8141	0,7422	0,8118	0,7445	0,8094	0,7492	0,8048	0,7445	0,0776
3	Kerinci	KSPN Kerinci Seblat	1,285	0,4363	0,8487	0,4376	0,8474	0,4389	0,8460	0,4417	0,8433	0,4553	0,3982
4	Kota Jambi	PKN Jambi	1,9586	0,8127	1,1459	0,8152	1,1433	0,8178	1,1408	0,8229	1,1357	0,8484	0,3128
5	Kota Sungai Penuh	KSPN Kerinci Seblat	0,26	0,1620	0,0980	0,1625	0,0975	0,1630	0,0970	0,1640	0,0959	0,1692	0,0908
6	Merangin	Geopark Merangin	0,776	0,7541	0,0219	0,7564	0,0196	0,7587	0,0172	0,7634	0,0125	0,7870	-0,0110
7	Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi dan KI Kemingking	0,22	0,5144	-0,2944	0,5160	-0,2960	0,5176	-0,2976	0,5208	-0,3009	0,5370	-0,3170
8	Sarolangun	PKW Sarolangun	2,9867	0,5599	2,4268	0,5616	2,4250	0,5634	2,4233	0,5669	2,4198	0,5844	1,8485
9	Tanjung Jabung Barat	PKW Kuala Tungkal	0,015	0,00172	0,0133	0,0017	0,0133	0,0017	0,0133	0,0017	0,0132	0,0019	0,0114
10	Tanjung Jabung Timur	PKW Muara Sabak	0,225	0,3898	-0,1648	0,3910	-0,1660	0,3922	-0,1672	0,3946	-0,1697	0,4068	-0,5674
11	Tebo	-	0,623	0,9126	-0,6996	0,9154	-0,7025	0,9183	-0,7053	0,9240	-0,7110	0,9525	-0,3295
TOTAL			3,4908	5,7518	-2,2610	5,7698	-2,2790	5,7878	-2,2970	5,8237	-2,3329	4,8190	-0,3581

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Sesuai dengan **hasil analisa perhitungan proyeksi luasan banjir** pada tabel 7.3, proyeksi potensi daerah rawan banjir di WS Batanghari pada tahun 2029 menjadi 445.629,42 Ha atau bertambah 14,42 Ha. Analisa proyeksi banjir pada WS Batanghari meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi kecuali Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena kewenangan Wilayah Sungai di bawah Pemerintah Provinsi Jambi. Penambahan potensi daerah rawan banjir terjadi di seluruh kabupaten/kota yang dianalisa, dengan penambahan tertinggi pertama dan kedua di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi. Program pengendalian banjir yang dapat dilakukan berupa: pengerukan sedimen, normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Tabel 7.3 Proyeksi Banjir di WS Batanghari Tahun 2022 - 2029

No.	Kabupaten/ Kota	Kawasan	Banjir Eksisting 2015 (Ha)	PROYEKSI LUASAN BANJIR (HA)							
				2022		2023		2024		2025	
				Luas	GAP	Luas	GAP	Luas	GAP	Luas	GAP
1	Kab. Kerinci	PKW Muara Bulian	2.727	2.727,10	0,1	2.727,11	0,11	2.727,13	0,13	2.727,14	0,14
2	Kota Sungai Penuh	PKW Muaro Bungo	700	700,08	0,08	700,09	0,09	700,1	0,1	700,11	0,11
3	Kab. Merangin	KSPN Kerinci Seblat	29.293	29.293,53	0,53	29.293,60	0,6	29.293,66	0,66	29.293,73	0,73
4	Kab. Bungo	PKN Jambi	36.308	36.308,64	0,64	36.308,72	0,72	36.308,80	0,8	36.308,88	0,88
5	Kab. Tebo	KSPN Kerinci Seblat	104.912	104.913,72	1,72	104.913,93	1,93	104.914,15	2,15	104.914,36	2,36
6	Kab. Batanghari	PKW Muara Bulian	78.948	78.949,31	1,31	78.949,47	1,47	78.949,64	1,64	78.949,80	1,8
7	Kab. Sarolangun	PKW Sarolangun	39.110	39.110,68	0,68	39.110,77	0,77	39.110,85	0,85	39.110,94	0,94
8	Kab. Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi dan KI Kemingking	95.608	95.609,57	1,57	95.609,77	1,77	95.609,96	1,96	95.610,16	2,16
9	Kota Jambi	PKW Kuala Tungkal	4.404	4.404,14	0,14	4.404,16	0,16	4.404,17	0,17	4.404,19	0,19
10	Kab. Tanjab Timur	PKW Muara Sabak	53.605	53.605,91	0,91	53.606,03	1,03	53.606,14	1,14	53.606,25	1,25
TOTAL			445.615	445.622,68	7,68	445.623,65	8,65	445.624,60	9,6	445.625,56	10,56

No.	Kabupaten/ Kota	Kawasan Prioritas	Banjir Eksisting 2015 (Ha)	Proyeksi Luasan Banjir (Ha)							
				2026		2027		2028		2029	
				Luas	GAP	Luas	GAP	Luas	GAP	Luas	GAP
1	Kab. Kerinci	PKW Muara Bulian	2.727	2.727,15	0,15	2.727,17	0,17	2.727,18	0,18	2.727,20	0,2
2	Kota Sungai Penuh	PKW Muaro Bungo	700	700,12	0,12	700,13	0,13	700,14	0,14	700,15	0,15
3	Kab. Merangin	KSPN Kerinci Seblat	29.293	29.293,79	0,79	29.293,86	0,86	29.293,93	0,93	29.293,99	0,99
4	Kab. Bungo	PKN Jambi	36.308	36.308,96	0,96	36.309,04	1,04	36.309,12	1,12	36.309,20	1,2
5	Kab. Tebo	KSPN Kerinci Seblat	104.912	104.914,58	2,58	104.914,79	2,79	104.915,01	3,01	104.915,22	3,22
6	Kab. Batanghari	Geopark Merangin	78.948	78.949,96	1,96	78.950,13	2,13	78.950,29	2,29	78.950,46	2,46
7	Kab. Sarolangun	PKW Sarolangun	39.110	39.111,03	1,03	39.111,11	1,11	39.111,20	1,2	39.111,28	1,28
8	Kab. Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi dan KI Kemingking	95.608	95.610,36	2,36	95.610,55	2,55	95.610,75	2,75	95.610,95	2,95
9	Kota Jambi	PKW Kuala Tungkal	4.404	4.404,21	0,21	4.404,22	0,22	4.404,24	0,24	4.404,26	0,26
10	Kab. Tanjab Timur	PKW Muara Sabak	53.605	53.606,37	1,37	53.606,48	1,48	53.606,59	1,59	53.606,71	1,71
TOTAL			445.615	445.626,53	11,53	445.627,48	12,48	445.628,45	13,45	445.629,42	14,42

Sumber : Analisis BPIW, 2034

Infrastruktur Bina Marga. Provinsi Jambi memiliki total 79 ruas jalan nasional dengan total panjang 1.318,9 Kilometer. Proyeksi perhitungan *Level of Service* jalan diperoleh dari perkalian data LHR setiap jenis kendaraan dengan koefisien jenis setiap jenis kendaraan pada tahun 2021 sebagai tahun dasar. Data diperoleh dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi. Tahap selanjutnya menggunakan data jumlah kendaraan dari BPS 5 tahun terakhir untuk diperoleh persamaaan regresi untuk menghitung Proyeksi LHR hingga tahun 2029 (Tabel 7.4). selanjutnya, untuk mencari nilai VCR proyeksi AADT (kendaraan/hari) tahun depan (T+1) dibagi AADT Tahun eksisting (T0) dikalikan dengan VCR Tahun eksisting. Nilai VCR akan diperoleh dan diklasifikasikan dengan nilai *Level of Service* (LoS) (Tabel 7.5).

Berdasarkan proyeksi perhitungan *Level Of Service* (LOS) hingga tahun 2029 bahwa jalan nasional di Provinsi Jambi pada tahun 2029 memiliki pelayanan/LOS A mengalami penurunan jumlah ruas dengan total 50 ruas jalan atau 63,29 % dari keseluruhan jalan nasional di Jambi. Selain itu nilai LOS F mengalami peningkatan jumlah ruas dari 8 ruas jalan pada tahun 2025 menjadi 13 ruas pada tahun 2029. Berikut tabel 7.5 merupakan kondisi infrastruktur jalan pada setiap kawasan prioritas di Provinsi Jambi.

Tabel 7.4 Proyeksi Lalu Lintas Ruas Jalan Nasional Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2034

Nomor Ruas			Nama Ruas	Kapasitas (smp/jam)	Data LHR (ADT)		Proyeksi LHR (smp/jam)								
					TH	LHR/ ADT	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1			Merlung - Bts. Prov. Riau	3.441	2021	244	143	140	149	158	167	176	185	194	248
2			Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjbbar – Merlung	11.520	2021	834	480	467	497	527	558	588	618	648	830
3			Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar	12.537	2021	855	522	508	541	574	607	640	673	706	903
4			Bts. Kota Jambi - Sp. Tuan	23.809	2021	1253	992	965	1.028	1.090	1.153	1.215	1.278	1.340	1.715
5			Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi	7.115	2021	457	296	288	307	326	344	363	382	400	512
5	12	K	SP. Pal Sepuluh - SP. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado - Gado)	41.279	2021	1903	1.720	1.673	1.782	1.890	1.998	2.107	2.215	2.323	2.973
5	13	K	Sp. Gado - Gado -Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II)	6.306	2021	415	263	256	272	289	305	322	338	355	454
6	11	K	Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/Muaro Jambi)	44.086	2021	1563	1.837	1.787	1.903	2.018	2.134	2.250	2.366	2.481	3.175
6	12	K	Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah)	81.081	2021	2912	3.378	3.287	3.500	3.712	3.925	4.138	4.351	4.563	5.840
6	14	K	Jln. Pangeran Hidayat (SP. Kawat - Sp. Kota Baru)	81.081	2021	2912	3.378	3.287	3.500	3.712	3.925	4.138	4.351	4.563	5.840
6	13	K	Jln. M. Yamin (Sp. Pulai - Sp. Kawat)	73.889	2021	2524	3.079	2.995	3.189	3.383	3.577	3.771	3.965	4.159	5.322
7			Bts. Kota Jambi – Tempino	25.455	2021	1301	1.061	1.032	1.099	1.165	1.232	1.299	1.366	1.433	1.833
8			Tempino - Bts. Sumsel	4.195	2021	340	175	170	181	192	203	214	225	236	302
9			Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Prov. Sumbar	27.049	2021	1212	1.127	1.096	1.167	1.238	1.309	1.380	1.451	1.522	1.948
9	11	K	Jln. Lintas Sumatera II Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts Kota Muaro Bungo)	39.507	2021	1557	1.646	1.601	1.705	1.809	1.912	2.016	2.120	2.223	2.846
10			Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin	12.325	2021	782	514	500	532	564	597	629	661	694	888
10	11	K	Jln. Lintas Sumatera I Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muaro Bungo)	35.378	2021	1278	1.474	1.434	1.527	1.620	1.713	1.805	1.898	1.991	2.548
11			Bts.Kab. Bungo/Kab.Merangin- Bts. Kota Bangko	4.376	2021	303	182	177	189	200	212	223	235	246	315
11	11	K	Jln. Lintas Sumatera II Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko)	5.601	2021	350	233	227	242	256	271	286	301	315	403
12			Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko	3.283	2021	240	137	133	142	150	159	168	176	185	236

Nomor Ruas			Nama Ruas	Kapasitas (smp/jam)	Data LHR (ADT)		Proyeksi LHR (smp/jam)								
					TH	LHR/ ADT	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
12	11	K	Jln. Lintas Sumatera I Bangko (Bts. Kota Bangko-Sp. Bukit Indah Bangko)	6.490	2021	382	270	263	280	297	314	331	348	365	467
13			Sarolangun - Bts. Sarolangun/Kab. Merangin	5.698	2021	340	237	231	246	261	276	291	306	321	410
14			Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel	27.576	2021	1108	1.149	1.118	1.190	1.263	1.335	1.407	1.480	1.552	1.986
15			Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun	26.798	2021	1255	1.117	1.086	1.157	1.227	1.297	1.368	1.438	1.508	1.930
16			Bts. Kab.Batanghari/Kab. Sarolangun – Pauh	3.154	2021	131	128	136	144	153	161	169	178	186	227
17			Pauh – Sarolangun	3.514	2021	146	142	152	161	170	179	189	198	207	253
18			Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo -Bts. Kota Muaro Bungo	3.590	2021	150	146	155	164	174	183	193	202	211	259
18	11	K	Jln. Pattimura Muaro Bungo (Bts. Kota Muaro Bungo- Sp. Jambi)	20.200	2021	842	819	872	925	978	1.031	1.084	1.137	1.190	1.455
19			Muara Tebo-Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo	5.967	2021	249	242	258	273	289	304	320	336	351	430
20			Sei Bengkal - Muaro Tebo	3.560	2021	148	144	154	163	172	182	191	200	210	256
21			Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo-Sei Bengkal	2.304	2021	96	93	99	105	112	118	124	130	136	166
22			Muara Tembesi-Bts. Kab. Batanghari/Kab.Tebo	14.361	2021	598	582	620	658	695	733	771	808	846	1.034
23			Bts. Kota Muara Bulian-Muara Tembesi	37.835	2021	1.576	1.534	1.633	1.732	1.832	1.931	2.030	2.129	2.229	2.725
23	11	K	Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian)	44.328	2021	1.847	1.797	1.913	2.030	2.146	2.262	2.379	2.495	2.611	3.193
24			Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari - Bts. MA. Bulian	20.484	2021	853	830	884	938	992	1.045	1.099	1.153	1.207	1.475
24	11	K	Jln. Gajah Mada (Muara Bulian)	26.888	2021	1.120	1.090	1.160	1.231	1.302	1.372	1.443	1.513	1.584	1.937
25			Sp. Mandalo Darat - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari	11.031	2021	460	447	476	505	534	563	592	621	650	795
26			Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat	81.928	2021	3.414	3.321	3.536	3.751	3.966	4.181	4.396	4.611	4.826	5.901
26	11	K	Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo	73.732	2021	3.072	2.989	3.182	3.376	3.569	3.763	3.956	4.150	4.343	5.311
27			Bts. Kota Jambi - Talang Duku	6.318	2021	263	256	273	289	306	322	339	356	372	455
27	11	K	Jl. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Musem Perjuangan-Sp. Pulai)	91.156	2021	3.798	3.695	3.934	4.174	4.413	4.652	4.891	5.130	5.370	6.566
27	12	K	Jl. Sultan Thaha (Jambi) (SP.3 Jl. Fatmawati - Sp. Museum Perjuangan)	33.281	2021	1.387	1.349	1.436	1.524	1.611	1.698	1.786	1.873	1.960	2.397

Nomor Ruas			Nama Ruas	Kapasitas (smp/jam)	Data LHR (ADT)		Proyeksi LHR (smp/jam)								
					TH	LHR/ ADT	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
27	13	K	Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp. 3 Jl. Fatmawati - Sp. Duren)	69.503	2021	2.896	2.817	3.000	3.182	3.365	3.547	3.729	3.912	4.094	5.006
27	14	K	Jln.Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang- Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi)	36.095	2021	1.504	1.463	1.558	1.653	1.747	1.842	1.937	2.031	2.126	2.600
27	15	K	Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Tugu Pers)	11.954	2021	498	485	516	547	579	610	641	673	704	861
27	16	K	Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Jelutung)	31.016	2021	1.292	1.257	1.339	1.420	1.501	1.583	1.664	1.746	1.827	2.234
27	17	K	Jln. Jenderal Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung - SP. Sudirman/Kol. Pol. M Thaher)	99.516	2021	4.147	4.034	4.295	4.556	4.817	5.079	5.340	5.601	5.862	7.168
27	19	K	Jln. Kol Pol. M Thaher (Jambi)	88.922	2021	2.325	2.262	2.408	2.555	2.701	2.848	2.994	3.140	3.287	4.019
27	20	K	Jln. RB. Siagian - Sp. Tanjung Lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi)	88.922	2021	2.325	2.262	2.408	2.555	2.701	2.848	2.994	3.140	3.287	4.019
27	21	K	Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi)	88.922	2021	2.325	2.262	2.408	2.555	2.701	2.848	2.994	3.140	3.287	4.019
28			Sp. Tuan - Bts.Kab. Muaro Jambi / Kab. Tanjabtim	3.141	2021	94	92	98	104	109	115	121	127	133	163
29	1		Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim - BTS. KAB. TANJABTIM / KAB. TANJABBAR	2.875	2021	82	80	85	91	96	101	106	111	116	142
29	2		Bts. Kab. Tanjabtim/Kab.Tanjabbar-Sp Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut)	2.143	2021	66	64	68	73	77	81	85	89	93	114
30			Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut) - Bts. Kota Kuala Tungkal	4.384	2021	113	110	117	124	131	138	145	152	160	195
30	11	K	Jln. Sultan Thaha (Kuala Tungkal) Sp. 3 Sudirman - Sp. 3 Sultan Thaha)	1.396	2020	118	115	122	129	137	144	152	159	167	204
30	12	K	Jln. Jenderal Sudirman (Kuala Tungkal) (Sp. Sudirman/Sri Sudewi-Sp. Sudirman/Sultan Thaha)	1.140	2020	184	179	191	202	214	226	237	249	260	318
30	13	K	Jln.Sri Sudewi (Kuala Tungkal) (Bts. Kota Kuala Tungkal -Sp. Tungkal - Sp. Sudirman /Sri Sudewi)	8.687	2021	184	179	190	202	213	225	236	248	259	317
33			Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi	1.820	2021	38	37	39	41	44	46	49	51	53	65
34			Bts. Kota Bangko - Sei Manau	2.273	2021	58	57	60	64	68	71	75	79	82	101
34	11	K	Jln. Makalam (Bangko) (Sp. Bukit Indah Bangko - Sp. Pasar Bawah)	3.802	2020	442	430	457	485	513	541	569	596	624	763

Nomor Ruas			Nama Ruas	Kapasitas (smp/jam)	Data LHR (ADT)		Proyeksi LHR (smp/jam)								
					TH	LHR/ ADT	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
34	12	K	Jln. M. Yamin (Bangko) (Sp. Pasar Bawah - Bts. Kota Bangko)	9.571	2021	214	208	222	235	249	262	276	289	303	370
35			Sei Manau - Bts. Kab. Merangin/Kab.Kerinci	2.265	2021	51	49	53	56	59	62	65	69	72	88
36			Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci - Sanggaran Agung	1.772	2021	46	45	47	50	53	56	59	62	65	79
37			Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata)	4.448	2021	104	101	107	114	120	127	133	140	146	179
37	11	K	Jln. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu PKK - Sp. Ahmad Yani)	2.331	2020	153	148	158	168	177	187	197	206	216	264
37	14	K	Jln. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu PKK)	10.833	2021	234	228	243	258	272	287	302	317	331	405
38			Bts. Kota Sungai Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan)	1.329	2021	32	31	33	35	38	40	42	44	46	56
38	11	K	Jln. Ahmad Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh)	7.410	2021	158	153	163	173	183	193	203	213	223	272
38	12	K	Jln. Soekarno - Hatta - Sungai Penuh (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh)	3.397	2021	103	100	106	113	119	126	132	139	145	178
39	1		Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi	9.542	2021	249	242	257	273	289	304	320	336	351	430
39	2		Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi	1.820	2021	38	37	39	41	44	46	49	51	53	65
39	3		Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim	905	2021	38	37	39	41	44	46	49	51	53	65
39	4		Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab.Tanjabtim-Sp. Zona V	905	2021	38	37	39	41	44	46	49	51	53	65
40			Sp. Zona V - Pel. Muara Sabak	2.066	2021	86	84	89	95	100	105	111	116	122	149
41	1		Sp. Niam - Bts Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar	712	2021	30	29	31	33	34	36	38	40	42	51
41	2		Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar-Lubuk Kambing	890	2021	37	36	38	41	43	45	48	50	52	64
42			Lubuk Kambing – Merlung	890	2021	37	36	38	41	43	45	48	50	52	64
43			Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W	26.088	2021	1.087	1.058	1.126	1.194	1.263	1.331	1.400	1.468	1.537	1.879
44			Siulak Deras/Letter W - Bts. Sumbar	2.779	2020	116	113	120	127	135	142	149	156	164	200

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Tabel 7.5 Proyeksi VCR dan Level Of Service (LOS) Ruas jalan Nasional Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2034

NOMOR RUAS			NAMA RUAS	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
				VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
1			Merlung - Bts. Prov. Riau	0,1	A	0,1	A	0,1	A	0,11	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,14	A	0,16	A
2			Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjbbar - Merlung	0,51	A	0,5	A	0,53	A	0,56	A	0,59	A	0,62	B	0,66	B	0,69	B	0,72	C	0,81	D
3			Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar	0,48	A	0,47	A	0,5	A	0,53	A	0,56	A	0,59	A	0,62	B	0,65	B	0,68	B	0,77	C
4			Bts. Kota Jambi - Sp. Tuan	0,56	A	0,54	A	0,58	A	0,62	B	0,65	B	0,69	B	0,72	C	0,76	C	0,79	C	0,89	D
5			Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi	0,23	A	0,22	A	0,24	A	0,25	A	0,27	A	0,28	A	0,3	A	0,31	A	0,33	A	0,37	A
5	12	K	SP. Pal Sepuluh - SP. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado - Gado)	0,98	E	0,95	E	1,02	F	1,08	F	1,14	F	1,2	F	1,26	F	1,32	F	1,39	F	1,57	F
5	13	K	Sp. Gado - Gado -Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II)	0,2	A	0,19	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,26	A	0,27	A	0,28	A	0,32	A
6	11	K	Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/Muaro Jambi)	0,96	E	0,93	E	0,99	E	1,05	F	1,12	F	1,18	F	1,24	F	1,3	F	1,36	F	1,53	F
6	12	K	Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah)	0,85	D	0,83	D	0,88	D	0,93	E	0,99	E	1,04	F	1,09	F	1,15	F	1,2	F	1,36	F
6	14	K	Jln. Pangeran Hidayat (SP. Kawat - Sp. Kota Baru)	0,85	D	0,83	D	0,88	D	0,93	E	0,99	E	1,04	F	1,09	F	1,15	F	1,2	F	1,36	F
6	13	K	Jln. M. Yamin (Sp. Pulai - Sp. Kawat)	0,58	A	0,56	A	0,6	B	0,64	B	0,67	B	0,71	C	0,75	C	0,78	C	0,82	D	0,93	E
7			Bts. Kota Jambi - Tempino	0,65	B	0,63	B	0,67	B	0,71	C	0,76	C	0,8	C	0,84	D	0,88	D	0,92	E	1,04	F
8			Tempino - Bts. Sumsel	0,12	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A
9			Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Prov. Sumbar	0,67	B	0,65	B	0,69	B	0,74	C	0,78	C	0,82	D	0,86	D	0,91	E	0,95	E	1,07	F
9	11	K	Jln. Lintas Sumatera II Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts Kota Muaro Bungo)	0,93	E	0,9	E	0,96	E	1,02	F	1,08	F	1,14	F	1,2	F	1,26	F	1,31	F	1,49	F
10			Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin	0,37	A	0,36	A	0,38	A	0,41	A	0,43	A	0,45	A	0,48	A	0,5	A	0,52	A	0,59	A
10	11	K	Jln. Lintas Sumatera I Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muaro Bungo)	0,34	A	0,33	A	0,35	A	0,37	A	0,4	A	0,42	A	0,44	A	0,46	A	0,48	A	0,54	A
11			Bts.Kab. Bungo/Kab.Merangin- Bts. Kota Bangko	0,14	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,2	A	0,22	A

NOMOR RUAS			NAMA RUAS	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
				VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
11	11	K	Jln. Lintas Sumatera II Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko)	0,17	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,2	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,27	A
12			Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko	0,12	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A
12	11	K	Jln. Lintas Sumatera I Bangko (Bts. Kota Bangko-Sp. Bukit Indah Bangko)	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,09	A	0,09	A	0,1	A	0,1	A	0,11	A	0,11	A	0,13	A
13			Sarolangun - Bts. Sarolangun/Kab. Merangin	0,14	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,2	A	0,22	A
14			Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel	0,68	B	0,66	B	0,7	C	0,75	C	0,79	C	0,83	D	0,88	D	0,92	E	0,96	E	1,09	F
15			Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun	0,7	C	0,68	B	0,73	C	0,77	C	0,81	D	0,86	D	0,9	E	0,95	E	0,99	E	1,12	F
16			Bts. Kab.Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauh	0,1	A	0,1	A	0,1	A	0,11	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,14	A	0,16	A
17			Pauh - Sarolangun	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,2	A	0,21	A	0,24	A
18			Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo -Bts. Kota Muaro Bungo	0,12	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A
18	11	K	Jln. Pattimura Muaro Bungo (Bts. Kota Muaro Bungo- Sp. Jambi)	0,7	C	0,68	B	0,73	C	0,77	C	0,81	D	0,86	D	0,9	E	0,95	E	0,99	E	1,12	F
19			Muara Tebo-Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,09	A	0,09	A	0,1	A	0,1	A	0,11	A	0,11	A	0,13	A
20			Sei Bengkal - Muaro Tebo	0,12	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A
21			Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo-Sei Bengkal	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
22			Muara Tembesi-Bts. Kab. Batanghari/Kab.Tebo	0,44	A	0,43	A	0,46	A	0,48	A	0,51	A	0,54	A	0,57	A	0,59	A	0,62	B	0,70	C
23			Bts. Kota Muara Bulian-Muara Tembesi	0,95	E	0,92	E	0,98	E	1,04	F	1,1	F	1,16	F	1,22	F	1,28	F	1,34	F	1,52	F
23	11	K	Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian)	0,66	B	0,64	B	0,68	B	0,73	C	0,77	C	0,81	D	0,85	D	0,89	D	0,93	E	1,05	F
24			Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari - Bts. MA. Bulian	0,56	A	0,54	A	0,58	A	0,62	B	0,65	B	0,69	B	0,72	C	0,76	C	0,79	C	0,89	D
24	11	K	Jln. Gajah Mada (Muara Bulian)	0,36	A	0,35	A	0,37	A	0,4	A	0,42	A	0,44	A	0,46	A	0,49	A	0,51	A	0,58	A
25			Sp. Mandalo Darat - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari	0,27	A	0,26	A	0,28	A	0,3	A	0,31	A	0,33	A	0,35	A	0,36	A	0,38	A	0,43	A
26			Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat	1,53	F	1,49	F	1,58	F	1,68	F	1,78	F	1,87	F	1,97	F	2,07	F	2,16	F	2,44	F

NOMOR RUAS			NAMA RUAS	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
				VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
26	11	K	Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo	1,17	F	1,14	F	1,21	F	1,29	F	1,36	F	1,43	F	1,51	F	1,58	F	1,65	F	1,87	F
27			Bts. Kota Jambi - Talang Duku	0,28	A	0,27	A	0,29	A	0,31	A	0,33	A	0,34	A	0,36	A	0,38	A	0,4	A	0,45	A
27	11	K	Jl. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Musem Perjuangan-Sp. Pulai)	1,07	F	1,04	F	1,11	F	1,18	F	1,24	F	1,31	F	1,38	F	1,45	F	1,51	F	1,71	F
27	12	K	Jl. Sultan Thaha (Jambi) (SP.3 Jl. Fatmawati - Sp. Museum Perjuangan)	0,31	A	0,3	A	0,32	A	0,34	A	0,36	A	0,38	A	0,4	A	0,42	A	0,44	A	0,50	A
27	13	K	Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp. 3 Jl. Fatmawati - Sp. Duren)	0,72	C	0,7	C	0,75	C	0,79	C	0,84	D	0,88	D	0,93	E	0,97	E	1,02	F	1,15	F
27	14	K	Jln.Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang- Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi)	1,26	F	1,23	F	1,31	F	1,38	F	1,46	F	1,54	F	1,62	F	1,7	F	1,78	F	2,01	F
27	15	K	Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Tugu Pers)	0,14	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,2	A	0,22	A
27	16	K	Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Jelutung)	0,36	A	0,35	A	0,37	A	0,4	A	0,42	A	0,44	A	0,46	A	0,49	A	0,51	A	0,58	A
27	17	K	Jln. Jenderal Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung - SP. Sudirman/Kol. Pol. M Thaher)	0,85	D	0,83	D	0,88	D	0,93	E	0,99	E	1,04	F	1,09	F	1,15	F	1,2	F	1,36	F
27	19	K	Jln. Kol Pol. M Thaher (Jambi)	0,48	A	0,47	A	0,5	A	0,53	A	0,56	A	0,59	A	0,62	B	0,65	B	0,68	B	0,77	C
27	20	K	Jln. RB. Siagian - Sp. Tanjung Lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi)	0,48	A	0,47	A	0,5	A	0,53	A	0,56	A	0,59	A	0,62	B	0,65	B	0,68	B	0,77	C
27	21	K	Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi)	0,48	A	0,47	A	0,5	A	0,53	A	0,56	A	0,59	A	0,62	B	0,65	B	0,68	B	0,77	C
28			Sp. Tuan - Bts.Kab. Muaro Jambi / Kab. Tanjabtim	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,09	A	0,09	A	0,1	A	0,1	A	0,11	A	0,11	A	0,13	A
29	1		Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim - BTS. KAB. TANJABTIM / KAB. TANJABBAR	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
29	2		Bts. Kab. Tanjabtim/Kab.Tanjabbar-Sp Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut)	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
30			Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut) - Bts. Kota Kuala Tungkal	0,12	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A
30	11	K	Jln. Sultan Thaha (Kuala Tungkal) Sp. 3 Sudirman - Sp. 3 Sultan Thaha)	0,09	A	0,09	A	0,09	A	0,1	A	0,1	A	0,11	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A
30	12	K	Jln. Jenderal Sudirman (Kuala Tungkal) (Sp. Sudirman/Sri Sudewi-Sp. Sudirman/Sultan Thaha)	0,17	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,2	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,27	A
30	13	K	Jln.Sri Sudewi (Kuala Tungkal) (Bts. Kota Kuala Tungkal -Sp. Tungkal - Sp. Sudirman /Sri Sudewi)	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A

NOMOR RUAS			NAMA RUAS	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
				VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
33			Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
34			Bts. Kota Bangko - Sei Manau	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A
34	11	K	Jln. Makalam (Bangko) (Sp. Bukit Indah Bangko - Sp. Pasar Bawah)	0,16	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,2	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,26	A
34	12	K	Jln. M. Yamin (Bangko) (Sp. Pasar Bawah - Bts. Kota Bangko)	0,18	A	0,18	A	0,19	A	0,2	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,25	A	0,29	A
35			Sei Manau - Bts. Kab. Merangin/Kab.Kerinci	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
36			Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci - Sanggaran Agung	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A
37			Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata)	0,1	A	0,1	A	0,1	A	0,11	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,14	A	0,16	A
37	11	K	Jln. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu PKK - Sp. Ahmad Yani)	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A
37	14	K	Jln. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu PKK)	0,21	A	0,2	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,26	A	0,27	A	0,28	A	0,3	A	0,34	A
38			Bts. Kota Sungai Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan)	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
38	11	K	Jln. Ahmad Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh)	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
38	12	K	Jln. Soekarno - Hatta - Sungai Penuh (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh)	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
39	1		Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi	0,19	A	0,18	A	0,2	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,26	A	0,27	A	0,30	A
39	2		Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
39	3		Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
39	4		Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab.Tanjabtim-Sp. Zona V	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
40			Sp. Zona V - Pel. Muara Sabak	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A
41	1		Sp. Niam - Bts Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar	0,02	A	0,02	A	0,02	A	0,02	A	0,02	A	0,02	A	0,03	A	0,03	A	0,03	A	0,03	A
41	2		Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar-Lubuk Kambing	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
42			Lubuk Kambing - Merlung	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A

NOMOR RUAS			NAMA RUAS	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
				VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
43			Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W	0,67	B	0,65	B	0,69	B	0,74	C	0,78	C	0,82	D	0,86	D	0,91	E	0,95	E	1,07	F
44			Siulak Deras/Letter W - Bts. Sumbar	0,82	D	0,8	C	0,85	D	0,9	E	0,95	E	1	F	1,06	F	1,11	F	1,16	F	1,31	F

Sumber :Analisis BPIW, 2023

Provinsi Jambi Memiliki Infrastruktur Permukiman berupa pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah. Infrastruktur yang ada ini memiliki kondisi yang berbeda – beda di tiap wilayah. Berikut merupakan kondisi infrastruktur permukiman yang ada di kawasan prioritas Provinsi Jambi.

Setiap kawasan prioritas diperhitungkan ketersediaan sistem pelayanan air minum serta proyeksi kebutuhan air minumnya. Berdasarkan tabel 7.6 ketersediaan dan kebutuhan air minum didapatkan bahwa kawasan prioritas dengan gap pemenuhan negatif antara lain Kawasan Perkotaan Jambi (PKN Jambi) dan KSPN Muaro Jambi. Selain itu, juga untuk wilayah lainnya sebagai bentuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 7.6 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jambi

No	Wilayah	Kapasitas (hanya PDAM Saja) (Liter/Detik)					Target Penerima Manfaat	
		Terpasang	Produksi	Distribusi	Air Terjual	Belum Terpakai	SR	Jiwa
1	Kerinci	421,00	313,30	300,58	165,30	72,70	33.859	110.096
2	Merangin	325,00	223,00	209,00	136,25	102,00	31.452	135.290
3	Sarolangun	275,00	180,50	179,50	144,26	95,00	16.400	65.600
4	Batang Hari	287,50	237,50	237,46	123,70	50,00	20.295	81.180
5	Muaro Jambi	290,00	235,00	136,85	92,32	55,00	22.000	88.000
6	Tanjung Jabung Timur	245,00	168,50	158,50	96,02	76,50	6.126	24.504
7	Tanjung Jabung Barat	380,00	193,60	81,80	47,50	76,40	10.911	39.280
8	Tebo	262,50	232,50	187,50	148,22	99,28	22.390	86.250
9	Bungo	210,00	190,00	177,00	132,00	20,00	16.800	76.000
10	Kota Jambi	1.530,00	1.019,00	990,00	634,00	108,00	106.940	588.320
11	Kota Sungai Penuh	170,00	145,00	135,50	100,41	25,00	14.146	56.584
PROVINSI JAMBI		**4.396,00**	**3.137,90**	**2.793,69**	**1.819,98**	**779,88**	**301.319**	**1.351.104**

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Kebutuhan Infrastruktur Persampahan. Proyeksi timbulan sampah dihitung berdasarkan rata-rata timbulan sampah masyarakat yang berada di dalam wilayah cakupan pelayanan masing-masing TPA, kemudian diakumulasikan menjadi timbulan sampah tahunan dengan mempertimbangkan volume sampah yang masuk ke TPA dan faktor kompaksi. Berdasarkan tabel proyeksi operasional TPA, maka kebutuhan pemenuhan infrastruktur persampahan diperlukan di kawasan prioritas Perkotaan Jambi (PKN Jambi), KSPN Muaro Jambi, dan kabupaten/kota lainnya melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

Tabel 7.7 Proyeksi Operasional TPA di Provinsi Jambi

No.	Kab/Kota	Nama TPA	Kapasitas TPA (m3/Tahun)	Proyeksi Demand Pengelolaan Persampahan Tahun 2029 (m3/tahun)	Proyeksi Demand Pengelolaan Persampahan Tahun 2034
1	Kota Jambi	TPA Talang Gulo	3.400.000	2.233.206	
2	Kabupaten Muaro Jambi	TPA Bukit Baling	240.000	**137.268**	
3	Sarolangun	TPA Bukit Baru	645.000	238.171	
4	Batang Hari	TPA AMD	1.080.000	1.168.395	
5	Tebo	TPA Kabupaten Tebo	693.000	1.282.290	
6	Bungo	TPA Gamut	1.436.400	1.381.719	
7	Tanjung Jabung Timur	TPA Parit Culum	789.750	779.295	
8	Tanjung Jabung Barat	TPA Lubuk Terentang	1.323.000	1.288.580	
9	Kota Sungai Penuh	Belum Memiliki TPA	0,0	522.549	
10	Kabupaten Kerinci	Belum Memiliki TPA	0,0	1.401.343	
11	Kabupaten Merangin	TPA Langling	1.160.250	304.317	

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Penanganan kawasan kumuh di Provinsi Jambi akan diintegrasikan dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu melalui integrasi program penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Ditjen Perumahan. Pengananan terintegrasi tersebut akan difokuskan di kawasan prioritas yang memiliki kawasan kumuh dengan luasan lebih dari 15 Ha, memiliki rumah yang termasuk di dalam kategori RTLH. Untuk luasasn di bawah 15 Ha menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Jenis penanganan kawasan kumuh mengacu kriteria yang sudah ditentukan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. Ketiga pola-pola penanganan tersebut ditentukan berdasarkan indikator masing masing kriteria. Kebutuhan penanganan kawasan kumuh berdasarkan sisa luasan kawasan kumuh antara lain berada di PKN Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, dan Kota Sungai Penuh (Tabel 7.8).

Tabel 7.8 Kawasan Kumuh pada Kawasan Prioritas Provinsi Jambi

No	Nama Kab/Kota	Penanganan Sisa Kumuh		
		Kel/Kawasan	APBN	APBD
1	Merangin	Pematang Kandis	186,08	
		Pasar Atas Bangko	93,68	
TOTAL			279,76	0
2	Sarolangun	Pasar Lama Pauh		10
		Pelayang	76,54	
TOTAL			76,54	10
3	Batanghari	Kelurahan Muara Bulian		11,07
		Kelurahan Pasar Baru		2,61
		Kelurahan Rengas Condong	17,83	
		Kelurahan Teratai		7
		Kelurahan Kampung Baru		10,51
TOTAL			18	31
4	Bungo	Jaya Setia		7,39
		Sungai Pinang	39,01	
		Bungo Taman Agung	15,82	
TOTAL			55	7
5	Kota Jambi	Legok	95,2	
TOTAL			95,20	-
6	Kota Sungai Penuh	Pusat Kota	48,514	
		Permukiman Pinggir S. Batang Merao	80,9	
		Permukiman Pinggir Batang Sangir	69,58	
TOTAL			**198,99**	**-**
TOTAL PROVINSI			**723,15**	**49,03**

Sumber: Kompilasi Data Kumuh – BPPW Jambi, 2021

Infrastruktur Perumahan. Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia selain sandang dan pangan. Kondisi infrastruktur perumahan di Provinsi Jambi diketahui terdapat beberapa permasalahan seperti RTLH dan *backlog* perumahan sehingga membutuhkan penanganan. Penanganan kawasan kumuh di Provinsi Jambi akan diintegrasikan dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga bisa lebih efektif.

Kondisi *backlog* perumahan di Provinsi Jambi disebabkan karena kondisi kemiskinan masyarakat dan peningkatan kebutuhan akan

perumahan. Kondisi kemiskinan pada masyarakat menjadi penyebab pada akses akan rumah layak huni yang menjadi sangat terbatas. Diketahui bahwa rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi mencapai angka sebesar 182.435 unit dan sudah tertangani sebanyak 22.472 sehingga tersisa RTLH sebanyak 160.847 unit. Dengan capaian angka rumah tidak layak huni tersebut menjadi fokus permasalahan yang perlu untuk diselesaikan oleh Ditjen. Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Ditjen Perumahan.

Tabel 7.9 Jumlah RTLH dan Penanganan di Provinsi Jambi

NO	Kabupaten/Kota	Total Penanganan 2016-2022	Jumlah RTLH yang belum ditangani
1	Batanghari	2.232	16.023
2	Sarolangun	1.383	11.206
3	Merangin	1.080	20.752
4	Kerinci	1.482	6.988
5	Kota Sungai Penuh	1.504	437
6	Tebo	2.596	11.351
7	Bungo	2.337	10.227
8	Tanjung Jabung Barat	2.539	19.956
9	Tanjung Jabung Timur	1.381	36.960
10	Kota Jambi	2.251	12.671
11	Muaro Jambi	3.687	14.276
Total		22.472	160.847

Sumber: Balai Perumahan Sumatera IV, 2022, e-rtlh Tahun 2022

Berdasarkan kondisi eksisting infrastruktur PUPR yang meliputi proyeksi penduduk dan proyeksi kepadatan penduduk, deman assesment, kebutuhan air minum, kebutuhan air limbah, kebutuhan persampahan, perumahan kumuh dan RTLH, dan *backlog*, maka dirumuskan beberapa kebutuhan infrastruktur PUPR. Berikut merupakan kebutuhan infrastruktur PUPR pada setiap fokus kawasan prioritas.

7.1.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Perkotaan – PKN Jambi

PKN Jambi meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Jambi. Wilayah ini terdiri dari 11 kecamatan, dengan luas 205,4 km2. Dalam perkembangan ke depan dimungkinkan deliniasi PKN Jambi ini juga mencakup aglomerasi daerah disekitarnya.

Tabel 7.10 Proyeksi Jumlah Penduduk PKN Jambi Tahun 2022-2034

Nama Kecamatan	Proyeksi Tahun ke -N (Pn)					
	2022	2023	2025	2027	2029	2034
Kota Baru	83.278	85.069	88.768	92.627	96.654	107.504
Alam Barajo	112.751	115.176	120.183	125.408	130.860	145.550
Jambi Selatan	58.424	59.681	62.275	64.983	67.808	75.420
Paal Merah	109.194	111.542	116.392	121.452	126.732	140.958
Jelutung	60.884	62.193	64.897	67.718	70.662	78.595
Pasar Jambi	11.422	11.668	12.175	12.705	13.257	14.745
Telanaipura	50.520	51.606	53.850	56.191	58.634	65.216
Danau Sipin	44.498	45.455	47.431	49.493	51.645	57.442
Danau Teluk	13.185	13.468	14.054	14.665	15.302	17.020
Pelayangan	13.273	13.559	14.148	14.763	15.405	17.135
Jambi Timur	67.898	69.359	72.374	75.521	78.804	87.650
Total Penduduk	**625.327**	**638.776**	**666.546**	**695.525**	**725.762**	**807.234**

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan tabel 7.10 diketahui bahwa proyeksi jumlah penduduk PKN Jambi pada tahun 2029 adalah 725.762 jiwa dengan kenaikan (r) sebesar 2,15% per tahun. Jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Alam Barajo sebesar 130.860 jiwa.

Tabel 7.11 Proyeksi Kepadatan Penduduk PKN Jambi 2022-2034

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Proyeksi Kepdatan Penduduk						
			2021 (Po)	2022	2023	2025	2027	2029	2034
1	Kota Baru	3611	23	23	24	25	26	27	30
2	Alam Barajo	4156	27	27	28	29	30	31	35
3	Jambi Selatan	1141	50	51	52	55	57	59	66
4	Paal Merah	2713	39	40	41	43	45	47	52
5	Jelutung	792	75	77	79	82	86	89	99
6	Pasar Jambi	402	28	28	29	30	32	33	37
7	Telanaipura	2251	22	22	23	24	25	26	29
8	Danau Sipin	788	55	56	58	60	63	66	73
9	Danau Teluk	1570	8	8	9	9	9	10	11
10	Pelayangan	1529	8	9	9	9	10	10	11
11	Jambi Timur	1594	42	43	44	45	47	49	55

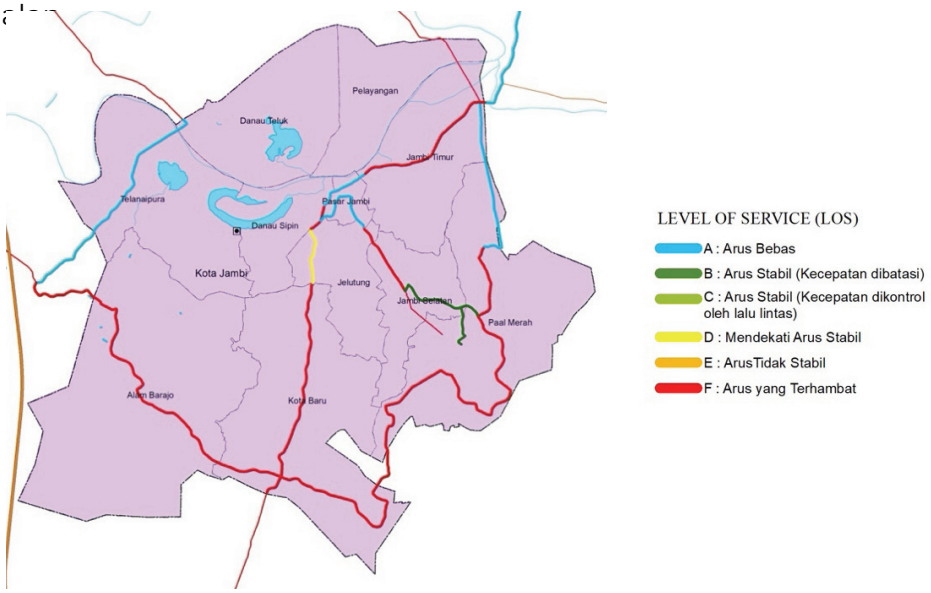
Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan tabel proyeksi kepadatan dari penduduk PKN Jambi di atas diketahui bahwa Proyeksi kepadatan terbesar pada tahun 2029 berada di Kecamatan Jelutung sebesar 99 Ha/Jiwa.

Kebutuhan infrastruktur jalan di Kawasan PKN Jambi. Kawasan PKN Jambi dilayani oleh 20 ruas jalan nasional dengan Total

panjang jalan 188,87 KM. Dari total 20 ruas jalan, terdapat 9 ruas yang memiliki nilai VCR di atas 0,8 dengan LOS D-F.

Jika melihat dari sisi LOS, Ruas Jalan dengan tingkat LOS F apabila dilihat dari sisi lebar jalan eksisting diperlukan adanya pelebaran ja



Gambar 7.1 Peta LOS Jalan Nasional PKN Jambi

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.12 *Demand Assesment* **PKN Kota Jambi Tahun 2023-2034**

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Lebar Jalan (Meter)	2023		2025		2027		2029		2034	
						VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
1	5			Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi	7,45	0,24	A	0,26	A	0,29	A	0,29	A	0,37	A
2	5	12	K	Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado-Gado)	7,04	1,01	F	1,12	F	1,22	F	1,23	F	1,57	F
3	5	13	K	Sp. Gado-Gado - Sp. Sijenjang (Lingkar Timur Ii)	7,19	0,21	A	0,23	A	0,25	A	0,25	A	0,32	A
4	6	11	K	Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi)	7,67	0,99	E	1,10	F	1,19	F	1,20	F	1,53	F
5	6	12	K	Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah	11,93	0,88	D	0,97	E	1,05	F	1,06	F	1,36	F
6	6	14	K	Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat - Sp. Kota Baru)	7	0,88	D	0,97	E	1,05	F	1,06	F	1,36	F
7	6		K	Jln. M. Yamin (Sp.Pulai - Sp. Kawat)	14,6	0,60	A	0,66	B	0,72	C	0,73	C	0,93	E
8	26			Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat	8,35	1,58	F	1,75	F	1,90	F	1,92	F	2,44	F
9	26		K	Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/ Sp Rimbo	8,71	1,21	F	1,34	F	1,45	F	1,47	F	1,87	F
10	27			Bts. Kota Jambi - Talang Duku	6,03	0,29	A	0,32	A	0,35	A	0,35	A	0,45	A
11	27	11	K	Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp.Museum Perjuangan - Sp. Pulai)	12	1,10	F	1,22	F	1,33	F	1,34	F	1,71	F

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Lebar Jalan (Meter)	2023		2025		2027		2029		2034	
						VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
12	27	12	K	Jln. Sultan Thaha (Jambi) (Sp.3 Jl. Fatmawati - Sp. Museum Perjuangan	17,29	0,32	A	0,35	A	0,38	A	0,39	A	0,50	A
13	27	13	K	Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp.3 Jl. Fatmawati - Sp. Duren)	11,04	0,74	C	0,82	D	0,89	D	0,90	E	1,15	F
14	27	14	K	Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang – Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi)	5,85	1,30	F	1,44	F	1,56	F	1,58	F	2,01	F
15	27	15	K	Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata - Sp.Tugu Pers)	11,81	0,14	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,22	A
16	27	16	K	Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Jelutung)	11,2	0,37	A	0,41	A	0,45	A	0,45	A	0,58	A
17	27	17	K	Jln. Jend. Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung – Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher)	12,71	0,88	D	0,97	E	1,05	F	1,06	F	1,36	F
18	27	18	K	Jln. Kol. Pol. M. Thaher (Jambi)	7	0,50	A	0,55	A	0,60	A	0,60	B	0,77	C
19	27	19	K	Jln. Rb. Siagian - Sp. Tanjung Lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi)	7	0,50	A	0,55	A	0,60	A	0,60	B	0,77	C
20	27	21	K	Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi)	7	0,50	A	0,55	A	0,60	A	0,60	B	0,77	C

Sumber : Analisis BPIW, 2023

Berdasarkan perhitungan nilai VCR dan LOS di ruas jalan nasional di PKN Jambi, terdapat 9 ruas jalan yang memerlukan penanganan antara lain pelebaran jalan untuk ruas jalan yang belum memenuhi lebar standar 7 meter dan penambahan lajur untuk ruas jalan yang sudah memenuhi lebar standar. Jika melihat kondisi eksisting disekitar ruas jalan nasional di Perkotaan Jambi sudah dipadati oleh bangunan permukiman masyarakat, kondisi ini akan menjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan untuk penanganan jalan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan jalan di Perkotaan Jambi yaitu perlu dibangunnya Jalan Lingkar Utara Kota Jambi. Pembangunan jalan lingkar tersebut diharapkan akan mengurangi kepadatan di jaringan jalan nasional Kota Jambi. Pembangunan ini diperlukan dukungan *Readiness Criteria* (RC). Penyiapan RC oleh pemerintah daerah terkait kesiapan lahan, kesiapan pengelola dan anggaran pengelolaan, serta kesanggupan menerima hibah (perubahan status jalan nasional menjadi jalan daerah yang berada di dalam Kota Jambi)



Gambar 7.2 Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Jambi

Sumber : Ditjen. Bina Marga dan Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2022

Kebutuhan Infrastruktur Air Baku untuk PKN Jambi. Penyediaan air baku untuk wilayah Kota Jambi dapat memanfaatkan Sungai

Batanghari sebagai sumber air baku permukaan. Kondisi eksisting ketersediaan air baku sebesar 1,9586 m^3/detik. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air baku hingga tahun 2029 yaitu 0,82292 m^3/detik sehingga ketersediaan air baku eksiting saat ini masih dapat men-*supply* air baku tanpa harus membangun intake air baku.

Tabel 7.13 Kebutuhan Air Baku untuk PKN Jambi Tahun 2022-2029

Tahun	Kondisi Eksisting (m^3/detik)	Proyeksi Kebutuhan (m^3/detik)	GAP (m^3/detik)
2022	1,9586	0,7943	1,1643
2023		0,7975	1,1611
2024		0,8007	1,1579
2025		0,8102	1,1484
2026		0,8127	1,1459
2027		0,815288	1,1433
2028		0,817832	1,1408
2029		0,82292	1,1357

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Kebutuhan Infrastruktur Air Minum di Kawasan PKN Jambi Pada tahun 2029, Jumlah proyeksi penduduk terlayani Air Minum adalah 725.762 jiwa dengan besaran unit konsumsi 150 liter/orang/hari karena Kota Jambi merupakan kota besar dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Dari perhitungan diperoleh total kebutuhan air minum domestik dan non domestik mencapai 1.341 liter/detik. Total kebutuhan air minum didapatkan dari total kebutuhan domestik dan non domestik ditambah dengan kemungkinan kebocoran PDAM. Kebutuhan air minum pada hari maksimum mencapai 2.118 liter/detik pada tahun 2029 dan 3.921 liter/detik untuk tahun 2034.

Tabel 7.14 Proyeksi Kebutuhan Air Minum PKN Jambi Tahun 2022-2029

No	Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Air Minum								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Jumlah Penduduk	orang	625.327	638.776	652.513	666.546	680.881	695.525	710.483	725.762	807.234
	Prosentase Pelayanan	%	92,0%	92,6%	93,2%	93,8%	94,5%	95,1%	95,7%	96,3%	100,0%
	Penduduk Dilayani	orang	563.189	579.149	595.536	612.359	629.630	647.361	665.564	684.249	807.234
KEBUTUHAN DOMESTIK											
2	Prosentase Pelayanan	%	92,6%	93,2%	93,8%	94,5%	95,1%	95,7%	96,3%	96,9%	100,0%
	Jumlah Penduduk Terlayani	orang	536.381	555.222	574.675	594.758	615.491	636.893	658.985	681.787	807.234
2.2	Sambungan Rumah (SR)										

No	Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Air Minum								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
	Prosentase Pelayanan	%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	Jumlah Penduduk Terlayani	Orang	493.471	510.805	528.701	547.178	566.252	585.942	606.266	627.244	742.656
	Penduduk Per Sambungan	Org/SR	5	5	5	5	5	5	5	5	8
	Jumlah Sambungan	Unit	98.694	102.161	105.740	109.436	113.250	117.188	121.253	125.449	92.832
	Unit Konsumsi	L/org/hr	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Pemakaian Rata - rata	L/dtk	857	887	918	950	983	1017	1053	1089	1289
2.3	Kran Umum (KU)										
	Prosentase Pelayanan	%	42,6%	39,3%	35,9%	32,5%	29,1%	25,8%	22,4%	19,0%	2,1%
	Jumlah Penduduk Terlayani	Orang	228.633	217.925	206.165	193.296	179.262	164.000	147.448	129.540	17.154
	Penduduk Per Kran Umum	Org/SR	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Jumlah Sambungan	Unit	3.266	3.113	2.945	2.761	2.561	2.343	2.106	1.851	245
	Unit Konsumsi	L/org/hr	30	30	30	30	30	30	30	30	31
	Pemakaian Rata - rata	L/dtk	79	76	72	67	62	57	51	45	6
Q Domestik Total		L/dtk	940	936	962	989	1017	1045	1074	1104	1134
Q Non Domestik Total		L/detik	141	140	144	148	153	157	161	166	170
Q Domestik dan Non Domestik		L/detik	1081	1077	1107	1138	1170	1202	1235	1269	1304
KEBOCORAN											
3	Prosentase Kebocoran	%	31,6%	31,6%	31,6%	31,6%	31,6%	31,6%	31,6%	31,6%	31,6%
	Debit	L/detik	340	350	360	370	380	390	401	412	471
Total Pemakaian Rata - rata		L/detik	1423	1417	1457	1497	1539	1582	1626	1670	1716
Q JAM PUNCAK		L/detik	1850	1842	1894	1947	2001	2057	2113	2172	2231
Q HARI MAKSIMUM		**L/detik**	**1.700**	**1.748**	**1.797**	**1.847**	**1.898**	**1.951**	**2.004**	**2.059**	**2.353**

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Supply air minum diperoleh dari 10 IPA yang tersebar di seluruh Kota Jambi dengan kapasitas terpasang sebesar 1.530 liter/detik. Berikut *suppy* air minum dari PDAM Tirta Mayang Jambi :

Tabel 7.15 *Supply* **Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kota Jambi**

No	NAMA	STATUS	Kapasitas (Liter/Detik)					Kehilangan Air (%)
			Terpasang	Produksi	Distribusi	Air Terjual	Belum Terpakai	
1	IPA AURDURI 1	Berfungsi	100	40	38	26	0	31,6%
2	IPA AURDURI 2	Berfungsi	100	92	90	62	10	31,1%
3	IPA AURDURI 3	Berfungsi	100	100	97	36	5	62,9%
4	IPA BRONI 1	Berfungsi	350	191	186	161	50	13,4%
5	IPA PASIR PANJANG	Berfungsi	40	40	37	21	0	43,2%
6	IPA PERUMNAS AUR DURI	Berfungsi	20	19	18	12	0	33,3%
7	IPA TANJUNG JOHOR	Berfungsi	20	12	11	9	8	18,2%
8	IPA Tanjung Sari 1	Berfungsi	100	55	52	44	20	15,4%
9	IPA Tanjung Sari 2	Berfungsi	100	60	57	45	15	21,1%

10	SPAM KOTA JAMBI (IPA BRONI 2 - SCADA)	Berfungsi	600	410	404	218	0	46,0%
11	IPA BENTENG	Tidak Berfungsi						
Jumlah			**1.530**	**1.019**	**990**	**634**	**108**	**31,6%**

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi diperoleh kebutuhan pada gap *supply-demand* yang dihitung dari pengurangan *supply* kapasitas terpasang oleh *demand* Q hari maksimum per tahun dihasilkan gap *supply-demand* sesuai dengan tabel berikut ini. Dengan mencermati hasil perhitungan di atas, kebutuhan air minum di Provinsi Jambi sudah mengalami gap pada tahun 2022 sebesar 218 liter/detik dan pada tahun 2029 sebesar 585 liter/detik serta pada tahun 2034 sebesar 823 liter/detik. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan kapasitas air minum yang belum termanfaatkan sebanyak 108 liter/detik dan menurunkan persentase tingkat kehilangan air menjadi di bawah 20%. Jika kondisi tersebut sudah terpenuhi maka dapat dilakukan membangun IPA baru.

Tabel 7.16 *Gap Supply Demand* **Air Minum PKN Jambi 2022-2029**

PKN Kota Jambi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Demand Air Minum (L/detik)	**1.700**	**1.748**	**1.797**	**1.847**	**1.898**	**1.951**	**2.004**	**2.059**	**2.353**
Gap (Liter/detik)	**-218**	**-267**	**-317**	**-368**	**-421**	**-474**	**-529**	**-585**	**-823**

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Kebutuhan Infrastruktur Air Limbah di Kawasan PKN Jambi.
Proyeksi kebutuhan air limbah diperoleh dari 80% total pemakaian rata – rata air bersih. Berdasarkan hasil proyeksi volume air limbah, pada tahun 2029 mencapai 2.451 liter/detik. Jika dibandingkan dengan eksisting Kota Jambi yang terlayani sanitasi 100%, maka arahan perencanaan dapat berupa optimalisasi IPAL eksisting dan pembangunan SPALD-T pada Kawasan kumuh.

Tabel 7.17 Proyeksi Jumlah Air Limbah PKN Jambi 2022-2034

PKN Kota Jambi	Proyeksi Kebutuhan Air Limbah (liter/detik)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
	1.771	1.821	1.872	1.924	1.977	2.032	2.088	2.145	2.451

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Tabel 7.18 Gap Kebutuhan Air Limbah PKN Jambi 2022-2029

PKN Kota Jambi	GAP Kebutuhan Air Limbah (Liter/Detik)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
	- 1.658	- 1.708	- 1.759	-1.811	- 1.864	- 1.919	- 1.975	- 2.032	- 2.338

Penyediaan infrastruktur air limbah di perkotaan Jambi, sudah dibangun beberapa IPAL dan IPLT. Pada tahun 2020 – 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat di Perkotaan Jambi melalui *Program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project (MSMIP)* yang dapat melayani 10.300 SR dengan kapasitas 7.600 m^3/hari atau setara dengan 88,16 liter/detik. Pembangunan IPAL Skala Perkotaan tersebut berupa stimulan sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat memenuhi capaian sanitasi layak 100% di Kota Jambi.

Kebutuhan Infrastruktur Persampahan di Kawasan PKN Jambi. Berdasarkan tabel 7.19 diketahui bahwa pada tahun 2029, Timbunan sampah di PKN Jambi diprediksi sebesar 459.675 m3/tahun.

Tabel 7.19 *Demand* **Pengelolaan Sampah PKN Jambi 2022-2029**

TPA TALANG GULO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Proyeksi Penduduk (Jiwa)	619.237	632.555	646.158	660.055	674.250	688.751	703.563	718.694
Nett Penduduk Terlayani TPA (Jiwa)	613.045	626.229	639.697	653.454	667.508	681.863	696.527	711.507
Timbulan Sampah Domestik (Kg/Hari)	185.771	189.766	193.848	198.016	202.275	206.625	211.069	215.608
Timbulan Sampah Non-Domestik (Kg/Hari)	74.308	75.907	77.539	79.207	80.910	82.650	84.428	86.243
Total Timbulan Sampah (Kg/Hari)	260.080	265.673	271.387	277.223	283.185	289.275	295.497	301.852
Timbulan Sampah Masuk TPA (Kg/Hari)	182.056	185.971	189.971	194.056	198.230	202.493	206.848	211.296
Timbulan Sampah Setelah Terkompaksi (Kg/Hari)	81.925	83.687	85.487	87.325	89.203	91.122	93.081	95.083
Timbulan Sampah Masuk TPA (Kg/Hari)	65.540	66.950	68.389	69.860	71.363	72.897	74.465	76.067

TPA TALANG GULO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Timbulan sampah Masuk TPA (Kg/Tahun)	23.922.119	24.436.594	24.962.133	25.498.974	26.047.361	26.607.541	27.179.769	27.764.303
Akumulasi Timbulan Sampah (Kg/Tahun)	47.340.595	71.777.188	96.739.321	122.238.295	148.285.655	174.893.196	202.072.965	229.837.268
Real Demand Pengolahan Sampah (Asumsi Densitas) (M3/Tahun)	**94.681**	**143.554**	**193.479**	**244.477**	**296.571**	**349.786**	**404.146**	**459.675**

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Timbulan sampah yang terdapat di PKN Jambi dikelola oleh TPA Talang Gulo. Berikut merupakan penjabaran dari pengelolaan sampah di PKN Jambi :

Tabel 7.20 Pengelolaan Sampah PKN Jambi

Wilayah	Nama TPA	Luas (Ha)	Volume Kapasitas (m^2)	Kapasitas Belum Terpakai (m^2)
PKN Kota Jambi	TPA Talang Gulo	21,3	3.500.000	3.400.000

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa luas TPA yaitu 21,3 Ha atau 213.000 m^2, dengan volume kapasitas TPA mencapai 3.500.000 m3. Maka dapat diasumsikan bahwa kapasitas TPA yang belum terpakai adalah sebesar 3.400.000 m^3. Sementara itu terdapat gap *supply demand dari* pengelolaan sampah di PKN Jambi. Akumulasi Timbulan sampah yang masuk ke TPS Talang Gulo diproyeksikan pada tahun 2029 mencapai 459.675 $m^{3/}$tahun. Mencermati hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan dalam periode sampai dengan tahun 2029 belum membutuhkan adanya peningkatan kapasitas TPA Talang Gulo. Arahan rencana dapat berupa pemeliharaan dan optimalisasi TPA Talang Gulo.

Tabel 7.21 *Gap Supply Demand* **Pengelolaan Sampah di PKN Jambi Tahun 2022-2034**

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
3.304.388	3.255.034	3.204.618	3.153.119	3.100.512	3.046.773	2.991.879	2.935.805	2.636.814

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Kebutuhan infrastruktur Permukiman Kumuh di Kawasan PKN Jambi. Penanganan Kawasan kumuh di Kota Jambi akan diintegrasikan dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu melalui integrasi program penanganan Kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pendekatan pengananan terintegrasi tersebut akan dilaksanakan dengan menetapkan 3 (tiga) klasifikasi Prioritas.

1. Prioritas I
   Memiliki kawasan kumuh > 15 Ha, terdapat RTLH, dan berada di dalam cakupan Kawasan Prioritas.
2. Prioritas II
   Memiliki Kawasan kumuh > 15 Ha, terdapat RTLH, namun berada di luar cakupan Kawasan Prioritas.
3. Prioritas III
   Memiliki Kawasan kumuh > 15 Ha, tidak terdapat RTLH dan berada di luar cakupan Kawasan Prioritas.

Kawasan Prioritas Kota Jambi sebagai Prioritas I Penanganan Kumuh Terintegrasi, dengan total sisa luasan kumuh yang belum ditangani 95,02 di Kelurahan Legok.

Kebutuhan Infrastruktur Perumahan di Kawasan PKN Jambi. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu permasalahan sektor perumahan di Provinsi Jambi, salah satunya di PKN Jambi. Jumlah RTLH berdasarkan data P3KE hingga tahun 2023 berjumlah 14.922 unit dan sudah ditangani melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.251 unit. Oleh karena terdapat GAP RTLH sebanyak 12.671 unit yang ditangani hingga tahun 2029. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dapat diintegrasikan dengan penataan kawasan permukiman kumuh.

7.1.2 Analisis Kesenjangan Infrastruktur KSPN Muaro Jambi

Kebutuhan infrastruktur di Kawasan KSPN Muaro Jambi menyesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2029. **Delineasi KSPN Muaro Jambi berada di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo.** Jumlah proyeksi penduduk KSPN Muaro Jambi pada tahun 2029 adalah 46.437 jiwa dengan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Maro Sebo sebesar 28.626 jiwa.

Tabel 7.22 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kawasan KSPN Muaro Jambi 2022-2034

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Maro Sebo	23.063	23.786	24.532	25.301	26.094	26.912	27.756	28.626	33.404
Taman Rajo	14.349	14.799	15.263	15.742	16.235	16.744	17.269	17.810	20.783
Jumlah	37.412	38.585	39.795	41.043	42.329	43.656	45.025	46.437	54.187

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Tabel 7.23 Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kawasan KSPN Muaro Jambi 2022 - 2034

Kecamatan	Luas (Ha)	Proyeksi Kepadatan Penduduk									
		2021 (Po)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Maro Sebo	1.623	14	14	14	14	15	15	15	15	16	17
Taman Rajo	1.545	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan tabel proyeksi kepadatan dari penduduk KSPN Muaro Jambi di atas diketahui bahwa Proyeksi kepadatan terbesar pada tahun 2029 berada di Kecamatan Muara Sebo sebesar 17 Ha/Jiwa.

Kebutuhan Infrastruktur Jalan di Kawasan KSPN Muaro Jambi. KSPN Muaro Jambi dilayani oleh 5 Ruas Jalan Nasional dengan Total Panjang Jalan 39,66 Kilometer. Jika melihat dari hasil proyeksi LOS di KSPN Muaro Jambi hingga tahun 2029 adalah A, yang artinya ruas jalan digolongkan ke dalam tingkat kinerja ruas jalan yang baik.

Tabel 7.24 *Demand Assesment* **KSPN Muaro Jambi 2022-2034**

Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lebar Rata - Rata (M)	Proyeksi LOS			
						2022	2025	2029	2034
33			Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi	4,04	6,93	A	A	A	A
39	1		Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi	2,26	6,63	A	A	A	A
39	2		Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi	8,58	7,00	A	A	A	A
39	3		Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim	15,90	7,00	A	A	A	A
39	4		Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab.Tanjabtim-Sp. Zona V	8,88	7,00	A	A	A	A

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Kebutuhan Air Baku untuk KSPN Muaro Jambi. Penyediaan air baku untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dapat memanfaatkan

Sungai Batanghari sebagai sumber air baku permukaan. Kondisi eksisting saat ini terdapat 2 intake air baku yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum yaitu intake Jaluko dengan debit 0,1 m^3/detik dan intake Sungai Duren dengan debit 0,06 m^3/detik serta SPAB Sungai Duren 0,06 m^3/detik.
Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air baku untuk KSPN Muaro Jambi hingga tahun 2029 yaitu 0,52088 m^3/detik. Oleh karena itu terdapat GAP kebutuhan air baku (RKI) sebesar 0,3609 m^3/detik. Untuk kebutuhan 2034, kebutuhan air baku untuk mesupplai Kabupaten Muaro Jambi 0,537 m3/detik sehingga GAP kebutuhan 0,317 m3/detik.

Tabel 7.25 Kebutuhan Air Baku untuk KSPN Muaro Jambi Tahun 2022-2034

Tahun	Kondisi Eksisting (m^3/detik)	Proyeksi Kebutuhan (m^3/detik)	GAP (m^3/detik)
2022	0,22	0,506	-0,286
2023		0,508	-0,288
2024		0,510	-0,290
2025		0,512	-0,292
2026		0,514	-0,294
2027		0,516	-0,296
2028		0,517	-0,297
2029		0,520	-0,300
2034		0,537	-0,317

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Kebutuhan Infrastruktur Air Minum di Kawasan KSPN Muaro Jambi Pada tahun 2029, Jumlah proyeksi penduduk baik penduduk yang berada di kawasan cagar budaya dan pengunjung terlayani air minum adalah 46.437 jiwa. Dengan total kebutuhan air minum domestik dan non domestik mencapai 109 liter/detik. Perhitungan kebutuhan air minum didapatkan dari total kebutuhan domestik dan non domestik ditambah dengan kemungkinan kebocoran. Sehingga total kebutuhan air minum pada hari maksimum mencapai 131 liter/detik.

Tabel 7.26 *Demand* **Air Minum KSPN Muaro Jambi Tahun 2023-2034**

No	Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Air Minum							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Jumlah Penduduk	orang	38.585	39.795	41.043	42.329	43.656	45.025	46.437	54.187
	Prosentase Pelayanan	%	**83,64%**	**85,12%**	**86,61%**	**88,10%**	**89,59%**	**91,07%**	**92,56%**	**100,00%**
	Penduduk Dilayani	orang	32.271	33.875	35.547	37.291	39.110	41.006	42.982	54.187

No	Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Air Minum							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
KEBUTUHAN DOMESTIK										
2	**Prosentase Pelayanan**	**%**	**83,64%**	**85,12%**	**86,61%**	**88,10%**	**89,59%**	**91,07%**	**92,56%**	**100,00%**
	Jumlah Penduduk Terlayani	orang	26.990	28.835	30.788	32.853	35.037	37.346	39.785	54.187
2.2	**Sambungan Rumah (SR)**									
	Prosentase Pelayanan	%	**83,64%**	**85,12%**	**86,61%**	**88,10%**	**89,59%**	**91,07%**	**92,56%**	**100,00%**
	Jumlah Penduduk Terlayani	Orang	22.573	24.545	26.665	28.943	31.388	34.012	36.826	54.187
	Penduduk Per Sambungan	Org/SR	5	5	5	5	5	5	5	5
	Jumlah Sambungan	Unit	4.515	4.909	5.333	5.789	6.278	6.802	7.365	10.837
	Unit Konsumsi	L/org/hr	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemakaian Rata - rata	L/dtk	26,13	28,41	30,86	33,50	36,33	39,37	42,62	62,72
2.3	Kran Umum (KU)									
	Prosentase Pelayanan	%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	46%
	Jumlah Penduduk Terlayani	Orang	12.415	13.264	14.162	15.112	16.117	17.179	18.301	24.926
	Penduduk Per Kran Umum	Org/SR	70	70	70	70	70	70	70	70
	Jumlah Sambungan	Unit	177	189	202	216	230	245	261	356
	Unit Konsumsi	L/org/hr	30	30	30	30	30	30	30	34
	Pemakaian Rata - rata	L/dtk	4	5	5	5	6	6	6	10
Q Domestik Total		L/dtk	30	33	36	39	42	45	49	73
Q Non Domestik Total		L/detik	5	5	5	6	6	7	7	11
Q Domestik dan Non Domestik		L/detik	35	38	41	45	48	52	56	83
KEBOCORAN										
3	Prosentase Kebocoran	%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
	Debit	L/detik	21	23	25	27	29	32	34	51
Total Pemakaian Rata - rata		L/detik	56	61	66	72	78	84	91	91134
Q JAM PUNCAK		L/detik	**73**	79	86	93	101	109	118	175
Q HARI MAKSIMUM		L/detik	**68**	**73**	79	**86**	**93**	**101**	109	161

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Supply air minum diperoleh dari kapasitas terpasang 1 unit IPA dengan kapasitas terpasang sebesar 5 liter/detik. Unit *supply* air minum di KSPN Muaro Jambi berasal IPA Candi Muaro Jambi.

Berikut merupakan penjabaran dari *supply-demand* air minum di KSPN Muaro Jambi.

Tabel 7.27 *Supply Demand* **Air Minum KSPN Muaro Jambi**

No	Unit Supply	Kapasitas Terpasang (Liter/detik)	Kapasitas Produksi (Liter/detik)	Kapasitas Belum Terpasang (Liter/detik)
1	IPA Candi Muaro Jambi	5	5	0

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Supply air minum diperoleh dari IPA Candi Muaro Jambi dengan kapasitas terpasang sebesar 5 liter/detik. Sementara itu, pada gap supply-demand yang dihitung dari pengurangan *supply* kapasitas terpasang oleh *demand* Q hari maksimum per tahun dihasilkan gap *supply-demand* sesuai dengan tabel berikut ini. Dengan mencermati analisis diatas, dapat disimpulkan dalam periode sampai dengan tahun 2029, kebutuhan air minum untuk Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi memerlukan pembangunan SPAM. Hal ini dibuktikan dengan jumlah defisit ketersediaan air minum pada tahun 2022 sebesar 58 liter/detik.

Tabel 7.28 *Gap Supply Demand* **Air Minum KSPN Muaro Jambi Tahun 2022-2034**

Cagar Budaya Muaro Jambi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Demand Air Minum (L/detik)	72	79	88	98	108	119	131	136
Gap (Liter/detik)	-67	-74	-83	-93	-103	-114	-126	-121

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Tabel 7.29 Proyeksi Jumlah Air Limbah KSPN Muaro Jambi Tahun 2022-2034

KSPN Muaro Jambi	Proyeksi Kebutuhan Air Limbah (liter/detik)						
	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2034
TOTAL Air Limbah	48	59	65	72	79	87	94
Gap Kebutuhan (Liter/detik)	- 48	- 59	- 65	- 72	- 79	- 87	-94

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2029 proyeksi timbulan air limbah mencapai 87 liter/detik. Namun belum ada instalasi pengolahan air limbah yang melayani kawasan KSPN Muaro Jambi. Oleh karena itu, perlu dibangunnya intalasi pengolahan air limbah di KSPN Muaro Jambi. Untuk pengolahan air limbah perpipaan skala kota belum dibutuhkan karena kepadatan penduduk masih di bawah 150 jiwa/ha.

Kebutuhan Infrastruktur Persampahan di Kawasan KSPN Muaro Jambi. Berdasarkan tabel 7.30 diketahui bahwa pada tahun 2029, Timbunan sampah di KSPN Muaro Jambi diprediksi sebesar 11.076 kg/hari. Dengan akumulasi timbulan sampah per tahun pada 2029 sebesar 19.503 Kg/Tahun. Timbulan sampah yang terdapat di KSPN Muaro Jambi dikelola di oleh TPA Bukit Baling. Berikut merupakan penjabaran dari pengelolaan sampah di KSPN Muaro Jambi.

Tabel 7.30 Demand Pengelolaan Sampah KSPN Muaro Jambi Tahun 2022-2034

KSPN Muaro Jabi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Proyeksi Penduduk (Jiwa)	38.585	39.795	41.043	42.329	43.656	45.025	46.437	54.187
Nett Penduduk Terlayani TPA (Jiwa)	38.199	39.397	40.632	41.906	43.220	44.575	45.972	53.645
Timbulan Sampah Domestik (Kg/Hari)	11.576	11.938	12.313	12.699	13.097	13.507	13.931	16.256
Timbulan Sampah Non-Domestik (Kg/Hari)	4.630	4.775	4.925	5.080	5.239	5.403	5.572	6.502
Total Timbulan Sampah (Kg/Hari)	16.206	16.714	17.238	17.778	18.336	18.910	19.503	22.758
Timbulan Sampah Masuk TPA (Kg/Hari)	11.344	11.700	12.066	12.445	12.835	13.237	13.652	15.931
Timbulan Sampah Setelah Terkompaksi (Kg/Hari)	5.105	5.265	5.430	5.600	5.776	5.957	6.144	7.169

KSPN Muaro Jabi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Timbulan Sampah Masuk TPA (Kg/Hari)	4.084	4.212	4.344	4.480	4.621	4.765	4.915	5.735
Timbulan sampah Masuk TpA (Kg/Tahun)	1.490.608	1.537.340	1.585.538	1.635.246	1.686.513	1.739.387	1.793.919	2.093.321
Akumulasi Timbulan Sampah (Kg/Tahun)	4.337.265	5.874.605	7.460.142	9.095.388	10.781.901	12.521.289	14.315.208	24.164.534
Real Demand Pengolahan Sampah (Asumsi Densitas) (m3/tahun)	8.675	11.749	14.920	18.191	21.564	25.043	28.630	48.329
Akumulasi Real Demand Pengelolaan Sampah (m3/tahun)	17.171	28.920	43.840	62.031	83.595	108.637	137.268	338.300

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Tabel 7.31 Sistem Pengelolaan Sampah KSPN Muaro Jambi

Wilayah	Nama TPA	Luas (Ha)	Volume Kapasitas (m^3)	Sistem Pengolahan
KSPN Muaro Jambi	TPA Bukit Baling	10,3	240.000	*Sanitary Landfill*

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan tabel 7.32 di atas diketahui bahwa luas TPA yaitu 10,3 Ha atau 103.000 m^2, dengan volume kapasitas TPA mencapai 240.000 m^3. Berdasarkan hasil proyeksi total timbulan sampah akibat aktivitas di KSPN Muaro Jambi dapat terlihat gap *Supply Demand*, TPA Bukit Baling masih dapat mengelola sampah dari KSPN Muaro Jambi.

Tabel 7.32 *GAP Supply Demand* **Pengelolaan Sampah di KSPN Muaro Jambi Tahun 2023-2034**

Tahun	Kapasitas TPA	Proyeksi Kebutuhan (m^3/tahun)	GAP (m^3/tahun)
2023	240.000	8.675	231.325
2024		11.749	228.251
2025		14.920	225.080
2026		18.191	221.809

Tahun	Kapasitas TPA	Proyeksi Kebutuhan (m^3/tahun)	GAP (m^3/tahun)
2027		21.564	218.436
2028		25.043	214.957
2029		28.630	211.370
2034		32.331	207.669

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan hasil analisis (tabel 7.32), dapat disimpulkan dalam periode sampai dengan tahun 2029 belum diperlukan penambahan unit TPA Bukit Baling, hal ini dikarenakan jumlah kapasitas TPA masih dapat menampung total timbulan yang ada hingga 2029 dan 2034 *(idle capacity)*.

Kebutuhan Infrastruktur Perumahan di Kawasan KSPN Muaro Jambi. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu permasalahan sektor perumahan di Provinsi Jambi, salah satunya di KSPN Muaro Jambi. umlah RTLH berdasarkan data P3KE hingga tahun 2023 di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 17.963 unit dengan total penanganan sebanyak 3.687 unit atau berkisar 21% RTLH yang sudah ditangani. Dalam Kawasan KSPN Muaro Jambi terdapat permukiman penduduk yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), namun belum dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah untuk nantinya diajukan sebagai calon bantuan program BSPS atau program Sarhunta.

7.1.3 Analisis Kesenjangan Infrastruktur untuk Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 7.33 Proyeksi Kebutuhan Air Baku di Kabupaten/Kota (SPM) di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan	Kondisi Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI (m3/detik)								
				2022		2023		2024		2025		
				Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	
1	Batanghari	PKW Muara Bulian	0,24	0,4613	-0,2213	0,4631	-0,2231	0,4650	-0,2250	0,4668	-0,2268	
2	Bungo	PKW Muaro Bungo	1,554	0,7290	0,8250	0,7318	0,8222	0,7347	0,8193	0,7376	0,8164	
3	Kerinci	KSPN Kerinci Seblat	1,285	0,4297	0,8553	0,4315	0,8535	0,4332	0,8518	0,4349	0,8501	
4	Kota Sungai Penuh	KSPN Kerinci Seblat	0,26	0,1596	0,1004	0,1603	0,0997	0,1609	0,0991	0,1615	0,0985	
5	Merangin	Geopark Merangin	0,776	0,7428	0,0332	0,7458	0,0302	0,7487	0,0273	0,7517	0,0243	
6	Sarolangun	PKW Sarolangun	2,9867	0,5516	2,4351	0,5538	2,4329	0,5560	2,4307	0,5582	2,4285	
7	Tanjung Jabung Barat	PKW Kuala Tungkal	0,015	0,0017	0,0133	0,0017	0,0133	0,00170	0,0133	0,001700	0,0133	
8	Tanjung Jabung Timur	PKW Muara Sabak	0,225	0,3840	-0,1590	0,3855	-0,1605	0,3871	-0,1621	0,3886	-0,1636	
9	Tebo	-	0,623	0,8991	-0,2761	0,9027	-0,2797	0,9062	-0,2832	0,9098	-0,2868	

NO	Kabupaten/ Kota	Kawasan	Kondisi Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI (m3/detik)									
				2026		2027		2028		2029		2034	
				Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP	Proyeksi	GAP
1	Batanghari	PKW Muara Bulian	0,24	0,4683	-0,2283	0,469712	-0,2297	0,471168	-0,2312	0,47408	-0,2341	0,48864	-0,2486
2	Bungo	PKW Muaro Bungo	1,554	0,7399	0,8141	0,74224	0,8118	0,74456	0,8094	0,7492	0,8048	0,74456	0,0776
3	Kerinci	KSPN Kerinci Seblat	1,285	0,4363	0,8487	0,43762	0,8474	0,43898	0,8460	0,4417	0,8433	0,4553	0,3982
4	Kota Sungai Penuh	KSPN Kerinci Seblat	0,26	0,1620	0,0980	0,162524	0,0975	0,163036	0,0970	0,16406	0,0959	0,1692	0,0908

5	Merangin	Geopark Merangin	0,776	0,7541	0,0219	0,756404	0,0196	0,758756	0,0172	0,76346	0,0125	0,7870	-0,0110
6	Sarolangun	PKW Sarolangun	2,9867	0,5599	2,4268	0,561688	2,4250	0,563432	2,4233	0,56692	2,4198	0,5844	1,8485
7	Tanjung Jabung Barat	PKW Kuala Tungkal	0,015	0,00172	0,0133	0,00173	0,0133	0,00175	0,0133	0,00178	0,0132	0,0019	0,0114
8	Tanjung Jabung Timur	PKW Muara Sabak	0,225	0,3898	-0,1648	0,391032	-0,1660	0,392248	-0,1672	0,39468	-0,1697	0,4068	-0,5674
9	Tebo	-	0,623	0,9126	-0,6996	0,915496	-0,7025	0,918344	-0,7053	0,92404	-0,7110	0,9525	-0,3295

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan karena itu, perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk penyediaan air baku dalam mendukung pemenuhan SPM di 3 kabupaten/kota tersebut.

Tabel 7.34 Potensi Banjir di Kabupaten/Kota (SPM) Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	POTENSI		
		RENDAH	MENENGAH	LUAS (HA)
1	Batanghari		328.808,95	328.808,95
2	Bungo		455.689,58	455.689,58
3	Kerinci		145.380,57	145.380,57
4	Kota Sungai Penuh		85,03	85,03
5	Merangin		69.515,61	69.515,61
6	Sarolangun		415.859,19	415.859,19
7	Tanjung Jabung Barat		1.666,99	1.666,99
8	Tanjung Jabung Timur		1.128,72	1.128,72
9	Tebo	191.407,18	411.754,70	603.161,88

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan data potensi genangan banjir (Tabel 7.34) di Kabupaten/Kota untuk wilayah pelayanan SPM dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah tersebut berpotensi tergenang banjir. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian banjir.

Kebutuhan infrastruktur Jalan Nasional di Wilayah Provinsi Jambi (SPM).
Berdasarkan hasil proyeksi nilai VCR di ruas jalan nasional 9 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, diperoleh hasil nilai VCR atau Tingkat Pelayanan Jalan *(Level of Service)* D-F. Nilai LOS D : Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, dan berbeda – beda, volume mendekati kapasitas, LOS E : Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda – beda, volume mendekati kapasitas, dan LOS F arus terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang sama. Ruas jalan nasional di Provinsi Jambi terutama di wilayah SPM yang memiliki nilai kapasitas D-F antara lain (Tabel 7.37) :

a. Kabupaten Bungo :
- Jln. Lintas Sumatera II Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts Kota Muaro Bungo) LOS E sejak tahun 2022;
- Jln. Pattimura Muaro Bungo (Bts. Kota Muaro Bungo- Sp. Jambi) LOS D tahun 2025;

b. **Kabupaten Sarolangun :** Jalan Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel memiliki nilai LOS D tahun 2028

c. Kabupaten Batanghari :
- Jalan Bts. Kota Muara Bulian-Muara Tembesi nilai LOS D Tahun 2022
- Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian) nilai LOS D tahun 2026
- Jalan Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun nilai LOS D tahun 2025

d. **Kota Sungai Penuh** : Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W nilai LOS D pada tahun 2028;

e. **Kabupaten Kerinci :** Siulak Deras/Letter W - Bts. Sumbar nilai LOS D pada tahun 2023.

Penanganan terhadap permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pelebaran jalan menuju standar untuk ruas jalan yang memiliki lebar jalan di bawah standar jalan nasional (7 meter) dan penambahan lajur jika lebar jalan sudah sesuai dengan standar lebar jalan nasional.

Tabel 7.35 Proyeksi Jalan Nasional di Wilayah Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2023- 2034

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	Ppanjang Jalan (Km)	Lebar Jalan (Meter)	Kabupaten / Kota	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
1	1			Merlung - Bts. Prov. Riau	61,27	6,74	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,10	A	0,11	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,14	A	0,16	A
2	2			Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjbbar - Merlung	36,20	6,74	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,53	A	0,56	A	0,59	A	0,62	B	0,66	B	0,69	B	0,72	C	0,81	D

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	Ppanjang Jalan (Km)	Lebar Jalan (Meter)	Kabupaten / Kota	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
3	9			Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Prov. Sumbar	54,37	6,83	Kab. Bungo	0,69	B	0,74	C	0,78	C	0,82	D	0,86	D	0,91	E	0,95	E	1,07	F
4	9	11	K	Jln. Lintas Sumatera II Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts Kota Muaro Bungo)	4,13	7,41	Kab. Bungo	0,96	E	1,02	F	1,08	F	1,14	F	1,20	F	1,26	F	1,31	F	1,49	F
5	10			Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin	34,05	6,6	Kab. Bungo	0,38	A	0,41	A	0,43	A	0,45	A	0,48	A	0,50	A	0,52	A	0,59	A
6	10	11	K	Jln. Lintas Sumatera I Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muaro Bungo)	5,94	15,07	Kab. Bungo	0,35	A	0,37	A	0,40	A	0,42	A	0,44	A	0,46	A	0,48	A	0,54	A
7	11			Bts.Kab. Bungo/Kab.Merangin-Bts. Kota Bangko	33,71	6,18	Kab. Merangin	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,20	A	0,22	A
8	11	11	K	Jln. Lintas Sumatera II Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko)	5,73	7,27	Kab. Merangin	0,18	A	0,19	A	0,20	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,27	A
9	12			Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko	35,48	5,79	Kab. Merangin	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A
10	12	11	K	Jln. Lintas Sumatera I Bangko (Bts. Kota Bangko-Sp. Bukit Indah Bangko)	4,94	11,37	Kab. Merangin	0,08	A	0,09	A	0,09	A	0,10	A	0,10	A	0,11	A	0,11	A	0,13	A
11	13			Sarolangun - Bts. Sarolangun/Kab. Merangin	34,21	7,13	Kab. Sarolangun	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,20	A	0,22	A
12	14			Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel	30,43	6,65	Kab. Sarolangun	0,70	C	0,75	C	0,79	C	0,83	D	0,88	D	0,92	E	0,96	E	1,09	F
13	15			Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun	38,98	6,07	Kab. Batanghari	0,73	C	0,77	C	0,81	D	0,86	D	0,90	E	0,95	E	0,99	E	1,12	F
14	16			Bts. Kab.Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauh	40,09	5,92	Kab. Sarolangun	0,10	A	0,11	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,14	A	0,16	A
15	17			Pauh - Sarolangun	23,46	5,86	Kab. Sarolangun	0,16	A	0,16	A	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,20	A	0,21	A	0,24	A
16	18			Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo -Bts. Kota Muaro Bungo	21,88	5,88	Kab. Bungo	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A
17	18	11	K	Jln. Pattimura Muaro Bungo (Bts. Kota Muaro Bungo- Sp. Jambi)	3,03	5,63	Kab. Bungo	0,73	C	0,77	C	0,81	D	0,86	D	0,90	E	0,95	E	0,99	E	1,12	F
18	19			Muara Tebo-Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo	19,78	11,15	Kab. Tebo	0,08	A	0,09	A	0,09	A	0,10	A	0,10	A	0,11	A	0,11	A	0,13	A
19	20			Sei Bengkal - Muaro Tebo	52,97	6,03	Kab. Tebo	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	Ppanjang Jalan (Km)	Lebar Jalan (Meter)	Kabupaten / Kota	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
20	21			Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo-Sei Bengkal	15,76	6,24	Kab. Tebo	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
21	22			Muara Tembesi-Bts. Kab. Batanghari/Kab.Tebo	54,64	6,29	Kab. Batanghari	0,46	A	0,48	A	0,51	A	0,54	A	0,57	A	0,59	A	0,62	B	0,70	C
22	23			Bts. Kota Muara Bulian-Muara Tembesi	11,10	6,35	Kab. Batanghari	0,98	E	1,04	F	1,10	F	1,16	F	1,22	F	1,28	F	1,34	F	1,52	F
23	23	11	K	Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian)	4,66	10,16	Kab. Batanghari	0,68	B	0,73	C	0,77	C	0,81	D	0,85	D	0,89	D	0,93	E	1,05	F
24	24			Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari - Bts. MA. Bulian	32,33	6,59	Kab. Batanghari	0,58	A	0,62	B	0,65	B	0,69	B	0,72	C	0,76	C	0,79	C	0,89	D
25	24	11	K	Jln. Gajah Mada (Muara Bulian)	4,98	10	Kab. Batanghari	0,37	A	0,40	A	0,42	A	0,44	A	0,46	A	0,49	A	0,51	A	0,58	A
26	29	2		Bts. Kab. Tanjabtim/Kab.Tanjabbar -Sp Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut)	16,62	5	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
27	30			Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut) - Bts. Kota Kuala Tungkal	34,53	5,23	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,15	A	0,15	A	0,16	A	0,17	A	0,19	A
28	30	11	K	Jln. Sultan Thaha (Kuala Tungkal) Sp. 3 Sudirman - Sp. 3 Sultan Thaha)	0,21	9,17	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,09	A	0,10	A	0,10	A	0,11	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A
29	30	12	K	Jln. Jenderal Sudirman (Kuala Tungkal) (Sp. Sudirman/Sri Sudewi-Sp. Sudirman/Sultan Thaha)	0,62	9,99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,18	A	0,19	A	0,20	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,27	A
30	30	13	K	Jln.Sri Sudewi (Kuala Tungkal) (Bts. Kota Kuala Tungkal -Sp. Tungkal - Sp. Sudirman /Sri Sudewi)	4,54	12,91	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
31	34			Bts. Kota Bangko - Sei Manau	38,47	5,84	Kab. Merangin	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A
32	34	11	K	Jln. Makalam (Bangko) (Sp. Bukit Indah Bangko - Sp. Pasar Bawah)	0,76	8,81	Kab. Merangin	0,17	A	0,18	A	0,19	A	0,20	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,26	A
33	34	12	K	Jln. M. Yamin (Bangko) (Sp. Pasar Bawah - Bts. Kota Bangko)	5,47	6,93	Kab. Merangin	0,19	A	0,20	A	0,21	A	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,25	A	0,29	A
34	35			Sei Manau - Bts. Kab. Merangin/Kab.Kerinci	28,51	6,07	Kab. Merangin	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
35	36			Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci - Sanggaran Agung	57,39	4,93	Kab. Kerinci	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	Ppanjang Jalan (Km)	Lebar Jalan (Meter)	Kabupaten / Kota	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
36	37			Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata)	17,45	5,42	Kota Sungai Penuh	0,10	A	0,11	A	0,12	A	0,12	A	0,13	A	0,14	A	0,14	A	0,16	A
37	37	11	K	Jln. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu PKK - Sp. Ahmad Yani)	0,26	12,43	Kota Sungai Penuh	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A
38	37	14	K	Jln. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu PKK)	0,70	6,63	Kota Sungai Penuh	0,22	A	0,23	A	0,24	A	0,26	A	0,27	A	0,28	A	0,30	A	0,34	A
39	38			Bts. Kota Sungai Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan)	36,34	5	Kab. Kerinci	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
40	38	11	K	Jln. Ahmad Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh)	0,55	9,32	Kota Sungai Penuh	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
41	38	12	K	Jln. Soekarno - Hatta - Sungai Penuh (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh)	0,91	8	Kota Sungai Penuh	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A	0,08	A	0,08	A	0,10	A
42	40			Sp. Zona V - Pel. Muara Sabak	32,71	7,13	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A	0,08	A
43	41	1		Sp. Niam - Bts Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar	26,98	6,46	Kab. Tebo	0,02	A	0,02	A	0,02	A	0,02	A	0,03	A	0,03	A	0,03	A	0,03	A
44	41	2		Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar-Lubuk Kambing	11,33	7	Kab. Tebo	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
45	42			Lubuk Kambing - Merlung	34,90	5,27	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,04	A	0,04	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,05	A	0,06	A	0,06	A
46	43			Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W	21,70	6,66	Kota Sungai Penuh	0,69	B	0,74	C	0,78	C	0,82	D	0,86	D	0,91	E	0,95	E	1,07	F
47	44			Siulak Deras/Letter W - Bts. Sumbar	35,51	4,95	Kab. Kerinci	0,85	D	0,90	E	0,95	E	1,00	F	1,06	F	1,11	F	1,16	F	1,31	F

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Kebutuhan infrastruktur Permukiman di Wilayah Provinsi Jambi (SPM).

Setiap kawasan prioritas diperhitungkan ketersediaan sistem pelayanan air minum serta proyeksi kebutuhan air minumnya. Berdasarkan tabel 7.36 diperoleh informasi kapasitas terpasang air minum dan proyeksi kebutuhan air minum pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi hingga tahun 2029. Kebutuhan air minum dihitung berdasarkan jumlah penduduk di wilayah tersebut, dapat dilihat kebutuhan air minum terbesar di Kabupaten Merangin 1.193 liter/detik, Kabupaten Bungo 925 liter/detik, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 908 liter/detik.

Tabel 7.36 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034

No.	Kab/Kota	Kapasitas Terpasang (Liter/Detik)	Tingkat Kehilangan Air	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter/Detik)								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Sarolangun	275,0	20,36%	264	313	370	435	508	591	685	790	1041
2	Batanghari	287,5	22,56%	327	380	439	506	580	663	755	858	1642
3	Tebo	262,5	21,67%	298	345	397	454	518	588	666	751	886
4	Bungo	210,0	23,20%	369	426	489	559	637	724	819	925	574
5	Tanjung Jabung Timur	245,0	47%	443	468	494	520	548	576	606	637	629
6	Tanjung Jabung Barat	380,0	41,26%	252	311	380	460	551	656	774	908	994
7	Kota Sungai Penuh	170,0	23,65%	218	224	230	236	243	249	256	263	234
8	Kabupaten Kerinci	421,0	43,70%	423	438	452	467	729	767	806	847	1084
9	Kabupaten Merangin	325,0	38,07%	472	546	628	719	821	933	1057	1193	1396

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Perhitungan GAP diperoleh dari kapasitas terpasang eksisting dengan proyeksi kebutuhan air minum. Berdasarkan hal tersebut, diketahui seluruh kabupaten/kota belum terpenuhi kebutuhan air minum layak.

Tabel 7.37 GAP Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034

No	Kabupaten/ Kota	GAP Penyediaan Air Minum (Liter/Detik)								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Sarolangun	11	-38	-95	-159	-233	-316,0	-409	-515	-766
2	Batang Hari	-39	-92	-151	-218	-292	-375	-468	-570	-1355

No	Kabupaten/ Kota	GAP Penyediaan Air Minum (Liter/Detik)								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
3	Tebo	-35	-82	-134	-191	-255	-325	-403	-488	-624
4	Bungo	-159	-56	-63	-70	-78	-86	-95	-105	-23
5	Tanjung Jabung Timur	-198	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30,6	-18
6	Tanjung Jabung Barat	128	-59	-69	-79	-91	-104	-118	-134	-99
7	Kota Sungai Penuh	-47	-53	-60	-66	-72	-79	-86	-93	-64
8	Kabupaten Kerinci	-2,4	-16,6	-31,2	-46,1	-308,3	-345,8	-385,1	-426,2	-663
9	Kabupaten Merangin	-147	-220	-302	-394	-495	-607	-731	-868	-1071

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Pemenuhan air minum untuk setiap kabupaten/kota harus memiliki nilai tingkat kehilangan air di bawah 20%, pemeritah daerah memiliki dokumen rispam, dan adanya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakaan pengelolaan dan perawatan infrastruktur air minum.

Setiap kawasan prioritas diperhitungkan pelayanan *demand* **pengelolaan persampahan** untuk memenuhi standar pelayanan minimal di Provinsi Jambi terutama untuk kabupaten/kota di luar kawasan prioritas RPIW Provinsi Jambi. Hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) namun masih terdapat 2 kabupaten/kota yang belum memiliki yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil proyeksi terhadap timbulan sampah dan demand pengelolaan persampahan, diperoleh informasi demand persampahan terbanyak di Kabupaten Kerinci sebesar 1,4 juta m^3/tahun dan terendah Kabupaten Sarolangun 238.171 m^3/tahun (Tabel 7.38). Besaran timbulan sampah dan demand didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk.

Tabel 7.38 Proyeksi Demand Persampahan di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034

No.	Kab/Kota	Nama TPA	Kapasitas TPA (m3/Tahun)	Proyeksi Demand Pengelolaan Persampahan (m3/tahun)								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Sarolangun	TPA Bukit Baru	645.000	46.232	70.677	96.052	122.392	149.736	178.120	207.585	238.171	409.480
2	Batang Hari	TPA AMD	1.080.000	71.895	145.417	245.122	371.893	526.644	710.321	923.902	1.168.395	415.448
3	Tebo	TPA Kabupaten Tebo	866.250	79.779	161.117	410.766	410.766	580.777	782.087	1.015.612	1.282.290	447.543

No.	Kab/Kota	Nama TPA	Kapasitas TPA (m3/Tahun)	Proyeksi Demand Pengelolaan Persampahan (m3/tahun)								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
4	Bungo	TPA Gamut	1.436.400	85.943	173.573	292.140	442.552	625.742	842.669	1.094.322	1.381.719	482.450
5	Tanjung Jabung Timur	TPA Parit Culum	789.750	51.580	103.266	172.288	258.697	362.549	483.897	622.794	779.295	245.337
6	Tanjung Jabung Barat	TPA Lubuk Terentang	1.323.000	81.174	163.652	274.952	415.765	586.801	788.784	1.022.457	1.288.580	440.433
7	Kota Sungai Penuh	Belum Memiliki TPA	0,0	33.742	67.790	113.498	171.024	240.528	322.173	416.124	522.549	171.382
8	Kabupaten Kerinci	Belum Memiliki TPA	0,0	92.783	185.747	309.883	465.281	652.033	870.233	1.119.972	1.401.343	440.934
9	Kabupaten Merangin	TPA Langling	1.160.250	61.700	93.755	126.642	160.381	194.995	230.507	266.940	304.317	440.553

Sumber : Analisis BPIW, 20222

Tabel 7.39 GAP Demand Persampahan di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034

No.	Kab/Kota	Nama TPA	Kapasitas TPA (m3/Tahun)	GAP Pengelolaan Persampahan (m3/Tahun)								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Sarolangun	TPA Bukit Baru	645.000	518.143	493.698	468.323	441.983	414.639	386.255	356.790	326.204	154.895
2	Batang Hari	TPA AMD	1.080.000	1.552.003	1.526.677	1.500.495	1.473.429	1.445.449	1.416.523	1.386.620	1.355.707	1.184.752
3	Tebo	TPA Kabupaten Tebo	866.250	1.006.848	1.518.861	1.490.150	1.460.601	1.430.189	1.398.889	1.366.676	1.333.522	1.152.657
4	Bungo	TPA Gamut	1.436.400	1.727.668	1.697.610	1.666.672	1.634.828	1.602.051	1.568.313	1.533.587	1.497.843	1.302.790
5	Tanjung Jabung Timur	TPA Parit Culum	789.750	755.346	738.064	720.729	703.340	685.898	668.402	650.853	633.249	544.413
6	Tanjung Jabung Barat	TPA Lubuk Terentang	1.323.000	1.268.669	1.240.522	1.211.700	1.182.186	1.151.964	1.121.017	1.089.327	1.056.877	882.567
7	Kota Sungai Penuh	Belum Memiliki TPA	0,0	- 22.545	-34.048	- 45.708	- 57.526	- 69.504	- 81.645	- 93.952	- 106.425	-171.382
8	Kabupaten Kerinci	Belum Memiliki TPA	0,0	-61.464	- 92.544	- 123.714	-154.977	-186.332	-217.778	- 249.318	-280.950	-440.513
9	Kabupaten Merangin	TPA Langling	1.160.250	1.098.550	1.066.495	1.033.608	999.869	965.255	929.743	893.310	855.933	719.697

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan kapasitas TPA dan hasil proyeksi demand pengelolaan persampahan maka diperoleh informasi GAP kebutuhan pengelolaan persampahan. Dari 9 kabupaten/kota, GAP pengelolaan persampahan ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. GAP di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dikarenakan belum adanya TPA.

Setiap kawasan prioritas diperhitungkan pelayanan *demand* **pengelolaan air limbah** untuk memenuhi standar pelayanan minimal di Provinsi Jambi terutama untuk kabupaten/kota di luar kawasan prioritas RPIW Provinsi Jambi. Perhitungan kebutuhan air limbah diperoleh dari 80% pemakaian rata – rata air minum disetiap kabupaten/kota dan kepadatan penduduk minimal 150 jiwa/ha. Berdasarkan hasil proyeksi air limbah, diperoleh informasi Kabupaten Merangin menghasilkan air limbah terbesar 795 liter/detik dan Kota Sungai Penuh terendah dengan besaran 176 liter/detik. Besaran jumlah air limbah tergantung pada jumlah penduduk dan pemakaian air.

Tabel 7.40 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034

No.	Kab/Kota	Proyeksi Demand Pengelolaan Air Limbah (m3/tahun)								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Sarolangun	166	166	188	211	237	265	297	331	615
2	Batang Hari	208	231	255	282	312	344	379	416	657
3	Tebo	191	213	237	263	291	322	356	392	591
4	Bungo	223	234	246	257	270	282	295	309	382
5	Tanjung Jabung Timur	267	276	285	294	303	313	323	333	387
6	Tanjung Jabung Barat	143	165	189	216	245	278	314	353	612
7	Kota Sungai Penuh	121	124	126	129	132	134	137	140	156
8	Kabupaten Kerinci	282	292	301	311	486	511	537	565	723
9	Kabupaten Merangin	287	318	352	388	428	470	520	575	931

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Tabel 7.41 GAP Pengelolaan Air Limbah di Provinsi Jambi (SPM) Tahun 2022- 2034

No.	Kab/Kota	Kapasitas Air Limbah Terpasang	GAP Pengelolaan Air Limbah (liter/detik)								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Sarolangun	0,3472	-166	- 166	-187	-211	-236	-265	- 296	- 331	-614
2	Batang Hari	0,474537	-207	-230	-255	-282	-311	-343	-378	- 416	-656
3	Tebo	0,0925926	-191	-213	-237	-263	-291	-322	-355	- 392	-591
4	Bungo	0,06944	-223	-234	-246	-257	-270	-282	-295	- 309	-382

No.	Kab/Kota	Kapasitas Air Limbah Terpasang	GAP Pengelolaan Air Limbah (liter/detik)								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
5	Tanjung Jabung Timur	0,06944	- 267	-276	-285	-294	-303	-313	- 323	- 333	-387
6	Tanjung Jabung Barat	2,77778	- 141	-162	-186	-213	-243	-275	- 311	-350	-609
7	Kota Sungai Penuh	10,40667	- 111	-113	-116	-119	-121	-124	-127	-129	-146
8	Kabupaten Kerinci	0	- 282	-292	-301	-311	- 486	-511	-537	-565	-723
9	Kabupaten Merangin	0,34722	-286	-317	-351	-388	-427	-470	-519	-575	-930

Sumber : Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi air limbah, diperoleh infomrasi gap pengelelolaan air limbah, seluruh kabupaten/kota di wilayah SPM mengalami defisit prasarana air limbah sehingga perlu adanya pembangunan prasarana pengelolaan air limbah. Jika dilihat dari Kepadatan penduduk, hanya 1 wilayah yang memiliki kepadatan di atas 150 jiwa/ha yaitu Kota Sungai penuh. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah skala perkotaan.

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sudah dilaksanakan hingga tahun 2022, berdasarkan data kabupaten/kota yang masih memiliki kawasan permukiman kumuh dari 9 kabupaten/kota di wilayah SPM terdapat 5 kabupaten/kota, antara lain Merangin, Sarolangun, Batanghari, Bungo, da Kota Sungai Penuh. Penanganan kawasan permukiman kumuh dapat melalui peremajaan permukiman kumuh. Peremajaan kawasan kumuh untuk kewenangan pusat jika luas > 15 ha dan jika luas < 15 ha dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 7.42 Kawasan Kumuh pada Kawasan Prioritas Provinsi Jambi

No	Nama Kab/Kota	Penanganan Sisa Kumuh		
		Kel/Kawasan	APBN	APBD
1	Merangin	Pematang Kandis	186,08	
		Pasar Atas Bangko	93,68	
TOTAL			279,76	0
2	Sarolangun	Pasar Lama Pauh		10
		Pelayang	76,54	
TOTAL			76,54	10
3	Batanghari	Kelurahan Muara Bulian		11,07

No	Nama Kab/Kota	Penanganan Sisa Kumuh		
		Kel/Kawasan	APBN	APBD
		Kelurahan Pasar Baru		2,61
		Kelurahan Rengas Condong	17,83	
		Kelurahan Teratai		7
		Kelurahan Kampung Baru		10,51
TOTAL			18	31
4	**Bungo**	Jaya Setia		7,39
		Sungai Pinang	39,01	
		Bungo Taman Agung	15,82	
TOTAL			55	7
5	**Kota Sungai Penuh**	Pusat Kota	48,514	
		Permukiman Pinggir S. Batang Merao	80,9	
		Permukiman Pinggir Batang Sangir	69,58	
TOTAL			**198,99**	**-**

Sumber: Kompilasi Data Kumuh – BPPW Jambi, 2021

Pemenuhan kebutuhan sektor perumahan difokuskan pada peningkatan rumah tidak layak huni. GAP jumlah Rumah Tidak Layak Huni diperoleh dari Jumlah RTLH dikurangi dengan total penanganan sejak tahun 2016 -2022. Berdasarkan tersebut diperoleh jumlah gap terbesar di Kabupaten Kerinci sebanyak 11.112 unit. Peningkatan RTLH diintegrasikan dengan penanganan kawasan permukiman kumuh**.**

Tabel 7.43 GAP RTLH yang Ditangani di Wilayah Provinsi Jambi (SPM)

NO	Kabupaten/Kota	Total Penanganan 2016-2022	Jumlah RTLH yang belum ditangani
1	Batanghari	2.232	16.023
2	Sarolangun	1.383	11.206
3	Merangin	1.080	20.752
4	Kerinci	1.482	6.988
5	Kota Sungai Penuh	1.504	437
6	Tebo	2.596	11.351
7	Bungo	2.337	10.227
8	Tanjung Jabung Barat	2.539	19.956
9	Tanjung Jabung Timur	1.381	36.960
Total		**16.534**	**133.900**

Sumber : Analisis BPIW,2022

7.2 Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Analisis keterpaduan infrastruktur digunakan untuk mengetahui keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan melalui penanganan antar sektor di PUPR maupun lintas instansi (PUPR dengan non PUPR). Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada. Berikut merupakan tabel keterpaduan infrastruktur pada kawasan prioritas Provinsi Jambi. Keterpaduan pembangunan dilihat pada keterpaduan antar infrasturktur PUPR dan keterpaduan dengan infrasturktur non PUPR. Contoh keterpaduan antar infrastruktur PUPR yakni pada bidang cipta karya dan perumahan. Hal ini diwujudkan dalam program penanganan kawasan kumuh yang akan diintegrasikan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tabel 7.44 Keterpaduan Infrastruktur Provinsi Jambi

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan	Fungsi	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur non PUPR
				Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
				Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
1	PKN Jambi	Perkotaan	Penanganan kumuh					Penataan kawasan	2026	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)	2025-2029	Keterpaduan Cipta Karya–Perumahan: Penanganan Kumuh dengan luas lebih dari 15 hektar yang akan diintegrasikan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)	
2	KSPN Muaro Jambi	Kawasan Pariwisata	Penanganan bencana, Penataan Kawasan, dan penyediaan rumah layak huni	Bangunan Pengendalian Banjir yang dibangun	2024	-	-	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	2025-2029	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)	2024 - 2029	Pengembangan KSPN Muaro Jambi melalui pengendalian banjir, penataan kawasan wisata, dan penyediaan rumah layak huni	Pengembangan KSPN Muaro Jambi perlu adanya dukungan sektor Non PUPR dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kemendikbud) **Penyusunan Masterplan KSPN Muaro Jambi**

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan	Fungsi	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur non PUPR
				Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
				Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
3	Kota Sungai Penuh	SPM/TNKS	Penanganan kumuh					Penataan kawasan	2026-2029	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)	2025-2029	Keterpaduan Cipta Karya–Perumahan: Penanganan Kumuh dengan luas lebih dari 15 hektar yang akan diintegrasikan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)	
4	Kabupaten Bungo	SPM/PKW Muaro Bungo	Penanganan kumuh					Penataan kawasan	2029	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)	2025-2029	Keterpaduan Cipta Karya–Perumahan: Penanganan Kumuh dengan luas lebih dari 15 hektar yang akan diintegrasikan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)	

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan	Fungsi	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur non PUPR
				Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
				Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
5	Kabupaten Merangin		Penanganan kumuh					Penataan kawasan	2029	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)	2025-2029	Keterpaduan Cipta Karya–Perumahan: Penanganan Kumuh dengan luas lebih dari 15 hektar yang akan diintegrasikan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)	
6	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kawasan Perkotaan dan Kawasan Industri	Konektivitas	-	-	1.Pembangunan Jalan; 2.Pembangunan Jembatan	2029	-	-	-	-	-	Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kementerian Perhubungan), Pengembangan Kawasan Industri Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi;

Tabel 7.45 Keterpaduan Infrastruktur Provinsi Jambi

No.	Infrastruktur Prioritas	Informasi Umum dan Teknis Program/ Kegiatan Prioritas	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jambi	Manfaat : Penyediaan pengelolaan air limbah skala perkotaan Jambi yang layak dan aman. 1. Pembangunan SPALD-T Skala Kota Jambi dbangun melalui 3 paket pada tahun 2020 - 2023 : a. Paket B1 Pembangunan IPAL. IPAL Kota Jambi dibangun dengan kapasitas 7600 m3/hari yang mampu melayani 10.300 Sambungan Rumah (SR). paket ini					Perluasan Sistem Jaringan Perpipaan IPAL Kota Jambi. Output : 10.122 SR	2025-2029				Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah dapat digunakan oleh Dinas Pertamanan atau Dinas Pemadam Kebakaran sebagai sumber air bersih penyiraman tanaman atau pemadam kebakaran	Pemerintah Kota Jambi : 1. Perluasan Sistem Jaringan Perpipaan IPAL Kota Jambi oleh Pemerintah Kota Jambi; 3. Penentuan Harga Langganan IPAL Kota Jambi; 2. Operasionalisasi dan Pemeliharaan IPAL Kota Jambi.

No.	Infrastruktur Prioritas	Informasi Umum dan Teknis Program/ Kegiatan Prioritas	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
		pembiayaan menggunakan LOAN ADB b. Paket C : Jaringan perpipaan air limbah Zona Barat (Sambungan Rumah). Paket ini pembiayaan APBN; c. Paket B2 : Jaringan Perpipaan Air Zona TImur + Rumah Pompa. Paket ini pembiayaan LOAN ADB. 2. Status Hingga November 2023 jumlah Sambungan Rumah yang sudah terkonfirmasi sudah dilakukan pemasangan 149 SR dan 29 perusahaan/sektor komersil.											



BAB 8

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pada Fokus Perencanaan

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jambi pada fokus perencanaan Perkotaan dengan kawasan prioritas PKN Jambi dan Fokus Pariwisata dengan kawasan prioritas KSPN Muaro Jambi. menguraikan program/kegiatan untuk sektor PUPR maupun sektor lainnya, cakupan kerja (antarkawasan prioritas dan lokasi spesifik), teknis Kementerian PUPR, indikasi kebutuhan, sumber pendanaan, dan tahun rencana implementasi.

8.1.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pada Fokus Perkotaan (PUPR dan Non PUPR)

Rencana Pengembangan fokus perkotaan membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR dan Non PUPR. Dukungan tersebut dijabarkan pada rencana aksi. Rencana aksi meliputi program, kebutuhan infrastruktur, kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan K/L pengampu beserta UNOR yang menangani rencana aksi PUPR. Rincian rencana aksi fokus perkotaan sebagai berikut :

- Tahun 2023 – 2024 yaitu tahapan pembangunan infrastruktur dasar yang merupakan program *Multi Years Contract* (MYC) seperti pengendalian banjir di PKN Jambi (2023 – 2026) dan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat di PKN Jambi. Selain itu, peningkatan kualitas kelembagaan daerah
- Tahun 2025 – 2026 yaitu tahapan peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan yang meliputi :penyelenggaran kawasan perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan akses rumah layak huni, peningkatan kualitas kelembagaan dan keuangan daerah, peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan zona pemanfaatan perkotaan dan mitigasi bencana, pengembangan simpul dan moda transportasi.
- Tahun 2027 – 2029 yaitu tahapan pemeliharaan infrastruktur dasar perkotaan yang meliputi : Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lanjutan, pengembangan ketersediaan energi dan telekomunikasi, peningkatan kelembagaan dan

keuangan daerah, penguatan kelembagaan dan preservasi jaringan jalan.

Tabel 8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Fokus Kawasan Perkotaan Jambi

Grand Strategi	Program		Rencana Aksi	Lokasi Spesifik	Volume	Unit	Biaya Anggara	Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	TAHUN						
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam memenuhi SPM dengan dukungan fiskal daerah	Penyediaan Infrastruktur prasarana permukiman	1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Jambi	1	Paket	277.814.000	LOAN	PUPR	CK	X						
		2	Saluran Drainase Utama Perkotaan yang dibangun/Pembangunan Saluran Drainase utama perkotaan - Sungai Asam	Kota Jambi	1	Paket	56.400.000	LOAN	Swasta/KPBU	SDA		X	X				
		3	Saluran Drainase Utama Perkotaan yang dibangun/Pembangunan Saluran Drainase utama perkotaan - Sungai Kenali	Kota Jambi	1	Paket	56.400.000	LOAN	Swasta/KPBU	SDA			X	X			
		4	Saluran Drainase Utama Perkotaan yang dibangun/Pembangunan Saluran Drainase utama perkotaan - Kolam Retensi : Potensial Kolam Retensi : 1. Kolam Retensi Makalam: 2. Kolam Retensi Lorong Arwah: 3. Kolam Retensi Jalan A. Zaidi Saleh; 4. Kolam Retensi Jalan P. Hidayat.	Kota Jambi	1	Paket	56.400.000	LOAN	Swasta/KPBU	SDA						X	
		5	Peningkatan Embung dan bangunan penampung air lainnya (Revitalisasi Danau Teluk, Kota Jambi)	Danau Teluk	1	Unit	5.500.000	APBN/APBD/Swasta	PUPR	SDA			X				

Grand Strategi	Program		Rencana Aksi	Lokasi Spesifik	Volume	Unit	Biaya Anggara	Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	TAHUN						
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6	Peningkatan Embung dan bangunan penampung air lainnya (Revitalisasi Danau Kenali, Kota Jambi	Danau Kenali	1	Unit	5.500.000	APBN/APBD/Swasta	PUPR	SDA	X						
		7	Peremajaan Permukiman Kumuh Kelurahan Legok, Kota Jambi	Kota Jambi	17	Ha	25.500.000	APBN/APBD/Swasta	PUPR/Pemerintah Daerah	CK						X	
		8	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) Kota Jambi	Kota Jambi	4000	unit	80.000.000	APBN/APBD/CSR	APBN	CK			X	X	X	X	X
		9	Pengelolaan Aset Infrastruktur PUPR	Kota Jambi				APBD	Pemerintah Daerah	TBD	X	X	X	X	X	X	X
	Pengelolaan Pembangunan dan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah	1	Peningkatan kemudahan investasi melalui inovasi pelayanan terpadu	Kota Jambi				APBN/APBD	BKPM/DPMPTSP	TBD		X	X	X	X	X	X
		2	Pemberian insentif kepada investor pada sektor tertentu	Kota Jambi				APBN/APBD	BKPM/DPMPTSP	TBD		X	X	X	X	X	X
		3	Peningkatan pajak dan retribusi daerah	Kota Jambi				APBN/APBD	BKPM/DPMPTSP	TBD		X	X	X	X	X	X
		4	Bimbingan Teknis dan Pembinaan Pengelolaan aset desa	Kota Jambi				APBN/APBD	KEMENDAGRI/ BPKAD	TBD		X	X	X	X	X	X
		5	Peningkatan kompetensi aparat pemerintah dan pengurus kelembagaan desa	Kota Jambi				APBN/APBD	KEMENDAGRI	TBD		X	X	X	X	X	X
		6	Penyediaan layanan pencatatan sipil melalui penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi/GISA	Kota Jambi				APBN/APBD	KEMENDAGRI	TBD		X	X	X	X	X	
		7	Pengadaan kerjasama dalam pengembangan Governence dan SDM bersama daerah yang menjadi mitra	Kota Jambi				APBN/APBD	KEMENDAGRI	TBD		X	X	X	X	X	

Grand Strategi	Program	Rencana Aksi		Lokasi Spesifik	Volume	Unit	Biaya Anggara	Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	TAHUN						
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan konektivitas perkotaan dengan pusat pertumbuhan baru (W1-T2-T3-T4)	Peningkatan konektivitas dan Simpul Transportasi	1	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Betung - Tempino - Jambi	Kota Jambi	32,9	Km	1.600.000.000	APBN/KPBU	PUPR, BUMN	BM	X	X	X	X	X	X	X
		2	Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Jambi	Kota Jambi	8,57	Km	76.000.000	APBN/APBD/Swasta	PUPR, PEMDA	BM			X	X	X	X	X
		3	Preservasi Jalan Nasional	Kota Jambi	1	Provinsi	60.000.000	APBN	PUPR	BM			X	X	X	X	X
		4	Peningkatan pelayanan bandara	Kota Jambi				APBN/APBD	KEMENHUB	TBD			X	X	X	X	X
		5	Penigkatan pelayanan terminal	Kota Jambi				APBN/APBD	KEMENHUB	TBD			X	X	X	X	X
		6	Pengoptimalan Pelabuhan Pengumpul - Pelabuhan Talang Duku	Kota Jambi (Pelabuhan Talang Duku)				APBN/APBD	KEMENHUB/PELINDO	TBD			X	X	X	X	X
		7	Penyediaan angkutan umum dan kota	Kota Jambi				APBN/APBD	KEMENHUB	TBD			X	X	X	X	X
Pengembangan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan (W3-T1-T4)	Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Kerentanan Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB), Rencana Kontijensi, Rencana Kedarurtata, dan Rencana Rehabilitasi	Kota Jambi				APBN/APBD	BNPB/BPBD	TBD			X	X	X	X	X
		2	Pembentukan desa/kelurahan tanggap bencana	Kota Jambi				APBN/APBD	BNPB/BPBD	TBD			X	X	X	X	X
		3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Jambi				APBN/APBD	BNPB/BPBD	TBD			X	X	X	X	X
		4	Penguatan kelembagaan bencana daerah	Kota Jambi				APBN/APBD	BNPB/BPBD	TBD		X	X	X	X	X	X
	Pembangunan Perkotaan yang Kompak dan Cerdas	1	Mendorong penerapan Transit Oriented Development	Kota Jambi				APBD	Pemda	TBD		X	X	X	X	X	X
		2	Mendorong penerapan mix-used building	Kota Jambi				APBD	Pemda	TBD		X	X	X	X	X	X

Grand Strategi	Program	Rencana Aksi		Lokasi Spesifik	Volume	Unit	Biaya Anggara	Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	TAHUN						
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3	Pembatasan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai banguna, dan sempadan sungai	Kota Jambi				APBD	Pemda	*TBD*		X	X	X	X	X	X
		4	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan masyarakat	Kota Jambi				APBD	Pemda	*TBD*		X	X	X	X	X	X
		5	Peningkatan kualitas transportasi yang terintegrasi (alih moda ramah lingkungan), penerapan ICT pada lalu lintas	Kota Jambi				APBD	Pemda	*TBD*		X	X	X	X	X	X
		6	Pemanfaatan teknologi dalam mendorong kegiatan ekonomi di perkotaan	Kota Jambi				APBD	Pemda	*TBD*		X	X	X	X	X	X
		7	Penerapan *waste management, water management*, dan energi alternatif yang ramah lingkungan	Kota Jambi				APBD	Pemda	*TBD*		X	X	X	X	X	X
		8	Memberikan fasilitas berupa informasi tentang kesehatan, mengembangkan kurikulum melek digital, serta membangun fasilitas ramah difabel.	Kota Jambi				APBD	Pemda	*TBD*		X	X	X	X	X	X
		9	Edukasi masyarakat sebagai end-user yang hidup di perkotaan	Kota Jambi				APBD	Pemda	*TBD*		X	X	X	X	X	X

Sumber : Analisis BPIW, 2022

8.1.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pada Fokus Pariwisata (PUPR dan Non PUPR)

Rencana Pengembangan fokus pariwisata membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR dan Non PUPR. Dukungan tersebut dijabarkan pada rencana aksi. Rencana aksi meliputi program, kebutuhan infrastruktur, kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan K/L pengampu beserta UNOR yang menangani rencana aksi PUPR. Rincian rencana aksi fokus industri sebagai berikut :

- Tahun 2023 – 2024 yaitu tahapan persiapan kawasan pariwisata penembangan infrastruktur konektivitas tahap awal, peningkatan kelembagaan SDM, penyediaan fasilitas dan amenitas pendukung pariwisata tahap awal serta penyusunan konsep media promosi;
- Tahun 2025 – 2026 yaitu tahapan pembangunan infrastruktur PUPR seperti pembangunan prasarana air baku, peningkatan rumah tidak layak huni, dan penyediaan sanitasi layak.
- Tahun 2027 – 2029 yaitu tahapan pemeliharaan dan peningkatan kualitas kegiatan pariwisata yang meliputi pengembangan fasilitas pendukung lanjutan, pemeliharaan amenitas pariwisata, peningkatan kualitas SDM, dan promosi pariwisata.

Tabel 8.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Fokus Kawasan Pariwisata

GRAND STRATEGY	PROGRAM		RENCANA AKSI		LOKASI SPESIFIK	Kebutuhan Indikasi		Biaya Anggara	Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	TAHUN						
						Volume	Unit					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan potensi atraksi baru pariwisata sebagai daya tarik (S1, S3-S4-T1-T3-T4)	01	Pengembangan Daya Tarik Wisata	1	Pengembangan Desa Wisata Muara Jambi	KSPN Muaro Jambi					Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	*TBD*		x	x	x	x	x	x
			2	Restorasi Candi Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/ Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	*TBD*	x	x	x				
			3	Pelaksanaan festival - festival Budaya setiap tahunnya	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*	x	x	x	x	x	x	x
	02	Peningkatan Promosi Wisata dan Optimalisasi Kelembagaan	1	Partisipasi Dalam Pameran Gebyar Wisata Nusantara (GWN)	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*		x	x	x	x	x	x
			2	Pembuatan Video Profil Destinasi Wisata Provinsi Jambi/TV *Commercial* (TVC) Wisata Jambi	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*		x	x	x	x	x	
			3	Partisipasi Dalam Pameran Pariwisata Dunia *(International Tourism Borse)*	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*		x	x	x	x	x	x
			4	Penyusunan Paket Wisata Jambi	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*		x	x				

GRAND STRATEGY	PROGRAM		RENCANA AKSI		LOKASI SPESIFIK	Kebutuhan Indikasi		Biaya Anggara	Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	TAHUN						
						Volume	Unit					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			5	Pengembangan inovasi pemasaran berdasarkan segmen wisatawan berbasis website, aplikasi, dan media sosial	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*	x	x	x	x	x	x	x
			6	Pengembangan dan Penguatan Organisasi Bidang Industri Pariwisata	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*	x	x	x	x	x	x	x
			7	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*	x	x	x	x	x	x	x
			8	Pelatihan Pemandu Wisata	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*	x	x	x	x	x	x	x
			9	Standarisasi dan Sertifikasi Pelaku Wisata	KSPN Muaro Jambi					Kemenparekraf/Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)/ Pemerintah Daerah	*TBD*	x	x	x	x	x	x	x
Pengembangan jaringan dan simpul transportasi dalam mendukung aksesibilitas pariwisata (S2-T4)	01	Peningkatan konektivitas dan Simpul Transportasi	1	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Betung - Tempino - Jambi					PUPR	*BM*	x	x	x	x	x	x	x
			2	Preservasi Rutin Jalan Nasional	Ruas Jalan Nasional akses menuju KSPN Muaro Jambi					PUPR	*BM*			x	x	x	x	x

GRAND STRATEGY	PROGRAM		RENCANA AKSI		LOKASI SPESIFIK	Kebutuhan Indikasi		Biaya Anggara	Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	TAHUN						
						Volume	Unit					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			3	Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Kota Jambi					Kementerian Perhubungan/Angkasa Pura	TBD		x	x	x	x	x	x
			4	Penyediaan Moda Bus Pariwisata	KSPN Muaro Jambi					Kementerian Perhubungan/Pemerintah Daerah	TBD		x	x	x	x	x	x
Penyediaan amenitas dan pemenuhan infrastruktur dasar bagi kawasan pariwisata (S5-T1-T5)	01	Penyediaan Infrastruktur prasarana permukiman	1	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	Sungai Batanghari dan Kanal - Kanal Purba KSPN Muaro Jambi					PUPR dan Pemerintah Daerah	SDA		x					
			2	Pembangunan Prasarana Air Baku	KSPN Muaro Jambi					PUPR	SDA		x	x				
			3	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)	KSPN Muaro Jambi					PUPR/Pemerintah Daerah	PERUMAHAN		x	x	x	x	x	x
			4	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	KSPN Muaro Jambi					PUPR/Pemerintah Daerah/Balai Pelestarian Cagar Budaya	CK		x	x	x	x	x	x
			5	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	KSPN Muaro Jambi					PUPR/Pemerintah Daerah/Balai Pelestarian Cagar Budaya	CK			x	x			
			6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	KSPN Muaro Jambi					PUPR/Pemerintah Daerah	CK					x	x	x
	02	Penyediaan Amenitas dan Jaringan Infrastruktur Penunjang Lainnya	1	Penyediaan Hotel dan Homestay	KSPN Muaro Jambi					Pemerintah Daerah/Kemenparekraf	TBD		x	x	x	x	x	x
			2	Penyediaan Restoran atau Tempat Makan	KSPN Muaro Jambi					Pemerintah Daerah/Kemenparekraf	TBD		x	x	x	x	x	x
			3	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan listrik	KSPN Muaro Jambi					PLN/Kemenetrian ESDM	TBD		x	x	x	x	x	x

GRAND STRATEGY	PROGRAM		RENCANA AKSI		LOKASI SPESIFIK	Kebutuhan Indikasi		Biaya Anggara	Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	TAHUN						
						Volume	Unit					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			4	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan IT	KSPN Muaro Jambi					Pemerintah Daerah/KOMINFO	TBD		x	x	x	x	x	x

Sumber : Analisis BPIW, 2022

8.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jambi menguraikan program/kegiatan, cakupan kerja (antarkawasan prioritas dan lokasi spesifik), justifikasi/tujuan dan deskripsi kegiatan, kesiapan *readiness criteria*, keterangan tambahan hasil diskusi dengan unit organisasi teknis Kementerian PUPR, indikasi kebutuhan, sumber pendanaan, dan tahun rencana implementasi. Rencana aksi ini terbagi ke dalam 4 sektor yaitu : Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

8.2.1. Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air

Program/kegiatan dan lokasi kawasan prioritas (PKN Jambi dan KSPN Muaro Jambi) dan SPM dari Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sektor Sumber Daya Air di Provinsi Jambi antara lain:

1. Pembangunan Saluran Drainase Utama Perkotaan PKN Jambi
2. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir PKN Jambi;
3. Peningkatan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Revitalisasi Danau Teluk) PKN Jambi;
4. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir yang dibangun KSPN Muaro Jambi;
5. Pembangunan Prasarana Air Baku Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Kerinci;
8. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kota Sungai Penuh;
9. Pembangunan Bendungan Merangin
10. Pembangunan Prasarana Air Baku Kabupaten Tebo;
11. Pembangunan Prasarana Air Baku Kabupaten Muaro Jambi/KSPN Muaro Jambi;
12. Pembangunan Prasarana Air Baku Kabupaten Batanghari;
13. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Bungo;
14. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Batanghari;

15. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Tebo.;
16. Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Sungai Batanghari;

Tabel 8.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR Sektor SDA Provinsi Jambi

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
1	SDA	Pembangunan Saluran Drainase utama perkotaan - Sungai Asam	PKN Jambi	Sungai Asam	1. Tingginya potensi Sungai Batanghari dan belum optimalnya sistem drainase Kota Jambi merupakan salah satu penyebab banjir. Upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Jambi salah satunya adalah meningkatkan sistem drainase Kota Jambi yang menuju sungai dan anak sungai. Salah satunya Sungai Asam dan Sungai Kenali. 2. Dari total luasan genangan banjir 3.826 Ha, sudah ditangani 1.440 Ha dan tersisa genangan banjir di Perkotaan Jambi sebesar 2.386 Ha. Penuntasan genangan banjir di Perkotaan Jambi dilaksanakan melalui Program *Urban Flood Control System Improvement System* (UFCSI). Terdapat 3 kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain normalisasi Sistem Sungai Asam, Sungai Kenali (Kenali Besar dan Kenali Kecil), dan Pembangunan Kolam Retensi.	1. RC : DED disusun oleh Ditjen. Sumber Daya Air dan direviu oleh JICA. Sumber pembiayaan program ini dari LOAN; 2. Untuk Pekerjaan Sungai Asam, akan dilaksanakan lelang Tahun 2023, Pembangunan fisik 2024-2025;	1	Km	40.000.000	LOAN	2025	2025
2	SDA	Pembangunan Saluran Drainase utama perkotaan - Sungai Kenali	PKN Jambi	Sungai Kenali	1. Tingginya potensi Sungai Batanghari dan belum optimalnya sistem drainase Kota Jambi merupakan salah satu penyebab banjir. Upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Jambi salah satunya adalah meningkatkan sistem drainase Kota Jambi yang menuju sungai dan anak sungai. Salah satunya Sungai Asam dan Sungai Kenali. 2. Dari total luasan genangan banjir 3.826 Ha, sudah ditangani 1.440 Ha dan	1. RC : DED disusun oleh Ditjen. Sumber Daya Air dan direviu oleh JICA. Sumber pembiayaan program ini dari LOAN; 2. Untuk Pekerjaan Sungai Kenali akan dilaksanakan Pembangunan fisik 2025-2026;	3,4	Km	100.000.000	LOAN	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
					tersisa genangan banjir di Perkotaan Jambi sebesar 2.386 Ha. Penuntasan genangan banjir di Perkotaan Jambi dilaksanakan melalui Program *Urban Flood Control System Improvement System* (UFCSI). Terdapat 3 kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain normalisasi Sistem Sungai Asam, Sungai Kenali (Kenali Besar dan Kenali Kecil), dan Pembangunan Kolam Retensi.							
3	SDA	Pembangunan Saluran Drainase utama perkotaan - Kolam Retensi : Potensial Kolam Retensi : 1. Kolam Retensi Makalam: 2. Kolam Retensi Lorong Arwah: 3. Kolam Retensi Jalan A. Zaidi Saleh; 4. Kolam Retensi Jalan P. Hidayat.	PKN Jambi	Potensial Kolam Retensi : 1. Kolam Retensi Makalam: 2. Kolam Retensi Lorong Arwah: 3. Kolam Retensi Jalan A. Zaidi Saleh; 4. Kolam Retensi Jalan P. Hidayat.	1. Tingginya potensi Sungai Batanghari dan belum optimalnya sistem drainase Kota Jambi merupakan salah satu penyebab banjir. Upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Jambi salah satunya adalah meningkatkan sistem drainase Kota Jambi yang menuju sungai dan anak sungai. Salah satunya Sungai Asam dan Sungai Kenali. 2. Dari total luasan genangan banjir 3.826 Ha, sudah ditangani 1.440 Ha dan tersisa genangan banjir di Perkotaan Jambi sebesar 2.386 Ha. Penuntasan genangan banjir di Perkotaan Jambi dilaksanakan melalui Program *Urban Flood Control System Improvement System* (UFCSI). Terdapat 3 kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain normalisasi Sistem Sungai Asam, Sungai Kenali (Kenali Besar dan Kenali Kecil), dan Pembangunan Kolam Retensi. 3. Rencana Lokasi di daaerah Perumahan Kembar Lestari	1. RC : DED disusun oleh Ditjen. Sumber Daya Air dan direviu oleh JICA. Sumber pembiayaan program ini dari LOAN; 2. Kolam Retensi membutuhkan luas 9 ha di jalur Sungai Asam (2028), Pemerintah Daerah Kota Jambi perlu menyiapkan pembebasan lahan (RC) pada tahun 2026-2027; 3. Pembangunan fisik pada tahun 2028	1	Paket	56.400.000	LOAN	**2028**	**2029**

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
					dan Namura (Lokasi Perbatasan Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi).							
4	SDA	Peningkatan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya **(Revitalisasi Danau Teluk)**	PKN Jambi	Danau Teluk, Kota Jambi	1. Sesuai dengan Isu terkait tingginya kerawanan bencana banjir yang mengancam kawasan permukiman Kota Jambi. Diharapkan juga dapat menjadi pilihan destinasi wisata masyarakat Kota Jambi 2. Masih satu rangkaian sistem pengendalian banjir di Perkotaan Jambi	1.Tahun 2022 sudah disusun studi pengendalian banjir dan perlu disusun dokumen lingkungan/amdal; 2.Tahun 2024: Penyiapan Dokumen Lingkungan Tahun 2024 dan **Fisik Tahun 2025**	1	Unit	5.500.000	APBN/APBD/ Swasta	2025	2025
5	SDA	Pembangunan Bangunan Prasarana Air Baku KSPN Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi	1. Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk dan wisatawan sebesar 63 liter/detik tahun 2021, dilayani oleh IPA Candi Muaro Jambi dengan kapasitas terpasang dan produksi 5 liter/detik, sehingga mengalami defisit sebesar 58 liter/detik. 2. Capaian air minum di Muaro Jambi khususnya IPA Candi kapasitas 5 liter/detik terdapat idle capacity 1 liter/detik (Sumber air baku dari Sungai Batanghari yang dibangun melalui dana APBD); 3. belum adanya intake air baku yang dibangun BWS Sumatera VI. Intake air baku yang dibangun BWS Sumatera VI di Intake Sungai Duren lokasinya terlalu jauh dengan KSPN Muaro Jambi.	Perlu disusun DED oleh BWS Sumatera VI, lalu pembangunan fisik	1	Unit	10.000.000	APBN/APBD	2029	2029
6	SDA	Pembangunan Prasarana Air Baku Kabupaten Tebo	Non Kawasan	Kabupaten Tebo	1.Sesuai dengan isu pemenuhan air baku untuk kawasan Kabupaten Tebo 2.Terdapat GAP Pemenuhan kebutuhan air baku antara kapasitas terpasang dengan proyeksi kebutuhan air baku. .	**Pada Tahun 2026** menyusun SID Air Tanah untuk Air Baku dan pembangunan intake dan pipa transmisi.	1	Unit	15.000.000	APBN/APBD	2028	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
7	SDA	Pembangunan Bendungan Merangin, Kabupaten Merangin	Non Kawasan	Bendungan Merangin, Kab. Merangin	1. Sesuai dengan isu pemenuhan air baku untuk Perkotaan Bangko dan Geopark Merangin; 2. Pembangunan Bendungan Merangin yang berperan untuk memenuhi berbagai kebutuhan (multipurpose dam) antara lain, sebagai pengendali banjir dengan kapasitas tampungan banjir 53,4 juta m3/detik, sumber air irigasi untuk mengairi area persawahan seluas 12,000 ha, penyedia air baku untuk sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 2 m3/detik, pembangkit listrik tenaga air (hydroelectric power plant) dengan kapasitas 95-107,5 MW	1. Pada saat ini dalam tahapan Final Business Case (FBC). 2. Tahun 2020 sudah dilakukan Studi Larap oleh BWS Sumatera VI, 3. Pada tahun 2023 proses perizinan penggunaan lahan ke KLHK untuk izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Untuk lahan yang diluar kawasan lindung sudah keluar KKPR dari Kementerian ATR/BPN, selanjut baru ajukan dokumen pengajuan lahan lalu penetapan lokasi (prediksi tahun 2024). 4. Tahap Penyiapan KPBU, estimasi Tahap Transaksi KPBU: Q2 2025, estimasi Konstruksi: akhir 2025	1	Unit	3.000.000.000	KPBU	2025	2029
8	SDA	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Batang Merao, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci	Non Kawasan	Sungai Batang Merao,	1. Sesuai dengan Isu terkait tingginya kerawanan bencana banjir yang mengancam kawasan permukiman di Sungai Batang Merao. Sungai Batang Merao berada di 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Hulu Sungai Batang Merao berada di dataran tinggi Gunung Kerinci melintasi Kota Sungai Penuh dan bermuara di Danau Kerinci. 2. Terdapat kawasan rawan banjir seluas 700 ha di Kota Sungai Penuh, jika tidak dilakukan penanganan hingga tahun 2029 maka akan bertambah seluas 0,15 Ha di Kota Sungai Penuh. Lokasi - lokasi terjadinya genangan banjir di Kecamatan Pasir Bukit, Koto Baru, Hamparan Rawang, dan Tanah Kampung.	**Tahun 2017** BWS Sumatera VI telah menyusun SID Pengendalian Banjir di Batang Merao dengan rekomendasi membangun kolam retensi, namun pada waktu pelaksanaan fisik terkendala pengadaan lahan sehingga belum terlaksana hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan **reviu SID dan Studi kembali.** **Tahun 2025** Reviu SID/Studi Pengendalian Banjir di Sungai Batang Merao. **Tahun 2026-2027** Pembangunan Fisik	30	Km	**300.000.000**	APBN/APBD/ Swasta	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
					berdampak pada permukiman dan pertanian. 3. Pada tahun 2023 sudah terdapat kegiatan Revitalisasi Danau Kerinci menjadi salah satu cara untuk mengurangi genangan banjir di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan mengurangi tingginya sedimentasi. Kegiatan ini dilanjutkan pada tahun 2025.							
9	SDA	Revitaliasi Danau Kerinci (Lanjutan)	Non Kawasan	Danau Kerinci Kabupaten Kerinci	1.Sesuai dengan Isu terkait tingginya kerawanan bencana banjir yang mengancam kawasan permukiman di Sungai Batang Merao. Sungai Batang Merao berada di 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Hulu Sungai Batang Merao berada di dataran tinggi Gunung Kerinci melintasi Kota Sungai Penuh dan bermuara di Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. 2.Terdapat kawasan rawan banjir seluas 2.727 ha di Kab. Kerinci, jika tidak dilakukan penanganan hingga tahun 2029 maka akan bertambah seluas 0,20 Ha di Kab. Kerinci. Lokasi genangan banjir di Kabupaten Kerinci di beberapa kecamatan antara lain Air hangat, Depati VII (Desa Kotomajidin, Siulak (Desa Telago Biru). 3. Pada tahun 2023 sudah terdapat kegiatan Revitalisasi Danau Kerinci menjadi salah satu cara untuk mengurangi genangan banjir di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan pembangunan Inlet Danau	**Tahun 2026** : Revitalisasi Danau Kerinci (lanjutan 2022)	1	Unit	26.000.000	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
					Kerinci dengan normalisasi terhadap sedimentasi. Kegiatan ini dilanjutkan pada tahun 2025.							
10	SDA	Pembangunan Prasarana Air Baku : Embung di Stadion Koni, Kabupaten Batanghari	Non Kawasan	Embung di Stadion Koni, Kabupaten Batanghari	1.Sesuai dengan isu pemenuhan air baku untuk kawasan Kabupaten Batanghari; 2.Terdapat GAP Pemenuhan kebutuhan air baku antara kapasitas terpasang dengan proyeksi kebutuhan air baku sebesar 0,2341 liter/detik.	1. Akan membuat embung lokasi di Stadion koni dapat dimanfaatkan untuk air baku. Studi tahun 2023 oleh PDAM lalu tahun 2025 reviu oleh BWS pelaksanaan fisik 2027; 2. Pembangunan Intake di sungai rengas fisik waktu menyesuaikan dengan rencana pembangunan IPA Sungai Rengas. Terkait IPA pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Batanghari menyusun Dokumen RISPAM.	1	Unit	40.000.000	APBN/APBD/ Swasta	2026	2026
11	SDA	Pembangunan Prasarana Air Baku : Intake Sungai Rengas	Non Kawasan	Intake Sungai Rengas	1.Sesuai dengan isu pemenuhan air baku untuk kawasan Kabupaten Batanghari; 2.Terdapat GAP Pemenuhan kebutuhan air baku antara kapasitas terpasang dengan proyeksi kebutuhan air baku sebesar 0,2341 liter/detik.	1. Akan membuat embung lokasi di Stadion koni dapat dimanfaatkan untuk air baku. Studi tahun 2023 oleh PDAM lalu tahun 2025 reviu oleh BWS pelaksanaan fisik 2027; 2. Pembangunan Intake di sungai rengas fisik waktu menyesuaikan dengan rencana pembangunan IPA Sungai Rengas. **Terkait IPA pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Batanghari menyusun Dokumen RISPAM.**	1	Unit	11.000.000	APBN/APBD	2027	2027
12	SDA	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Batanghari	Non Kawasan	Kabupaten Batanghari	1.Sesuai dengan Isu terkait tingginya kerawanan bencana banjir yang mengancam kawasan permukiman 2.Terdapat kawasan rawan banjir seluas 78.948 Ha di Kab. Batanghari, jika tidak dilakukan penanganan hingga tahun 2029 maka akan bertambah seluas 2,46 Ha di Kabupaten Batanghari	1. Tahun 2021 ada studi pengendalian banjir di Desa Terusan direncakan fisik 2025 (di tebing sungai). tidak perlu pembebasan lahan. Usulan bupati terkait perlindungan tebing di jembatan intake 2. Tahun 2025 : akan disusun SID untuk pengendalian banjir desa desa lainnya. -Pengendali Banjir Sungai Batanghari Desa Terusan,	1	Paket	240.000.000	APBN/APBD	2026	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
						Kab Batang Hari 2025, 35 Miliar, 26 Km Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Batanghari Desa Terusan Kab. Batanghari (2025; 25 M; 0,3 Km) -Pembangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Batanghari (SYC; 240 M; 2026-2028)						
13	SDA	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Bungo	Non Kawasan	Kabupaten Bungo	1.Sesuai dengan Isu terkait tingginya kerawanan bencana banjir yang mengancam kawasan permukiman. BWS Sumatera VI melakukan studi pengendalian banjir secara komprehensif, selama ini baru penanganan untuk Spot - spot saja; 2.Pada Kabupaten Bungo terdapat kawasan rawan banjir seluas 36.308 Ha, termasuk PKW Muara Bungo, jika tidak dilakukan penanganan hingga tahun 2029 maka akan bertambah seluas 1,20 Ha 3. Berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bungo, lokasi genangan banjir di 3 Kecamatan : a. Kecamatan Pasar Muaro Bungo : Kelurahan Kaya Setia, Tanjung Gedang, dan Batang Bungo: b. Kecamatan Bathin II : Kelurahan Bungo Taman Agung dan Mangis c. Kecamatan Bungo Dani : Kelurahan Sungai Pinag dan Desa Sungai Arang 4. Tahun 2021-2022 sudah pembangunan turap Kecamatan Pasar Muara Bungo (Sungai Batang bungo- Ordo II), Wilayah lainnya Kota Muaro Bungo :	Tahun 2025 : Disusun DED Tahun 2026 : Pembangunan Fisik	28	Km	80.000.000	APBN/APBD	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
					Dusun Bhatin I (Batang Tebo -Orde II) diajukan DED ditahun 2026.							
14	SDA	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir - Pengaman Pantai Timur	Non Kawasan	Kecamatan Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur	1.Sesuai dengan Isu terkait tingginya kerawanan bencana banjir yang mengancam kawasan permukiman 2.Pada kabupaten ini terdapat kawasan rawan banjir seluas 53.605 Ha termasuk PKW Muara Sabak dan kawasan pesisir, jika tidak dilakukan penanganan hingga tahun 2029 maka akan bertambah seluas 1,71 Ha 3. Semua wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah pesisir dengan kondisi pasang surut dan rawa, isu sedimetasi tinggi. Banjir di daerah pesisir karena sedimentasi dan abrasi (di Kecamatan Mendahara dan Saadu); 4. Sudah ada penanganan Kementerian PUPR di desa air hitam, Kecamatan Sadu melalui bangunan pemecah ombak Tahun 2019 di areal pemukiman dan penananam mangrove 50 ha. 5. Untuk pengendalian banjir di Sungai belum adanya perencanaan.	1. Tahun 2025 : Penyiapan SID Prasarana Pengaman pantai timur (Sadu dan Sei Cemara 2. Tahun 2026 : Pembangunan Fisik	0,2	Km	50.000.000	APBN/APBD	2027	2028
15	SDA	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir : Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur	Non Kawasan	Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur	1.Sesuai dengan Isu terkait tingginya kerawanan bencana banjir yang mengancam kawasan permukiman 2.Pada kabupaten ini terdapat kawasan rawan banjir seluas 53.605 Ha termasuk PKW Muara Sabak dan kawasan pesisir, jika tidak dilakukan penanganan hingga tahun 2029 maka akan bertambah seluas 1,71	Untuk Pengendalian Banjir pada sungai belum ada perencanaan, sehingga perlu disusun DED pada tahun 2025 dan pembangunan fisik 2027.	1	Unit	55.000.000	APBN/APBD	2029	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
					Ha 3. Perlu adanya penanganan abrasi anak sungai WS. Batanghari karena menjadi penyebab genangan banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinding penahan eksisting tidak mampu menahan air pasang sungai. Lokasi di Kecamatan Rantau Rasau dan Berbak 4. Untuk pengendalian banjir di Sungai belum adanya perencanaan.							
16	SDA	Pembangunan Prasarana Air Baku Kecamatan Sadu	Non Kawasan	Kecamatan Sadu	1. Merupakan daerah tertinggal dan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi dengan tingkat kemiskinan tertingg yaitu 10,91i; 2. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air baku tahun 2029 untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur 0,1697 m3/detik, maka diperlukan pemenuhan air baku. 3. Kecamatan Sadu Belum memiliki Sumber Air Baku dan IPA supply air minum bagi masyarakatnya.	1. SID sudah disusun Tahun 2021 untuk Pembangunan Teluk Sakau. Teluk Sakau dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Diperkirakan kapasitas air baku 170 liter/detik; 2. DED dan Dokumen Lingkungan Sebelum : 2025 3. Pembangunan Fisik Tahun 2026	1	Unit	20.000.000	APBN/APBD	2029	2029
17	SDA	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir WS Batanghari di Kabupaten Sarolangun	Non Kawasan	Kabupaten Sarolangun	1. Sesuai dengan Isu terkait tingginya kerawanan bencana banjir yang mengancam kawasan permukiman akibat meluapnya Batang Asai, Batang Tembesi, dan Limun 2. Potensi Menengah Genangan Banjir di Kabupaten Sarolangun 415.859,19; 3. Kabupaten Sarolangun dilalui oleh 3 sungai besar yaitu Sungai Batang Tembesi, Batang Asai, dan Limun. 4. BWS Sumatera VI telah melakukan survei untuk pengendalian banjir salah	**1. Tahun 2023 :** Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyusun DED untuk penanganan genangan banjir di Desa Baru, Kecamatan Sarolangun **2. Tahun 2026-2027** akan disusun SID oleh BWS Sumatera VI. Lokasi prioritas penanganan berdasarkan hasil SID. 3. **Pembangunan fisik direncanakan tahun 2027-2028**	1	Km	75.000.000	APBN	2028	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selasai
					satunya di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun; 5. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023, RC DED untuk Desa Baru Kecamatan Sarolangun (Sungai Batang Tembesi). sudah dianggarkan tahun 2023 dan selesai tahun ini; 6.Terdapat usulan Bupati Sarolangun untuk penanganan banjir di Kecamatan Pelawan, Mandiangin, dan Kecamatan Sarolangun. Namun belum terdapat studi pengendalian banjir.							
18	SDA	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	Kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin prasarana dan sarana SDA		1	Provinsi	1.634.088.170	APBN	**2025**	**2029**

Sumber : Analisis BPIW, 2022

8.2.2. Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sektor Jalan dan Jembatan

Program/kegiatan dan lokasi kawasan prioritas (PKN Jambi dan KSPN Muaro Jambi) dan SPM dari Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sektor Jalan dan Jembatan di Provinsi Jambi antara lain:

1. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Jambi PKN Jambi
2. Pelebaran Menambah Lajur Jln. Lintas Sumatera II Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts Kota Muaro Bungo);
3. Pelebaran Menambah Lajur Jln. Pattimura Muaro Bungo (Bts. Kota Muaro Bungo- Sp. Jambi;
4. Pelebaran Menambah Lajur Jalan Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel;
5. Pelebaran Menambah Lajur Jalan Bts. Kota Muara Bulian-Muara Tembesi
6. Pelebaran Menambah Lajur Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian);
7. Pelebaran Menambah Lajur Jalan Muara Tembesi - Bts Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun;
8. Pelebaran Menambah Lajur Jl. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Musem Perjuangan-Sp. Pulai);
9. Pelebaran Menambah Lajur Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W;
10. Pelebaran Menambah Lajur Siulak Deras/Letter W - Bts. Sumbar;
11. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal;
12. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Ujung Jabung;
13. Pembangunan Jembatan Sei Rambut;
14. Pembangunan Jalan Tol : Jambi – Rengat;
15. Pembangunan Jalan Tol : Betung - Tempino – Jambi (PKN Jambi dan KSPN Muaro Jambi).

Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur PUPR Sektor Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
1	BM	Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Jambi	PKN Jambi	Kota Jambi	1. **Pada tahun 2021 Nilai VCR 1,26 dengan Kelas LOS F** di Ruas Jalan Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang – Bts. Kota Jambi/Kab.Muaro Jambi); 2. **Pada Tahun 2021 Nilai VCR 1,07 dengan kelas LOS F** Ruas Jalan Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp.Museum Perjuangan - Sp. Pulai) 3.Kebutuhan peningkatan konektivitas dalam mendukung mobilitas aktivitas masyara kat; 4. Sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020 - 2040	Tahun 2025 penyusunan dan penyiapan RC : pemerintah daerah terkait kesiapan lahan.	8,57	Km	75.568.692	APBN/APBD	2028	2029
2	BM	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Jambi dan Muaro Jambi	PKN Jambi	Kota Jambi	Pelebaran Jalan Menuju Standar/Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang untuk mengurai kemacetan pada : 1. Ruas Jalan Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat Pada Tahun 2021 Nilai VCR 1,53 dengan kelas LOS F di 2. Ruas Jalan Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/ Sp Rimbo Pada Tahun 2021 Nilai VCR 1,53 dengan kelas LOS F 3. Ruas Jalan Sp. Pal	Agar disiapkan RC. Penyiapan RC oleh pemerintah daerah terkait kesiapan lahan.	20	km	176.356.340	APBN/APBD/Swasta	2029	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
					Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado-Gado) Pada Tahun 2021 nilai VCR 0,98 dengan Kelas LOS E							
3	BM	Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang - Persimpangan Jalan Jend. Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung – Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher)	PKN Jambi	Persimpangan Jalan Jend. Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung – Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher);	Pelebaran Jalan Menuju Standar/Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang untuk mengurai kemacetan pada : 1. Ruas Jalan Jenderal Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung - Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher). Pada tahun 2021 ruas jalan tersebut, nilai VCR sudah mencapai 0,85 dengan Kelas LOS D; 2. Kebutuhan peningkatan konektivitas dalam mendukung mobilitas aktivitas masyarakat 3. Merupakan usulan Pemerintah Provinsi Jambi. Pembangunan ini untuk mengurai kemacetan di dalam Kota Jambi	Penyiapan RC oleh pemerintah daerah terkait kesiapan lahan	1	Unit	40.000.000	APBN/APBD/Swasta	2025	2029
4	BM	Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang : Persimpangan Jalan Sp. Pal Sepuluh dengan Jalan Surya Darma.	PKN Jambi	Persimpangan Jalan Sp. Pal Sepuluh dengan Jalan Surya Darma.	Pelebaran Jalan Menuju Standar/Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang untuk mengatasi nilai VCR dan LOS di ruas Jalan 1. Ruas Jalan Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado - Gado) Pada tahun 2021 nilai VCR	Penyiapan RC oleh pemerintah daerah terkait kesiapan lahan	1	Unit	40.000.000	APBN/APBD/Swasta	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
					sudah mencapai 0,98 dengan kelas LOS E 2. Ruas Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi) pada tahun 2021 NIlai VCR 0,96 dengan Kelas LOS E; 3. Ruas JJln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah pada tahun 2021 NIlai VCR 0,85 dengan Kelas LOS D; 4. Ruas Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat - Sp. Kota Baru) NIlai VCR 0,85 dengan Kelas LOS D; 5. Kebutuhan peningkatan konektivitas dalam mendukung aktivitas masyarakat 6. Merupakan usulan Pemerintah Provinsi Jambi							
5	BM	Pembangunan Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi	PKN Jambi dan KSPN Muaro Jambi	Betung - Tempino - Jambi	1.Perlunya pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi utk meningkatkan distribusi barang dan pergerakan orang serta tumbuhnya ekonomi wilayah. Pada saat ini belum ada konstruksi tol di Jambi. Adapun ruas yang rencananya akan dibangun yaitu Tempino - Jambi dan Jambi-Rengat; 2.Kebutuhan konektivitas antar kawasan dalam	a. Tahun 2022 dalam proses pengadaan lahan, pada tahun 2023 akan dimulai pembangunan fisik; b. Untuk seksi dukungan konstruksi (seksi Bayung Lencir - Tempino) sedang dalam proses konstruksi dan target selesai pada Q2 2024	32,9	Km	7.781.790.000,00	APBN/KPBU	2024	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
					mendukung hilirisasi komoditas dan mendukung pengembangan kawasan prioritas, peningkatan konektivitas Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.							
6	BM	Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar: Kota Sungai Penuh : Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W	Non Kawasan	**Kota Sungai Penuh :** Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W	Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W nilai LOS D pada tahun 2028. Ruas jalan tersebut memiliki panjang jalan 21,70 Km dan lebar jalan 6,66 meter	Agar disiapkan RC. Penyiapan RC oleh pemerintah daerah terkait kesiapan lahan.	1	Paket	191.346.629	APBN	2028	2028
7	BM	Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar: Kabupaten Batanghari : Jalan Bts. Kota Muara Bulian-Muara Tembesi	Non Kawasan	**Kabupaten Batanghari :** Jalan Bts. Kota Muara Bulian-Muara Tembesi	Jalan Bts. Kota Muara Bulian-Muara Tembesi nilai LOS D Tahun 2022. Panjang Jalan 11,10 Km dan lebar jalan 6,35 meter. Ruas Jalan ini merupakan jalur distribusi batubara. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menyiapkan distribusi batubara	Agar disiapkan RC. Penyiapan RC oleh pemerintah daerah terkait kesiapan lahan.	1	Paket	98.318.660	APBN/APBD/Swasta	2026	2027
8	BM	Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar: Kabupaten Batanghari : Jalan Muara Tembesi - Bts Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun	Non Kawasan	**Kabupaten Batanghari :** Jalan Muara Tembesi - Bts Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun	Jalan Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun nilai LOS D tahun 2025. Panjang Jalan 38,98 Km dan lebar jalan 6,07 meter.Ruas Jalan ini merupakan jalur distribusi batubara. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah daerah dan pelaku usaha	Agar disiapkan RC. Penyiapan RC oleh pemerintah daerah terkait kesiapan lahan.	1	Paket	343.718.507	APBN/APBD/Swasta	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
					untuk menyiapkan distribusi batubara							
9	BM	Pembangunan Jalan Lingkar di Kabupaten Bungo	Non Kawasan	Menghubungkan Ruas Jalan Provinsi : Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Kabupaten : Jalan R.M. Thaher -Perumnas-Simpang Bandara	Jalan lingkar Kabupaten Bungo diharapkan dapat mengurai volume lalu lintas di ruas jalan : 1. Jln. Lintas Sumatera II Muaro Bungo (Sp. Jambi - Bts Kota Muaro Bungo). Pada tahun 2021, nilai VCR 0,82 dengan Nilai LOS E tahun Panjang jalan 4,13 Km dengan lebar jalan 7,41 meter; 2. Jln. Pattimura Muaro Bungo (Bts. Kota Muaro Bungo- Sp. Jambi). Adanya peningkatan dengan Nilai LOS D tahun 2025. Panjang Jalan 3,03 Km dan lebar jalan 5,63 meter.	Pemerintah Provinsi Jambi : Jalan lingkar Kabupaten Bungo sepanjang 22 km, sudah ada trase dan perkerasan jalan sepanjang 18,6 km dan tersisa 3,4 km.	22	Km	193.991.974	APBN/APBD	2026	2029
10	BM	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal	Non Kawasan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1. Merupakan jalan akses menuju Pelabuhan Roro Kuala Tungkal (Pelabuhan Pengumpan Regional) barang dan jasa menuju Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, sesuai dengan Rencana Umum Jalan Nasional Tahun 2020 - 2040; 2.Jalan akses menuju ke Pelabuhan Roro Kuala Tungkal terdapat 2 ruas jalan : a. Jalan teluk sialang 13,95 km kondisi	a, Sudah dilakukan pembebasan lahan dan sudah ada trase jalan. Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal merupakan program DAK Lanjutan; b. Pembangunan MYC, selesai di 2025 (2024 sedang diusulkan dengan Sisa Lelang, lahannya sudah siap)	21,08	Km	185.879.582	APBN/APBD/DAK	2024	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
					kemantapan 83,3% sudah tertangani 11,61 km (Sisa 2,34 km kemantapan 16%) b. Jalan Simpang IV Sungai Saren : 7,1 Km kemantapan 28,05% (masih perkerasan tanah) yang sudah tertangani 2 km							
11	BM	Pembangunan Jalan Tol Jambi - Rengat	Non Kawasan	Jambi - Rengat	1.Perlunya pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi utk meningkatkan distribusi barang dan pergerakan orang serta tumbuhnya ekonomi wilayah. Pada saat ini belum ada konstruksi tol di Jambi. Adapun ruas yang rencananya akan dibangun yaitu Tempino - Jambi dan Jambi-Rengat; 2.Kebutuhan konektivitas antar kawasan dalam mendukung hilirisasi komoditas dan mendukung pengembangan kawasan prioritas, peningkatan konektivitas Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.	Tahun 2022 dalam proses pengadaan lahan. Belum ada pembangunan fisik, pada tahun 2023 untuk ruas Betung - Tempino - Jambi	116,73	Km	35.000.000.000	APBN/KPBU	2024	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
12	BM	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Non Kawasan	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.Pembangunan Jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung merupakan kebutuhan untuk peningkatan konektivitas dalam mendukung distribusi komoditas dan aktivitas masyarakat. Pembangunan ini juga ditujukan untuk membuka keterisolasian daerah 2 kecamatan yaitu Sadu dan Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2.Bedasarkan surat Dirjen. Bina Marga kepada Menteri PUPR diperoleh informasi: a.Trase terpilih sebagai Jalan Akses Menuju Pelabuhan Ujung Jabung yaitu : Jambi - Muara Sabak - Desa Simpang - Ujung Jabung dengan total panjang 157,62 Km. b.Estimasi biaya awal yang dibutuhkan agar jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung dapat fungsional termasuk dengan Jembatan Sei Rambut adalah Rp. 1,8 Triliun.	1. FS disusun oleh pemda tahun 2019; 2. DED disusun oleh pemda pada tahun 2013 (perlu dilakukan reviu desain karena desain awal belum memperhitungkan kebutuhan jalan terdekat). Desain yang disusun oleh pemda, memperkirakan kebutuhan panjang bentang utama adalah 625 meter dengan biaya konstruksi Rp. 283 miliar. 3. Ditjen. Bina Marga melalui Direktorat Pembangunan Jembatan (ESP PPC for Bridges - PAckage 5) telah melakukan reviu desain terhadap desain pemda dengan perkiraan panjang jembatan menjadi 1.200 meter termasuk bentang pendekat dan oprit dengan estimasi biaya awal Rp. 750 miliar. 4. Jembatan Sei Rambut dalam proses finalisasi kesiapan dokumen RC (DED, RPB, Dokumen Lingkungan,	99,5	Km	1.050.000.000	APBN/APBD/ KPBU	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
						Dokumen Pembebasan Lahan, Dokumen Tender, dan Proses izin kontrak tahun jamak MYC). berdasarkan Rencum Jaringan Jalan Nasional Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Ujung Jabung pada tahun 2025-2029; 5. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melakukan pembebasan lahan dan akan dituntaskan pada tahun 2023 sepanjang 42 Km (Desa Simpang - Ujung Jabung)						
13	BM	Pembangunan Jembatan Sei Rambut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	**Non Kawasan**	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.Pembangunan Jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung merupakan kebutuhan untuk peningkatan konektivitas dalam mendukung distribusi komoditas dan aktivitas masyarakat. Pembangunan ini juga ditujukan untuk membuka keterisolasian daerah 2 kecamatan yaitu Sadu dan Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2.Bedasarkan surat Dirjen. Bina Marga kepada Menteri PUPR diperoleh informasi: a.Trase terpilih sebagai	1. FS disusun oleh pemda tahun 2019; 2. DED disusun oleh pemda pada tahun 2013 (perlu dilakukan reviu desain karena desain awal belum memperhitungkan kebutuhan jalan terdekat). Desain yang disusun oleh pemda, memperkirakan kebutuhan panjang bentang utama adalah 625 meter dengan biaya konstruksi Rp. 283 miliar. 3. Ditjen. Bina Marga melalui	1.200	Meter	750.000.000	APBN/APBD/ KPBU	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
					Jalan Akses Menuju Pelabuhan Ujung Jabung yaitu : Jambi - Muara Sabak - Desa Simpang - Ujung Jabung dengan total panjang 157,62 Km. b.Estimasi biaya awal yang dibutuhkan agar jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung dapat fungsional termasuk dengan Jembatan Sei Rambut adalah Rp. 1,8 Triliun.	Direktorat Pembangunan Jembatan (ESP PPC for Bridges - PAckage 5) telah melakukan reviu desain terhadap desain pemda dengan perkiraan panjang jembatan menjadi 1.200 meter termasuk bentang pendekat dan oprit dengan estimasi biaya awal Rp. 750 miliar. 4. Jembatan Sei Rambut dalam proses finalisasi kesiapan dokumen RC (DED, RPB, Dokumen Lingkungan, Dokumen Pembebasan Lahan, Dokumen Tender, dan Proses izin kontrak tahun jamak MYC). berdasarkan Rencum Jaringan Jalan Nasional Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Ujung Jabung pada tahun 2025-2029; 5. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melakukan pembebasan lahan dan akan dituntaskan pada tahun 2023 sepanjang 42 Km						

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi Dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
						(Desa Simpang - Ujung Jabung)						
14	BM	Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Kabupaten Sarolangun :Jalan Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel	Non Kawasan	**Kabupaten Sarolangun :** Jalan Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel	1. Jalan Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel panjang jalan 30,34 km dan lebar jalan 6,65 meter memiliki nilai LOS D tahun 2028. Ruas Jalan ini merupakan jakses menuju Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. 2. Tonase Batubara yang melewati jalan ini tidak terlalu besar jika dibandingkan ruas jalan ke Kota Jambi maupun ke Dhamasraya (Provinsi Sumatera Barat).	Agar disiapkan RC. Penyiapan RC oleh pemerintah daerah terkait kesiapan lahan.	1	Paket	95.000.000	APBN/APBD/Swasta	2028	2028
15	BM	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Preservasi Jembatan/Preservasi Rutin Jalan Nasional Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			1	Paket	1.405.000.000	APBN	2025	2029

Sumber : Analisis BPIW, 2023

8.2.3. Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sektor Permukiman

Program/kegiatan dan lokasi kawasan prioritas (PKN Jambi dan KSPN Muaro Jambi) dan SPM dari Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sektor Permukiman di Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2029 antara lain:

1. Peremajaan Permukiman Kumuh di PKN Jambi;
2. Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dalam mendukung KSPN Muaro Jambi;
3. Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata KSPN Muaro Jambi;
4. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota – Kota Sungai Penuh;
5. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota – Kabupaten Kerinci;
6. Peremajaan Permukiman Kumuh Kota Sungai Penuh;
7. Peremajaan Permukiman Kumuh di Kabupaten Merangin;
8. Peremajaan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bungo;
9. Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota Kabupaten Merangin

Tabel 8.5 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR Sektor Permukiman Provinsi Jambi

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
1	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kelurahan Legok, Kota Jambi	PKN Jambi	Kelurahan Legok, Kota Jambi	Penanganan sisa kawasan kumuh sebesar 95,02 di Kelurahan Legok;	Perlu penyiapan RC dari Pemerintah Daerah: Dokumen RP2KPKPK, SK kumuh, DED, surat minat dan terima hibah RC : Lahan sudah ada, Surat hibah dari masyarakat erkena dampak sudah ada, DED sudah disusun, Dokumen RP2KPKPK sudah disusun, SK Kumuh masih menggunakan 2016. Tahun 2023 : Reviu DED oleh BPPW dan akan dilakukan konsep desain pengembangan ekonomu di kawasan kumuh tersebut. Perlu adanya laporan tertulis terkait studi larap untuk pembebasan lahan masyarakat. Luasan kumuh perlu disesuaikan dengan SK yang baru.	17	Ha	25.500.000	APBN/ APBD/ Swasta	2026	
2	CK	Pembangunan SPAM KSPN Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi	1. Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk dan wisatawan sebesar 63 liter/detik tahun 2021, dilayani oleh IPA Candi Muaro Jambi dengan kapasitas terpasang dan produksi 5 liter/detik, sehingga mengalami defisit sebesar 58 liter/detik. 2. Capaian air minum di Muaro Jambi khususnya IPA Candi kapasitas 5 liter/detik terdapat idle capacity 1 liter/detik (Sumber air baku dari Sungai	Perlu adanya kelengkapan RC dan dokumen perencanaan RISPAM '- Kelembagaan kurang sehat - Belum ada rencana pengembangan untuk KSPN (di RISPAM) - Idle 111 l/det - Diperlukan penyerapan kapasitas terpasang - Perlu komitmen Pemda untuk SR dan RC	10	liter/detik	15.000.000	APBN	2026	2029

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
					Batanghari yang dibangun melalui dana APBD); 3. Intake air baku yang dibangun BWS Sumatera VI di Intake Sungai Duren lokasinya terlalu jauh dengan KSPN Muaro Jambi.							
3	CK	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata KSPN Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi	1. Sebagai kawasan prioritas direktif presiden RI dan Menteri PUPR serta kawasan cagar budaya, diperlukan penataan kawasan yang komprehensif. Penataan kawasan perlu adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, Balai Pelaksana Cagar Budaya yang menyusun masterplan pengembangan KSPN Muaro Jambi 2. Penataan Kawasan KSPN Muaro Jambi pada lokasi Zona Pengembangan dan Zona Penyangga berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 135 Tahun 2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat	1.Penyiapan RC oleh pemerintah daerah seperti kesiapan lahan, kesanggupan menerima hibah, dan Kesiapan Institusi Pengelola dan Anggaran Pengelolaan 2.Masterplan KSPN Muaro Jambi disusun oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, Kemendikbud. 3. RTBL Telah disusun BPPW Jambi pada tahun 2016 namun sudah tidak berlaku. BPPW siap mendukung penataan kawasan KSPN Muaro Jambi menyesuaikan dengan Masterplan KSPN Muaro Jambi	1	Kawasan	120.000.000	APBN/ APBD	2025	2029

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
					Nasional Muarajambi.							
4	CK	Pembangunan SPAM IPA Wirotho Agung, Kabupaten Tebo	Non Kawasan	IPA Wirotho Agung, Kabupaten Tebo	1. Berdasarkan analisis kesenjangan air minum di Kabupaten Tebo terdapat defisit air minum hingga tahun 2029 sebesar 488 liter/detik sehingga perlu adanya pembangunan SPAM atau peningkatan kapasitas air minum. 2. Berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangnas Tahun 2023, terdapat kesepakatan pembangunan Intake Air Baku Wirotho Agung dan Pembangunan IPA Wirotho Agung	Dokumen Rispam sudah siap dengan usulan Kapasitas 50 liter/detik namun berdasarkan hasil reviu BPPW Jambi kebutuhan air minum 30 liter/detik, sehingga perlu adanya perbaikan dokumen rispam. Revisi Dokumen Rispam oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dilakukan pada tahun 2024.	50	liter/detik	16.000.000	APBN	2025	2025
5	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Merangin	Non Kawasan	Kab. Merangin	Penanganan sisa kawasan kumuh di Kab. Merangin 279,76 Ha: a. Pematang Kandis 186,08 Ha; b. Pasar Atas Bangko : 93,68 Ha.	Perlu penyiapan RC dari Pemerintah Daerah: Dokumen RP2KPKPK disusun tahun 2023, SK kumuh, DED, surat minat dan terima hibah	1	Kawasan	25.000.000	APBN	2029	2029
6	CK	Pembangunan TPST: Kota Sungai Penuh	Non Kawasan	Kota Sungai Penuh	1. Kota Sungai Penuh belum memiliki Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) 2. Rencana lokasi pembangunan TPA di Desa Sungai Ning, Kecamatan	1. Perlu Penyiapan RC oleh pemerintah daerah. Readiness criteria tersebut antara lain adalah adanya: a) Surat Peminatan, b) Kesiapan Lahan, c) Kesiapan Rencana Induk dan Detail, d) Kesiapan Institusi Pengelola dan	1	Unit	25.000.000	APBN/ APBD	2026	2027

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
					Sungai Bungkal. Luas lahan 11 ha dan baru dimiliki 5 ha (kebutuhan 5 ha). Rencananya akan di FS tahun 2024. .	Anggaran Pengelolaan, serta e) Kesanggupan Menerima Hibah. 2. Penyusunan FS akan disusun pemerintah daerah pada tahun 2024.						
7	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kota Sungai Penuh	Non Kawasan	Kota Sungai Penuh	Penanganan sisa kawasan kumuh di Kota Sungai Penuh 198,994 Ha: a. Pusat Kota (Kecamatan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, dan Sungai Bungkal) 48,514 Ha; b. Permukiman Pinggir Sungai Batang Merao (Kecataman Tanah Kampung dan Hamparan Rawang) :80,9 Ha; c. Pusat Permukiman Pinggir Sungai Batang Sangir (Kecamatan Koto Baru) : 69,58 Ha.	Perlu penyiapan RC dari Pemerintah Daerah : Dokumen RP2KPKPK sudah disusun Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tahun 2023, SK kumuh dalam proses updating pada Tahun 2023, DED, surat minat dan terima hibah	1	Kawasan	18.000.000	APBN	2026	2029
8	CK	Pembangunan SPAM Rawang, Kota Sungai Penuh	Non Kawasan	Kota Sungai Penuh	1. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan infrastruktur untuk sektor air minum terdapat defisit tahun 2029 sebesar 93,3 liter/detik sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas atau pembangunan IPA dalam pemenuhan air minum; 2. Penyediaan air minum di Kota	Dokumen Rispam sudah disiap dan sudah diserahkan ke BPPW Jambi dan akan proses reviu. Pembangunan Fisik direncanakan : 2025 - Kelembagaan sehat - RC sudah tersedia - Dit AM mendapatkan penugasan penanganan bencana, syarat penerbitan Surat Keadaan Tanggap Bencana dari Walikota, juga dengan usulan RC	50	liter/detik	24.000.000	APBN	2025	2025

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
					Sungai Penuh dilaksanakan oleh PDAM Tirta Khayangan dengan Status PDAM Sehat. Air Minum disupply melalui 4 IPA antara lain Unit Tanah Kampung, Unit Sungai Penuh, Unit Kumun Debai, dan Unit Rawang dengan total kapasitas terpasang 170 liter/detik hingga Tahun 2023 kapasitas tersebut sudah terpakai semua. oleh karena itu perlu adanya pembangunan IPA atau peningkatan kapasitas IPA di Kota Sungai Penuh. 3. Tingkat kehilangan air rata - rata 24%.							
9	CK	Pembangunan TPST Kabupaten Kerinci	Non Kawasan	Kabupaten Kerinci	1. Kabupaten Kerinci belum memiliki Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) 2. Rencana ada 2 lokasi : TPA Sembulun Pantai (Wilayah Danau Kerinci) (luas 40 ha untuk TPA 10 Ha) dan TPA Gunung Kerinci (lokasi deket dengan wilayah Kayu Aro). TPA Gunung kerinci merupakan hutan produksi	1. Perlu Penyiapan RC oleh pemerintah daerah. Readiness criteria tersebut antara lain adalah adanya: a. Surat Peminatan, b. Kesiapan Lahan, c. Kesiapan Rencana Induk dan Detail, d. Kesiapan Institusi Pengelola dan Anggaran Pengelolaan, serta e. Kesanggupan Menerima Hibah. 2. RC tahun 2023 belum siap, sertifikat lahan untuk lokasi TPA belum siap. Untuk lokasi Gunung Kerinci perlu adanya izin dari KLHK karena berada di Kawasan Hutan Produksi.	1	Unit	25.000.000	APBN/ APBD	2026	2027

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
					sehingga perlu izin dari KLHK.							
10	CK	Pembangunan SPAM Sungai Rengas	Non Kawasan	SPAM Sungai Rengas	1. Sesuai dengan isu pemenuhan kebutuhan air minum untuk Kabupaten Batanghari. Pengelolaan air minum di Kabupaten dikelola oleh PDAM Tirta Batanghari dengan status Sehat. 2. Kapasitas terpasang 287,5 liter/detik dan total yang belum terpakai 50 liter/detik dengan tingkat kehilangan air 22% sehingga untuk pembangunan SPAM baru perlu memanfaatkan idle capacity terlebih dahulu. 3. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Batanghari pada tahun 2029 sebesar 570 liter/detik. 4. Kecamatan Rengas belum terlayani jaringan air minum	**Tahun 2026 :** Menyusun Dokumen RISPAM. Sebelum penyusunan Dokumen RISPAM lalu reviu oleh BPPW Jambi. Diperlukan pemanfaatan idle capacity yang ada. **Tahun 2029 :** Pembangunan Fisik. - Kelembagaan sehat- RC sudah tersedia	50	liter/detik	30.000.000	APBN	2029	2029
11	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupate	Non Kawasan	Kelurahan Rengas Condong	Penanganan sisa kawasan kumuh di Kabupaten Batanghari 17,8 Ha	SK Cagar Budaya Tahun 2023, Dokumen RP2KPKPK Tahun 2024, SK Kawasan Kumuh Tahun 2024	1	Kawasan	22.500.000	APBN	2027	2027

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
		n Batanghari			di Kelurahan Rengas Condong							
12	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Bungo	Non Kawasan	Kabupaten Bungo	Penanganan sisa kawasan kumuh sebesar 97,27 Ha: a .Jaya Setia : 42,44 Ha; b.Sungai Pinang :39,01 Ha c.Bungo Taman Agung : 15,82 Ha	Dokumen RP2KPKPKperlu menyusun Pemerintah Kabupaten Bungo dan perlu updating SK Kumuh dikarenakan SK Kumuh terakhir Tahun 2015.	15	Ha	22.500.000	APBN/APBD/DAK	2029	2029
13	CK	Perluasan Jaringan SPAM : IPA Manggis, Kecamatan Bhatin III, Kabupaten Bungo	Non Kawasan	IPA Manggis, Kecamatan Bhatin III	1. Air minum di Kabupaten Bungo dikelola oleh PDAM Pancuran Telago dengan status PDAM Kurang Sehat. 2. Penyediaan air minum melalui 14 Instalasi Pengelolaan Air (IPA) : 9 berfungsi dan 5 IPA tidak berfungsi. 3. IPA Manggis di Kecamatan Bhatin III dengan Kapasitas Terpasang 50 liter/detik dengan kapasitas terpakai 33 liter/detik sehingga terdapat idle capacity 17 liter/detik dengan tingkat kehilangan air mencapai 53,33%. kehilangan air ini dikarenakan **belum adanya Jaringan Perpipaan Distribusi Utama (JDU) dan**	RC sudah siap tapi masih perlu dilakukan reviu oleh BPPW Jambi.	100	SR	14.000.000	APBD	2025	2025

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
					Jaringan Perpipaan Distribusi Bagi (JDB)							
14	CK	Pembangunan SPAM Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo	Non Kawasan	SPAM Rimbo Tengah	Pembangunan Intake Rimbo Tengah untuk melayani Kecamatan Rimbo Tengah. Kondisi Saat ini K**ecamatan Rimbo Tengah belum memiliki IPA untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat**. IPA eksisting terdekat di IPA Sungai Pinang (Kecamatan Bungo Dani) dengan Kapasitas 100 liter/detik dan sudah terpakai semua.	1. DED sudah disusun tahun 2021, Lahan sudah siap, dokumen RISPAM pada tahun 2019 dan sudah ada usulan dari Bupati pada Januari 2030. - Kelembagaan sehat - Idle 45 l/det - Perlu komitmen Pemda untuk SR - Ada 5 SPAM yang tidak berfungsi	50	liter/detik	50.000.000	APBN	2026	2026
15	CK	Pembangunan SPAM Kecamatan Sadu	Non Kawasan	Kecamatan Sadu	1. Merupakan daerah tertinggal dan memiliki tingkat kemiskina tertinggi di Provinsi Jambi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 10,91; 2. Kecamatan Sadu Belum memiliki Sumber Air Baku dan IPA untuk supply air minum bagi masyarakatnya. SPAM Eksisting terdapat di Kecamatan Rantau Rasau dengan kapasitas 60	Pemerintah daerah menyiapkan RC : Dokumen RISPAM, Tahun 2023 masih dalam proses reviu oleh BPPW Jambi. Selain itu, pemerintah daerah perlu mmembentuk badan usaha pengelola air minum (kelembagaan) - PDAM dan menyusun DED. Pembangunan SPAM Tahun 2027.	24	liter/detik	24.000.000	APBN	2027	2027

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
					liter/detik dan sudah terpakai semuanya (tidak ada idle capacity). selain itu, jarak dari SPAM Rantau Rasau ke Kecamatan Sadu lebih dari 17 km sehingga terlalu jauh. oleh karena itu, perlu adanya pembangunan SPAM di Kecamatan Sadu. 3. Pengelolaan air minum masih UPTD belum adanya badan pengelola PDAM.							
16	CK	Pembangunan SPAM IPA Bernai, Kabupaten Sarolangun	Non Kawasan	IPA Bernai	1. Usulan pembangunan IPA Dusun Bernai, perjanjian sarolangun dengan BWS, pemda meminta membangun Intake Bernai 110 liter/detik dan sudah dibangun intakenya. Terkendala covid, refocussing anggaran APBD sehingga tidak bisa dilaksanakan pembangunan IPA. terhadap kebutuhan air minum untuk Dusun Bernai minum 50 liter/detik. 2. Kondisi SPAM ada 16 unit : status	BWS Sumatera VI sudah membangun Intake Bernai dengan kapasitas 110 liter/detik, namun Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum membangun IPA dikarenakan refocussing anggaran APBD akibat Covid19. - Kelembagaan BUMD status sehat - Idle 94 l/det - Intake sudah dibangun BWS tahun 2019 - Perlu komitmen Pemda untuk SR dan RC	60	liter/detik	60.000.000	APBN	2027	2029

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
					berfungsi semua. Kapasitas terpasang 275 liter/detik (12.372 SR) dan belum terpakai 94,5 liter/detik. Ada beberapa IPA tidak maksimal untuk berproduksi (karena usia intake dan IPA sudah di atas 15 tahun sehingga mempengaruhi kapasitas produksi) antara lain IPA Gunung Kembang Tahun 2003, IPA Bukit Aur Tahun 1998, dan sudah pernah dilakukan perawatan/*maintainance* tahun 2006. 3. IPA Bernai direncanakan akan melayani 3 kecamatan Pelawan, Sarolangun, dan Bhatin VIII. IPA Bernai rencananya akan mendukung IPA Bukit Aur, jarak Bernai dari IPA Bukit Aur kurang lebih 10 km. Hal tersebut dikarenakan IPA eksisting tidak ada *idle capacity.*							
17	CK	Perluasan Sistem Jaringan Perpipaan	PKN Jambi	Kota Jambi	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Jambi ditargetkan dapat	Tahun 2021-2023 telah dibangun IPAL Kota Jambi oleh Kementerian PUPR. Oleh kerana itu, perlu adanya perluasan jaringan perpipaan (SR) ke masyarakat dan komersil	10122	SR	70.854.000	APBD	2025	2029

NO	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness	Indikasi Kebutuhan		Biaya Anggaran (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol	Satuan			Mulai	Selesai
		IPAL Kota Jambi			melayani melayani 10.300 Sambungan Rumah (SR). Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kota Jambi (IPAL Kota Jambi) yang selesai dibangun pada tahun 2023 sebanyak 149 SR dan 29 PR total 178 sehingga tersisa 10.122 yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah							

Sumber : Analisis BPIW, 2023

8.2.4. Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sektor Perumahan

Program/kegiatan dan lokasi kawasan prioritas (PKN Jambi dan KSPN Muaro Jambi) dan SPM dari Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sektor Perumahan di Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni PKN Kota Jambi
2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni KSPN Muaro Jambi
3. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bungo
6. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Batanghari;
7. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Batanghari;
8. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sarolangun
9. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Merangin
10. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kerinci;
11. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Sungai Penuh
12. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tebo

Tabel 8.6 Rencana Aksi Infrastruktur PUPR Sektor Perumahan Provinsi Jambi

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
1	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Jambi	PKN Jambi	Kota Jambi	1.Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 14.922 dan sudah ditangani hingga tahun 2022 sejumlah 2.251, sehingga tersisa RTLH yang perlu penanganan 12.671 unit. 2.Luasan Sisa Kumuh di Perkotaan Jambi sebesar 95,02 di Kelurahan Legok sehingga perlu adanya keterpaduan program dengan Sektor Cipta Karya terkait dengan peremajaan permukiman kumuh.	1. Tahun 2023 ada kolaborasi penanganan PKE dan Stunting di Kelurahan Sijenjang melalui Dana CSR, Pemkot Jambi, Baznas, dan Balai Perumahan Sumatera IV dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023. Dari Balai Perumahan Sumatera IV mengalokasikan 35 unit. 2. Untuk BSPS Reguler tahun 2023 dialokasikan 200-300 unit. 3. Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/APBD/ CSR	2025	2029
2	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi	KSPN Muaro Jambi-Kab. Muaro Jambi	1.Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 17.963 hingga tahun 2022 sejumlah 3.687 unit, sehingga tersisa RTLH yang perlu penanganan 14.276 unit.	Masterplan pengembangan KSPN Muaro Jambi sudah disahkan pada Agustus 2023. Dalam pengembangannya perlu adanya pembahasan lebih lanjut untuk penyediaan perumahan layak	4000	unit	80.000.000,00	APBN/ APBD/ CSR/ DAK	2025	2029

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					2.Penanganan sisa kawasan kumuh sebesar 97,27 Ha : a.Jaya Setia : 42,44 Ha; b.Sungai Pinang :39,01 Ha c.Bungo Taman Agung : 15,82 Ha 3.Penanganan RTLH diharapkan adanya keterpaduan program dengan Sektor Cipta Karya terkait dengan peremajaan permukiman kumuh. 4. Kabupaten bungo setiap tahun ada BSPS, BSPS Reguler (Aspirasi) tahun 2023 sebanyak 246 unit.	huni dan penataan kawasan.						
3	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tebo	Non Kawasan	Kabupaten Tebo	Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 13.947 hingga tahun 2022 sudah ditangani sejumlah 2.596 unit,	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/ APBD/CSR	2025	2029

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					sehingga tersisa RTLH yang perlu penanganan 11.351 unit							
4	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Merangin	Non Kawasan	Kabupaten Merangin	1. Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 21.832 dan hingga tahun 2022 sudah ditangani sejumlah 1.080 unit, sehingga tersisa RTLH yang perlu penanganan 20.352 unit unit. Terdapat RTLH yang belum tertangani sebanyak 10.147 unit; 2. Penanganan sisa kawasan kumuh di Kab. Merangin 279,76 Ha: a. Pematang Kandis 186,08 Ha; b. Pasar Atas Bangko : 93,68 Ha. 3.Penanganan RTLH diharapkan adanya keterpaduan program dengan	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/ APBD/ CSR	2025	2029

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					Sektor Cipta Karya terkait dengan peremajaan permukiman kumuh; 4. Penanganan RTLH pada tahun 2023 sebanyak 190 unit.							
5	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Sungai Penuh	Non Kawasan	Kota Sungai Penuh	1. Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 1.507 2. Penanganan sisa kawasan kumuh Kota Sungai Penuh 198,99Ha: a. Pusat Kota : 48,514 Ha b. Permukiman Pinggir Sungai Batang Merao : 80,9 Ha c. Permukiman Pinggir Sungai Batang Sangir : 69,58 Ha 3.Penanganan RTLH diharapkan adanya keterpaduan program dengan Sektor Cipta Karya terkait	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	1500	unit	30.000.000,00	APBN/APBD/CSR	2025	2029

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					dengan peremajaan permukiman kumuh 4. Berdasarkan Dokumen RP2KPKPK lokasi BSPS didominasi di Kawasan Permukiman Kumuh. 5. Kota Sungai Penuh tidak mendapatkan alokasi BSPS selama 3 tahun berturut - turut sejak tahun 2020-2023. Pada tahun 2019, Kota Sungai Penuh mendapatkan penghargaan untuk Pelaksanaan BSPS Terbaik di Indonesia.							
6	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kerinci	Non Kawasan	Kabupaten Kerinci	1. Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 8.470 unit hingga tahun 2022 sudah ditangani sejumlah 1.080 unit, sehingga tersisa RTLH yang perlu penanganan	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/APBD/CSR	2025	2029

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					1.482 unit unit. Terdapat RTLH yang belum tertangani sebanyak 6.988 unit;							
7	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Batanghari	Non Kawasan	Kabupaten Batanghari	1. Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 18.225 dan hingga tahun 2022 sudah ditangani sejumlah 2.232 unit, sehingga tersisa RTLH yang perlu penanganan 16.023 unit; 2. Penanganan sisa kawasan kumuh Kota Sungai Penuh 17,83 Ha di Kelurahan Rengas Condong:	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/ APBD/ CSR	2025	2029
8	Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Batanghari	Non Kawasan	Kabupaten Batanghari	Adanya lokasi perumahan masyarkat di bantara Sungai Batanghari yang terdampak erosi sungai sehingga perlu adanya relokasi. Program ini merupakan lanjutan Tahun 2021.	RC lahan sudah siap. Lokasi sama dengan Relokasi Tahap 1 pada tahun 2021	42	unit	5.250.000,00	APBN/APBD/CSR	2025	2025

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					Target tahun 2021 untuk relokasi sebanyak 74 unit untuk relokasi sempadan sungai. Sudah ada relokasi 30 unit rumah dan Tersisa 42-44 unit.							
9	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bungo	Non Kawasan	Kabupaten Bungo	1.Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 12.564 hingga tahun 2022 sudah ditangani sejumlah 2.337 unit, Terdapat RTLH yang belum tertangani sebanyak 10.227 unit 2.Penanganan sisa kawasan kumuh sebesar 97,27 Ha : a.Jaya Setia : 42,44 Ha; b.Sungai Pinang :39,01 Ha c.Bungo Taman Agung : 15,82 Ha 3.Penanganan RTLH diharapkan adanya keterpaduan program	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/ APBD/ CSR	2025	2029

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					dengan Sektor Cipta Karya terkait dengan peremajaan permukiman kumuh. 4. Kabupaten bungo setiap tahun ada BSPS, BSPS Reguler (Aspirasi) tahun 2023 sebanyak 246 unit.							
10	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Non Kawasan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1.Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 22.495 hingga tahun 2022 sudah ditangani sejumlah 2.539 unit, Terdapat RTLH yang belum tertangani sebanyak 19.956 unit. 2. Tahun 2023 ada bantuan Program DUMISAKE : 60 unit BSPS reguler : 452 unit.	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/ APBD/ CSR	2025	2029
11	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Non Kawasan	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 38.341 hingga tahun 2022 ditangani sejumlah1.381 unit, Terdapat	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/APBD/ CSR	2025	2029

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					RTLH yang belum tertangani sebanyak 36.960 unit. Penanganan tahun 2023 sebanyak 212 Unit.							
12	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sarolangun	Non Kawasan	Kabupaten Sarolangun	1.Berdasarkan data P3KE jumlah RTLH 12.589 hingga tahun 2022 ditangani sejumlah1.383 unit, Terdapat RTLH yang belum tertangani sebanyak 11.206 unit. 2. Penanganan sisa kawasan kumuh di Kab. Sarolangun 76,54 di Kelurahan Pelayang 3.Penanganan RTLH diharapkan adanya keterpaduan program dengan Sektor Cipta Karya terkait dengan peremajaan permukiman kumuh.	Agar disiapkan RC berupa proposal yang berisikan data BNBA yang disetujui oleh kepala daerah.	4000	unit	80.000.000,00	APBN/APBD/CSR	2025	2029

NO	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Indikator Kebutuhan		Biaya Anggaran Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Vol.	Satuan			Mulai	Selesai
					4. Tahun 2023 BSPS 185							

Sumber : Analisis BPIW, 2023



BAB 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

Pada bab ini terkait evaluasi pelaksanaan yaitu terkait kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. RPIW. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW digunakan sebagai klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW selanjutnya.

9.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah dalam hal ini disebut dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam hal ini dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program

dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang *(living document).*

9.2. Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan output (infrastruktur terbangun), outcome (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), benefit (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), impact (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW

   Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per tahun. Pemantauan Lima (5) Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW

   Evaluasi Tahunan (*output* dan *outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah. Evaluasi Lima (5) Tahunan (*benefit, impact,* dan keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.

PUPR

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

www.pu.go.id